

**ISI INFORMASI ARSIP REKAMAN SUARA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TAHUN 1989 - 1993**

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
		RAPAT PARIPURNA		
1	Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume I Side A: Pembukaan Rapat Paripurna Dewan BP3 masa persidangan ke-1 tahun sidang 89-90 dengan peserta para anggota dewan yang mewakili pemerintah. Acara selanjutnya laporan kunjungan kerja komisi-komisi masa reses persidangan ke-4 tahun sidang 88-89, dengan para juru bicara yang mewakili dari masing-masing komisi pada sidang hari pertama Rabu 6-September-1989 yaitu : -Komisi 1 : Suwandi; Komisi 2 : Adi Pranoto; Komisi 3 : Mulyadi Jaya Negara; Komisi 4 : Ir SM Tampu Bolon; Komisi 5 : Ir H. Abdullah Puteh; Komisi 6 : Ir Zulkifli Indrakusuma Sedangkan untuk sidang hari kedua Kamis 7-september-1989 yaitu : Komisi APBN : Drs. Sutikno; Komisi 7 : Haye Sanggor; Komisi 8 : Dr Anda Herawati Tarigan; Komisi 9 : Drs. Asman Simanjuntak; Komisi 10 : Hsk Susilastuti Sutopo Isnomo. Laporan kunjungan kerja Komisi 1 disampaikan oleh Suwardi, obyek kunjungan kerja adalah satuan Hankam ABRI unit kerja Departemen Penerangan dan instansi yang dinilai punya kaitan. Side B: Bidang Penerangan yang menjadi obyek kunjungan adalah TVRI Side B: Laporan BKSKAP sebagai penasehat khusus DPR RI ke sidang Majleis PBB ke- 44 di New York tanggal 19-20 September 1990. Drs. Subagyo, dalam sidang tsb Menlu Argentina, Yosep en Garba menyetujui tentang Palestina dan Israel untuk dibahas dalam sidang Majleis PBB. Negara berkembang menjadi korban dalam ekonomi tentang hutang luar negeri, pemilu di Namimbia harus dilakukan secara demokratis agenda lain yang dibahas adalah: menyerukan semua anggota PBB dapat meratifikasi, masalah Timor Timur ke RI ditunda sampai 7 kali berturut-turut dimana Bawardiman dan Subagyo ditunjuk sebagai staf khusus. Selama di New York bersama Menlu Ali Alatas dan staf khusus serta anggota tetap melakukan kegiatan dengan hasil yang dicapai adalah: Ekuin mengadakan sidang khusus untuk komoditi utang luar negeri, aliran dana, narkoba, wanita dalam pembangunan, pengembangan SDM di bidang lptek, dan masalah Kamboja supaya statusnya merdeka.	Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990	Rabu, 06 September 1989	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
2	Side A: Lanjutan Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume 2 -Bidang Pemerintahan meliputi rencana pemekaran wilayah Pemda Tk I Lampung dimana wilayah tingkat II dari 4 daerah tingkat II menjadi 10 daerah tingkat II, 76 Kecamatan menjadi 229 Kecamatan, dan 1517 desa menjadi 2175 desa, Pemerintahan Kecamatan, Pemilihan Kepala Desa serta program pengembangan kawasan seperti kawasan industri yang diprogramkan secara pasti peningkatan kesejahteraannya. Laporan Kunjungan Kerja Komisi III disampaikan oleh Mulyadi Jaya Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI no.55/Pim/4/88-89 tanggal 17-7-1989 dan Keputusan Rapat Komisi III DPR RI telah ditetapkan untuk membentuk Tim Kunjungan Kerja Komisi III ke daerah Provinsi Maluku. Tujuan Tim Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan hukum khususnya penegakan hukum di daerah tersebut serta permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Provinsi Maluku. Side B: Adapun hasil kunjungan kerja adalh Kanwil Departemen Kehakiman dimana pelaksanaan kenaikan pangkat bagi personilnya sudah berjalan dengan lancar terkecuali untuk mutasi pegawai eselon V yang tersendat karena menunggu keputusan dari pusat serta belum adanya mutasi bagi hakim dan panitera kepala/panitera pengganti di sejumlah daerah. Lembaga Pemasyarakatan Ambon yang daya tampungnya hanya 80 orang tapi kenyataannya setiap bulan terdapat 100 -150 orang serta kondisi bangunannya yang belum direhabilitasi. Imigrasi, yang sebagian besar berasal dari Belanda yang melakukan kunjungan ke Pulau Banda Maluku Tengah. Kegiatan Poskumdu (Pos Hukum Terpadu) di Maluku berjalan dengan lancar berkat bantuan masyarakat dan kerjasama instansi terkait, telah terbentuk 24 Poskumdu dan dilaksanakan setiap triwulan.	Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990	Rabu, 06 September 1989	Suara Jelas
3	Side A: Lanjutan. Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume 3 Kesimpulan dan Saran : -Gangguan kamtibmas di daerah Maluku selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan kuantitasnya yang terbanyak adalah kasus penganiayaan. Saran Komisi III semua kasus tersebut harus ditangani secara terpadu, mendasar dan tanpa pandang bulu. -Pelaksanaan penegakan hukum di daerah Maluku sering mengalami hambatan diantaranya keadaan geografis yang terdiri dari banyak pulau, keterbatasan petugas serta sulitnya sarana dan prasarana perhubungan. -Program pengawasan dan dan pembinaan terhadap aparaturnegak hukum sangat diperlukan sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat. -Proses peradilan yang secara cepat, sederhana, dan biaya ringan yang terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat menurut Komisi III DPR RI dalam prakteknya tidak terlaksana sepenuhnya . Oleh karena itu dipertegas lagi semua kebijakan yang ada. Laporan kunjungan kerja Komisi IV yang disampaikan oleh Ir. SM. Tampubolon. Sesuai dengan keputusan dewan, Komisi IV terbagi menjadi 4 Tim kunjungan kerja meliputi daerah Provinsi Timor Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Disamping dalam bentuk Tim para anggota Komisi IV juga melakukan kunjungan kerja perorangan. Hasil kunjungan kerjanya adalah di sektor : -Pertanian sub sektor tanaman pangan produksi di daerah 1. Timor Timur : makanan pokok adalah jagung yang merupakan hasil produksi sendiri dan makanan kedua adalah beras, akan tetapi masih harus didatangkan dari luar Timor Timur, 2. Sulawesi Utara : sampai sekarang belum swasembada pangan beras dan kedelai namun untuk jenis pangan lainnya telah terpenuhi seperti : ubi kayu, padi, sayuran dan buah-buahan. -Produksi perikanan di Timor Timur masih jauh dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, eksploitasi dari dasar laut masih kurang 1% dari potensi yang ada dan usaha penangkapan baru bersifat tradisional yaitu menggunakan tombak.	Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990	Rabu, 06 September 1989	

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
	Side B:Sektor kehutanan di Sulawesi Utara terdapat hutan tetap dan kawasan hutan produksi yang menghasilkan kayu. -Program transmigrasi di Sulawesi Utara dimulai sejak tahun 1953 sampai akhir Pelita III telah ditempatkan 7382 KK, selama Pelita IV program transmigrasi dititik beratkan pada tanah lokal/resettlemen atas dasar pertimbangan tertentu sperti berada di Hutan Lindung. Sedangkan transmigrasi di Kalimantan Barat, pembinaan yang yang diberikan meliputi konservasi lahan, rehabilitasi pemukiman, pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, peningkatan produksi dan pemasaran. Laporan kunjungan kerja Komisi V yang disampaikan oleh Ir. H. Abdullah Puteh, BRE. Sesuai Surat Keputusan DPR RI No.55/Pim/IV/1990 tanggal 17-7-1989dan juga berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi V DPR RI maka kunjungan kerja Komisi V adalah Daerah Istimewa Aceh yang di pimpin oleh Iwan Dana yang berabnggotakan 14 orang dan kunjungan kerja dimulai sejak tanggal 3 s/d 14 Agustus 1989. Temuan-temuan di lapangan : a. Sektor Pekerjaan Umum : proyek-proyek pengembangan jalan, parasarana dan sarananya banyak mengalami hambatan dan keterlambatan dikarenakan Pilar yang direkomendasikan untuk bangunan jalantidak diketemukan, sehingga waktu lama dan biaya mahal karena menggunakan Pilar yang lebih kecil. b. Sektor Perhubungan : kereta api masih terlalu sempit tata letak untuk penumpang, sarana jalan dan prasarananya sudah tak berfungsi lagi dikarenakan dukungan anggaran mulai berkurang dan lama kelamaan dukungan dan perawatan kereta api sudah tidak ada lagi sehingga KA tidak digunakan lagi. Sedangkan sektor perhubungan laut hanya digunakan untuk zona industri mengangkut industri kimia, pupuk, kertas, LNG sedang kan zona pertanian mengangkut hasil perkebunan dan kelapa sawit.			

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
4	Side A : Lanjutan. Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume 4 Perhubungan udara : Bandar udara Malikus Saleh dibuat oleh Pertamina memiliki akses jalur yang bagus untuk lintas daerah yang posisinya 20 Km dari Loksumawe. Kesimpulan dan Saran Komisi V : -Ketidak seimbangan pembangunan antara kawasan timur utara dan kawasan tengah barat dan selatan sehingga timbul kecemburuan sosial. -Masalah pemerataan kesempatan berusaha walaupun banyak terdapat proyek besar namun masyarakat setempat sebagai pengusaha swasta lokal amat sulit untuk dilibatkan karena semua dimenangkan oleh BUMN dan Perusahaan asing. -Manajemen pengelolaan proyek selalu mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan proyek. -Kebijaksanaan dan pola transportasi yang terpadu. Saran Komisi V adalah : -Agar pemerintah menciptakan suatu pola transportasi yang terpadu. -Pembangunan kota Lhokseumawe sebagai kota modern yang berkembang dan mengusahakan kerjasama antar sektor terkait dengan instansi Pemerintah. -Dalam mengembangkan perusahaan daerah Aceh Zona perindustrian Lhokseumawe dan bandar udara dapat lebih difungsikan. Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI yang disampaikan oleh Z. Indra Kusuma. Daerah kunjungan kerja adalah Provinsi Maluku, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Provinsi Sumatera Selatan, Lampung Dan Jawa Barat. Adapun maksud dan tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPR dengan melihat langsung di lapangan khususnya bidang energi, pertambangan, industri, tenaga kerja dan penanaman modal. Keadaan dan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : Bidang Industri : di Maluku terdapat 2 pabrik kayu lapis dan penggergajian yang bahan bakunya dari Maluku, Kalimantan Timur dan Irian Jaya. Side B : Lanjutan. Bidang pertambangan dan energi di Maluku; Pertamina depot Ambon mengalami permintaan yang meningkat karena banyak nelayan yang sudah menggunakan perahu mesin. Permasalahan yang terjadi adalah sumber bahan bakar lain selain bahan bakar minyak masih belum dimanfaatkan. Perkembangan listrik di Kalimantan Tengah terdapat 75 buah PLTD hal ini menyebabkan daerah tersebut mengalami kerugian. Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat program peningkatan pelayanan, efisiensi, pemasaran, dan mutu keandalan. Penambangan Batu Bara di Bukit Asam mengalami peningkatan dengan kualitas yang baik setiap tahunnya.	Rapat Paripurna ke 3/I/198919-90	Rabu, 06 September 1992	Suara Jelas
5	Rapat Paripurna ke 3/I/198919-90 Side A; Tidak ada suara Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 3/I/198919-90	Kamis, 04 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
6	Rapat Paripurna ke 11/III/1989-1990 Volume 1 dan 3 Side A : Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan III tahun sidang 1989-1990 sesuai ketentuan tata tertib pasal 96 ayat 3 rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Sebagai bagian dari pelaksanaan Repelita V RAPBN 1990-1991 mempunyai arti yang penting bagi dalam rangka memantapkan kerangka pembangunan nasional. Disamping membahas RAPBN DPR juga membahas RUU yang telah disampaikan ke Pemerintah yaitu: RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta RUU wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam, sedangkan RUU tentang pembentukan Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan RUU tentang Susunan Pemerintahan DKI Jakarta masih menunggu rapat musyawarah yang akan datang. Amanat Presiden Soeharto dalam menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 1990-1991: -Jadwal penyampaian RAPBN kepada DPR RI terjadwal setiap minggu pertama bulan Januari -Pelita IV dan V merupakan sebuah kerangka landasan pembangunan, Pelita VI implementasinya (era tinggal Landas). Side B: Tahun 1989 terjadi banyak kecelakaan di instansi perminyakan sehingga menimbulkan pergolakan perekonomian. Perkembangan yang terjadi di skala Internasional (dibawah OPEC) menimbulkan perubahan harga perminyakan diberbagai negara. Atas dasar kemungkinan yang terjadi, Pemerintah menentukan harga minyak pada RAPBN 1990-1991 sebesar 16,5US/barell. -Penerimaan diluar migas diperkirakan naik 25% sedangkan penerimaan lainnya adalah penerimaan pembangunan yang berasal dari luar negeri yang terdiri dari bantuan program dan program proyek. -Belanja pegawai meliputi pembayaran gaji PNS diantaranya kenaikan gaji PNS sebesar 10%, dan untuk anggaran rutindipergunakan untuk subsidi BBM dan anggaran untuk pembangunan naik 23%.	Rapat Paripurna ke 11/III/1989-1990	Kamis, 04 Januari 1990	Suara jelas
7	Rapat Paripurna ke 11/III/1989-1990 Side A : Lanjutan. Persiapan menghadapi era globalisasi dampak dari perkembangan teknologi informasi dari segala aspek. Laju pertumbuhan ekonomi dalam Repelita IV sudah mengalami peningkatan terutama dalam sektor non migas. Disamping dari sumber keuangan negara melalui anggaran pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan ekonomi, stabilitas nasional serta kebijakan ekonomi telah terus mendorong para penanam modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemantapan stabilitas nasional yang dinamis akan terus ditingkatkan pada Pelita V tahun ke dua ini agar trilogi pembangunan dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Koperasi merupakan salah satu prasarana penunjang perekonomian masih banyak yang harus dibenahi agar dapat berfungsi maksimal sehingga menjadi sebuah kekuatan perekonomian nasional. Penyusunan RAPBN 1990-1991 tetap mempertahankan prinsip anggaran berimbang yang dinamis. Side B : Lanjutan. Pembangunan sub sektor transmigrasi merupakan sektor yang memberikan peranan penting juga dalam pemerataan pembangunan, sektor pemukiman dan perumahan rakyat juga besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satu programnya adalah penyediaan air bersih. Sektor aparatur pemerintah salah satu programnya adalah penyempurnaan aparatur pemerintah dan meningkatkan pengawasannya.	Rapat Paripurna ke 11/III/1989-1990	Kamis, 11 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
8	Rapat Paripurna ke 12/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Penyampaian pokok-pokok pikiran Komisi APBN atas RUU APBN 1990-1991 serta Nota Keuangan dan laporan hasil-hasil rapat kerja pembicaraan pendahuluan yang disampaikan oleh Ketua Komisi APBN Drs. H. Muhammad Murni. Hasil-hasil pembicaraan Pendahuluan RAPBN 1990-1991 yaitu : Masa persidangan I Agustus s/d Oktober aspirasi rakyat telah disalurkan kepada Komisi I s/d X dan sampai pada Komisi APBN dan hasil-hasil pembicaraan pendahuluan dari Komisi-komisi tersebut telah tersampaikan pada Komisi APBN dan dibahas oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dibawa ke Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi APBN yang membahas sejumlah RAPBN untuk tahun 1990-1991 termasuk didalamnya saran-saran dan masukan para fraksi tentang aspirasi rakyat tersebut, dan pada bulan November dibahas laporan smester I dan pradiagnosa smester II guna memberikan anggaran tahun berjalan anggaran tahun berikutnya. Side B : Lanjutan. Pengeluaran dan Penerimaan Negara dalam RAPBN 1990-1991 adalah : Penerimaan dalam negeri naik 25% meliputi penerimaan migas dan non migas, kebijakan ekonomi diluar migas bertujuan untuk mendorong perekonomian, membatasi impor barang mewah, merangsang ekonomi lemah, dan membuka lapangan kerja. Penerimaan pembangunan dalam hal bantuan luar negeri lebih sedikit jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran rutin naik 13% dari sebelumnya karena digunakan untuk pembayaran bunga cicilan pinjaman luar negeri dan subsidi BBM. Pengeluaran pembangunan naik 23,6% dan alokasi diberikan untuk pembangunan prasarana dasar yang menunjang pembangunan ekonomi, pengembangan SDM dan pemeliharaan fisik.	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990	Senin,15 Januari 1990	Suara jelas
9	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Rapat Paripurna kali ini adalah melakukan pembahasan mengenai pemandangan umum para anggota tentang RUU APBN tahun anggaran 1990-1991 dengan para pembicara adalah : Ir. Indra Bambang Utoyo dari FKP, Sri Sukarto dari FABRI, Drs. H. Bunyamin Mattaliti dari FPP dan Aberson Marley Sihalo dari FPD. Pembicara-1 adalah: Ir. Indra Bambang Utoyo dari FKP mengemukakan bahwa :APBN tahun anggaran 1990-1991 harus ditetapkan dengan Undang-undang karena hal ini merupakan isyarat tanggungjawab pelaksanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita merupakan merupakan tanggungjawab konstitusional antara DPR dan Pemerintah. Repelita V sebagai tahap penutup pembangunan jangka panjang merupakan arah pemantapan kerangka laju pembangunan agar bangsa Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas dalam rangka pembangunan nasional tahap II. FKP sependapat dengan gagasan Presiden Soeharto dalam political willnya dimana dalam perusahaan-perusahaan swasta harus dimasukkan semangat koperasi sehingga pada gilirannya akan terwujud arah kekeluargaan. Side B : Pembicara ke-2: Sri Suharto dari FABRI mengemukakan pemandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan RUU tentang RAPBN tahun anggaran 1990-1991 adalah Ideologi bangsa tercermin dalam perkembangan politik dalam arti luas dimana semua aspek yang mendukung sistem politik merupakan cermin dari ideologi nasional yaitu Pancasila. Pembangunan nasional di Indonesia telah mencakup beberapa dimensi yang dituntut oleh berbagai ideologi dimana telah mencakup pula dimensi kemanusiaan dan keadilan.	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990	Senin,15 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
10	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Side A : Lanjutan. FABRI tetap mempertahankan pendapat Pemerintah mengenai prinsip anggaran berimbang dan dinamis yang secara substansial dari RAPBN adalah merupakan : Komitmen Pemerintah untuk mengusahakan pembangunan yang menyeluruh terutama kepentingan kelompok yang lemah dan daerah-daerah terpencil serta terbelakang. Membangun suatu interaksi yang semakin meningkat antara keberhasilan pembangunan ekonomi, perluasan pendidikan dan kesadaran peran serta masyarakat dalam demokrasi. Secara umum angka-angka dalam RAPBN tahun anggaran 1990-1991 mencerminkan perbaikan ekonomi rakyat Indonesia yang mapan dan prospek lebih baik. Tertib penerimaan negara menunjukkan keadaan ekonomi yang lebih sehat dan yang lebih menguat terhadap penerimaan sektor non migas. Tabungan Pemerintah tahun anggaran 1990-1991 meningkat dan menduduki posisi 30,4% dari seluruh pengeluaran pembangunan. Pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri sedikit berkurang dari tahun yang sedang berjalan. Dan pengeluaran pembangunan meningkat 24% dibanding pada tahun 1989-1990 sehingga dapat mendorong kearah yang lebih besar terhadap kegiatan pembangunan. Side B : Lanjutan. Pemandangan umum dari FPP yang disampaikan oleh Drs. H. Bunyamin Mattaliti adalah sebagai berikut : - FPP sependapat dengan Pemerintah bhw Repelita V sangat strategis karena menentukan keberhasilan pembangunann berikutnya. -Meningkatkan dan memantapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga menmengemban tugas dan tanggungjawab. -Prioritas pembangunan Repelita V adalah meningkatkan kecerdasan bangsa dan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata.	Rapat Paripurna ke 11/III/1989-1990	Senin,15 Januari 1990	Suara jelas
11	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 3 Pemandangan umum FPD yang disampaikan oleh Aberson Marley Sihalo : RUU tentang RAPBN 1990-1991 diproyeksikan kepada harga minyak dunia dan ekspor non migas yang kini lebih ditingkatkan. Dalam hubungan perdagangan luar negeri dengan perubahan ekonomi global yang ditandai dengan kemunculannya di berbagai negara perusahaan multi corporate maka pendekatannya adalah secara efektif yaitu memanfaatkan peluang yang sekaligus tantangan bagi pemerintah. Tanggapan mengenai kerangka landasan dibidang politik yang telah banyak mengalami kemajuan antara lain telah diberlakukannya 5 UU di era pembangunan politik yaitu sejauh mana Pemerintah merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dibidang politik dan berapa besar anggaran yang dialokasikan pada RAPBN 1990-1991 bagi kekuatan organisasi sosial politik. Side B : Lanjutan. Penerimaan migas pada tahun 1990-1991 mengalami kenaikan 37% dengan proyeksi dari tahun berjalan sekarang ini, pinjaman luar negeri dimana Bank Dunia beserta negara-negara pendonor berusaha mengalihkan pinjaman ke negara-negara berkembang lainnya. Penerimaan dari pajak mengalami kenaikan 1,7%. FPD sependapat dengan Pemerintah untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan serta anggota ABRI yang mengacu sepenuhnya terhadap efisiensi, efektifitas dan peningkatan produksi kerja.	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990	Senin,15 Januari 1990	Suara jelas
12	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 4 Side A : Lanjutan. Pemerintah mengatakan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia telah mengalami peningkatan sejak dikeluarkannya paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dalam beberapa tahun ini. Asumsi bahwa ini akan berlanjut/berjalan terus selama tahun 1990-1991 maka peningkatan ekspor, impor dan jasa dalam tahun 1990-1991 diperkirakan memadai sehingga transaksi berjalan dapat dikendalikan. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990	Senin,15 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
13	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Pemndangan umum yang disampaikan oleh G. Hartanto Sunaryo dari FABRI yaitu : tinjauan atas lintas sektoral RAPBN tahun 1990-1991 Repelita V tahun ke 2 ditandai dengan prioritas-prioritas yang lebih dipertajam. FABRI mendukung sikap Pemerintah yang telah menentukan kebijaksanaan menaikkan anggaran belanja baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Berdasarkan RAPBN tahun 1990-1991 bahwa rencana anggaran dibidang pembangunan naik sekitar 16,4%-65,9% untuk sektor tenaga kerja dan transmigrasi, sektor pertanian dan pengairan dimana pembangunan pertanian sesuai dengan GBHN 1988 telah ditetapkan adalah untuk memantapkan dan meningkatkan swa sembada pangan yang diarahkan untuk menghasilkan produksi desa dan kota pertanian dengan langkah-langkah diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi serta intensifikasi pertanian. Untuk sektor pendidikan ditetapkan wajib belajar 9 tahunserta pemerataan pembangunan sarana pendidikan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Side B : Lanjutan. Pemandangan umum yang disampaikan oleh Ir. Niken Tarimasdiyono dari FKP yang pada umumnya lebih menyoroti pembangunan lintas sektoral yaitu : Sektor Hankamnas yang ditujukan untuk memelihara kemampuan dan kekuatan yang diperlukan untuk memelihara stabilitas keamanan nasional dan untuk menghadapi ancaman dimasa datang yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Sektor pembangunan daerah, desa dan kota dengan prinsip pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh tanah air sesuai dengan trilogi pembangunan. Dan RUU Pemekaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara agar segera di sahkan menjadi UU.	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Selasa,16 Januari 1990	Suara jelas
14	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan. Untuk sektor pendidikan wajib belajar 9 tahun berupa perintisan wajib belajar yang didukung dengan pembangunan fasilitas gedung SMP 470 buah di seluruh wilayah Indonesia, sedang sektor agama sejak Repelita III s/d IV telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan namun masih dirasakan kurangnya guru agama di sekolah-sekolah mulai TK, SD s/d Perguruan Tinggi. Dibidang lptek faktor yang amat penting dengan apa yang disebut dengan nilai tambah sumber daya alam, SDM, realisasi dan pengembangan masyarakat industri yang ditunjang dengan pertanian yang tangguh memerlukan pengetahuan dan teknologi dimana anggarannya meningkat 45,5% dibanding dengan anggaran yang sedang berjalan. Side B : Lanjutan. Pemandangan umum yang disampaikan oleh H. Mohamad Hartono, BA dari FPP yang menyoroti RUU tentang RAPBN tahun 1990-1991 mengalami kenaikan sebesar 14,7% dibandingkan dengan APBN 1989-1990, dimana komponen-komponen anggaran 1990-1991 berasal dari Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemberdayaan sumber daya alam seperti Hutan Tropis Basah yang dimiliki oleh Indonesia dimana sekarang ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah mengenai kelestariannya karena Hutan Tropis Basah yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia.	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Selasa,16 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
15	Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 3 Side A : Lanjutan. Penerimaan cukai tembakau dalam RAPBN 1990-1991 mengalami kenaikan sebesar Rp 380,93 Milyar, sementara itu mulai bulan Januari di pasaran sudah mulai ada kenaikan harga rokok tertentu sedangkan harga cengkeh dan tembakau yang diproduksi petani harganya cenderung menurun. Untuk subsidi BBM apabila pada tahun 1989-1990 tidak dianggarkan adanya su. Dalam RAPBN sisi BBM tetapi dianggarkan adanya penerimaan dari hasil penjualan BBMdisebabkan karena pemerintah telah menentukan patokan harga minyak sebesar 14 U\$ /barell. Dalam RAPBN 1990-1991 telah dianggarkan adanya subsidi BBM jutan.dengan asumsi harga minyak bumi seperti sekarang ini maka sudah barang tentu subsidi BBM tahun 1990-1991 akan terus meningkat, namun demikian FPP mengharapkan agar harga jual BBM dalam negeri tidak mengalami kenaikan mengingat dampaknya sangat luas terhadap penentuan komponen harga dan tarif. Side B : Lanjutan. Sektor pertanian dan pengairan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2, 391,6 trilyun dalam tahun 1990-1991 dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan, memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk desa yang hidup dibawah garis kemiskinan untuk mendukung industrialisasi dan mempertahankan swa sembada pangan khususnya beras.	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Selasa,16 Januari 1990	Suara jelas
16	Rapat Paripurna ke 13/III/89-90 Volume 4 Side A : Lanjutan. Sektor kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita, kependudukan dan Keluarga Berencana dalam RAPBN tahun 1990-1991 anggaran pembangunan sektor ini direncanakan berjumlah sebesar Rp 591,7 Milyar. Berdasarkan rencana penggunaan alokasi dana sub sektor kesehatan akan digunakan bagi peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan dasar. Bertitik tolak dari pembangunan sosial untuk mengurangi dan mencegah kesenjangan sosial baik sosial ekonomi, budaya, fisik maupun mental maka kebijakan pola penanganan harus mengalami perbaikan yang mendasar. Side B : Lanjutan. Untuk penanaman modal sesuai dengan apa yang ditargetkan Pemerintah maka didalam Pelita V ini diharapkan adanya investasi swasta sebesar Rp 131,5 Trilyun yang berarti rata-rata Rp 26,3 Trilyun/th. kalau melihat persetujuan yang dikeluarkan oleh BKPM s/d Desember 1989 maka untuk PMDN mencapai Rp 19,59 Trilyun dan untuk PMA U\$ 4,53 milyar yang berarti target rata-rata penanaman modal Rp 26,5 Trilyun/th dapat dicapai. FPDl menilai bahwa gagasan ini merupakan konsepsi yang amat baik sehingga FPDl serta merta memberikan dukungan politik yang kuat terhadap pelaksanaan gagasan tersebut, lebih dari itu FPDl berpendapat bahwa mengingat strategisnya gagasan ini dalam pelaksanaan ps 33 UUD'45 maka gagasan ini harus diberi landasan hukum yang kuat agar semua pihak terikat dan wajib melaksanakan. Bahwa BUMN adalah milik negara maka tidak dibenarkan adanya pemikiran untuk menjual saham BUMN baik secara keseluruhan maupun lewat pasar modal.	Rapat Paripurna ke 14/III/89-90	Rapat Paripurna ke 14/III/89-90 Volume 2	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
17	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume I Side A : Sidang membahas tentang laporan hasil kunjungan kerja dari masing-masing Komisi antara lain : -Komisi V yang disampaikan oleh AM Thamrin; Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR no: 18/Pim/2/1989 tgl 11-12-1989 dan Keputusan Rapat Komisi V DPR RI tanggal 15-12-1989 Komisi V melakukan kunjungan kerja ke daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk melihat secara langsung hasil pelaksanaan pembangunankhususnya dibidang perhubungan dan pekerjaan umum, pariwisata pos dan telekomunikasi serta perumahan rakyat beserta permasalahannya. Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 24 Desember 1989. Daerah tujuan dari kunjungan kerja ke Propinsi Sulawesi Tenggara adalah Pulau Buton sebagai penghasil aspal karena merupakan kekayaan hasil bumi Indonesia. Bidang pekerjaan umum antara lain : proyek bendungan serbaguna Bili-Bili yang digunakan sebagai pusat drainase kota Ujung Pandang dan untuk penampungan air bersih untuk kepentingan rumah tangga, industri, suplai air minum, irigasi, pembangkit tenaga listrik, pariwisata dan perikanan. Pembangunan proyek Irigasi Sadang Maraso. Proyek pembangunan jalan tol di Kotamadya Ujung Pandang hingga menuju pelabuhan Makasar sepanjang 3.5km serta pembangunan jalan ruas mamuju batas Sulawesi tengah yang akan menghubungkan 2 Propinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi tengah sepanjang 334km. Side B : Lanjutan. Bidang pariwisata yaitu kampanye sadar wisata dengan sapta pesonanya perlu digalakkan terus menerus pada seluruh lapisan masyarakat agar tertarik dan turut berpartisipasi agar dapat dapat mengembangkan potensi pariwisata yang terdapat di Sulawesi Selatan.	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Selasa, 23 Januari 1990	Suara jelas
18	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan. PN. Kertas Padalarang berdiri pada tahun 1961 yang dibentuk berdasarkan UU No.30. Pada pabrik tersebut tersedia 3 buah mesin masing-masing mesin I dipasang pada tahun 1923 dengan kapasitas 2700 ton/tahun yang dapat memproduksi berbagai jenis kertas yang tebalnya antara 60 s/d 229gr, mesin ke 2 dipasang pada tahun 1931 dengan kapasitas kertas 1800 ton/tahun yang dapat memproduksi jenis kertas 26 s/d 80 gr dan mesin ke 3 dipasang pada tahun 1975 dapat memproduksi kertas 3000 ton/tahun dengan ukuran 23 s/d 32 gr. Bahan baku utama pembuatan kertas adalah merang, pulp, kayu dan bahan lainnya dan untuk pulp masih diimpor dari luar negeri. Pada tahun 1973 penambahan mesin baru dengan kapasitas 5000 ton/hari menjadi 8000 ton/hari dan untuk pengembangan jangka panjang dalam rangka pembuatan kertas-kertas tipis doorslag. Side B : Lanjutan. Kunjungan kerja Tim pada tanggal 18 Desember 1989 terdiri dari; H. Ipik Asmasubrata sebagai ketua dengan para anggota adalah : Susatyo Madi , Bagus Sasmito, Supomo, Said Abas, Drs. Zamhari, Azmi Perkasa Alam, Azim Zahid, Suparman, HM. Amshari Syam, Puji Santoso dan Heru Pradipta . Yang menjadi pokok bahasan kunjungan kerja adalah bidang Hankam, Ekonomi, Sosial Budaya dan Penerangan	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Selasa, 23 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
19	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 3 Side A : Lanjutan. Juru bicara Komisi II Hartini Susilo Wahidi mengemukakan bahwa dasar dari pelaksanaan kunjungan kerja Komisi II adalah Keputusan Pimpinan DPR No.17/Pimp/II/1989-1990. Topik pembahasan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, yang mana sifat dari pelaksanaan otonomi daerah menurut pasal 7 UU No.5/1974 adalah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara nyata dan bertanggungjawab dalam kerangka negara kesatuan RI yang tergantung pada 3 hal yaitu : 1. Kemampuan aparaturnya Pemerintah yang ada pada daerah tingkat II untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Tersedianya sumber daya dan potensi untuk dikembangkan baik sumber daya alam maupun manusia dan budaya agar dapat memperoleh penghasilan untuk membiayai pembangunan di Pemerintahan dan Daerah. 3. Pola hubungan di pusat dan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah. Side B : Lanjutan. Bidang perhubungan darat : dalam rangka mewujudkan kesepakatan Gubernur KDH se Kalimantan, Pemerintah Daerah Tingkat I se Kalimantan telah membuat program pembangunan dan peningkatan jalan lintas Kalimantan Poros Selatan. Untuk tahun anggaran 1990/1991 direncanakan kegiatan lanjutan peningkatan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan tersebut diatas melalui sumber dana APBN. Laporan juru bicara Komisi III yang disampaikan oleh Abu Bakar, SH, bahwa tujuan kunjungan kerja ke Lampung adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan hukum di daerah tersebut.	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Selasa, 23 Januari 1990	Suara jelas
20	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 4 Side A : Lanjutan. Lembaga Pemasyarakatan Metro dengan kapasitas 250 orang pada saat ini berisi 133 orang Narapidana dan 65 orang tahanan, gedung lembaga pemasyarakatan sedang direhabilitasi terutama meninggikan atap 4m guna terhindarnya para narapidana yang mencoba untuk melarikan diri. Jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan 46 orang termasuk petugas keamanan. Masalah yang merupakan hambatan adalah bea makan dan lauk pauk narapidana karena pada tahun anggaran 1989-1990 hanya bisa dibayarkan selama 9 bulan sehingga masih ada tunggakan sekitar 3 bulan. Side B : Lanjutan. Juru bicara Komisi IV : R. Wijaya Nata Kusumah , mengemukakan bahwa wilayah yang menjadi lokus kunjungan kerja Komisi IV adalah : daerah tingkat I DKI Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang dititik beratkan pada Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak mengabaikan tugas-tugas bidang lain dalam lingkup tugas Komisi IV DPRRI, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 23 Desember 1989 dengan obyek yang dikunjungi adalah ruang lingkup Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Transmigrasi. Bidang Pertanian : Sub sektor pertanian penampangan di wilayah DKI Jakarta hasil produksi pertanian dari areal seluas 3067ha telah menghasilkan gabah kering giling dan sayuran. Untuk wilayah Jawa Barat yaitu di Serang dan Penedeglang telah berhasil mencapai swa sembada beras, untuk wilayah Jawa Tengah juga telah berhasil mencapai swa sembada beras. Sub sektor Perikanan : di DKI Jakarta pengelolaan perikanan tradisional Muara Angke Jakarta Utara yang semula merupakan kawasan kumuh kini telah berubah menjadi kawasan yang patut dibanggakan setelah dibenahi sebagai proyek yang dikelola oleh Pemda DKI Jaya. di Jawa Barat yaitu di Penjamben Labuan dikembangkan proyek pengembangan udang.	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Selasa, 23 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
21	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 5 Side A : Lanjutan. Di Jawa Tengah Pekalongan proyek pengembangan Pelabuhan Nusantara mengalami perkembangan yang cukup besar dimana produksi ikan dewasa ini meningkat hingga mencapai 150 ton/hari yang hasil tangkapannya tidak kurang dari 400 kapal. Sektor transmigrasi; realisasi program transmigrasi DKI Jakarta tahun 1989/1990 s/d bulan November 1989 baru mencapai 30% dari jumlah sasaran program sebanyak 1240 KK. Masih rendahnya realisasi program fisik ini menurut hemat Komisi IV DPR RI disebabkan oleh kondisi kependudukan dalam hal keterampilannya yang berbeda dibanding daerah pengiriman lainnya. Oleh karena itu perlu penganganan program proyek dengan pola networking planning project yang tepat dan terencana yang tepat dan terencana dengan perhitungan kondisi pendukung, masalah yang mungkin timbul dan koordinasi dengan daerah penerima dan masalah-masalah keterlambatan proyek dapat dihindari. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990	Selasa, 23 Januari 1990	Suara jelas
22	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Laporan kunjungan kerja Komisi-komisi selama masa reses persidangan ke II tahun sidang 1989/1990 yang lalu. Adapun juru bicara yang akan menyampaikan laporan kunjungan kerja Komisi-komisi adalah sebagai berikut : Komisi IX : H. Ali Tamin, SH Komisi X : Drs. Popo Sonata Harun Komisi APBN : Maskan Sajarwo, SH Komisi VII : Drs. Abdul Munir Komisi VIII : Ny Nani Dading Kalbuadi Juru bicara Komisi IX Ali Tamin, SH melaporkan bahwa daerah-daerah yang dikunjungi adalah Jambi, Jateng, Jabar, Sumbar, DIY, Jatim, Bali, NTT, Sulsel, Kaltim, Sulut, Maluku dan Irian Jaya. Dasar pelaksanaan kunjungan kerja adalah Keputusan Badan Musyawarah DPR RI tanggal 30-11-1989, Surat Keputusan Pimpinan DPR RI No.17 dan 18/Pim/II/1989-1990 tanggal 11-12-1989 dan Surat Keputusan Rapat Pleno Komisi IX DPR RI tanggal 5-12-1989. Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk memantau perkembangan dan hasil yang telah dicapai oleh daerah-daerah yang dikunjungi dalam bidang pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda dan olah raga serta untuk memperoleh masukan berupa data dan informasi sebagai bahan analisa dalam membuat penilaian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan program-program pemerintah berdasarkan GBHN 1988 dan Repelita ke V. Side B : Lanjutan. Juru bicara Komisi X Drs. Popo Sonata Harun, melaporkan bahwa tema kunjungan kerja Komisi X kali ini adalah Konservasi lahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Atas dasar tema tersebut Komisi X melakukan kegiatan untuk memantau masalah yang menyangkut : Rencana pembangunan daerah, Kependudukan dan lingkungan hidup, Peranan perguruan tinggi dalam pengembangan Iptek dan penelitian, dan Per statistikan	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990	Rabu, 24 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
23	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan. <i>Drs. Popo Sonata Harun</i> , Konservasi sumber daya alam selama Pelita V telah berhasil dilaksanakan dengan melakukan konservasi didalam dan diluar kawasan konservasi dengan cara-cara, pembinaan hutan, pembangunan taman nasional pengembangan wisata alam, pembinaan pencinta alam, monitoring dampak lingkungan serta perlindungan dan pengamanan hutan. Namun karena dana terbatas pelaksanaan konservasi tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Side B : Lanjutan. Kesimpulan : Terobosan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemda Sumbar dengan Manunggal Sakato telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, sekiranya perlu mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam segi pendanaannya. Anggaran rutin yang belum mencukupi perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan dalam rangka penerimaan daerah dari sektor perpajakan maka perlu diadakan pembenahan terutam pajak Bumi Bangunan yang masih menggunakan data tahun 1970 yang sudah tidak relevan lagi. Proyek-proyek yang terkena penjadwalan ulangperlu mendapat perhatian khusus yang kiranya dapat dibiayai oleh APBN.	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990	Rabu, 24 Januari 1990	Suara jelas
24	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 3 Side A : Lanjutan. Laporan Komisi VII oleh <i>Abdul Munir</i> melaporkan bahwaKomisi VII melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sulawesi tengah yang berlangsung dari tanggal 17 s/d 23 Desember 1989 dengan susunan anggota tim terdiri dari; 7 orang dari FKP, 2 orang dari FABRI, 1 Orang FPP, 1 orang dari FPDJ yang dipimpin oleh Ny Hj. <i>Sisi HerawatiHadiwitarto</i> dari FKP. Adapun tema dari kunjungan kerja adalah: Mengusahakan terumuskannya demokrasi ekonomi dalam rangka sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 dengan sub tema antara lain a. Kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi hendaknya tetap tertumpu pada pelaksanaan trilogi pembangunan dengan titik berat pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. b. menjadikan komoditi andalan sebagai keunggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani produsen. Side B : Lanjutan. Kesimpulan yaitu : Penerimaan negara dari sektor perpajakan baik PPH maupun PPN 3 tahun terakhir ini meningkat walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Penerimaan negara dari Pajak Bumi Bangunan belum mencapai target bahkan menurun sekitar 10%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 17,3 % terhadap APBD menurun menjadi 10,7% pada tahun 1989. Pengembangan usaha golongan ekonomi masih lambat walaupun telah dilakukan upaya untuk meningkatkannya pada tahun-tahun yang lalu.	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990	Rabu, 24 Januari 1990	Suara jelas
25	Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 4 Side A : Lanjutan. Laporan Komisi VIII yang disampaikan oleh Ny. Nani Dading Kalbuadi melaporkan bahwa materi yang ditinjau di daerah meliputi : -Bidang kesehatan : air bersih pedesaan, penggunaan obat generik, rumah sakit, puskesmas dan Perum Husada Bhakti. -Bidang sosial : karang taruna Iposos (ideologi, politik, dan sosial), setgasos, penyantunan dan pengentasan fakir miskin, proyek pemugaran perumahan pedesaan terpadu, program bantuan korban bencana alam dan pemukiman desa nelayan. -Bidang urusan peranan wanita : PKK, peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS), tenaga kerja wanita. -Bidang KB :Pos Yandu dan upaya peningkatan pendapatan keluarga dan aseptor. Side B : Lanjutan. Berdasarkan pengamatan tim Komisi VIII di lapangan, hambatan program KB disebabkan antara lain: masih adanya rasa enggan pemasangan alat kontrasepsi spiral yang dilaksanakan oleh dokter laki-laki, tingkat pendidikan yang masih rendah terutama di pedesaan, tingkat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Sehingga untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam Pelita V ini ditetapkan 5 jurus prioritas pemantapan sebagai strategi operasional program tersebut antara lain : pemerataan, Peningkatan Kualitas, Peningkatan Kemandirian, Peningkatan Peran Generasi Muda, dan Pemantapan Lini Lapangan.	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990	Rabu, 24 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
26	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Jawaban dan tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum DPR RI mengenai Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1990/1991. APBN harus ditetapkan dengan undang-undang oleh karena itu ketetapan dan pelaksanaan APBN merupakan tanggungjawab konstitusional DPR bersama dengan Pemerintah, untuk itu segala pandangan dan tanggapan atas RAPBN 1990/1991 merupakan masukan yang sangat berharga dan sekaligus merupakan wahana didalam menyatukan pola pikir antara DPR dan Pemerintah guna melanjutkan pembangunan bagi tercapainya sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Repelita V, karena dengan terlaksananya pembangunan nasional selama lebih 20 tahun hingga memasuki tahun ke 2 Repelita V telah berhasil mencapai baba baru diberbagai bidang ekonomi. Side B : Lanjutan. Sistem penggajian untuk PNS, ABRI, dan pensiunanserta usaha untuk meningkatkan produktifitas pegawai.Pemerintah berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai perlu mendapat perhatian dan upaya peningkatan disiplin, produktivitas kerja, efisiensi, dan penciptaan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990	Kamis, 25 Januari 1990	Suara jelas
27	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan. Bahwa uang dalam masyarakat berfungsi untuk melancarkan pertukaran barang dan jasa diantara anggota masyarakat. Dalam hal ini jumlahnya harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang juga dipengaruhi antara lain tingkat produksi barang dan jasa, tingkat penggunaan uang atau moneynisasi dalam masyarakat, volume peredaran barang dan jasa serta tingkat kepercayaan masyarakat kita atas nilai rupiah. Dalam hal iklim ekonomi cukup baik bagi kegiatan ekonomi maka masyarakat akan menggunakan uang untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat, dan begitu pula sebaliknya. Side B : Lanjutan. dari tahun ke tahun pemerintah telah berusaha secara bertahap menyempurnakan mekanisme perencanaan dengan melibatkan daerah dalam hal ini kemampuan para perencana di daerah telah ditingkatkan dan selanjutnya akan ditingkatkan pula para perencana ditingkat kabupaten dan Kecamatan, dengan demikian kebutuhan daerah dapat ditampung dan diserasikan dengan prioritas nasional dalam kemampuan pendanaan pemerintah.	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990	Kamis, 25 Januari 1990	Suara jelas
28	Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 3 Side A : Lanjutan. Jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum DPR mengenai Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1990-1991 sebagai salah satu rangkaian tugas konstitusional yang telah menjadi tekad bersama yaitu Pemerintah Orde Baru untuk dapat memenuhi sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan. Pemerintah dengan sungguh-sungguh dalam batas-batas kemampuannya telah berusaha untuk menjawab selengkap mungkin semua pertanyaan dan menanggapi berbagai pendapat yang telah diketengahkan oleh para anggota yang terhormat atas nama fraksi masing-masing yang mencakup keseluruhan usaha pembangunan dan kegiatan umum pemerintah. Semoga usaha bersama yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab kepada tercapainya tujuan kemerdekaan akan mendapatkan manifestasinya didalam bentuk undang-undang APBN sebagai perwujudan baik ndari politik rakyat untuk menyelenggarakan kesejahteraannya. Side B : <i>Tidak ada suara</i>	Rapat Paripurna ke 16/III/1989-1990	Kamis, 25 Januari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
29	Rapat Paripurna ke 16/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Acara rapat hari ini adalah pembicaraan tingkat I yaitu Keterangan Pemerintah atas : 1. RUU tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya telah disampaikan oleh Pemerintah dengan amanat Presiden No. R.04 PU 11 89 tanggal 14-11-1989 diumumkan dalam rapat Paripurna tanggal 20-11-1989. 2. RUU tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah disampaikan oleh Pemerintah dengan amanat Presiden No. R.04 PU 11 89 tanggal 21-11-1989 diumumkan dalam Rapat Paripurna tanggal 11-12-1989. kedua RUU tersebut telah dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah pada tanggal 30-11-1989 dan naskahnya telah ada ditangan para anggota dewan yang terhormat. Pembicaraan tingkat I keterangan pemerintah atas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan yaitu : Strategi Konservasi Dunia pada tahun 1980 dan pemerintah Indonesia melalui pernyataan bersama Menpan, Menteri Pertanian, Menteri PPLH dan Menristek pada tanggal 6-3-1980 mengeluarkan pernyataan mendukung strategi konservasi tersebut. Side B : Lanjutan. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdiri dari 4 bagian yaitu : Judul, Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat materi-materi yang dapat dikelompokkan dalam 11 Bab dan 39 pasal, dan bagian akhir adalah Penjelasan.	Rapat Paripurna ke 16/III/1989-1990	Senin, 29 Januari 1990	Suara jelas
30	Rapat Paripurna ke 16/III/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan. Penjelasan mengenai RUU Karya Cetak dan Karya Rekam. Salah satu unsur utama dalam kecerdasan bangsa ini adalah tentu saja sumber informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan bangsa ini, salah satu bentuk utama dari informasi adalah koleksi bahan pustaka. Karya cetak dan karya rekam yang telah dihasilkan itusedikit banyaknya adalah penting sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai kehidupan masyarakat yang bersangkutan oleh karenanya harus tersimpan baik serta tersedia untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Karya cetak dan karya rekam merupakan karya intelektual bangsa dan diharapkan bangsa kita akan memiliki koleksi nasional berupa karya cetak dan karya rekam yang lengkap dan terkumpul serta terpelihara di tempat tertentu sebagai dokumen nasional. <i>Side B : Tidak ada suara</i>	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990	Senin, 29 Januari 1990	Suara jelas
31	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat dewan dalam masa persidangan ke III tahun sidang 1989-1990 yang berlaku mulai tanggal 4 Januari s/d 10 Maret 1990, hasil keputusan badan Musyawarah tanggal 30-11-1989 acara Rapat Paripurna hari ini adalah Pembicaraan tingkat II tentang Pemandangan Umum anggota Dewan mengenai RUU tentang tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Urutan juru bicara yang mewakili fraksi-fraksi nya antara lain : F ABRI Zainudin , FKP Drs. Sudarmaji , FPP Muhammad Fajar Sidiq , FPD I Nicolas . Pemanfaatan sumber daya alam hayati yag tidak terkendali mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang dapat menurunkan potensinya dan bahkan dapat rusak/punah sama sekali apabila pemanfaatannya melebihi alat dukung itu sendiri. RUU Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan pelaksanaan tindak lanjut dari UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang ditetapkan dalam pasal 12. Side B : Lanjutan. Kehadiran UU tentang Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat diharapkan sebagai pelengkap yang peranannya diharapkan lebih besar dalam upaya mengatasi sepenuhnya. Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat mengharapkan kehadiran UU ini dengan demikian cita-cita yang terkandung dalam pasal 22 UUD'45 akan dapat terlaksana secara utuk	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990	Senin, 12 Pebruari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
32	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan. Dalam mutu perundang-perundangan yang ada menjadi satu hukum nasional yang bersifat menyeluruh. Sependapatkah Pemerintah dengan FKP agar didalam undang-undang yang baru tersebut dapat lebih mengatur, menyatukan dan memajukan setara bahkan semua peristilahan dan terminologi yang ada sehingga menjadi lebih jelas tidak rancu dan tumpang tindih. Side B : Lanjutan. Pemandangan umum dari FPP Muhammad Fajar Sidiq : RUU Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI dengan amanat Presdien RI tanggal 14-11-1989 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 9-1-1990 Meskipun upaya konservasi ini telah dirintis beberapa tahun yang lalu namun permasalahannya masih selalu timbul dan terus berlangsung	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990	Senin, 12 Pebruari 1990	Suara jelas
33	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 3 Side A : Lanjutan. Keadaan ini harus segera dihentikan, dan langkah awal untuk itu dipandang perlu pembenahan kembali perangkat peraturan perundang-undangan dibidang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang telah dibagi dalam 2 kelompok yaitu : -Kelompok I : peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang masih berlaku dan bersifat kolonial serta parsial sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional. -Kelompok II : Peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan oleh negara RI yaitu : UU No 5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, UU No 4/1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan UU No 9/1985 tentang perikanan. Dari ketiga undang-undang tersebut belum dapat menampung semua permasalahan yang timbul dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Side B : Lanjutan. Gambaran usaha yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pada saat ini telah menyisihkan sebagian wilayah menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terdiri dari -Kawasan cagar alam 177 lokasi seluas 5,9 juta ha -Kawasan cagar alam laut 5 lokasi seluas 928 juta ha -Kawasan taman wisata 65 lokasi seluas 263.000 ha -Kawasan taman burung 11 lokasi seluas 242.000 ha -Kawasan taman laut 7 lokasi seluas 73.000 ha	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990	Senin, 12 Pebruari 1990	Suara jelas
34	Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 4 Side A : Lanjutan. Kawasan-kawasan tersebut letaknya tersebar diseluruh Indonesia, selanjutnya dalam Pelita IV saat bangsa kita tinggal landas kawasan suaka alam dan pelestarian alam direncanakan mencapai areal 18,7 juta ha daratan dan 10 juta ha perairan laut. Apabila RUU telah menjadi UU apakah sikap dunia akan berubah terhadap Indonesia dibidang pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya itu dan akan menjamin pelaksanaan reboisasi, penghijauan, terhindarnya pencemaran air dan udara? Apakah impian umat manusia untuk terus maju akan disertai dengan kelestarian lingkungan hidup yang menghidupinya atau akan dikuras habis yang akan mendatangkan bencana? Tiba-tiba suara hilang..... Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 18/III/1989-1990	Senin, 12 Pebruari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
35	Rapat Paripurna ke 18/III/1989-1990 Volume 1 Side A : Rapat Paripurna DPR tentang pembicaraan tingkat II yaitu pemandangan umum para anggota mengenai RUU tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam. RUU tersebut disampaikan oleh Pemerintah bersama dengan amanat Presiden RI No. R.05/PU/11/1989 tanggal 21-11-1989. Adapun daftar nama fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum atas RUU tersebut adalah: 1. H. CH. Muhammad Muas dari FKP 2. Burhan Arifin dari FABRI 3. H. Ali Tamin, SH dari FPP 4. Drs. Ukun Suryana dari FPD Fraksi Karya Pembangunan disampaikan oleh H. CH. Muhammad Muas Pada tanggal 9-01-19890 menteri pendidikan dan Kebudayaan atas nama pemerintah telah memberikan keterangan dalam Sidang Paripurna DPR RI. RUU ini bertujuan untuk melindungi dan mendayagunakan karya baik putra dan putri Indonesia maupun karya WNA tentang Indonesia yang berbentuk karya cetak atau karya rekam dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Side B : Lanjutan. Fraksi ABRI disampaikan oleh Burhan Arifin : Upaya untuk mencerdaskan bangsa adalah keharusan untuk memiliki dan mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan potensi serta kemampuan sumber daya nasional termasuk potensi informasi keutuhan yang dimiliki bangsa dalam bentuk seni dan budaya.	Rapat Paripurna ke 18/III/1989-1990	Selasa, 13 Pebruari 1990	Suara jelas
36	Rapat Paripurna ke 18/III/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan. Bahwa pemerintah telah mengambil keputusan untuk menghimpun semua hasil karya seni dan budaya dengan ciri-ciri yang selaras dengan perkembangan kemajuan teknologi disertai tata cara penyimpanan dan pengamanannya secara lebih cermat termasuk pendayagunaannya dalam rangka pelestarian hasil karya budaya bangsa. Fraksi Persatuan Pembangunan disampaikan oleh H Ali Tamin, SH : hal ini mencerminkan pula bahwa nilai strategis hasil budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam tersebut sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa akan semakin dikagumi secara proporsional dan cermat termasuk pelestariannya. FPP sejalan dengan Pemerintah bahwa perlu diciptakan peraturan perundang-undangan dibidang kewajiban serah simpan hasil karya cetak dan rekam yang dapat menampung perkembangan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi sehingga masa berlakunya cukup lama. Side B : Lanjutan. Fraksi PDI disampaikan oleh : Drs. Ukun Suryaman : Salah satu tujuan amanat UUD'45 adalah terbentuknya Negara Indonesia adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah telah cukup banyak dengan telah diundangnya UU. RUU wajib serah karya cetak dan rekam yang masih dalam kaitan program mencerdaskan bangsa bertujuan ingin mewujudkan suatu perpustakaan yang dapat diandalkan sebagai sumber informasi dan pengetahuan dimana terhimpun semua karya cetak dan rekam dalam bentuk apapun. Apabila RUU ini diundangkan menjadi UU dapat memberikan nuansa kepekaan akan kewajiban untuk menyerahkan karya cetak dan rekamnya bukan karena keterpaksaan. Demikian pandangan umum FPD dalam rangka membahas RUU wajib serah simpan karya cetak dan rekam, apa yang belum termuat dalam pandangan umum ini akan disampaikan pada pembicaraan tingkat III yang dimuat dalam Daftar Isian Masalah (DIM).	Rapat Paripurna ke-19/III/1989-1990	Selasa, 13 Pebruari 1990	Suara jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
37	Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 1 Side A: Laporan Komisi APBN tahun 1990/1991 tentang RUU APBN diperlukan perangkat undang-undang yaitu RUU Perbankan, RUU APBN, dan RUU di bidang Perdagangan. Dalam pembahasannya pemerintah dapat menggunakan UU APBN tapi harus memperhatikan tentang pengembalian utang dari Bank pembangunan Asia, untuk pengawasan, dan dana bantuan luar negeri untuk pembangunan nasional. Untuk menghadapi eksport saingan luar negeri perlu dana pengembangan eksport non migas. Pembinaan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui koperasi untuk itu perlu adanya peningkatan manajerial. Side B: Alwi dari Fraksi Karya Pembangunan, pemerintah harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong sektor usaha untuk mencapai kemakmuran. Koperasi perlu ditangani dengan baik karena sebagai soko gurunasional. Proses pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan cita-cita bangsa sehingga kemakmuran dapat tercapai untuk itu perlu disemangati proses kehidupan bermasyarakat untuk mendorong proses demokrasi politik melalui dialog sehingga demokrasi dapat berkembang sesuai hak-hak warga negara dapat dipenuhi. Semakin baiknya sandang papan maka 30 juta masyarakat yang kurang mampu perlu diperhatikan dengan menyiapkan lapangan pekerjaan. Adanya praktek koklomerat dan monopoli oleh kelompok swasta tertentu dapat merugikan kelompok usaha menengah ke bawah untuk itu perlu adanya kerjasama. Bantuan luar negeri untuk menciptakan iklim yang baik untuk usaha dengan cara mengembangkan koperasi. Perlu dioptimalkan penerimaan pajak dan mencegah pajak bergaanda yang dapat merugikan rakyat kecil. Dengan memanfaatkan bantuan luar negeri untuk pembangunan dapat memebrikan kesejahteraan dan anggaran rutin untuk membayar utang luar negeri secara rutin.	Rapat Paripurna ke-19/III/1989-1990	Selasa, 27 Februari 1990	Suara Jelas
38	Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 2 Side A: Pengeluaran anggaran naik 20 % perlu peran serta masyarakat dan dunia usaha mendukung penghimpunan tabungan masyarakat. Pembangunan wilayah Timur perlu ditingkatkan terutama di bidang perhubungan dan ketrampilan untuk memudahkan pelaksanaan kerja di lapangan. Untuk mencapai pembangunan tinggal landas perlu peningkatan anggaran untuk transmigrasi khususnya tran swakarsa guna pemerataan penduduk, pengawasan ditingkatkan untuk menghindari kebocoran negara, pembangunan sarana prasarana perhubungan, dan peningkatan sektor pariwisata, jumlah tenaga guru ditingkatkan. Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan RUU APBN untuk disyahkan menjadi undang-undang. Side B: Fraksi ABRI, mengucapkan terima kasih kepada media pers yang meliput proses RUU menjadi UU untuk pelaksanaan anggaran tahun ke dua Repelita ke V akan disyahkan pada tanggal 19 maret 1990. Di Eropa sedang bergejolak anjloknya mata uang dunia dan harga minyak bumi di pasaran dunia dan bangsa Indonesia mampu melewati masalah ini. Kebijakan perkembangan ekonomi dan moneter dapat memberikan pertumbuhan guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Pemilikan sahan di perusahaan besar oleh koperasi yang dianjurkan oleh Presiden RI supaya koperasi dapat berkembang untuk kesejahteraan anggiotanya. Bantuan dana donatur sekarang pindah ke Eropa Timur, APBN meningkat 17 % penerimaan naik 25 % dari pajak naik 31,7 %. PBB turun tetapi penerimaan miga naik ditunjang kenaikan tabungan pemerintah sehingga membantu pinjaman luar negeri dengan demikian anggaran menjadi seimbang sesuai prinsip ekonomi dan dapat menekan inflasi sampai 6 %. Penarikan investor luar negeri dapat memebrikan nilai tambah keuangan negara dan menyerap tenaga kerja. Sumber minyak bumi dihemat untuk kemakmuran rakyat dan pemerintah mengupayakan bantuan luar negeri untuk pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan. Pembangunan perhubungan untuk meningkatkan alat transportasi dan mencapai hubungan antara wilayah sehingga menyerap tenaga kerja. Pendidikan ditingkatkan kualitasnya untuk pembinaan generasi muda untuk pembangunan Indonesia yad untuk pertahanan nasional menjadi ilmuwan yang berwawasan.	Rapat Paripurna ke-19/III/1989-1990	Selasa, 27 Februari 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
39	Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 3 Side A: A. makruf dari Fraksi ABRI, Pembangunan wilayah Timur dapat terpadu, efektif untuk mencapai kesimbangan dengan anggaran naik 30 % dari tahun yang lalu laju transmigrasi perlu diarahkan untuk mencapai hasil terpadu mulai dari kemauan yang keras dan penyiapan lahan yang tepat. Pembinaan hukum ditingkatkan sehingga investasi dapat masuk dan menyerap tenaga kerja. Penarikan pajak bagi yang mampu belum tertangani untuk membiayai pembangunan. Ekonomi masih terhambat karena karena seharusnya melayani tetapi sebaliknya sehingga banyak proyek pembangunan wilayah Timur kurang ditangani dengan baik. Menciptakan lapangan kerja sesuai dengan fungsional dapat diperdayakan sehingga dapat berkembang dan waskat dimulai sejak direncanakan sampai pelaksanaan dengan diawasi dan diarahkan sehingga dapat dicegah penyalahgunaan wewenang . Kenaikan gaji PNS 10 % membantu kesejahteraan PNS dan Fraksi ABRI menyetujui RUU APBN menjadi UU. Moh. Mansur dari Fraksi PPP, pelaksanaan pembangunan wilayah Timur mulai membaik dan demokrasi ekonomi berkembang baik, penerimaan dari gas dan minyak bumi naik 10,7 triliun perlu ditingkatkan serta PPn naik 7 %. Side B: Mansur dari Fraksi PPP, petani dibebaskan dari PBB, bantuan luar negeri memberi kontribusi untuk pembangunan sejauh penggunaan dana untuk kesejahteraan rakyat. Penerimaan pinjaman ini tidak ada kaitannya dengan politik dan merupakan pinjaman lunak. Pembayaran hutan 84 % dari anggaran harus dibayar supaya mendapat kepercayaan tanpa melanggar kesepakatan yang diambil. Untuk kesejahteraan PNS perlu ditingkatkan terus dan 4,9 triliun tabungan masyarakat ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan. sasaran dan pemerataan anggaran untuk penyerapan tenaga kerja. Fraksi PPP mengusulkan penyempurnaan pelaksanaan pemilu dan penataran P4 hasilnya belum maksimal untuk itu perlu dimaksimalkan kurikulumnya supaya pesertanya benar-benar menerapkan isi Pancasila. Perlu peningkatan mutu pendidikan Madrasah agar siswa dapat menerapkan pendidikan agama di masyarakat. Aparat penegak hukum tidak membedakan masyarakat yang mencari keadilan dan pemerintah dianjurkan untuk memberi bantuan hukum bagi yang tidak mampu. harga pupuk petani dimurahkan untuk kesejahteraan petani dan menuju ke swasembada pangan. meningkatkan semangat koperasi untuk kepentingan orang banyak dan perusahaan diminta untuk memberika 25 % untuk pengembangan koperasi. Taraf hidup para transmigran ditingkatkan sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan program Inpres diberikan secara utuh sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.	Rapat Paripurna ke-19/III/1989-1990	Selasa, 27 Februari 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
40	Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 4 Side A: Kegiatan waskat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum tuntas untuk itu pengawasan fungsional perlu ditingkatkan dengan cara disiplin nasional. Anggaran fungsional meningkat yang melakukan pemantauan pemeriksaan. Fraksi PPP menghimbau SDM perlu ditingkatkan ketaqwaannya. Pemerintah harusnya menyalurkan paket kecil peminjaman uang untuk koperasi guna sehingga petani dapat mencapai pemerataan kesejahteraan sehingga golongan ekonomi lemah dapat keseimbangan hidup sehingga ekonomi menjadi kuat. Moh. Mansyur, dari Fraksi PPP dengan pejabat Depkeu pada pemandangan RUU APBN . APBN sesuai Trilogi Pembangunan untuk mencapai pembangunan tinggal landas dengan berpatokan pada harha minyak bumi. Pembangunan wilayah Timur harus ditingkatkan ketertibannya dan mendapat prioritan sehingga pemerataan Trilogi pembangunan dititikberatkan pada pemerataan tapi tidak seperti yang diharapkan sehingga timbul konglomerat. Koperasi dapat memanfaatkan peluang untuk kesejahteraan bantuan sosial Parpol dan Golkar untuk mendahulukan rakyat supaya rakyat punya hak dan kewajiban untuk memikul tanggungjawab pembangunan. ABRI diminta untuk mengayomi rakyat karena asal-usul ABRI dari rakyat sehingga masyarakat tidak jenuh dengan perilaku kekuasaan ABRI. Side B: Fraksi PDI, Claris Sitompul, menyambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri, Rudini No. 13/2/1990 tentang penyusunan tatib DPRD Tk I dan II. Kekurangan guru pada Pelita VI belum terpenuhi untuk itu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana. Upaya penciptaan tanah perlu dilakukan untuk pemerataan kepemilikan tanah karena sebelumnya belum terpenuhi sehingga perlu realisasi. Departemen Transmigrasi dapat merealisasikan anggaran sesuai Inpres No. 1 tahun 1986 untuk penyerapan anggaran. Penggarapan hutan perlu ditingkatkan untuk menyerap SDM dan menghasilkan hasil ekspor rotan. Dana rehabilitasi perlu diterapkan untuk reboisasi yang menyerap dana 4 milyar untuk itu perlu adanya reboisasi. Pola penyuluhan hukum yang langsung menyentuh masyarakat supaya warga negara dapat mematuhi hukum dan taat hukum supaya UU Perkawinan melalui Sadarkum. Untuk pemerataan kesehatan perlu proyek rehabilitasi untuk anak -anak dan tempat bersalin di RS Provinsi. Kerjasama pertamina dan swasta harus diawasi dengan baik sehingga BBM tidak dinaikan karena sangat mempengaruhi. Penyerapan SDM perlu diatur dengan dasar hukum untuk melindungi bekerja. Anggaran penelitian dinaikan untuk pengembangan. Fraksi PDI menghargai keberhasilan pemerintah tentang pengembangan listrik tenaga surya di Sukabumi sehingga hal ini bisa dikembangkan di daerah perbatasan atau daerah terpencil untuk pemerataan. Perbaikan perumahan kumuh melalui program perumahan dan masyarakat rendah bisa mendapatkan cicilan rumah dengan bunga rendah untuk menghindari gejolak sosial.	Rapat Paripurna ke-19/III/1989-1990	Selasa, 27 Februari 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
41	Rapat Paripurna ke 20/III/1989-1990 Side A: Claris Sitompul dari Fraksi PDI, untuk pendidikan sumber dana dari masyarakat digunakan sebaik-baiknya dan untuk mencapai eksport non migas pemerinah diharapkan mengelola bahan baku untuk diproduksi sendiri sehingga dapat menekan devisit.Pemasukan modal dan peminjaman dana dari luar negeri untuk pembangunan pemerintah dapat merealisir dengan penuh tanggung jawab. Walaupun harga minyak bumi naik APBN 1990 masih ada devisa untuk itu perlu ditingkatkan pendapatan petani dan pengadaan peralatan kerja untuk pelayanan masyarakat. RUU tentang perimbangan pembiayaan daerah dan pusat perlu diperbarui supaya daerah mempunyai sarana hukum dalam mengatur pembiayaan daerah. Pendapat akhir Fraksi PDI dalam pembicaraan Tk III bahwa kesenjangan pusat dan daerah itu ada dan perlu adanya komputerisasi serta monitoring penggunaan anggaran RUU tentang perbendaharaan negara yang diajukan pada taun 1990 dapat diterima dan disetujui RAPBN tahun 1990 untuk disyahkan menjadi undang-undang. Side B: Rapat yang dihadiri 335 anggota dewan untuk mengesahkan RUU APBN menjadi Undang-Undang. Menteri Keuangan, JB. Sumarlin : Bahwa untuk menjaga kelangsungan pembangunan maka UU telah disyahkan dan kami mengucapkan terima kasih. Pemerintah selalu mengajukan RUU APBN pada tahun ke- 2 Repelita V untuk memasukkan pembangunan era tinggal landas. Aliran modal lebih besar ke negara industri dari pada negara berkembang disebabkan adanya proteknise, hal ini mempengaruhi negara berkembang sehingga harga minyak bumi tidak mengalami kenaikan. Aspek pengelolaan uang negara agar dapat digunakan sesuai sasaran sehingga perlu adanya pengawasan fungsional sebagai mata rantai APBN untuk menghindari kebocoran negara. Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang karena adanya peluang untuk meningkatkan produktifitas sehingga dunia usaha dapat terarah jelas sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata untuk itu pemerintah memberikan deregulasi dan debirokrasi secara sistem. Penyempurnaan kebijakan pemerintah berbagai perangkat hukum dimantapkan agar mencerminkan pada kesetiakawanan nilai kekeluargaan, kebersamaan bersumber pada UUD 1945 dan Pancasila untuk memberikan aturan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Dana dalam negeri dapat digunakan secara optimal dan investasiluar negeri dapat memberi peluang lapangan kerja. Berhasil atau tidak penggunaan anggaran tergantung dari instansi dan kesanggupan aparatur yang menggunakan oleh sebab itu harus berpegang secara terarah dan terkendali sesuai rencana program dan disiplin pembiayaan fungsi serta kegiatan instansi tsb sehingga dituntut untuk berhemat sesuai kebutuhan, disiplin kerja, jujur, tekun, efisien.	Rapat Paripurna ke 20/III/1989-1990,	Selasa, 27 Februari 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
42	Rapat Paripurna ke 21/III/1989-1990 Side A: BJ. Habibie, menyampaikan rancangan pemerintah tentang RUU Ilmu Pengetahuan Indonesia. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dengan metode secara keseluruhan informasi untuk yang digali dan disusun untuk memberikan kejelasan tentang hakekat berbagai gejala alam dan kemasyarakatan untuk memperoleh hasil yang diperlukan bagi kelangsungan hidupnya sehingga dapat merubah peradaban manusia. Sekarang Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang dengan pesat untuk kehidupan pribadi, masyarakat, dan internasional. Kekayaan bangsa tergantung dari kekayaan lptek dan teknologi untuk percepatan teknologi guna memperoleh produk baru semua ini karena ditunjang dengan lptek sehingga akan mendapat nilai tambah . Meningkatkan mutu hasil pembangunanyang berhubungan dengan internasional karena sebagai prestise dan kemajuan bangsa. Setiap bangsa berusaha meningkatkan pengetahuan supaya tidak ketinggalan dengan bangsa lain dengan majunya bangsa Indonesia mampu menyumbangkan , memanfaatkan, dan menerapkan teknologi mutakhir di bidang transportasi, komunikasi, penginderaan jarak jauh, dan penerbangan. Tujuan lptek sebagai sarana yang mampu sebagai penunjang pembangunan. Tahun 1956 dibentuk Majelis Pengetahuan nasional, tahun 1967 diganti lembaga Riset Nasional, tahun 1978 hadir BPPT hal ini untuk untuk mengadakan kegiatan penelitian dan pengembangan penelitian. Tahun 1984 tahap penggunaan teknologi, tahap penerapan transportasi , tahap pengembangan, dan tahap penelitian, hal ini akan menghasilkan 8 wahana yang hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Para ilmuwan bertanggung jawab denga hasil penelitian dan dampak yang ditimbulkan sehingga harus ada pertimbangan para ahli sehingga wajar lptek diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia. Side B: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tugasnya menyampaikan saran pertimbangan tentang ilmu pengetahuan, tujuannya melaksanakan hubungan internasional sehingga dapat menampung dan mendapat data untuk perkembangan lptek, melaksanakan telaah di bidang pengetahuan dan teknologi data dan informasinya untuk kepentingan nasional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan.Investasi ilmu pengetahuan dapat memberikan nilai tambah untuk kehidupan manusia1	Rapat Paripurna ke 21/III/1989-1990	Kamis, 1 Maret 1980	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
43	Rapat Paripurna ke 22/III/1989-1990 Volume 1 Side A: Mendagri, Rudini selaku mewakili pemerintah mengajukan RUU tentang pembentukan Kabupaten Tk II Halmahera Tengah dan RUU Kodya Tk. II Bitung. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Halmahera Tengah dan Biitung merupakan janji pemerintah sehingga dibahas pada Rapat Paripurna ini. Halmahera Tengah dalam sejarahnya ikut mengembalikan wilayah Irian Barat dimana saat dikuasai oleh Belanda daerah tsb berbentuk Kawedanan Tidore dan di daerah ini telah dicetuskan Trikora . Tanggal 13 Juni 1967 Gubernur Maluku menegaskan daerah Irian Barat disiapkan menjadi daerah Tk II. Sekretariat dan daerah dan jumlah pegawai dari semua dinas ada 1181 orang. Side B: Kabupaten Tk II Halmahera Tengah merupakan kota administrasi yang dibentuk pertama terdiri dari 3 kecamatan apabila ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum . Kota administrasi Bitung berkembang sangat pesat banyak industri baru, konstruksi, perikanan mengakibatkan bertambahnya penduduk naik hingga 75 % maka perlu dibentuk pemekaran kecamatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Walaupun Bitung hanya kota administrasi tetapi kkgiatannya dan kesibukan perangkat administrasinya seperti Tk I sedangkan jumlah pegawai hanya 194 orang. Semua kecamatan mempunyai gedung kantor setingkat Kanwil untuk tingkat II. Kecamatan Bitung Utara, Tengah, dan Timur untuk mewujudkan ketertiban keamanan urusan tsb dilaksnaakan secara nyata oleh suku dinas. Kota Madya Bitung dan Kabupaten pengangkatan Kepala Daerah DPRD sesuai perundang-undangan. Walikota Madya diangkat oleh Gubernur dan akan diangkat 20 anggota DPRD dari Minahasa untuk ditempatkan di Bitung. Pembiayaan akan mendapat biaya tambahan dari pemerintah untuk operasional dan penambahan pegawai selama 3 tahun. Berdasarkan fakta -fakta tsb sesuai ketetapan MPR RI No II/MPR/1988, GBHN khusus untuk pemekaran daerah dan pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kodya Bitung merupakan janji pemerintah maka dibentuk kedua daerah tsb dari kecamatan menjadi Kabupaten dan Kodya.	Rapat Paripurna ke 22/III/1989-1990	Senin, 5 Maret 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
44	Rapat Paripurna ke 22/III/1989-1990 Volume 2 Side A: Menteri Muda Tanaman Kerasa, Parada Harahap selaku pemerintah memberikan jawaban dalam pemandangan umum tentang RUU Wajib serah karya cipta dan karya rekam. Untuk mengamati UU Produk Hindia Belanda Ps 33 disebutkan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat artinya semua yang ada di bumi harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masa kini dan mendatang. untuk meningkatkan kesadaran hukum warisan Belanda maka RUU sumber daya ps 12 No. 4 Tahun 1984 tentang Pokok -Pokok Pola Lingkungan Hidup pengertian sumber daya ada 3, yaitu: Perlindungan eko sistem, pengawasan jenis satwa, dan pelestarian sumber daya hayati dan ekosistem. Konservasi bukan untuk kepentingan konservasi belaka tetapi mengenai kesejahteraan rakyat sehingga dapat manfaat dan masyarakat ikut bertanggungjawab untuk menyelamatkan ekosistem sehingga dapat berhasil. *Poses ekosistem punya manfaat tinggi sehingga perlu diwujudkan pelestarian satwa kehidupan di wilayah RI. RUU yang diajukan untuk mengganti UU yang ada al: UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, UU No. 9 tahun Tentang Perikanan. Hal ini karena penjabarannya masih terbatas misalnya peraturan tentang penangkapan ikan, wisata laut, kepemilikan satwa perorangan belum diatur dalam ketiga undang-undang ini. Alasan yang mendasari adalah kedudukan geografis wilayah Indonesia menjadi jalur internasional antara Pasifik dan Samudera Hindia untuk itu perlu adanya UU yang ketat dan menanggapi anti kayu tropis hal ini untuk menangkal isu tsb sesuai kondisi kita. Tujuan lptek sebagai sarana yang mampu sebagai penunjang pembangunan. Tahun 1956 dibentuk Majelis Pengetahuan nasional, tahun 1967 diganti lembaga Riset Nasional, tahun 1978 hadir BPPT hal ini untuk untuk menghadirkan kegiatan penelitian dan pengembangan penelitian. Tahun 1984 tahap penggunaan teknologi, tahap penerapan transportasi , tahap pengembangan, dan tahap penelitian, hal ini akan menghasilkan 8 wahana yang hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Para ilmuwan bertanggung jawab denga hasil penelitian dan dampak yang ditimbulkan sehingga harus ada pertimbangan para ahli sehingga wajar lptek diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia. Side B: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tugasnya menyampaikan saran pertimbangan tentang ilmu pengetahuan, tujuannya melaksanakan hubungan internasional sehingga dapat menampung dan mendapat data untuk perkembangan lptek, melaksanakan telaah di bidang pengetahuan dan teknologi data dan informasinya untuk kepentingan nasional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Investasi ilmu pengetahuan dapat memberikan nilai tambah untuk kehidupan manusia.	Rapat Paripurna ke 22/III/1989-1990	Kamis, 8 Maret 1990	Suara Jelas
45	Rapat Paripurna ke 23/III/1989-1990 Volume 1 Side A: Indonesia menyamnggupi membayar biaya kegiatan pada tahap I. Sekjen dari ASEAN dan masa jabatan sekjen 5 tahun biaya ditanggung bersama dari AIPO. Susunan anggota: Abdul Lopez diangkat sebagai Sekjen AIPO diberi 1 sekretaris berkantor di Jakarta. Jabatan Sekjen dan Deputi AIPO 3 tahun dari ASEAN sedangkan staf berdomisili di Jakarta. Mulai September 1990 jabatan Sekjen dari Indonesia wakil dari Thailand dan berkantor di gedung DPR RI di Jakarta. Tanggal 17 Februari berdiri sekretariat tetap di Jakarta yang ditandai denga pengguntingan pita. Sekjen AIPO jabatan sampai sidang AIPO mendatang di Singapura dimana struktur nantinya akan ditatapka di Singapura sedangkan staf di Jakarta dan rencananya akan mendirikan sekteraiat nasional di setiap negaranya. Indonesia bersedia menyiapkan dana operasionalnya dan dalam sidang tsb menghabiskan dana 120.000 \$ ditanggung oleh 5 negara AIPO/ ASEAN. Dalam kegiatan AIPO di jakarta dihadiri 322 dewan, Fraksi ABRI 82, PPP 30 orang, PDI 23 orang. Ketua DPR RI, Daryatmo menurut sidang AIPO. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 23/III/1989-1990	Kamis, 8 Maret 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
46	Rapat Paripurna ke 24/III/1989-1990 Volume 1 Side A: Menteri Dalam Negeri, Rudini dalam memberikan keterangan pemerintah tentang RUU Susunan Pemda DKI Jakarta pada pasal 6 1976 kedudukan Jakarta sebagai ibukota RI apabila kedudukan disamakan dengan provinsi lainnya akan mengalami kendala karena Jakarta merupakan tempat menyelenggarakan kegiatan secara regional nasional dan internasional , maka RUU tentang susunan Pemda DKI sebagai Ibukota RI. Latar belakang RUU ini karena Jakarta mengalami pertumbuhan dengan cepat yang dilatarbelakangi oleh faktor historis lahirnya Budi Utomo, Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi. UU No. 1 Tahun 1956 UUD Serikat Pemerintah Ibukota Jakarta dijalankan oleh Walikota atas petunjuk Menteri Dalam Negeri, kemudian UU No. 1 ayat 1 tahun 1957 Jakarta sebagai Ibukota dan mulai Februari 1961 Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dalam Penetapan Presiden Pemerintah Jakarta Raya meliputi Daerah Kotapraja Jakarta Raya dikuasai oleh Presiden RI melalui Menteri I kewenangan Jakarta Raya melaksanakan kegiatan pemerintah pusat dan anggaran ditetapkan oleh pemerintah Agung. Maka mulai saat itu disebut DKI. UU No. 10 tahun 1964 tentang pernyataan DKI Jakarta Raya menjadi Jakarta Raya kemudian ditata dengan peraturan No. D.3/1/1/66 tentang pembentukan kota administrasi yang dikukuhkan N0 25 tahun 1978 ps 6 UU N0. 5 tahun 1974 Ibukota RI mengingat pertumbuhan penduduk dan lainnya. UU yang mengatur secara khusus adalah No. 2 dan No. 10 tahun 1974 sehingga timbul masalah karena sebagai daerah provinsi dengan otonomi khusus menghadapi tantangan secara kompleks karena wilayahnya terbatas tapi jumlah penduduknya tinggi sehingga perlu adanya sinkronisasi dari penanganan an penyelenggaraannya, maka DKI tidak dibagi menjadi Daerah TK II tetapi sebagai daerah otonomi khusus Tk I hal ini untuk tidak melahirkan otoritas lain tetapi untuk kesatuan pembinaan. DKI dibagi wilayah Kodya, gubernur dibantu 3 walikota dan wakil karena tugasnya banyak maka tidak memungkinkan untuk kelancaran kegiatan pusat di bidang politik, acara kenegaraan, pusat kegiatannasional, regional dan internasional, dan pembangunan kota maka gubernur minta petunjuk presiden dimana anggaran APBD dibantu dengan APBN. Side B: Laporan BKSKAP sebagai penasehat khusus DPR RI ke sidang Majleis PBB ke- 44 di New York tanggal 19-20 September 1990. Drs. Subagyo, dalam sidang tsb Menlu Argentina, Yosep en Garba menyetujui tentang Palestina dan Israel untuk dibahas dalam sidang Majleis PBB. Negara berkembang menjadi korban dalam ekonomi tentang hutang luar negeri, pemilu di Namimbria harus dilakukan secara demokratis agenda lain yang dibahas adalah: menyerukan semua anggota PBB dapat meratifikasi, masalah Timor Timur ke RI ditunda sampai 7 kali berturut-turut dimana Bawardiman dan Subagyo ditunjuk sebagai staf khusus. Selama di New York bersama Menlu Ali Alatas dan staf khusus serta anggota tetap melakukan kegiatan dengan hasil yang dicapai adalah: Ekuin mengadakan sidang khusus untuk komoditi utang luar negeri, aliran dana, narkoba, wanita dalam pembangunan, pengembangan SDM di bidang lptek, dan masalah Kamboja supaya statusnya merdeka.	Rapat Paripurna ke 24/III/1989-1990	Jumat, 9 Maret 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
47	Rapat Paripurna ke 24/III/1989-1990 Volume 2 Side A: Rapat pembahasan Tk I keterangan pemerintah tentang RUU Kepariwisata dan Tk II jawaban pemerintah tentang RUU wajib serah karya cipta dan karya rekam. Rapat dihadiri oleh 218 anggota dewan dari 3 fraksi. Menteri Pariwisata, Susilo Sudarman: Pembangunan pariwisata dengan mengembangkan potensi kepariwisataan untuk menghasilkan ekonomi guna mendorong kesejahteraan rakyat. Tanggal 29 Desember 1990 untuk pertama kalinya disampaikan RUU Kepariwisata guna memudahkan sektor pariwisata sebagai sektor devisa non migas yang setiap tahunnya selalu meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Pariwisata memanfaatkan sektor alam yang sudah ada hal ini akan memperkokoh jatidiri bangsa dan hubungan antar bangsa sebagai bangsa yang berbudaya. Alam merupakan potensi besar dari bahari untuk itu perlu dikelola dengan baik dan profesionalisme sehingga wisatawan dapat tertarik dengan alam dan budaya kita sehingga bisa dikenal diseluruh dunia. Side B: Sesuai Inpres No. 3 Tahun 1989 tentang kepariwisataan menjadikan Visit Indonesia setiap tahun diprogramkan melalui Sapta Pesona Pariwisata hal ini untuk menyerap tenaga kerja sehingga sektor non migas menjadi besar. RUU ini dirintis dari tahun 1974 melalui pertemuan-pertemuan sebelum dibentuk Deparpostel. Setelah tahun 1983 berdiri Deparpostel maka perlu penambahan materi melalui RUU membentuk tim dari pariwisata swasta dan melibatkan berbagai instansi. Kegiatan pariwisata memanfaatkan alam dan budaya sehingga menyerap tenaga kerja dan devisa non migas untuk itu perlu dibangun obyek wisata yang terakomodir dalam pasal 15 tentang keamanan dan ketertiban, pasal 19 tentang angkutan dan perhubungan, pasal 20 tentang pendidikan dan kebudayaan, dan pasal 33 tentang lingkungan hidup.	Rapat Paripurna ke 24/III/1989-1990	Sabtu, 10 Maret 1990	Suara Jelas
48	Side A: Jawaban pemerintah tentang RUU wajib serah simpan hasil karya cipta dan karya rekam. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 29 Januari 1990 usaha pengumpulan karya cipta dan rekaman dibuat RUU supaya pembangunan dibidang perpustakaan nasional dan daerah dapat berkembang karena dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas . Pengelolaan perpustakaan supaya dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara pengumpulan, pelestarian, pendayagunaan hasil budaya bangsa sehingga semua jenis terbitan dalam bentuk apapun dapat dikonsumsi masyarakat luas dan disimpan di perpustakaan pusat dan daerah untuk dapat didayagunakan. Side B: Materi karya cipta dan rekam pemerintah akan menyimpan setelah diserahkan. Lembaga Perpustakaan dapat melakukan kegiatan pelestarian dan penyimpanan hasil cetak dan karya rekam yang pembiayaannya dilakuka oleh pemerintah. Pembicaraan TK. II RUU Sumber hayati selesai tanggal 8 Maret 1990 dan RUU Serah dan Simpan selesai tanggal 10 maret 1990. Dalam rangka pemanfaatan landasan kerangka pembangunan dituntut untuk semakin memperkokoh solidaritas sosial nasional. Walau mencapai sukses di bidang pembangunan tetapi masih banyak yang hidup sulit. Ny. Fatimah Achmad, studi banding ke Australia, Malaysia dan Syaiful Sulun, H. J Naro dan Drs. Suryadi melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk mendengar aspirasi dan menampung keluhan masyarakat.	Tidak Ada judul	Sabtu, 10 Maret 1990	Suara Jelas
49	Rapat Paripurna ke 25/IV/1989-1990 Side A: Tidak Ada Suara Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 25/IV/1989-1990	Tidak Ada Tanggal	Tidak ada suara

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
50	Rapat Paripurna ke 25/ /189-1990 Volume 2 Side A: Laporan Menteri Muda Keuangan, pelaksanaan pembiayaan pembangunan irigasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, NTB dan pembangunan 6 bendungan di Jawa dan Kalimantan. Pembiayaan program rehabilitasi jalan , jembatan , rel KA, dan pengembangan kesyahbandaran disamping itu program pendidikan tingkat atas dan tinggi baik kejuruan maupun non kejuruan , gedung politeknik, laboratorium, program energi listrik, PLTU III dan IV di Belawan dan Tulungagung semua ini dibiayai dari tambahan anggaran. Pengeluaran rutin 17 triliyun 350 milyar untuk realisasi belanja pegawai, operasional, dan pemilu. Tabungan pemerintah 4 triliyun 351 milyar dan penerimaan pembangunan 5 triliyun 562 milyar. Ketua sidang membacakan susunan anggota pansusu yang ditentukan berdasarkan rapat paripurna untuk membahas RUU Konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang terdiri dari: Tambunan, Rangkuti, HE. marboen, Jamarisius, Hardoyo, R. Tubagus Hamsyah, Suwardjo Djoyohadisusno, Sutopo, Drs. Sudarmadji, Drs. Syarif Alkadri, Bambang Supangat, Indrajaya, Alam F, Dra. Ulfah HS Harmanto, Rapat ditutup. Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 25/ /1989-1990	14 Mei 1990	Suara Jelas
51	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Sidang dihadiri 304 anggota dari 3 fraksi untuk pembukaan masa sidang ke- 4 1990/1991 untuk membahas: pembukaan masa sidang ke- 4 tahun 1989/1990, pembicaraan Tk. I tentang RUU tambahan dan perubahan APBN tahun 1989/1990, penghitungan anggaran negara 1988/1989, pembicaraan Pansus ekosistem. Sidang untuk membahas 10 RUU al: RUU konservasi dan ekosistem, RUU wajib simpan karya cetak, RUU susunan DKI Jakarta, RUU Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah, RUU Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, RUU Kepariwisata, RUU PTUN di Jakarta, Medan, Ujung Pandang, dan RUU Perhitungan APBN. Side B: Ketua membuka sidang dan mengucapkan bela sungkawa kepada 3 dewan yang telah meninggal dunia dan mengangkat Sekjen DPR RI. Wakil Menteri Keuangan, Drs. Suryadi memberikan penjelasan tentang RUU Tambahan Keuangan untuk memenuhi ketentuankonstitusional Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1989 tentang Pendapatan dan anggaran belanja negara tahun 1990. UU ini disiapkan untuk setiap tahun anggaran sesuai strategi pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Repelita. Ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan minyak dan gas sehingga pemerintah berusaha meningkatkan sumber dana dari non migas terutama dari sumber-sumber pajak. Penerimaan pajak migas non igas mencapai sasaran karena perkembangan harga minyak dan gas, PPn, PPh, pajak ekspor mengalami kenaikan hal ini bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Hal ini untuk memberi semangat kerja aparatur negara serta biaya operasional peningkatan subsidi bahan bakar minyak karena melonjaknya harga minyak di dunia menyebabkan biaya rutin meningkat menjadi 220 milyar. Repelita memberi batasan dan petunjuk dalam pembiayaan Repelita seperti pertamina, pariwisata dll. 39 % dibiayai pelaksanaan pembangunan dari tabungan pemerintah dan utang luar negeri.	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990	14 Mei 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
52	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 2 Side A: Rapat dihadiri oleh 324 dewan untuk melaporkan hasil kerja komisi-komisi pada masa reses. Ir. Umbu Mehangkunda dari Komisi IV, melaporkan hasil kunjungan ke Bengkulu, Maluku, NTT pada tanggal 12 - 18 Maret 1990 pada obyek kehutanan, pertanian, transmigrasi, dan perorangan. Produksi pangan di Maluku mengalami peningkatan 4,5 % untuk perbaikan gizi dan swa sembada pangan karena pembangunan irigasi, penyediaan bibit pertanian, dan penyuluhan pertanian. Perkebunan: Intensifikasi kapas di NTT mengalami peningkatan sehingga pemerintah menyediakan pabrik kapas di Kabupaten Sika yang dikelola oleh PTP VI tetapi lama kelamaan mengalami penurunan karena animo masyarakat untuk menanam kapas berkurang disebabkan harga kapas rendah, kesulitan kredit, hama, lahan sempit, dan tata laksana. Perikanan di Maluku meningkat di P. Obi karena melimpahnya hasil tangkapan menimbulkan harganya murah. Anggota dewan menyarankan adanya pabrik pengolahan ikan dan colstored. Di Bali dan NTT nelayan mendapat kredit perahu dari pabrik pengolah ikan "Mintarko Raya" sehingga menyerap tenaga kerja. Dinas Pertikanan di Bengkulu menyediakan sarana diklat sehingga peternak udang dan bandeng bisa mengembangkan perikanan ikan baronang dan kepiting sehingga mendatangkan investor dan adanya pabrik yang dikelola oleh BUMN sehingga menyerap SDM . Peternakan sapi, kerbau, dan kuda serta ternak potong yang didampingi oleh penyuluh di NTT sebagai sumber penghasilan. Kehutanan industri kayu di Maluku dan Irian Jaya dikelola oleh PT. jayanti Group sehingga produksi kayu lapis dan gergajian untuk memenuhi daerah tsb. Komisi IV mendukung adanya reboisasiyang dilakukan oleh PT. jayanti Group untuk kesejahteraan rakyat. Side B: Hutan di NTT produktivitasnya rendah karena hanya 10 % sisanya berupa ladang tapana sehingga kebutuhan kayu tidak terpenuhi. JPerum Perhutani Jawa Timur melakukan reboisasi dengan sistem tumpang sari . Lahan kritis di Yogyakarta dan Jawa Tengah di aliran sungai Opak, Progo, Comal, dll. Transmigrasi di Maluku didatangkan dari P. Jawa dengan pola tanaman pangan dan nelayan tetapi daerahnya belum terpenuhi air bersih sehingga banyak yang pergi menjadi buruh di kta hal ini disebabkan pengolahan lahan yang dipaksakan. Transmigrasi di NTT, Irian jaya, Sul Sel, Kal Tim, dan Kalsel banyak yang berhasil tetapi kantor transmigrasi di NTT masih ngontrak di rumah penduduk. Peninjauan ke Timor Timur pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik sesuai GBHN. Pembangunan rel KA untuk mengangkut batubara, dan semen Indarung sering terkendala karena tanah longsor dan dewan menyarankan pembaharuan kereta api karena usianya sudah tua. Pelabuhan Telukbayur dan lapangan terbang Tabing perlu dikembangkan pembangunannya untuk mendorong ekspor non migas Sumatera Barat . Dinas Perhubungan LLAJR di Riau untuk jembatan tibang perlu ditambah dan pembangunan pelabuhan perintis untuk menanggulangi penumpang. Fasilitas pelabuhan di Batam perlu dikembangkan tentang keselamatan penumpang dan barang karena asal wisatawan dari Singapura meningkat. Pelabuhan di Banyuasin, Sumatera Selatan sudah mengalami kedangkalan maka perlu dilakukan pengerukan. Pelabuhan Luwuk di Sulawesi Tengah perlu dilakukan pembangunan untuk melayani kapal perintis.	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990	29 Mei 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
53	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 3 Side A: Proyek pembangunan jalan Padang Baypas sepanjang 22 Km perlu dibebaskan untuk kota Padang yang dibiayai oleh pusat sedangkankan pelaksanaan pembangunannya oleh daerah dengan biaya 15 milyar. Junarso, biaya ganti rugi hanya untuk tanaman dan bangunan. Pembangunan irigasi di Riautersebar di 5 kabupaten. Permasalahan yang ditemui anggota dewan adalah belum semua tanah diolah menjadi sawah sehingga irigasi kurang bermanfaat. Pembangunan jalan akan dibuka di lintas Timur untuk memperpendek jarak tempuh dan mengaktifkan jembatan timbang yang ramai dilalui. Pembangunan jalan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dimana masyarakatnya rela tanahnya dibangun jalan. Pembangunan jembatan di Kalimantan Selatan dari jembatan kayu diganti jembatan beton. Pembangunan jalan di NTT perlu tambahan dana . Parpostel, banyaknya wisatawan dari Belanda ke Sumatera Selatan dan Batam, maka perlu daerah tsb dikembangkan dan kendalanya adalah modal untuk mengembangkan pariwisata. Pembangunan telekomunikasi terhambat karena prosedur pabean, tanah mahal, pelelangan dan DIP terhambat. Side B: R. Budi Winarno, anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Barat. balai latihan kerja di Palu, kerajinan dan industri di Donggala nihil. Anjloknya harga timah mencapai 50 % karen tidak biasa operasi tambang timah dan kurangnya peralatan sehingga mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Karena tambang timah mengandung radio aktif maka perlu diolah dengan baik dan reklamasi pantai untuk pelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan. Bahan baku produksi krakatau steel sehingga mendatangkan dari luar negeri. Perlunya pengawasan standar industri bahan baku dari PT. Tunas Inti. Karena masyarakat Sulawesi Selatan memerlukan banyak BBM maka perlu ditingkatkan produksinya dan penggunaan listrik di Palu sangat tinggi karena perkembangan industri.`	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990, Vol. 3	29 Mei 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
54	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 4 Side A; Suwardi Wirya, kegiatan TVRI sudah menjangkau pelosok misalnya di Sumatera Timur. TVRI tayangannya lebih bagus dari pada Malaysia tetapi RRI kalah dengan siaran dari luar negeri yang sudah ada 8 stasiun. Kegiatan keamanan yang dilakukan ALRI masih kekuarangan sarana kapal untuk operasi keamanan laut dimana banyak nelayan luar negeri yang mencari ikan di perairan Indonesia untuk itu perlu penambahan SDM ALRI , bea cukai, dan kelauatan. Aparat penerangan mobil banyak yang rusak sehingga perlu diberi mobil untuk operasi penerangan dan klopencapir tentang produksi da perdagangan . Komisi II dalam kunjungannya ke Medan menemui adanya program pembauran warga di Medan dan banyak sengketa tanah di perkebunan hal ini perlu segera diselesaikan oleh Komisi IV dimana hutan di Simalungun sedang memperluas areal hutan yang dilakukan oleh PT. Indorayon. Pariwisata di Batam, dimana kapal Feri tujuan Belawan- Pangkal Pinang dihentikan karena sedikit wisatawan yang datang dan kondisi Istana Deli, Medan memprihatinkan untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi dan pemindahan lapangan terbang Polonia karena jauh dari Ibukota Medan. Side B: HS. Amini, SH, laporan hasil kunjungan anggota dewan ke daerah Tk. I Jawa Timur , Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Otonomi daerah Tk. II mulai dilakukan oleh Pendapatan Dinas PU dan Dinas Pertanian. Pemekaran wilayah untuk mempermudah pelayanan. Denpasar menjadi Kodya karena sudah memiliki BAD, gedung DPR dll.LKMD terhambat karena dana untuk demokrasi desa perlu diperhatikan melalui Banpres yaitu penggantian kepala desa melalui pemilihan untuk mencerdaskan masyarakat dan perlu peremajaan dan untuk lurah dicarikan dana dari PBB. Kondisi nelayan di Pasuruan masih rendah ekonominya, pembangunan inpres kesehatan , jala, sekolah di daerah tsb terhambat karena dana dari pusat terhambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Kepala Daerah Malang menyetujui penggunaan tanah garapan oleh rakyat dan tanah di Batam seluruhnya belum ada HTL untuk itu perlu dilakukan pendataan untuk memenuhi keinginan rakyat. pendaftaran ulang ex anggota PKI untuk menghadapi pemilu. Moh Roem, penegakan hukum korupsi, eksekusi perkara, imigrasi, pembinaan dan pemasyarakatan, dan bantuan biaya perkara. Penegakan hukum di Riau yang berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia. Sarana perhubungan belum lancar sehingga penegakan hukum terhambat dan biaya perkara sangat tinggi sehingga banyak tunggakan perkara baik pidana maupun perdata. Polri sebagai ujung tombak Kuhap tapi Polri hanya sedikit yang dapat menyidik perkara untuk itu perlu diadakan pembinaan hukumuntuk Polri yang menyulitkan dalam pelaksanaan KUHAP.	Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990	Selasa, 20 Mei 1990	Suara Jelas
55	Rapat Paripurna ke 26/Lj.IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Moh Roem, Terbatasnya ruang untuk pemeriksaan perkara di Polda Riau perlu dilakukan perluasan bangunan. 30 % yang terselamatkan dari perkara korupsi dari SPJ fiktif dan penyelundupan sebagian dapat diselamatkan. Hasil perkebunan, perikanan dipasarkan di Singapura untuk dijual kemudian membeli kebutuhan pokok sehari-hari serta barter di tengah laut. Penasehat hukum tempat tinggalnya di propinsi sedangkan perkara ada di daerah sehingga memerlukan biaya tinggi hal ini berpengaruh oada membengkaknya perkara . Untuk pengawasan imigrasi di wilayah pulau dan daratan di Riau perlu penyempurnaan administrasi imigrasi. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 26/Lj.IV/1989-1990	Selasa, 29 Mei 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
56	Rapat Paripurna ke- 26 (Lj)/IV/1989-1990 Voume 2 Side A: Laporan Tengku Haji Gazali Amna, Drs. Ukun Suryawan, Aminulah Adiwilaga (komisi X), Drs. Sutikno (Komisi APBN), Martin Balalembang (Komisi VII). Laporan kunjungan kerja bidang kesehatan, sosial, peranan wanita, BKKBN. Masa reses 1989/1990. Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Dati I di Indonesia, Sumatera Utara. kesehatan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit di Ujung Pandang sebagai rumah sakit rujukan, pendidikan, penelitian sehingga dapat berguna bagi masyarakat rumah sakit ini letaknya dekat dengan Rumah Sakit rujukan untuk itu harus dipindahkan salah satunya. RSUP di Sulawesi Selatan pembuatan baru Puskemas, RSU Ulin Banjarmasin lahan kurang mendukung karena rawa tanahnya dan lingkungan kurang sehat, rujukan belum berjalan baik dan beban kerjanya sangat tinggi untuk itu perlu perubahan. Rumah Sakit Umum di Medan, pembangunan fisik terhambat termasuk obat-obatan banyak didatangkan dari luar, peningkatan biaya operasional sehingga kurang mampu mengelola rumah sakit tersebut. Jumlah para medis belum sesuai bila dibandingkan dengan jumlah pasien. Bangunan bekas Belanda tersebut perlu di renovasi karena sudah tua. Bantuan peralatan Luar Negeri kurang karena kesalahan teknis. Pengadaan obat-obat murah/ generik sudah hampir ke daerah, tetapi kendala pengadaan kurang dan sulit diperoleh. Adanya perbedaan pelayanan askes dan umum karena dana sehingga SBBO dihentikan. Dokter ahli kurang ehingga perlu di realisasi. Penanganan suku terasing di Riau kurang berhasil pembinaan oleh Epartemen Sosial, Dep. pertanian, PU, Deptran, dan Depdagri baru mencapai 19% yang berhasil dipemukimkan. Dana pembinaan tidak dapat diperoleh sesuai dengan dana yang dialokasikan. Pemukiman kembali suku Tabalang di Kalimantan Selatan setiap kepala keluarga dapat rumah, alat pertanian, tanah tapi tanah yang ditempati kurang air sehingga masih masuk hutan. Penanganan bencana alam dari laut dapata rumah, tanah tetapi belum ada tenaga penyuluh pertanian dan perikanan, sekolah jauh dan rumah sudah banyak yang rusak. Penempatan satgas sosial adalah pendamping suku terasing pembentukan karang taruna di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan sudah ada tetapi tiddak unya usaha karena kurang dana perlu lintas sektoral agar dapat punya usaha sendiri. Perlu banyak sekolah SD dan Puskesmas. Side B: Peranan wanita menunjukkan peningkatan di Sulawesi Selatan, Klimantan Selatan seperti PKK, KOWANI, BKW, kurang tenaga untuk perencanaan administrasi ehingga perlu adanya kerjasama dengan universitas. Daerah transmigrasi, terasing, terpencil khusus mendapatkan bantuan KB untuk mempercepat program KB mandiri untuk itu perlu dilibatkan ulama, institusi. Pengadaan tenaga PLKB perlu dilakukan untuk menanggulangi penyuluhan KB. Program KB dapat menekan jumlah penduduk. Pembinaan suku terasing perlu ditingkatkan. Drs. H. Ukun Suryaman (komisi IX). Laporan kunjungan kerja Irian Jaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Selatan, Jambi, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Kunjungan kerja sesuai Surat Keputusan Badan Musyawarah DPR RI. TK, D, SMP, SMA, PT. Peninggalan Purbakala. Perkembangan pendidikan di Jawa meningkat tetapi untuk gedung sekolah perlu direhabilitasi mengingat adanya bencana angin puyuh untuk daerah pedalaman karena jauh. Pembatasan tugas antara Dinas P&K , Kanwil untuk itu setiap kecamatan	Rapat Paripurna ke-26 (Lj)/IV/1989-1990	Rabu, 30 Mei 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
57	Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/IV/1989-1990 Volume 3 Side A: Drs. H. Ukun Suryawan, Program penyerataan guru SD yang akan dilakukan oleh Universitas Terbuka perlu dipikirkan dan program penyerataan usaha mandiri di Universitas Malang perlu dipantau untuk mengetahui sejauhmana keberhasilannya. Peninggalan purbakala seperti candi-candi banyak yang perlu diawasi pengelolaanya mengingat banyaknya orang yang menjual benda purbakala. Pembinaan olahraga perlu ditangani secara organisasi. Kurang merata penempatan guru agama di Jawa Tengah, Irian Barat, Sulawesi Selatan dan kepulauan lainnya perlu segera direalisasikan. Perbaikan rumah ibadah cepat ditangani dan Jemaah umroh ada yang menjadi TKI perlu ditertibkan serta aliran agama Kong Fu Chu diserahkan kepada Dirjen Agama. Calon guru pria harus lebih banyak dari pada wanita supaya siap ditempatkan di daerah terpencil yang akan dibangun gedung SD dan adanya SMP terbuka untuk golongan tidak mampu. Drs. Aminulah Adiwilaga dari Komisi X, Bapeda di NTT belum berfungsi sesuai yang diharapkan untuk itu perlu ditingkatkan melalui diklat, pembangunan gedung, tenaga ahli, dan konsultan pembangunan. Perencanaan pembangunan di NTT perlu direncanakan dengan bertumpu pada kemampuan supaya mendapat bantuan konsultan dengan biaya dana dari luar negeri dengan meningkatkan sarana fisik. Pada Repelita V mamasukki tahun ke- 2 sejak UU No. 4 tahun 1986 tentang analisis dampak lingkungan peraturan pelaksanaannya perlu ditangani dengan baik ditangani oleh Amdal dan KLH tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan secara optimal karena perbedaan birokrasi yang kurang memahami tentang amdal. Side B: Drs. Aminulah Adiwilaga, lahan kritis di NTT meningkat 10,6 % sehingga perlu Inpres penghijauan melalui hutan tanaman industri. Peningkatan konservasi lahan untuk penghijauan adanya embung-embung air perlu ditingkatkan. Habitat binatang komodo perlu diobservasi untuk kepentingan pariwisata mengingat binatang tsb sudah langka. Prokasih kerjasama dengan 46 perusahaan untuk mengolah air limbah guna mentaati lingkungan hidup. Masyarakat diberi bekal pendidikan kesehatan dengan bekerjasama dengan LSM melalui penyuluhan hidup sehat lingkungan bersih. NTT perlu diteliti mengingat daerah tsb kering, daerah kritis dan jenis tanah tidak subur karena kemiringannya sehingga banyak sawah tadah hujan. Pemerintah mendorong Universitas Cendana untuk mengembangkan penelitian daerah NTT. Pemanfaat. Pemanfaatan tenaga surya yang dilakuka oleh BPPT bekerjasama dengan Jerman barat untuk mendapatkan air bersih di daerah Kupang, Sumba Barat dan Sumba Timur. Penyediaan listrik di Jawa Tengah menggunakan tenaga nuklir dengan PLTN tetapi masyarakat sekita mengkhawatirkan bahaya yang ditimbulkan PLTN. Penelitian statistik dampaknya karena dana, data, SDM terbatas sehingga mutunya kurang baik dan tingkah laku responden karena perusahaan kurang terbuka dalam memberikan informasi untuk itu perlu ditinjau kembali UU Statistik NO. 7 tahun 1960 karena peta rupa bumi, tematik, klimatologi belum dimiliki oleh daerah kecamatan.	Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/IV/1989-1990	Rabu, 30 Mei 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
58	Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/IV/1989-1990 Volume 4 Side A: Drs. Sutikno dari Komisi APBN, Pendapatan tahun 1989-1990 pada Pelita IV direncanakan dari PBB dan minyak gas bumi. Hambatan pembangunan di Irian Jaya adalah tanah adat, harga mahal untuk itu Kanwil di Irian Jaya diberi kewenangan untuk merubah DIP. Bank meningkat dan pergerakan dana milik masyarakat untuk pembangunan 10,3 %, kredit macet 12,9 % dari total kredit hal ini karena kelemahan pengawasan debitur. Korupsi mengakibatkan kerudian negara 200 juta. Jalan daei Merauke - Timika penuh dengan hutan . Perkebunan sawit perlu ditopang dengan adanya perusahaan Minyak sawit untuk mengolah dan untuk meningkatkan PAD dari PT. Frepot perlu adanya peraturan pembanguna untuk devisa negara. Perlu adanya investor dari luar untuk memajukan Irian jaya dan pembangunan pendidikan, perhubungan dan untuk penanganannya tidak seperti daerah lain karena latar belakang daerah. Di Timor Timur PAD nya kecil hanya dari ikan sedangkan di NTB PAD 5 Milyard 337 juta ini sangat kecil dari dari non pajak. Pendapatan masyarakat masih kecil dan kepatuhan membayar pajak 93 % tidak ada peta , batas desa, letak geografis . Pembangunan proyek karena pimpro di Jakarta dan kemampuan SDM terbatas sedangkan untuk pengembangan pertanian mendapat bantuan dari Bank Dunia. penyediaan bibit sapi dari Australia realisasi 37 % angka kematian bibit sapi 11 % sehingga SDM tidak terserap . Pembangunan bendungan Sutami untuk irigasi belum dimanfaatkan sepenuhnya dan pembangunan rumah sakit di Kabupaten Ende perlu dilakukan karena mengalami kerusakan. Bali PADnya 18 Milyard 380 juta (80,4 %) penerimaan negara 62 milyar 80 juta mengalami kenaikan 16 % dari pariwisata. kebutuhan daerah Bali terhadap pegadaian positif tetapi lemah di pengawasan. Side B: Kalimantan Selatan PAD nya 8,5 % temuan pada kelemahan adminisitrasi. Martin, Daerah Ternate yang dihasilkan kayu lapis, nekel, pala, coklat, dan ikan. Pinjaman KUK maksimal Rp 200.000 untuk masyarakat belum jalan karena tenaga Bank belum disiapkan untuk menangani KUK. Eksport ikan mengalami kenaikan `1, 15 % harena harga ikan tertinggi dan dari mutiara 22 %.	Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/IV/1989-1990	Rabu, 30 Mei 1990	Suara Jelas
59	Rapat Paripurna ke 27/IV/1989-1990 Volume I Side A: Martin Balalembang dari Komisi VII, pemasangan rumpon untuk meningkatkan pendapatan perikanan oleh PT. Husasa Mina dan nilai ekspor kayu lapis dan gergajian . Eksport cengkeh di Maluku mencapai 4000 ton tetapi harganya selalu merosot untuk itu perlu pembentukan KUD untuk membeli cengkeh rakyat sehingga perkembangan koperasi dan non KUD meningkat. Puskud di Ambon dan Ternate kurang tenaga penyuluhan dan koperasi kurang tenaga administrasi. Dolog di Maluku mensuplai beras untuk keperluan daerah Maluku dan Ternate melalui angkutan laut termasuk gula. Karena Indonesia merupakan wilayah seribu pulau maka harus berwawasan kelautan sehingga perlu menambah armada laut dan landasan lapangan terbang perlu diperluas untuk mengangkut hasil laut melalui udara . Pembangunan di P. Searm setelah Pelita III tidak selesai menimbulkan pertanyaan. Angka inflasi di Maluku tinggi , harga kebutuhan hidup tinggi untuk itu perlu perhubungan darat, laut, dan udara untuk menyeimbangkan pendapatan dan kebutuhan. Perhatian pemerintah terhadap koperasi perlu ditingkatkan dan perlu diberi tunjangan kemahalan serta simpan pinjam untuk masyarakat. Side B: Kebutuhan hidup di Ambom sangat tinggi karena telur didatangkan dari Surabaya. Pola tata niaga eksport pala dan coklat tetapi faktor kendalanya adalah alat transportasi. 31 jenis eksport naik 47 % akibat deregulasi dan debirokrasi pemerintah. Side B :; Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 27/IV/1989-1990	Rabu, 30 Mei 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
60	Rapat Paripurna ke 27/IV/1989-1990 Voume 2 Side A: Mendagri (Rudini), dalam pemandangan umum Anggoota TK II RUU Ibukota Jakarta No. R/07/PU/XII/1989- 7 Desember 1989. Pembangunan masuk RUU Ibukota Jakarta No. 15/5/1990 oleh Mendagri disampaikan di depan DPR. Pembicara TK II. Drs. H. Hasanudin (Golkar), Rudiyanto (ABRI), Kun Solehudin (PPP), Adi Pranoto (PDI). Drs. H. Hasanudin - sejarah ibukota Jakarta Raya UU No. 1/1960 RIS No. 20 tahun 1950 dijalankan oleh Walikota. Pemerintah dijalankan UU No.20 tahun 1956. 2. Status Kota Praja di pertahankan oleh UU No. 1 tahun 1957. 3. Setelah dekrit 1959 ada 2 keputusan: a. Penetapan presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintah DKI Jakarta menjadi Jakarta Raya menjadi Ibukota Jakarta diberi daerah khusus Ibukota sehingga diatur dalam UU mengemban 2 fungsi. Landsan Idil-Pancasila, Landasan Konstitusioanal- UUD 1945. Jakarta harus tampil menjadi Kota metropolitan yang mencerminkan citra dan masyarakat Indonesia mempunyai kultur kebudayaan dimata masyarakat dunia. Untuk itu perlu dikembangkan dengan BMW- Bersih, Manusiawi, Berwibawa. Jakarta diberi status harus memberi pelopor dengan susunan pemerintah yang khusus. UU No. 5 tahun 1974 sudah memberi arah untuk itu perlu ditekankan tingkat kekhususan bidang apa saja dalam peran serta pembangunan untuk itu perlu ditekankan tentang kekhususan karena perkembangan pendidikan, dll harus ditangani secara khusus. side B: Untuk mendewasakan masyarakat yang tersebar tidak digunakan otonomi daerah yang nyata-nyata bertanggungjawab yang seluas-luasnya karena akan mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kecenderungan penukaran yang membahayakan bagi keutuhan Republik Indonesia UU No. 5 No. 1974. PSII ayat 1- titik berat otonomi daerah diutamakan pada daerah TK II karena DKI tidak punya TK II dimana otonomi tersebut dilaksanakan pada seharusnya menampang kepesatan DKI. DKI tidak dibagi-bagi ke wilayah TK II karena memberi percepatan pelayanan masyarakat dan pengambilan keputusan. Fungsi khusus DKI - sesungguhnya konsekuensi sebagai Ibukota Republik Indonesia sampai menjadi pelayan pemerintah pusat disamping sebagai pelayan masyarakat. side B: Untuk mendewasakan masyarakat yang tersebar tidak digunakan otonomi daerah yang nyata bertanggung jawab seluas-luasnya karena akan mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kecenderungan penukaran yang membahayakan bagi keutuhan RI UU No. 5 No. 1974psi 11 ayat 1. Titik berat otonomi daerah di TK II karena DKI tidak punya TK II dimana otonomi tsb dilaksanakan padahal seharusnya menopang kepentingan DKI. DKI tidak dibagi2 ke wilayah TK II untuk memberi percepatan pelayanan masyarakat dan pengambilan keputusan. Fungsi khusus DKI - sesungguhnya konsekuensi sebagai Ibukota RI samapai menjadi pelayan pemerintah pusat sedangkan harus sebagai pelayan masyarakat. Pertanggungjawaban gubernur kepada presiden pada pasal 10 ayat 1 RUU DPR anggota dewan minta penjelasan karena gubernur setingkat menteri dan penyelenggaraan pemerintah dibebankan ke APBN bukan ke APBD. Rudiyanto dari Fraksi ABRI, dinamika pembangunan semakin pesat dan DKI menuntut adanya kemajuan dalam pelayanan yang keinginanya beragam. 60 % uang beredaar di Jakarta karena pusat pemerintahan dan pusat pengambilan keputusan sehingga perlu adanya pengaturan Jakarta sebagai fungsi kedaerahan dan Jakarta harus dapat memberikan pelayanan. Hal yang menjadi pemikiran dewan adalah: Hakekat	Rapat Paripurna ke 27/IV/1989-1990	Selasa, 5 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
61	Rapat Paripunar ke 27/ IV / 1989-1990 Volume 3 Side A: Kun Solahudin dai Fraksi PPP, Jakarta harus dikembangkan menjadi ibukota baik yang berkaitan dengan transportasi, pemukiman, industri, dan kegiatan pemerintahan. Harus tampil seefisien mungkin dan memudahkan pelayanan. Tata ruang harus dikaji sungguh-sungguh. Jakarta tidak perlu diberi daerah khusus karena sudah menjadi ibukota negara dan mendapat kekhususan . Pengaturan wilayah ibukota perlu penataan ruang yang baik dan tepat serta beban beban walikota non otonomi telah disetujui presiden dan Fraksi PPP memahami karena gerak pembangunan wilayah Jakarta sebagai khusus ibukota mencakup banyak kegiatan baik nasional maupun internasional tetapi Fraksi PPP ingin mengetahui sejauhmana peranan Mendagri , bagaimana posisi daerah DKI, bagaimana legitimasi rencana induk yang dimiliki untuk tahun 1995 -2005 sesuai pasal 11 ayat 1 apakah harus ditata kembali. Side B: Adi Pranoto dari Fraksi PDI, Susunan DKI aturanya sama dengan provinsi lain yang mengatur otonomi tetapi UU Psl 5 tahun 1974 bahwa mengingat perkembangan dan pertumbuhan wilayah DKI disesuaikan dengan ketentuan ternyata dalam pasal tsb sampai sekarang belum ada. Saat UU dibuat jumlah penduduk DKI tahun 1989 5,9 juta dan setiap tahunnya bertambah banyak. Titik berat otonomi pada pasal 11 ayat 1 dimana daerah TK II sebaiknya Kodya dan DKI punya walikota tetapi tidak punya DPRD Tk II semua berpusat pada gubernur sebagai Kanwil yang langsung kepada gubernur sehingga kekuasaan tidak berpusat ke gubernur tetapi ke walikota. Hal ini wewenang bisa tersebar ke walikota sehingga menjadi konkrit pada tahun 2005. UU No. 74 sudah 16 tahun titik berat otonomi pada Tk I dan kewenangan walikota ditambah sepanjang tidak menyangkut masalah militer dan kenegaraan.	Rapat Paripunar ke 27/ IV / 1989-1990	Selasa, 5 Juni 1990	Suara Jelas
62	Rapat Paripurna Ke 28/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Dalam rangka memberikan kebutuhan pelayanan Pemda DKI membentuk Dinas-dinas daerah masih tumpang tindih dalam memberikan pelayanan. Misal: Telp, perhotelan, air minum, PLN hal ini perlu dijelaskan oleh Mendagri. Proklamasi, Pancasila, UUD 1945 lahir di Jakarta pada HUT RI sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pemerintah diminta ada 5 wilayah perlu penjelasan pemerintah sesuai dengan RUU tentang susunan Pemda DKI Jakarta. Sidang ditutup oleh Ketua sidang. Side B: Tidak ada Suara	Rapat Paripurna Ke 28/IV/1989-1990	Selasa, 5 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
63	Rapat Paripunar ke 28/ IV/1989-1990 Volume 2 Side A: Rapat dibuka oleh Ketua pembicara Tk II RUU pembentukan Kabupaten Tk II Halmahera Tengah dan Kodya Bitung. Alexander Wenas dari Fraksi PDI, pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah atas aspirasi Halmahera tahun 1962, Provinsi Irian Barat yang berasal dari Kawedanan Tidore dan Weda dikembalikan ke Maluku bukan ke Maluku Utara . Pada tanggal 13 Juni 1967 daerah ex Irian Barat perjuangan dijadikan daerah Tk. II hal ini sesuai dengan sejarah, akar, dan aspirasi yang tidak bisa dipisahkan . Wilayah Kesultanan Tidore dikembalikan menjadi Tk II. Untuk wilayah Bitung atas aspirasi masyarakat Bitung sebagai kota administratif I di Sulawesi Utara walau sehari-hari kota administrasi tetapi kegiatan administrasinya semakin meningkat. Berdasarkan kemajuan yang berkembang pada tanggal 16 September 1983 Surat Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan Dati Tk II Bitung menjadi Kota Madya. Golkar berjanji atas pemekaran Halmahera Tengah dan Bitung tetap diperjuangkan dan pada tanggal 15 maret 1980 kedua daerah tsb menjadi janji pemerintah dan dibahas oleh anggota dewan dan merupakan produk yang I tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Setelah mendengar sikap pemerintah maka anggota dewan dari Golkar berpijak pada Pancasila sebagai azas negara memantapkan pemekaran di daerah untuk meningkatkan operasional GBHN. Side B: Adolf Yopi Sondag dari Fraksi Golkar, sependapat dengan pemerintah karena erat hubungannya dengan politik will supaya perkembangan dapat dilaksanakan secara merata. Untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah Tk II sangat penting untuk pembinaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai UU NO. 5 tahun 1974 supaya dapat memberikan pengayoman dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Yang dipertanyakan Dewan adalah: kesamaan aturan pada hal yang satu otonomi Tk II dan Tk I, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kodya Bitung ada 9 urusan pemerintah yang selama ini dilayanani oleh dinas-dinas termasuk perikanan dan kehutanan. Bitung terdiri dari 3 kecamatan mengapa yang 2 kecamatan tidak diajukan? Untuk menetapkan batas wilayah Halmahera Tengah berhadapan dengan Lautan Teduh harusnya Mendagri menyebutkan pada pasal 6 ayat 3 tetapi tidak ada. Masa jabatan kepala daerah Bupati, Walikota, dan DPRD masa jabatannya. Muhamad Isnaen mahmud dari Fraksi ABRI, 2 RUU sudah ditunggu-tunggu oleh daerah masing-masing untuk melaksanakan otonomi daerahnya yang tujuannya untuk memberi wadah daerah ybs untuk mengatur sendiri dan mengelola daerahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Hubungan fungsional perlu ditata kepala daerah dan DPRD untuk menyerasikan perlu dikoordinasi antara aparatur negara dan masyarakat dapat diayomi. Batas wilayah perlu diperjelas disertai koordinasi antara fungsional Halmahera dan maluku Utara.	Rapat Paripurna ke 28/ IV/1989-1990	Rabu, 6 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
64	Rapat Paripurna ke 28/IV/1989-1990 Volume 3 Side A: Halmahera Tengah telah mempunyai SDM yang baik wilayah Soa Siu tetap sebagai ibukota Kabupaten Halmahera Tengah. Apa ada rencana untuk menarik anggota DPRD dari Minahasa untuk mengisi jabatan yang kosong untuk Halmahera Tengah. Kemas Badarudin dari Fraksi PPP, pembentukan otonomi 2 daerah tsb sangat ditunggu untuk memacu pembangunan daerah di bagian Timur karena sumber daya laut belum banyak yang diolah dan daerah-daerah ini menjadi sengketa antara Irian Barat - Maluku - Timor Timur. Halmahera posisinya strategis karena saat pembebasan Irian Barat daerah ini menjadi daerah perjuangan yang wilayahnya dibawah Kesultanan Tidore. Tanggal 15 April 1969 Halmahera Tengah sudah mengatur daerahnya sendiri dengan ibukota Soa Siu yang berada di P. Tidore dimana wilayah tsb kecil. Dengan adanya Halmahera Tengah maka daerah Maluku akan terpecah-pecah. Kota Bitung dalam melaksanakan tugas menyamai dengan daerah Tk. L. Bitung sebagai kota pelabuhan, pangkalan T Side B: Alexander Wenas dari Fraksi PDI, tanggal 7 Desember 1986 sesuai amanat presiden tentang pembentukan RUU Halmahera Tengah dan Bitung. Kemauan yang keras untuk mewujudkan Halmahera Tengah menjadi daerah TK II atau daerah era perjuangan Irian Barat. Kantor Dinas di Soa Siu menjadi Dinas jawatan yang keberadaannya di rumah kediaman Bupati dan DPRD mendapat perhatian dari Pemda yang kewajibannya mengemban amanat rakyat dan kedudukan bupati tidak dapat karena belum ada DPRD. Pengangkatan DPRD paling sedikit 3 orang bertempat di tinggal di daerah pemekaran. Bitung dari daerah Tk II menjadi Kodya adalah wajar dan selaras. pemekaran desa dan pemecahan wilayah sudah diatur. Bagaimana pengangkatan administrasi pegawai pemerintah dan gedung pegawai apakah pegawai kelurahan ada di Bitung. Sumber pendapatan di Bitung dari pajak, bagi hasil bukan pajak, sumbangan dll dengan jumlah anggaran ini Bitung dapat mandiri. Pemda dikepal oleh Kepala Daerah dan DPRD sehingga penyelenggaraan Pemda dilakukan oleh kepala daerah yang memimpin eksekutif dan DPRD yang bergerak di bidang legislatif. Kepala daerah sebagai kepala daerah otonom fungsinya sebagai kepala wilayah yang menyelenggarakan pemilu dan mendapat kepercayaan dari masyarakat di daerahnya. Dewan menyarankan untuk memperhatikan UU No. 5 tahun 1974 tentang peraturan pemerintah daerah. NI, pangkalan minyak, terdapat 4 pabrik pengalengan ikan, pengolahan kayu. Posisi kota Bitung akan menjadi kota terbesar di wilayah Timur.	Rapat Paripurna ke 28/IV/1989-1990	Rabu, 6 Juni 1990	Suara Jelas
65	Rapat Paripurna ke 29/ IV/ 1989-1990 Volume 1 Side A: Alexander Wenas dari Fraksi PDI, anggota dewan dari Fraksi PDI menyetujui dengan anggota DPRD sejumlah 22 orang setiap fraksi kurang 3 orang diangkat bukan dipilih dengan ketentuan UU No. 5 Pasal 25 tahun 1985 dengan tempat tinggal di wilayah Bitung daerah Tk II dan disediakan gedung untuk DPRD. Sidang ditutup oleh Ketua. Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 29/ IV/ 1989-1990	Rabu, 6 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
66	Rapat Paripurna ke 29/ IV/ 1989-1990 Volume 2 Side A: Untuk membicarakan RUU Kepariwisata tingkat II yang diajukan oleh pemerintah yang disampaikan oleh Yupito dari Fraksi ABRI, Karena selama ini belum ada produk hukum yang memayungi kepariwisataan maka anggota dewan menanggapi dengan baik untuk menyambut tahun pariwisata yang bisa mendatangkan devisa dari sektor non migas. Ini dapat mengatur tanggung jawab dan fungsi serta peranan kepariwisataan. RUU ini mendapat tanggapan positif dari kalangan swasta maupun dari mahasiswa untuk mengatur tentang kepariwisataan karena perkembangannya sangat pesat di Asia Pasifik sehingga secara dini kita sudah menyiapkan aturannya. Pembangunan pariwisata dapat menciptakan kesenjangan sosial yang menjadi pertanyaan dalam pasal 6 mengapa usaha kepariwisataan harus dijalankan oleh perseroan terbatas? Side B: Pada bagian dampak kepariwisataan pada materi pidana kurang tegas pada pasal 24 dan 25 karena belum jelas delik pidananya untuk itu perlu dirumuskan kembali. Mansyursah Ardian, Pancasila sebagai pandangan hidup dan landasan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata yang perlu ditingkatkan untuk menambah devisa negara, menyerap SDM, dan tetap menjaga kelestarian kebudayaan bangsa untuk memupuk cinta tanah air oleh sebab itu perlu disediakan sarana prasarana, mutu, dll. Pembangunan pariwisata perlu dikembangkan dan diamdalkan untuk menjaga iman dan alam lingkungan hidup. Pengamanan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai upaya terpadu dan dapat mendorong demokrasi ekonomi sehingga perlu peranan BUMN, koperasi, dan swasta ikut mendorong perkembangan pariwisata. Pembangunan pariwisata dapat membantu menyerap tenaga kerja, kesempatan berusaha masyarakat sehingga dapat berperan di dalamnya maka pembangunan lintas sektoral dan non sektoral.	Rapat Paripurna ke 29/ IV/ 1989-1990	Kamis, 7 Juni 1990	Suara Jelas
67	Rapat Paripurna ke 29/ IV/1989-1990 Fraksi Pembangunan Karya/Golkar-Mansyur. Penyelenggaraan BUMN, Koperasi, Diberi hak untuk ikut mengelola sesuai dengan demokrasi ekonomi. Pengelolaan dilakukan oleh PT belum memberikan hasil yang optimal. Promosi belum seperti yang diharapkan untuk itu dituangkan dalam RUU ini. Sampai mana tata ruang yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan UUD 45 dan bagaimana memberikan perlindungan kepada pengelola perusahaan dan sejauhmana pemerintah membentuk badan untuk mengelola.... Husni Thamrin dari Fraksi PPP. dapat merusak tata ruang budaya di Bali dan Jawa Barat merusak lingkungan kurangnya sehingga... hanya bahwa hanya pulau Bali tempat pariwisata di Indonesia. Fraksi PDI- RUU ini sebagai acuan dalam kepariwisataan dalam mengelolah RUU menjadi UU dan pelaksanaan kepariwisataan yang dijamin oleh UUD, Pancasila, dan GBHN.	Rapat Paripurna ke 29/ IV/1989-1990	Kamis, 7 Juni 1990	Suara Jelas
68	Side A : Putus Side B : Putus	Rapat Paripurna ke 30/ IV/	Kamis, 7 Juni 1990	

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
69	Rapat Paripurna ke 30/ IV/ 1989-1990 Volume 2 Side A: Dr. Ida Yudi Dahlan, RUU Akademi Ilmu Pengetahuan dalam sejarahnya pertama kali diterapkannya UU No. 6 tahun 1956 tentang pembentukan Majelis IPI kemudian SK Kep MPRS No. 18/B/1967+D68 tanggal 16 Februari 1967 pembubaran Lembaga Riset Nasional dan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pembentukan LIPI. Sesuai kepres No. 94 tahun 1962 diadakannya Menteri Urusan Riset nasional dan penempatannya berada di bawah Menristek Nasional. Kepres 128 tahun 1967 Mpembentukan LIPI tugas pokoknya menyiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan sesuai kepres No. 64 tahun 1973 dan sesuai Kepres No. 34 tahun 1974 kedudukan LIPI menjadi non Departemen. Dalam rangka pembangunan tinggal landas pengembangan teknologi disesuaikan dengan pembangunan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksional sebagai daya saing dengan negara lain untuk itu peran aktif masyarakat mengembangkan IPI. Wadah AIPI adalah organisasi para ilmuwan yang sifatnya non struktural dan mandiri merupakan bagian Badan pemerintah yang memperoleh dana dari APBN dari Sekretariat Negara sehingga perlu dijelaskan bagaimana bentuk pola AIPI yang diterapkan di negara yang bermoral Pancasila. Para ilmuwan dipilih menjadi anggota dan usia pensiun bisa diperpanjang hal ini perlu ditanggapi karena apabila ada kesalahan harus diberhentikan tetapi materi disini tidak dijelaskan, sejauhmana kewenangan pemerintah untuk mengawasi AIPI. Side B: Masnan Sastra Putra dari Fraksi ABRI, Gagasan AIPI sudah lama tetapi karena situasi dan kondisi tidak terealisasi. Untuk mewujudkan Ilmu Pengetahuan pada pembangunannasional karena tumpang tindih MIPI maka dibubarkan pada masa PRS kemudian dibentuk LIPI. IPI berkembang dengan pesat maka untuk mengimbangi dan tidak tergantung dengan negara maju maka perlu dibentuk AIPI yang dipayungi dengan UU sebagai landasan hukum untuk pembangunan era tinggal landas menuju ke industrialisasi yang memerlukan teknologi. Alangkah baiknya jika AIPI dimasukkan dalam batang tubuh UU. Peroleh dana bukan merupakan struktur pemerintah walau demikian karena menghasilkan daya intelektual wajar apabila pemerintah memberi dana dan sarana hanya pemerintah tidak boleh mencapuri hasil AIPI, mengapa dana diminta dari APBN?	Rapat Paripurna ke 30/ IV/ 1989-1990	Senin, 11 Juni 1990	Suara Jelas
70	Rapat Paripurn ke 30/IV/1989-1990 Volume 3 Side A: Dra. Syarifah Mutarom dari Fraksi PPP, RUU AIPI diajukan pemerintah tanggal 1 Maret 1989 melalui surat presiden. Bangsa yang berazaskan Pancasila harus meninjau sudut lain untuk kemaslahatan bangsa. Ilmu tanpa pengetahuan akan lumpuh dan pengetahuan tanpa ilmu akan buta. Seorang Pancasilais tidak boleh ragu dalam amanat GBHN, pembangunan jangka panjang II terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan saling terkait. Side B: Lembaga AIPI ditingkatkan menjadi Akademi AIPI yang dilindungi UU. Perlu penjabaran yang seimbang antara ilmu dan amanat. Fraksi PPP menginginkan AIPI dilindungi UU untuk kesejahteraan manusia dan seisinya di dunia. Papo Sunata Harun, surat pemerintah No. R.08/EU/12/1989 tanggal 23 Desember 1989 menyampaikan RUU AIPI dan tanggal 1 Maret 1990 Menristek menyampaikan keterangan tentang pentingnya peranan teknologi. Fraksi PDI sependapat dengan pemerintah maka perlu ditingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan, kekuatan, dan prestise suatu bangsa. Mengingat Indonesia masih di bawah Jepang, Thailand, dan Pakistan maka dewan menyadari perlu adanya UU yang memayungi. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan biayanyanya perlu ditingkatkan supaya teknologinya maju untuk memasuki era tinggal landas. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan startegis suatu bangsa karena maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari hasil penelitian untuk itu pemerintah perlu memprogramkan.	Rapat Paripurna ke 30/IV/1989-1990	Senin, 11 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
71	Rapat Paripurn ke 31/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Papo Sonata Harun, kurangnya minat SDM untuk menjadi peneliti dan kurangnya dana yang menunjang penelitian bagaimana kemandirian AIPI tsb? Peran teknologi sangat penting karena dapat menjunjung tinggi bangsa. RUU peradilan agama untuk perkara perdata yang beragama Islam, hal ini berlaku di pengadilan agama yang kewenangannya mengadili agama tertentu sejajar dengan penhadilan agama yang lain untuk itu hal-hal yang menguraikan keputusan dihapus seperti pengukuhan pengadilan agama untuk memantapkan pengadilan agama maka dalam UU ini diadakan juru sita. UU perkawinan diatur secara khusus No. 9 tahun 1975 Side B: Dalam UU perkawinan apabila seorang istri menggugat cerai maka sesuai Peraturan Pemerintah UU No. 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada di daerah tergugat sesuai prinsip-prinsip hukum pidana umum, tetapi perkara diajukan ke pengadilan di daerah hukumnya tertgugat. Seorang hakim yang melakukan perbuatan tercela di depan pengadilan dihukum 3 bulan apabila sikap perbuatan merendahkan pengadilan. Hukum tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai PNS dan sebelum diberhentikan sebagai hakim. Hakim bukan jabatan eksekutif oleh sebab itu pemberhentiannya tidak seperti PNS. Pada pasal 22 yang dimaksud pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer.	Rapat Paripurn ke 31/IV/1989-1990	Senin, 11 Juni 1990	Suara Jelas
72	Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Yoke Sondag dari Fraksi Karya Pembangunan, memberikan jawaban pemerintah tentang RUU pembentukan Kabupaten halmahera Tengah dan Kodya Bitung. Rudini (Mendagri) menyampaikan jawaban pemerintah pada tanggal 6 Juni 1990 oleh fraksi-fraksi. Jawaban Fraksi Karya Pembangunan, Yoke Sondag Kabupaten Halmahera Tengah karena faktor historis yang dipegang oleh seorang Bupati selama 25 tahun. Sistematika RUU disusun berdasarkan serupa walaupun materinya berbeda satu Kabupaten I Kodya urusan kewenangan akan menjadi urusan rumah tangga daerah sesuai kemampuan SDM dan sarana/ prasarana. Urusan perikanan laut masih wewenang daerah batas wilayah dengan menyebut wilayah TK II dengan berbatasan dengan Kecamatan ini sebagai pelengkap. Anggota DPRD Bitung ditarik dari Minahasa tanpa melalui pemilihan dari awal diisi sesuai daftar nomor urut hasil pemilu tahun 1987 dan domisili di wilayah Bitung seperti halnya di Halmahera Tengah. Usnaen machmud dari Fraksi ABRI, status kecamatan di Bitung tetap kecamatan pembantu , pengisi anggota DPRD seperti di atas karena keterbatasan dana dan faktor historis Soa Siu sebagai ibukota Halmahera Tengah karena transportasi melalui laut . Modal pangkal 3 tahun karena 2 daerah tsb sudah mampu membiayai untuk daerahnya sendiri.	Rapat Paripurna ke 32/ IV/ 1989-1990	Selasa, 12 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
73	Rapat Paripunar ke 32/IV/1989-1990 Volume 2 Side A: Muharsono Kartodirdjo dari Komisi APBN, pembahasan dilakukan secara singkat yang rapat-rapatnya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Komisi APBN. Dengan adanya pendapatan yang meningkat karena adanya kenaikan gaji PNS dan pemberian tunjangan khusus untuk pegawai di wilayah Ambon. Untuk mengendalikan inflasi supaya tidak mempengaruhi ekonomi rakyat maka neraca perdagangan dapat diatur dengan baik. Temuan BPK dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan APBN anggaran tahun 1987/1988 pelaporannya dapat ditingkatkan. Realisasi belanja pegawai lebih tinggi karena untuk pembayaran gaji PNS yang memang dibutuhkan adalah guru dan pegawai rumah sakit. Side B: Meningkatnya ekspor tekstil memperbaiki devisa negara . Neraca perdagangan untuk mempercepat perhitungan anggaran dengan meningkatkan biro-biro keuangan untuk memperhatikan SE Menteri Keuangan. Batas waktu penyampaian laporan kedua RUU sudah disempurnakan oleh Tim perumus Komisi APBN untuk itu Menteri keuangan bisa membahas pada tingkat IV. Komisi IV APBN mempersilakan untuk memutuskan kedua RUU tsb. Pendapat akhir DPR dari Endang Junaedi, setiap APBN ditentukan dengan UU dan ditetapkan oleh DPR. Rencana APBN semakin tumbuh dengan baik hal terlihat dari banyaknya pemasukkan negara dari non migas. Fraksi Karya Pembangunan, mengharapkan alat mobilisasi disiapkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu sehingga dapat berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan agraria yang baik untuk menjamin kepemilikan tanah di sertifikat untuk kepastian wilayah industri jangan sampai menggunakan lahan pertanian. Untuk membangun perekonomian himbauan presiden perlu dilaksanakan dimana untuk memberikan dari perusahaan besar kepada pengusaha lemah sehingga pasal 33 UUD 45 dapat diwujudkan	Rapat Paripunar ke 32/IV/1989-1990	Rabu, 13 Juni 1990	Suara Jelas
74	Rapat ParipurnakKe 32/IV/1989-1990 Volume 3 Fraksi Karya Pembangunan. Side A: RUU keuangan, perdagangan, perbankan DPR meminta kepada pemerintah untuk segera diajukan. DPR prihatin masih banyak yang belum memberi kesejahteraan buruh sesuai hak-haknya. Berbagai kebijakan untuk memberi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik untuk itu subsidi untuk rumah sakit di daerah perlu dipertahankan bantuan sarana prasarana dari Bank Dunia dapat dimanfaatkan dengan baik- Tunjangan intensif guru perlu ditingkatkan karena belum memadai. Pelaksanaan pembangunan inpres ditingkatkan untuk pemerataan pembangunan. Pemerintah berhasil mengajukan pertambahan anggaran pemerintah dapat memenuhi aturan tetapi APBN setiap tahun harus dapat mendapat persetujuan DPR. Pelaksanaan APBN dan tambahan APBN sesuai tahun 1989. Fraksi karya Pembangunan menyetujui 2 RUU untuk ditetapkan menjadi UU untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan UUD 45. Fraksi ABRI - Mahmudi Hadisaroso. Untuk membayar utang luar negeri ditingkatkan kualitas ekspor seluruh sektor produksi. Tingkat pertumbuhan 7,9% dapat menyerap SDM. Side B : Penerimaan dalam negeri diterapkan untuk menjaga aparat pemerintahan yang berwibawa. Rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM 1989/1990 tidak jadi harga minyak mentah di pasar dunia naik tetapi dampaknya harga bahan baku mentah naik, karena kelebihan penerimaan uang tersebut dapat mensubsidi BBM sehingga masyarakat tidak kena dampaknya. Realisasi bantuan program dan proyek tapi dapat ditutup dari tabungan, untuk itu PBB guna devisa negara. Apabila ada temuan harus ditindak lanjuti sesuai UU yang berlaku. Fraksi ABRI menyetujui 2 RUU yang sudah maka untuk menjadi UU.	Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990	Rabu, 13 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
75	Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990 Volume 4 Fraksi PPP - Benyamin Mataliti. Realisasi penerimaan dari minyak bumi dan gas alam dan non minyak bumi dan gas ada peningkatan 24,9%. Fraksi bersyukur harga minyak dan gas bumi mengalami kenaikan sehingga meningkatkan devisa negara. Untuk menghemat gas bumi yang ditunjang dari PLTA, PLTU dan tenaga nuklir. Berkurangnya anggaran karena kurangnya bantuan proyek dari luar negeri sehingga tidak terealisasi karena prosedur/ sayarat yang harus dipenuhi. Dewan menilai baik kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran menggunakan dana dari luar negeri untuk pembangunan sehingga memperingan pengembalian utang. Pengeluaran rutin berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan perekonomian Indonesia cukup baik untuk menghadapi pembangunan tinggal landas neraca keuangan harus baik. Side B: Pemerintah perlu melakukan pengawasan. Kebijakan ekspor minyak meningkat sehingga mengurangi pinjaman utang luar negeri. Fraksi PPP menerima dan menyetujui 2 RUU untuk disyah kan menjadi UU. Sejalan dengan teknologi informasi UU ini segera disosialisasikan secara luas. Budihardjono dari Fraksi PDI, pemerintah harus bisa mengatasi masalah perdagangan asongan sehingga operasi perdagangan asongan harus ditinjau kembali karena pemerintah harus memberi penganyoman masyarakat. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak pemerintah harus ikut memikirkan untuk itu kenaikan BBM ditinjau kembali ijin untuk angkutan laut harus diperketat untuk menghindari dari kecelakaan penumpang laut. Koperasi harus mempunyai peran penting dengan memberi prioritas utama untuk deregulasi. Pembebasan kuota rempah-rempah seperti pala, bunga pala, PDI menyarankan memberi deregulasi untuk cengkeh melalui KUD.	Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990	Rabu, 13 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
76	Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990 Volume 5 Side A: Fraksi PDI - Budi Hardjono, yang menikmati biaya masuk otomotif bukan negara tetapi para pengusaha untuk itu pemerintah perlu mempertimbangkan deregulasi harga otomotif sementara masyarakat membeli harga motor tinggi. Sikap pemberi pelayanan tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat. Pemerintah memberi perlindungan kepada masyarakat yang tanahnya tergusur untuk diberi perlindungan tegas tdk dirugikan. Harga dari ekspor hial pertanian rakyat sangat rendah untuk itu pemerintah dapat mengambil sikap untuk delegulasi/restrukturisasi di bidang industri/tata niaga sehingga berani dan nilai tata ekspor dapat terpenuhi kebijakan pemerintah 20% untuk koperasi sangat positif karena ini dapat membantu masyarakat. Penerimaan pembangunan mengalami penurunan hal ini lembaga donor karena berkurang untuk itu pemerintah harus anggarkan dalam APBN. Pengeluaran lebih besar karena pemberi tunjangan 10% kepada PNS. Realisasi untuk membayar utang/cicilan piutang luar negeri 11,6%. Membaiknya harga ekspor minyak bumi Indonesia sehingga pemerintah menyediakan subsidi kepada masyarakat cukup besar karena patokan harga minyak bumi sangat rendah hal ini karena anggaran tidak lentur dalam menentukan pengeluaran pemerintah naik 13 triliun. Alokasi proyek pencetakan tanah untuk sawah sangat positif hal ini untuk menuju pada swasembada beras. Saran PDI melalui deregulasi di bidang industri secara terpadu dimana hasil produk pertanian rakyat dapat di olah menjadi barang baku menjadi industri barang jadi sehingga petani mendapat hasil yang loyal untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Side B: Pelaksanaan proyek harus diperhitungkan dengan benar agar mencapai sasaran. Menteri Keuangan menanggapi Fraksi PDI mengusulkan kedua RUU dapat di syahkan menjadi UU. RUU tentang tambahan APBN. Kepala Biro Persidangan : Mengsahkan 2 RUU dapat di syahkan menjadi UU dengan demikian anggaran bertambah APBN 1989-1990 tambah 1,8 triliun dengan rincian anggaran rutin dan proyek. UU berlaku surut disyahkan di Jakarta RUU tambahan Aggaran Belanja Negara Pendapat 2. Kelebihan penerimaan negara yang lebih untuk pembangunan infrastruktur. Karena kelebihan alokasi 1990 anggaran digunakan untuk pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, lapangan kerja, pembangunan wilayah timur. Minyak bumi sumber penerimaan negara No. 1 untuk itu perlu dimanfaatkan dengan baik untuk itu minyak bumi di manfaatkan sebaik-baiknya /bijak untuk pembangunan. Kemantapan dari penerimaan pajak 1989-1990 dialisir sesuai rencana/ lebih supaya dapat memberi nyata bahwa pendapatan rakyat. Perlu adanya sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk itu tahun 1989-1990 dapat lebih efektif lagi. Dengan berkurang pembayaran pajak pada tahun 1989-1990 mulai realisasi tambahan pemasukan melalui tabungan masyarakat dapat direalisasikan sehingga dapat mendukung sasaran pembangunan dan menekan realisasi pembangunan ekstern.	Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990	Rabu, 13 Juni 1990	Suara Jelas
77	Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Menteri Keuangan, tambahan anggaran untuk pembangunan pertanian, pengairan, pariwisata, pendidikan, kepercayaan, pertambangan dan energi. Pengembangan sumber daya manusia mobilisasi dana, meningkatnya tabungan masyarakat swasta dan tabungan pemerintah untuk disalurkan lagi, sektor produktif sehingga memperlancar sektor yang kuat dan yang lemah sehingga dana dapat menumbuhkan ekonomi yang produktif. Side B: Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990	Rabu,13 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
78	Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990 Volume 1 Side A : Pembicara TK II, jawaban pemerintah tentang RUU Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan RUU kepariwisataan Menristek BJ. Habibie: untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia perlu dibuat RUU AIPI berlandaskan UUD 1945 guna kepentingan pembangunan bersama. AIPI dengan LIPI, AIPI diatur UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan pasal 16 dan 17 dalam lembaga pendidikan tugas AIPI diatur dalam pasal 3 dan 4 rincian tugas tidak mencakup kegiatan kependidikan nasional seperti yang diatur pada UU No. 2 tahun 1989. Landasan AIPI - Pancasila. AIPI buakn badan pemerintah, buakn bagian pemerintah, bukan orang politik, masyarakat yang mencari kewenangan dana dari pemerintah dan masyarakat yang akan di syahkan oleh pemerintah. Pelita V baru dibentuk awalnya SK MPRS 18/ B/1967, telah dibubarkan lembaga riset dan LIPI kemudiaan membentuk LIPI awalnya LIPI yang akan membentuk AIPI karena tahun 1973 LIPI dijadikan lembaga Non Departemen, maka AIPI kemudian dibentuk menristek. Anggota LIPI adalah para ilmuan dari LIPI, Menristek, dll. AIPI bukan badan pelaksana Litbang/ perguruan. AIPI bukan penasehat IPTEK tetapi AIPI sebagai wadah ilmuan yang tugasnya memberi wadah non struktural dan mandiri. AIPI adalah prakarsa sendiri. Side B: Usia anggota 65 tahun. Anggota berdasarkan suara keanggotaan AIPI setiap 5 tahun ditinjau kembali berdasarkan usia dan keaktifan. Menteri Pariwisata dan Postel- Ahmad Tahir. Ucapan terima kasih dari pemerintah kepada DPR yang telah menggodok RUU. Perdebatan antara DPR dan Pemerintah untuk mendapatkan UU yang berbobot. Ketertarikan judul, definisi, dan materi menjelasannya dijabarkan oleh pemerintah. Tujuan pariwisata kurang lengkap memuat F. ABRI dapat dilihat pada penjelasan karena perlunya jaminan keamanan bagi wisatawan. Menteri Parpostel pemerintah sepakat dengan Fraksi PPP karena ikut mendorong pendapat nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pendapatan nasional serta penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan hidup yang akan menjadi daya tarik pariwisata. Pelaksanaan pariwisata dilakukan oleh BUMN, Koperasi, dan masyarakat. Kegiatan promosi dituangkan dalam RUU untuk pemasaran pariwisata. Tata ruang pariwisata sebagai potensi tunjangan wisata. Perkembangan pariwisata dapat menghancurkan kebudayaan bangsa untuk itu perlu UU untuk menjaring budaya bangsa. Karena bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup yaitu Pancasila. Budaya asing yang dapat mempengaruhi kebudayaan bisa dicegah untuk itu pada pasal 32 karena bertentangan dengan Pancasila. Pendayagunaan pantai untuk hotel sangat merugikan. Ada daerah tertentu yang pariwisatanya tidak dipromosikan karena belum ada sarana prasarana. Lahirnya UU pariwisata dapat menjadi landasan yang kokoh. Perkembangan pariwisata tidak lepas dari kemajuan teknologi. Penyelenggara wisata harus menyediakan pemandu apabila tidak menyediakan azin akan dicabut. Side B: Apabila usaha pariwisata asing membawa pemandu dari negara asing akan dicabut izinnya. Perhubungan, pariwisata, Menpora, Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan kerjasama pariwisata untuk menimbulkan cinta tanah air. Pemerintah sepakat dengan PDI bahwa pariwisata merupakan aset yang meningkatkan aspek ekonomi sehingga perlu ditingkatkan dan penyelenggara pariwisata harus	Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990	18 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
79	Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990 Volume 2 Side A: Menteri Kehutanan (Hasjrul Harahap), RUU tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan RUU wajib serah karya cipta dan karya rekam, serta laporan sidang AIPO di Manila. Sumber daya hayati dan ekosistem punya peranan strategis untuk penyelamatan guna generasi muda . Konservasi untuk menjamin kesejahteraan rakyat sehingga dapat dimanfaatkan dan masyarakat ikut bertanggungjawab dalam penyelamatan ekosistem supaya dapat berhasil. Proses ekosistem punya manfaat tinggi sehingga perlu diupayakan pelestarian satwa kehidupan di wilayah RI. Pemerintah menghargai pendapat dari fraksi-fraksi dalam membicarakan RUU yang diajukan pemerintah untuk saling mengisi dari 3 RUU yaitu: UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, UU No. 4 tahun 1982 tentang pokok-pokok lingkungan hidup, dan UU No. 9 tahun 1990 tentang perikanan. Hal ini disebabkan UU No. 5 dan No. 9 masih terbatas pengaturannya dimana masalah wisata laut, taman laut, dan kepemilikan satwa perorangan belum diatur pada 3 UU ini. Alasan penyusunan RUU ini adalah kedudukan geografis wilayah Indonesia menjadi jalur internasional antara Benua Pasifik dan Samudera Hindia untuk itu perlu adanya UU yang ketat dan menanggapi anti kayu tropis sehingga untuk menangkai isu tsb sesuai kondisi saat ini. Side B: Laporan AIPO di Manila oleh A. Hartono, pemerintah mengirim 2 delegasi ke AIPO untuk menyampaikan undangan kepada Ketua AIPO di Singapura. Kegiatan AIPO mendapat dukungan dari Malaysia, Thailand, dan Philipina untuk menyiapkan Sekjen yang diisi oleh Thailand. Pada AIPO pada bulan September mendatang strukturnya akan disederhanakan dan pelaksanaannya dilangsungkan di Singapura. Dalam pertemuan AIPO disetujui Ketua DPR RI sebagai pembuka, persetujuan rekomendasi, pengangkatan sekretaris, dan pembentukan kantor AIPO. Sekjen AIPO dari Singapura ditetapkan dan delegasi RI mengusulkan kantor sekretariat tetap.	Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990	8 Maret 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
80	Rapat Paripurna ke 34/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Pembicara TK II jawaban pemerintah tentang RUU DKI Jakarta Raya. Mendagri Rudini: Pemerintah sependapat dengan Fraksi PPP fungsi DKI sebagai daerah otonomi TK I sesuai ketentuan No. 5 tahun 1974 walaupun ada penegasan pada pasal. Berkaitan dengan fungsi untuk itu daerah TK I berbeda dengan daerah lain pertumbuhannya. Mengingat persentasi wilayah DKI dapat mempunyai susunan wilayah dalam bentuk lain yang ketetapan disesuaikan UU No. 5 tahun 1974 dan hanya ciri-ciri dan kebutuhan yang berbeda dengan daerah lain. Perbedaan terbatas pada wilayah dan perangkatnya sehingga pengaturannya selalu sesuai UU No. 5 tahun 1974 kecuali pengaturan penyelenggaraan kecuali dalam hal tertentu dan berkaitan erat dengan pembangunan Jakarta dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Wilaya Jakarta perkembangannya sangat cepat sehingga timbul barbagai masyarakat di 5 wilayah sehingga tidak ditangani sendiri untuk pemberian pelayanan tidak pada TK II tetapi di TK I sehingga TK I sebagai penyelenggara pemerintah negara dan nasional, pusat reional, internasional pelaksanaan tugas baik biaya maupun penyelenggara. Untuk merumuskan kembali DKI Jakarta pelayanan diatur pada pasal 2 sesuai umum Gurbernur DKI dalam menjalankan pemerintahan bersifat khusus bertanggung jawab kepada presiden merupakan bentuk lain UU No. 5 tahun 1974 pembangunan wilayah sesuai desentralisasi/sentralisasi untuk memenuhi pelayanan masyarakat. Sepanjang mendapat petunjuk khusus presiden dengan pembiayaan APBN sesuai. Rencana umum tata kota DKI mendapat persetujuan presiden untuk mendapat kepastian. Pengatur batas wilayah diatur No. 45 tahun 1974 untuk perubahan batas wilayah DKI sesuai pasal 4 ayat 2 UU No. 5 tahun 1974 fungsi susunan ketentuan umum No. 5 tahun 1974 untuk susunan tersebut tidak perlu disusun dalam batas tubuh UU. Side B: Koordinasi dengan daerah penyangga Mendagri mengajukan 3 wakil gubernur untuk dapat memacu berfungsinya perangkat operasional seperti dinas, wali kota, lurah, camat, bidang pembangunan, pemerintahan, permasyarakatan. Diatur secara khusus kedudukan DPRD dalam UU dapat melihat penjelasan dari Fraksi Karya Pembangunan. Jawaban PPP: Kedudukan khusus Jakarta karena penetapan Presiden RI No. 2 tahun 1961 tentang pembangunan DKI pertimbangan daerah yang dikuasai langsung oleh presiden kemudian ditinjau kembali Kepres pasal 5 tahun 1974 bahwa daerah TK I dan tata pemerintahannya diatur seperti daerah lainnya berdasarkan UU yang berlaku untuk memberi pelayanan yang tepat dan cepat maka dibentuk daerah TK II di wilayah barat timur selatan sehingga urusan tidak menumpuk di wilayah Jakarta Pusat.	Rapat Paripurna ke 34/IV/1989-1990	Tidak ada tanggal dan bulan	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
81	Rapat Paripurna ke 35/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua Dewan. Dalam Rapat Paripurna akan dibacakan laporan BKKP tentang laporan hasil-hasil kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri. Pembicara I akan melaporkan hasil kunjungan ke Colombia oleh Sundoro Samsuri anggota No. 407, pembicara II akan melaporkan hasil kunjungan ke Finlandia oleh Kemas Badarudin anggota No. 13, pembicara III akan melaporkan hasil kunjungan ke Australia oleh Budi Waluyo anggota No. 490, dan pembicara ke IV akan melaporkan hasil kunjungan ke Belanda oleh Walkam Silitonga anggota No. 424. Dilanjutkan dengan laporan I hasil kunjungan anggota DPR RI ke Colombia yang disam Sundoro Samsuri. Kunjungan Delegasi diketuai oleh Wakil Ketua DPR RI dan anggotanya yang terdiri antara lain Ir. Ahmad Mustahid Astari dari FKP(Fraksi Karya Pembangunan), H. Yahya Murad dari FKP, H. Imam K dari FPP, Royani dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan Sundoro Samsuri dari fraksi ABRI. Tujuan kunjungan untuk menjaga hubungan baik antara DPR RI dan Parlemen negara sahabat, baik secara bilateral dan multilateral. Selama kunjungan membahas masalah narkoba, politik dan pemerintahan, sosial dan KTT yang telah dilaksanakan di Kartena yang tidak berhasil karena Presiden Amerika Serikat George Bush menuduh Amerika Latin sebagai negara yang melanggar hukum, sedangkan Amerika Latin meminta Amerika tidak mengkonsumsi narkoba. Side B : Laporan dari Pembicara II kunjungan Delegasi DPR RI ke Finlandia oleh Kemas Badarudin. Delegasi diketuai oleh H. Naro, S.H. dengan anggotanya antara lain Abdulah Zaini, S.H. dari FKP, Dagomes dari FKP, Surahtadi dari Fraksi ABRI, Kemas Badarudin dari FKP dan I Gusti Ngurah Yude dari PDI. Kunjungan delegasi ke Finlandia dengan tujuan membina dan mempererat kerja sama antara dua negara yang saling menguntungkan. Antara lain: menunjang peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) karena Finlandia menganggap Indonesia sebagai negara ASEAN yang terpenting, dalam hal ini pemerintah Indonesia menjelaskan kebijaksanaan dan langkah-langkah pemerintah dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan, khususnya Timor Timur, masalah lingkungan hidup. Selain itu delegasi mengunjungi juga daerah Utara Finlandia dan Helsinki.	Rapat Paripurna ke 35/IV/1989-1990	Selasa, 19 Juni 1990	Suara Jelas
82	Rapat Paripurna ke 35/IV/1989-1990 Volume 2 Side A : Kesimpulan dari kunjungan ke Finlandia yang disampaikan oleh Kemas Badarudin adalah sambutan sangat baik dan melanjutkan hubungan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan karena Indonesia berpengaruh di Asia Tenggara, Finlandia akan memberi bantuan Indonesia di bidang pembangunan dan perdagangan karena Indonesia berhasil mengembangkan laju ekonomi, penanaman modal Finlandia ke Indonesia rendah karena hambatan birokrasi kedua negara. Laporan pembicara III kunjungan delegasi DPR RI ke Australia dan Malaysia dari tanggal 27 Februari-8 Maret 1990 disampaikan oleh Budi Waluyo. Sasaran dititikberatkan pada bidang kelembagaan, anggaran, kesekretariatan, dan perpustakaan. Ketua delegasi Safirah Udin dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dan anggotanya Budi Waluyo, Irawan Bratakusuma S.H dari FKP, Drs. Usman Simanjuntak dari FKP, Lencang B.A., Beni Wardanto, dan Faisal S.H. Di Malaysia mengadakan diskusi kelembagaan, peninjauan gedung dan fasilitas kerja, dan meninjau masjid Selangor. Sedangkan selama di Australia dapat dilihat secara langsung adanya perbedaan sistem politik antara Australia dan Indonesia, tetapi karena di sana sedang ada kampanye maka tim tidak bisa meninjau jalannya persidangan. Side B : Laporan pembicara IV kunjungan delegasi DPR RI ke Belanda dari tanggal 10-19 Maret 1990 disampaikan oleh Walkam Silitonga. Tujuan kunjungan adalah untuk kepentingan pembangunan nasional dengan mengadakan tukar pikiran, penjajakan antar delegasi dengan pejabat pemerintah, parlemen dan swasta Belanda. Selain itu dilakukan juga peninjauan ke obyek-obyek vital di negeri Belanda dan propinsi termuda Belanda hasil reklamasi laut. Dalam kunjungan kehormatan ketua majelis tertinggi di Belanda diharapkan adanya peningkatan kerjasama antar parlemen.	Rapat Paripurna ke 35/IV/1989-1990	25 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
83	Rapat Paripurnake 35/IV/1989-1990 Volume 3 Side A : Lanjutan laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Belanda. Saat menerima delegasi Indonesia, Perdana Menteri Belanda sangat terkesan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, pendidikan, dan pariwisatanya. Pihak Belanda juga menyayangkan pelaksanaan pidana mati yang masih dilakukan di Indonesia. Selain itu dibahas juga masalah Kamboja untuk mencari jalan damai. Untuk Masyarakat Ekonomi Eropa akan dibahas usaha memberantas kemiskinan seperti di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Sebagai negara pintu gerbang Eropa, Belanda menawarkan sebagai transiko untuk komoditi dan jasa. Fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya perluasan hubungan ekonomi Indonesia. Rombongan delegasi diterima juga oleh Walikota Amsterdam karena ada kerjasama dengan DKI Jakarta masalah penanggulangan sampah, pemugaran gedung kesenian Kebudayaan. Masalah lain yang dibahas adalah lingkungan hidup, kerja sama pendidikan, dan Timor Timur. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 35/IV/1989-1990	25 Juni 1990	Suara Jelas
84	Rapat Paripurna ke 36/IV/1989-1990 Volume 1 Side A : Acara yang dilaksanakan adalah pengesahan pembentukan panitia khusus terhadap 2 rancangan Undang-undang, yaitu Rancangan Undang-undang tentang susunan pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia dan Rancangan Undang-undang tentang Kepariwisataaan. Dilanjutkan dengan laporan delegasi DPR RI di New Delhi dalam acara Konferensi Asean Woman Parlementarian on Population dan laporan muhibah DPR RI ke Canada. Rancangan Undang-undang Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta disampaikan oleh pemerintah kepada pimpinan dewan sesuai amanat Presiden No. R.07/PU/XII/1989 tanggal 7 Desember 1989. Sedangkan Undang-undang Kepariwisataaan disampaikan oleh pemerintah kepada pimpinan dewan sesuai amanat Presiden No. R.09/PU/XII/1989 tanggal 29 Desember 1989. Rapat Badan Musyawarah akhirnya memutuskan RUU tersebut diserahkan kepada Panitia Khusus dengan anggota tetap berjumlah 25 orang dan anggota pengganti 12 orang. Side B : Dilanjutkan dengan laporan delegasi DPR RI dalam Konferensi Asean Women Parlementarian on Population di New Delhi yang disampaikan oleh ketua delegasi Ny.HKS. Susilastuti Sutopo Isnomo. Dalam laporannya dia mengatakan bahwa dunia telah mengakui peranan wanita dalam konferensi PBB bulan Juli 1985 di Naerobi. Kemudian tanggal 11 Juli 1987 bersepakat untuk mengadakan konferensi bagi anggota wanita parlemen se Asia. Sedang dasar hukum delegasi ke acara tersebut adalah keputusan pimpinan DPR RI No.26/Pimpinan/III/1989-1990 tanggal 15 Februari 1990 untuk mengirimkan 2 orang anggota DPR RI atas nama Dra. Ny. H. Sarifah dan Dra. HSK. Susilastuti Sutopo Isnomo. Peserta dari 25 negara Asia, 9 dari organisasi internasional PBB, serta dari Irak, Iran, dan Monggolia. Dalam konferensi tersebut membahas tentang peningkatan pendidikan dan gizi bagi perempuan. Buta huruf se Asia untuk laki-laki 25,6 % sedangkan perempuan 47,4 %. Dibahas juga masalah tenaga kerja, hak asasi manusia dan diskriminasi, upah yang sama untuk pekerja yang sama, mitra sejajar, agama, budaya, politik, dan perundang-undangan.	Rapat Paripurna ke 36/IV/1989-1990	29 Juni 1990	Suara Kecil

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
85	Rapat Paripurna ke 36/IV/1989-1990 Volume 2 Side A: Laporan delegasi DPR RI ke Canada yang disampaikan oleh Drs. Kafandi. Perjalanan dilaksanakan tanggal 17-24 Maret 1990 dengan dasar hukumnya Keputusan Presiden RI No.18/LN/1990 tanggal 7 Maret 1990. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI R. Soekardi, dengan anggotanya antara lain H. Abdul Firman dari FKP, Drs. Sudarmaji dari FKP, Drs. Kafandi dari F. ABRI, Ny. Mahdulloh dari FPP, Marbun S.H. dari F.PDI, dan Drs. Sujito. Tujuan dilaksanakan kunjungan tersebut sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif untuk membina persahabatan dan kerja sama yang saling bermanfaat tanpa membedakan ideologi dan prinsip-prinsip yang dianut sehingga tercipta perdamaian di dunia, meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi di Benua Amerika khususnya Canada, menjelaskan kebijakan-kebijakan atau langkah pemerintah RI dalam kaitannya dengan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan melalui serangkaian Repelita, khususnya pemerataan pembangunan ke arah Indonesia bagian Timur, dan untuk menangkai kemungkinan adanya pandangan negatif terhadap usaha pembangunan Indonesia terutama yang menyangkut lingkungan hidup. Side B :<i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 36/IV/1989-1990	29 Juni 1990	Suara Jelas
86	Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990 Volume 1 Side A: Rapat dihadiri oleh Menteri Kehakiman, anggota DPR RI dan masyarakat. Acara yang akan dibahas adalah 1. Pembicaraan Tingkat I, yaitu keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, 2.Laporan BKSAP mengenai delegasi DPR RI ke pertemuan Abda ke 6 di Jakarta dan ABDA (Asosiasi Kependudukan dan Pembangunan Bangsa-bangsa Asia) di Tokyo Jepang. 3. Laporan Konferensi di Cyprus 4. Laporan Konferensi di Amerika Serikat, 5. Laporan delegasi muhibah DPR RI ke Thailand. Pembahasan pertama disampaikan oleh Menteri Kehakiman Bapak Ali Said, SH. Dalam rapat paripurna Ali Said mengatakan bahwa RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang sesuai dengan pelaksanaan pasal 6 ayat 2 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diundangkan tanggal 29 Desember 1986. Dilanjutkan dengan pembahasan kedua yaitu laporan BKSAP delegasi DPR RI ke pertemuan ABDA ke 6 di Jakarta dan kunjungan Abda di Tokyo Jepang yang disampaikan oleh Dr. Tahiri Nor, MA Side B: Lanjutan Laporan pertemuan ABDA di Jakarta. Diharapkan ABDA ke 14 ini akan memberikan hasil dari pertemuan ABDA ke 1-4 yang belum terpenuhi, terutama amanat ABDA yang telah dilaksanakan di Filipina yaitu kerjasama di bidang kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan secara internasional dalam ruang lingkup Asia Pasifik. Hasilnya berguna bagi anggota parlemen bukan antar parlemen. Dalam laporan kunjungan ABDA di Jepang yang diketuai oleh Drs. Suryadi disampaikan bahwa kunjungan tersebut diharapkan dapat membina dan mempererat hubungan DPR RI dengan anggota ABDA Jepang. Delegasi Indonesia juga menjelaskan kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh dalam rangka kependudukan melaksanakan kependudukan, lingkungan hidup, dan pembangunan di Indonesia. Selain itu kegiatan tersebut untuk mencari temuan dan masukan sebagai sumbangan dalam pembangunan nasional. Dilanjutkan dengan laporan delegasi DPR RI dalam konferensi di Cyprus yang disampaikan oleh Marzuki Darusman, yang membahas tentang kesempatan kerja, latihan kejuruan, dan teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Sedang masalah dunia yang dibicarakan adalah masalah kamboja dan masalah keamanan Laut Tengah Cyprus.	Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990	29 Juni 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
87	Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990 Volume 2 Side A: Laporan konferensi antar parlemen yang diselenggarakan di Washington DC Amerika serikat tanggal 29 April-3 Mei 1990, yang disampaikan oleh Bambang Supangat. Sebagai ketua delegasi adalah H. Naro, dengan anggotanya antara lain: Prof. Dr. Ir. Gunarwan Suratmo dari Departemen Kehutanan dan Dr. Kholil Abdullah, MPH dari BKKBN. Kegiatan ini menyoroti isu-isu yang timbul mengenai pengaruh negara terhadap dunia yang disebabkan oleh kurang terpeliharanya lingkungan, yang meliputi: perubahan suhu udara, perusakan lapisan ozon, dan penggundulan hutan. Hasilnya adalah kesepakatan bersama yang dibawa oleh masing-masing anggota parlemen untuk membantu pemerintah dalam penentu kebijaksanaan dalam ikut serta menyelamatkan iklim dunia. Negara-negara yang ikut serta dalam konferensi ini adalah: Australia, Austria, Kamerun, Canada, Cekoslowakia, Den Mark, Mesir, Parlemen Eropa, Finlandia, Perancis, Jerman, Watamala, Indonesia, Italia, Jepang , Kenya, Madagaskar, Maladewa, Malta, Mexico, dan Belanda. Side B : Lanjutan laporan konferensi di Washington DC. Indonesia merupakan hutan tropis terbaik dunia. Dalam usaha menjaga hutan tropis Indonesia belum mempunyai undang-undang pengelolaan dan pengaturan hutan. Isu tentang lingkungan hidup akan menjadi sorotan dunia internasional selama belum ada kesamaan bertindak yang menangani penanganan tersebut. Dilanjutkan dengan laporan delegasi muhibah DPR RI ke Thailand dengan pembicara Drs. Sukarno Darmo Sukarto. Muhibah dilaksanakan berdasarkan Keputusan DPR RI No. 11 tahun 1989/1990 dan Keppres RI No.32 tahun 1990. Susunan keanggotaannya terdiri dari Saiful Sukun, Sri Rejeki, S.H., Subiyono S.H., Silalahi, dan Umar B.A. Sedangkan maksud dan tujuannya adalah membina persahabatan antara Indonesia dan Thailand. Kunjungan muhibah antara lain ke obyek wisata, pembuatan kerajinan tangan dan cara memproses batu mulia, serta melihat pusat pemeriksaan pemberian sertifikat barang ekspor hasil pertanian.	Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990	2 Juli 1990	Suara Jelas
88	Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990 Volume 3 Side A : Lanjutan laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Thailand. Eksport permata dan batu hias sebelumnya menempati urutan ke 4 setelah Italia, Hongkong, dan Spanyol, bahkan kini menempati urutan ke 2 di dunia setelah Italia. Untuk itu negara kita perlu belajar dari negara tersebut agar potensi yang ada di Indonesia bisa dikembangkan lebih cepat di bidang perdagangan Thailand mengalami peningkatan kemakmuran sehingga diramalkan dalam waktu dekat akan menjadi negara industri baru kelima setelah Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990	2 Juli 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
89	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 1 Side A : Acara Rapat Paripurna adalah Pembicaraan Tingkat IV Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan Keputusan Dewan No.8 DPR RI/IV/1989-1990 tanggal 14 Mei 1990 dibentuk Panitia Khusus Rancangan Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang beranggotakan 47 orang, 30 orang anggota tetap dan 17 anggota pengganti. Pada Rapat Paripurna kali ini juru bicara yang akan menyampaikan adalah Dra. Ulfah A. Darmanto dari FKP (Fraksi Karya Pembangunan), Jamaludin dari Fraksi ABRI, Hadi Abdullah Khalil dari FPP (Fraksi Persatuan Pembangunan), dan Jupri S.H. dari Fraksi Partai demokrasi Indonesia. Pembacaan pendapat akhir fraksi ABRI tentang RUU yang dibahas disampaikan oleh Jamaludin. Tim perumus dapat menyelesaikan rumusan dengan tepat dan benar, dengan mengikutsertakan konsultan bahasa Indonesia agar dapat diterima oleh panitia kerja. Perumusan dapat diterima secara bulat oleh ke 4 fraksi dan pemerintah, sehingga dapat diteruskan pada pembicaraan Tingkat IV yang akan dibicarakan sekarang ini. Side B : Di dalam rapat telah diputuskan selain ada penambahan ayat dan butir juga ada penghapusan pasal, ayat, dan butir. Selain itu juga ada perubahan sistematika bab yang disesuaikan dengan substansi, dan ditambahkan penjelasan pasal, ayat, dan butir. Pembacaan pendapat akhir Fraksi Karya Pembangunan oleh Dra. Ulfah A. Darmanto. Rencana undang-undang yang dibahas akan menjadi perangkat lunak dan dasar hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati Indonesia. FKP berpendapat bahwa pengajuan RUU ini mempunyai latar belakang dan motivasi yang sangat mendasar dalam rangka mempersiapkan proses tinggal landas pembangunan Indonesia. RUU ini merupakan kelanjutan dari pasal 12 UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990	2 Juli 1990	Suara Jelas
90	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 2 Side A : Lanjutan pembacaan pendapat akhir dari FKP oleh Dra. Ulfah, Fraksi Karya Pembangunan intinya menyetujui sepenuhnya RUU untuk disahkan menjadi undang-undang. Harapan dari FKP agar pemerintah menyediakan perangkat pelaksanaan yang tersurat dalam undang-undang. Untuk pendapat akhir Fraksi ABRI yang disampaikan oleh Sayudin tentang Rancangan Undang-undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan masalah yang mempunyai kedudukan strategis sehingga wajar bila terdapat perbedaan pendapat dalam pembahasannya. Namun fraksi ini mengharapkan RUU ini dapat diselesaikan secara lancar. Undang-undang kolonial yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga diharapkan setelah disahkan nanti bisa menangkai isu dunia tentang pengrusakan hutan-hutan tropis, karena Indonesia sangat memperhatikan masalah konservasi. Selain itu diharapkan juga memuat peran serta masyarakat dalam konservasi, dan segera pemerintah segera mensosialisasikan undang-undang ini Side B : Pendapat akhir dari Fraksi Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Abdulah Kalil. Setelah ada penyempurnaan dari fraksi-fraksi undang -undang ini menjadi 45 pasal dan 14 bab. Menurut fraksi ini peran serta masyarakat harus mendapat perhatian agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab karena kehadirannya bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini berazaskan pelestarian, kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang, maka tanggung jawab untuk mewujudkan suatu kondisi yang kita inginkan sepenuhnya terletak kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut. Undang-undang ini perlu diimbangi dengan kesadaran pengelolaannya terhadap konservasi pengelolaan sumber alam hayati dan ekosistem. Perlu juga adanya sosialisasi melalui media cetak, elektronik, serta pendidikan formal maupun informal karena masalah ini merupakan hal yang baru, terutama untuk anak muda. Dengan demikian diharapkan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab untuk memiliki dan memelihara konservasi	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990	19 Juli 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
91	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 3 Side A : Pendapat akhir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia oleh Jufri, S.H. Masalah-masalah yang sekarang dihadapi dalam kaitannya dengan undang-undang ini antara lain adalah masalah ekspansi industri yang berupa kawasan industri Pulau Jawa, diperlukan reorientasi kebijaksanaan yang lebih bersifat rasional obyektif dalam rangka kepentingan nasional dengan tolok ukur GBHN. Proyek nuklir di Jepara, yang diharapkan akan ditinjau kembali. Kemudian kawasan sekitar Danau Toba diharapkan segera dihutankan kembali dalam arti yang sebenarnya agar fungsi konservasi dalam pengertian yuridis maupun royalitasnya dapat sungguh-sungguh terpenuhi. Side B : Pada dasarnya Fraksi PDI menyambut baik undang-undang ini untuk menambah Undang-Undang No 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan negara RI. Fraksi PDI telah mengadakan peninjauan materi dan substansi, maka Fraksi PDI menyetujui untuk segera disahkan menjadi undang-undang dan setelah pengesahannya segera pula memasyarakatkan kepada masyarakat secara luas agar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan operasional undang-undang ini agar dapat melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Kehutanan Ir. Hasjrul Harahap.	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990	19 Juli 1990	Suara Jelas
92	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 4 Side A : Dalam sambutannya menteri Hasjrul Harahap mengatakan bahwa Undang-undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan penjabaran dari UUD 1945 khususnya pasal 33 dan yang diamanatkan dalam GBHN tahun 1988. Hutan tropis dalam bentuk alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia merupakan terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Masalah konservasi merupakan hal yang baru sehingga minim sekali pengertian tentang hal ini. Dalam pembahasan tidak ada perbedaan yang prinsipil antara pemerintah dan fraksi-fraksi dewan. Dengan disetujuinya undang-undang ini mengandung makna dan arti dalam pembangunan bangsa Indonesia terutama dalam pembangunan hukum nasional secara teknis. Sumber konservasi daya alam hayati telah memperoleh kepastian hukum, khususnya masalah kawasan dan pengembangan wisata alam. Dalam rangka ulang tahun Indonesia yang ke-45 ini telah berhasil disusun undang-undang oleh pemerintah dan DPR yang digali dari budaya bangsa Indonesia Side B :tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990	19 Juli 1990	Suara Jelas
93	Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990 Volume 1 Side A : Merupakan pembicaraan Tingkat IV dengan hasil pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Halmahera Tengah dan Daerah Tingkat II Kotamadya Bitung. Sedangkan Fraksi-fraksi yang akan memberikan pendapat akhir atas 2 rancangan tersebut di atas adalah: 1. Eni Achyani dari Fraksi Karya pembangunan, 2. Drs. Moelyono Marto Suwarno dari Fraksi ABRI, 3. H. Kun Solehudin dari Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Adi Pranoto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Pembicaraan Tingkat I sudah dilakukan tanggal 5 Maret 1990, Pembicaraan Tingkat II dilakukan tanggal 6 Juni 1990, sedangkan Pembicaraan Tingkat III tanggal 19 Juni-22 Juli 1990. Dilanjutkan penyampaian pendapat akhir dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Eni Achyani, yang pada intinya telah melakukan kunjungan ke dua daerah tersebut dan tidak mengalami hambatan dalam memberikan sumbangsih atas penyempurnaan kedua undang-undang tersebut Side B : Menurut Fraksi Karya Pembangunan kedua RUU sangat penting direalisasikan dalam masa pemerintahan Orde Baru sebagai bukti keberhasilan pembinaan wilayah. Hal ini sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, yaitu sebagai bukti adanya kemajuan yang seimbang antara kota dan desa. Dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari Fraksi ABRI oleh Moelyono Marto Suwarno tentang kedua RUU tersebut diatas. Dalam hal ini Fraksi ABRI mengaitkan dengan UU No. 5 tahun 1975 dan UU No. 18 tahun 1965 yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini Fraksi ABRI mengharapnkan adanya pertemuan tingkat III karena masih adanya selisih pendapat hal-hal yang perlu dimuat, sehingga harus segera diselesaikan.	Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990 Volume 1	19 Juli 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
94	Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990 Volume 2 Side A : Penyampaian pendapat akhir dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Kun Solehudin. Menurutnya keputusan terakhir dari pembahasan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah, karena kenyataan banyak daerah yang berstatus otonomi tetapi masih menggantungkan subsidi dari pemerintah pusat. Kemudian pada pasal 5 UU No. 5 tahun 1974 disebutkan bahwa suatu daerah dapat dihapus apabila syarat-syarat dalam pasal 4 ayat 1 UU No.5 tahun 1974 tidak terpenuhi lagi. Hal ini diperlukan kemantapan dan keyakinan bahwa kedua daerah tersebut telah benar-benar mampu dan siap ditingkatkan statusnya untuk menjadi daerah nyata dan bertanggung jawab. Dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari Fraksi PDI oleh Adi Pranoto. Pada intinya fraksi ini setuju akan dibentuknya UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Halmahera Tengah dan Daerah Tingkat II Kotamadya Bitung. Pembentukannya harus segera diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Perlu dilakukan peninjauan ke dua daerah tersebut untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai sarana dan prasarannya, serta kegiatannya Side B : Harapan dari Fraksi PDI adalah pejabat atau pemimpin daerah yang diangkat benar-benar melaksanakan tugasnya agar rakyat dapat menikmati pelaksanaan pembangunan daerah Tingkat II yang baru. Selain itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru, baik Halmahera Tengah dan Bitung wajar apabila telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat, sehingga diberikan hak-hak tertentu yang sesuai dengan tata tertib DPRD yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan menteri dalam negeri	Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990	20 Juli 1990	Suara Jelas
95	Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990 Volume 3 Side A : Pemekaran dan penataan wilayah sesuai dengan ketetapan MPR RI No.II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tepatnya dalam Bab IV bidang ekonomi, yakni dalam rangka efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah perlu diadakan pemekaran dan penataan kembali wilayah daerah-daerah tertentu. Dalam Repelita V ini sesuai realisasi kebijaksanaan pemekaran daerah, Departemen Dalam Negeri selain Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan Daerah Tingkat II Kotamadya Bitung telah memprogramkan juga Daerah Tingkat II Lampung Barat, serta akan dilakukan penelitian-penelitian lain untuk dikembangkan Side B :Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990	20 Juli 1990	Suara Jelas
96	Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990 Volume 1 Side A : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV yang merupakan pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam acara ini perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya. Dalam hal ini dari Fraksi Karya Pembangunan diwakili oleh Drs. Isak Sojay, Fraksi ABRI diwakili oleh Sutahan Mangun Sentono, Fraksi Persatuan Pembangunan diwakili oleh H. Ali, dan Fraksi PDI diwakili oleh A. Tias Satiyono Sunarto. Pendapat akhir dari Fraksi Karya Pembangunan yang disampaikan oleh Drs. Isak Sojay. Menurutnya Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan hasil dari budaya rekam dalam menunjang pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan, teknologi, penelitian, penyebaran informasi, dan pelestarian budaya bangsa berdasar Pancasila, serta dalam UUD 1945 pasal 32 Side B : Sejarah tidak berarti hanya perjuangan fisik, tetapi mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam tidak hanya ditujukan pada penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam negeri, tetapi juga setiap warga negara Indonesia yang menerbitkan karya-karyanya di luar negeri. Rancangan Undang-undang ini mempunyai keterkaitan dengan UU No. 7 tahun 1971 tentang Kearsipan dengan obyek arsip dalam arti naskah. Harapa dari Fraksi Karya Pembangunan adalah untuk segera dipersiapkan fasilitas pendukungnya dan peraturan pelaksanaannya. Diharapkan juga berlaku lama dan dapat menyaring kebudayaan asing. Dilanjutkan pendapat akhir dari Fraksi ABRI oleh Sutahan Mangun Sentono. Fraksi ini berpendapat akan dimungkinkan upaya agar lebih terarah dalam mendata dan menginventarisir budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya simpan. Bila dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1971 tentang Kearsipan, Fraksi ABRI dapat memaklumi adanya kerancuan.	Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990	20 Juli 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
97	Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990 Volume 2 Side A : Sehubungan adanya kerancuan tersebut maka terhadap naskah dan rekaman yang dihasilkan instansi pemerintah yang berbentuk karya cetak dan karya rekam tetapi muatannya hal-hal yang bersifat rahasia, maka tidak menjadi obyek dalam undang-undang ini, sehingga tidak wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, maupun badan lain yang ditunjuk pemerintah. Harapan dari fraksi ini Undang-Undang tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam segera disosialisasikan ke masyarakat. Dilanjutkan dengan pendapat akhir Fraksi Persatuan Pembangunan oleh H. Ali. Menurut fraksi ini pembangunan bangsa harus dilaksanakan seutuhnya baik materiil maupun spirituil untuk meningkatkan kualitas manusia. Pentingnya undang-undang ini perlu dilakukan pembinaan demi kelestariannya dengan mewajibkan setiap penerbit dan pengusaha rekaman menyerahkan beberapa karya cetak dan karya rekam guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin bagi masyarakat. Harapannya perlu mengajak pengusaha Indonesia dalam membantu berdirinya perpustakaan dilingkungannya. Selain itu perlu dipersiapkan juga perangkat keras dan lunak sesuai dengan perkembangan teknologi, agar meningkatkan mutu dan pelayan perpustakaan Side B : Kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir dari Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia, dengan juru bicara A. Tias Satiyono Sunarto. Pada intinya Fraksi PDI menyetujui Undang-undang tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam untuk disahkan sebagai undang-undang. Sedangkan harapannya antara lain pada tahap pertama harus tersedia tenaga pelaksana yang mampu, profesional, serta mengetahui seluk beluk pelaksanaan karya cetak dan karya rekam sehingga diperlukan study perbandingan ke negara tetangga untuk memperoleh pengalaman dan tata kerja yang relevan. Selain itu demi kelestarian karya cetak dan karya simpan yang optimal maka perlu disediakan peralatan yang memadai, mutakhir, dan fungsional. Perlu didukung juga oleh tenaga pelaksana yang profesional dan tidak birokratis. Dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Fuad Hasan. Dengan pengesahan undang-undang ini merupakan langkah lebih maju bangsa Indonesia dalam perkembangan sistem informasi, dan menjadi andalan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa	Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990	21 Juli 1990	Suara Jelas
98	Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990 Volume 3 Side A : Acara Penutupan Rapat Masa Sidang ke IV Tahun 1989-1990. Dari tanggal 12 Mei 1990- 21 Juli 1990 alat kelengkapan DPR telah berhasil mengolah 10 buah RUU yang sedang maupun telah ditangani. Kesepuluh RUU tersebut adalah: 1. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, 2. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, 3. RUU tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 4. RUU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Halmahera Tengah, 5. RUU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Bitung, 6. RUU tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 7. RUU tentang Kepariwisata, 8. RUU tentang p[embentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, 9. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atau Pendapat dan Belanja Negara tahun 1989/1990, 10. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1987-1998. Dalam hal ini 6 buah RUU di atas telah diselesaikan dan 4 buah belum terselesaikan Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990	21 Juli 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
99	Rapat Paripurna ke 1/I/1990-1991 Side A : Acara pembukaan Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Presiden Soeharto, Wakil Presiden Soedharmono, S.H., menteri Kabinet Pembangunan V, para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, anggota dewan, dan para undangan. Dalam sambutannya ketua DPR/MPR RI mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terhadap 9 buah RUU, yakni : 1. RUU tentang Paten, 2. RUU tentang Peradilan Agama, 3. RUU tentang APBN 1990/1991, 4. RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN 1989/1990, 5. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara 1987/1988, 6. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, 7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, 8. RUU tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, dan 9. RUU tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam hal ini ada 5 RUU yang belum dibahas yaitu tentang kepariwisataan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Susunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang Side B : Dilanjutkan dengan sambutan ketua DPR/MPR RI dalam rangka mengisi kemerdekaan RI yang ke 45. Ideologi Pancasila telah kokoh dan melembaga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekuatiran tidak perlu lagi karena akan menghambat Pancasila itu sendiri. Tugas yang kita hadapi adalah memelihara stabilitas nasional yang dinamis. Tahap saat ini adalah mendekati negara maju agar lebih tercipta perdamaian. Politik luar negeri kita yang bebas aktif akan dilanjutkan demi pembangunan bangsa, sehingga negara kita membangun hubungan kerja sama kembali dengan RRC atas dasar Dasasila Bandung, kemudian ikut juga dalam KTT ke 15. Hal ini mencerminkan tekad negara yang sedang membangun untuk bekerja sama.. Dalam Repelita IV situasi ekonomi dunia belum pulih dari dampak penuhnya gejolak, sehingga pada Repelita V ini diutamakan pembangunan prasarana dasar, pengembangan SDM, dan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan bagi rakyat, seperti pendidikan, air minum, dan lain-lain.	Rapat Paripurna ke 1/I/1990-1991	21 Juli 1990	Suara Jelas
100 A	Rapat Paripurna ke 2/I/1990-1991 Volume 1 Side A : Acara Pembicaraan Tingkat I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama antara RI dengan Australia Utara) tentang Celah Timor dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 3 BURT dan BKSAP. Hakl ini berdasarkan surat dari Menteri Luar Negeri kepada pimpinan dewan No. 1876/90/02 tertanggal 20 Agustus 1990. Untuk acara pertama ditangguhkan, sehingga dilanjutkan dengan acara kedua yaitu Penetapan Susunan dan Nama Calon Anggota Komisi Badan Urusan Rumah Tangga DPR (BURT) yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPR bertugas menangani urusan dapur DPR, kerumahtanggaan dan kebijaksanaan DPR) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama calon Anggota Komisi Badan Urusan Rumah Tangga DPR (BURT) dan BKSAP dari Komisi I sampai Komisi IV dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia oleh Staf Sekretariat Jenderal Dewan Side B : Dilanjutkan lagi dengan pembacaan nama-nama calon Anggota Komisi Badan Urusan Rumah Tangga DPR (BURT) dari Komisi V sampai Komisi IX dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia. Kemudian pembacaan nama-nama Komisi APBN	Rapat Paripurna ke 2/I/1990-1991	16 Agustus 1990	Suara Jelas
100 B	Rapat Paripurna ke 2/I/1990-1991 Volume 2 Side A : Kelanjutan pembacaan nama-nama calon Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan calon keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), baik anggota tetap maupun anggota pengganti dari semua fraksi, yakni Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, maupun Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia. Dalam acara ini yang hadir berjumlah 348 orang anggota dewan dari 489 orang anggota dewan, sehingga forum telah terpenuhi untuk mengambil keputusan. Dilanjutkan dengan penutupan rapat paripurna Side B :Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 2/I/1990-1991	23 Agustus 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
101	Rapat Paripurna ke 3/I/1990-1991 Volume 1 Side A : Acara Pembicaraan Tingkat I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama antara RI dengan Australia (Utara) tentang Celah Timor. RUU tentang hal ini telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Pimpinan Dewan dengan amanat Presiden No. R.6/PU/VI/90 tanggal 21 Juni 1990, dan telah dilaporkan pada anggota dewan pada rapat paripurna dewan tanggal 25 Juni 1990. Perjanjian kerja sama ini telah ditandatangani oleh Menteri luar Negeri RI, Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Australia tanggal 11 Desember 1989. Menurut Ali Alatas perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam upaya penyelesaian batas maritim antara RI dengan Australia, dan merupakan pengaturan yang bersifat sementara dan unik. Perjanjian ini bukan merupakan penentuan batas lintas kontinen anantara 2 negara, karena maslah ini merupakan hal pelik karena ada perbedaan persepsi anantara kedua negara baik geologis, geomorfologis, landas kontinen di Celah Timor maupun prinsip hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan garis batas serta aspek politik Side B : Ali Alatas mengharapkan dengan keterangannya tersebut di atas dapat memperjelas maksud perjanjian kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Australia mengenai zona kerjasa di wilayah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Utara. Untuk selanjutnya RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama antara RI dengan Australia (Utara) ini diserahkan kepada Komisi I	Rapat Paripurna ke 3/I/1990-1991	23 Agustus 1990	Suara Jelas
102	Rapat Paripurna ke 4/I/1990-1991 Volume 1 Side A : Acara tunggal pidato ketua DPR dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPR/DPR tepatnya 29 Agustus 1945. Dalam sambutannya ketua DPR menguraikan tentang sejarah MPR/DPR RI. Awal Komite Nasional Pusat dilantik oleh Presiden Soekarno di Gedung Kesenian Pasar Baru (sekarang) Pelantikan anggota KNIP ini merupakan embrio kelahiran suatu badan permusyawaratan perwakilan Indonesia diawal kemerdekaan. Pada Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 mengamanatkan sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, maka segala kekuasaan dijalankan presiden dengan bantuan Komite Nasional. Pada awalnya KNIP beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, diantaranya bekas anggota PPKI. Kemudian anggotanya berkembang dengan tambahan dari wakil-wakil aliran dan golongan baru di dalam masyarakat. Setelah keluar maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 fungsi dan tugas mengalami perubahan atas usul anggota KNIP itu sendiri. KNIP yang dibantu Badan Pekerja KNIP kemudian diberi tugas legislatif ikut menetapkan GBHN sebelum terbentuk MPR dan DPR. Kemudian Kabinet presidensiil diganti dengan Kabinet Parlementer. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan UUD 1945 pernah berubah menjadi UUD RIS, kemudian UUDS dan kembali ke UUD 1945 lagi lewat Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 Side B : Kelanjutan pidato ketua DPR, Masa Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan nasakomnya dan kekuasaan terlalu besar kepada pemimpin revolusi, akhirnya terjadi peristiwa G 30 S PKI, kemudian Orde Lama tergantikan dengan Orde Baru pada tahun 1966 yang memberi koreksi pada penyimpangan yang terjadi menuju pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian lembaga DPR merupakan lembaga yang dinamis, sehingga harus menunjukkan citranya yang berbobot dan mampu memainkan peranan dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang mengaturnya, baik itu fungsi legislatif, hak bugded, maupun dalam fungsi pengawasannya	Rapat Paripurna ke 4/I/1990-1991	27 Agustus 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
103	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 1 Side A : Rapat paripurna laporan kunjungan kerja Komisi I sampai dengan Komisi X selama masa reses persidangan ke IV tahun sidang 1999/1990. Pada acara ini akan disampaikan laporan dari 6 Komisi, yakni Komisi III sebagai juru bicara Drs. Robenson Gorning, Komisi IV sebagai juru bicara Drs. Ismutiar Nurdin, Komisi V sebagai juru bicara Sundoro Syamsuri, Komisi VI sebagai juru bicara Dewa Putu Suparte Nide, Komisi I sebagai juru bicara Ibu Legowo, serta Komisi II sebagai juru bicara Lalu Patre Wijaya. Penyampain laporan Komisi III oleh Drs. Robenson Gorning dalam kunjungan timnya ke Bali dan NTB. Tujuan kunjungannya adalah melihat dari dekat keberhasilan pelaksanaan hukum dan penegakan hukum serta kendala-kendala yang dihadapi kedua daerah tersebut, mencakup bidang kehakiman, Imigrasi, perkara korupsi, bidang kepariwisataan, dan bidang kepolisian. Pada intinya pencairan dana untuk daerah NTB mengalami kesulitan, sedangkan Bali sudah cukup. Sedangkan sarana dan prasarana keimigrasian kedua daerah tersebut kurang memadai. Untuk kasus korupsi di NTB ada 35 perkara, sedangkan di Bali 13 kasus. Untuk bidang kepariwisataan, karena banyak pintu maka banyak kejahatan Side B : Di Bali banyak terdapat penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu hukum harus disemaksimal mungkin sesuai dengan UU Narkotika. Di NTB terjadi pemalsuan pestisida yang dibuat di Bandung. Di NTB sarana prasarana perhubungan baik darat, laut, udara perlu ditingkatkan. Sedangkan di Bali koordinasi antar aparat penegak hukum dan jajaran kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman lebih ditingkatkan agar tidak ada perbedaan persepsi yang tajam. Dilanjutkan dengan laporan dari Komisi IV oleh Drs. Ismutiar Nurdin dalam kunjungan timnya ke Jambi dan Lampung. Sedangkan lingkup yang dikunjungi meliputi Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Transmigrasi. Untuk daerah Jambi terjadi penurunan hasil perikanan karena kurangnya dana. Untuk pertanian di daerah transmigrasi diperlukan penambahan kursus-kursus. Perlu pula dilakukan konservasi kebun plasma	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991	29 Agustus 1990	Suara Jelas
104	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 2 Side A : Lanjutan laporan Komisi IV, di Jambi di bidang kehutanan sebagian besar digunakan untuk produksi kayu olahan yang diarahkan untuk kepentingan ekspor dibawah PT. Mugi Triman seluas 5000 Ha. Sedangkan di Lampung Tengah didirikan Sekolah Pusat Latihan Gajah di Way Kambas untuk melindungi gajah Sumatera. Melakukan perlindungan pada pohon tengkawang. Transmigrasi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah kurang lebih 6000 kepala keluarga. Mulai berkembang juga kebun kelapa sawit yang dikelola pihak swasta. Dalam hal ini di Lampung telah terjadi kerusakan hutan sehingga mulai berkurang kesuburan tanahnya, sering terjadi banjir dan erosi sehingga awal Repelita III Pemda Lampung mulai mengadakan penataan ulang pemukiman penduduk dan berusaha bertani di daerahmkawasan hutan, DAS, daerah kritis dan daerah padat penduduk, sehingga mereka akan berpindah di daerah tipis penduduknya. Dilanjutkan dengan laporan Komisi V oleh Sundoro Syamsuri dalam rangka kunjunga kerjanya ke Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk memantau pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, pariwisata, pos dan telekomunikasi dan perumahan rakyat. Side B : Dalam rangka kunjungan ke Jawa Tengah tempat yang mereka kunjungi adalah pelabuhan laut Tegal, pusdiklat jalan tol, Waduk Cacaban, pelabuhan Tanjung Mas Semarang, jalan lingkar Semarang, jalan Tol Krapyak Jatingaleh, dan relokasi korban banjir di Semarang, Bandara Adi Sumarmo di Solo, terminal peti kemas di Jebres Solo, dan Waduk Gajah Mungkur. Sedangkan kunjungan ke Yogyakarta antara lain di Bandara Adi Sumarmo, bahaya lahar gunung berapi, rencana Waduk Sermo di Kulonprogo, proyek air bersih di Wonosari, dan Bandara Tunggul Wulung. Temuan-temuan antara lain jalan kelas III karena frekwensi pemakaian meningkat sehingga banyak yang rusak dan segera diperbaiki. Untuk pelabuhan sarana dan prasarana kurang lengkap. Bandara perlu diperluas dan ditingkatkan juga sarana prasarananya. Keadaan waduk banyak pendangkalan adanya kebocoran waduk itu sendiri sehingga perlu ditata dan tertibkan. Jalan menuju tempat-tempat wisata juga perlu perbaikan. Dilanjutkan dengan laporan dari Komisi VI oleh Dewa Putu Suparte Nide dalam rangka kunjungannya ke PT. Kaltex di Riau, pabrik kertas Kiat Indah di Kerawang, Kilang minyak di Dumai, PT. tambang batubara PT. Kaltim Primako di Kalimantan Timur, dan PT. Bukit Asam di Sumatera Selatan	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991	5 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
105	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 3 Side A : Volume rusak Side B : Volume rusak	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991	5 September 1990	Suara Jelas
106	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 4 Side A : Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi II oleh Lalu Patre Wijaya. Masalah pertanahan merupakan tugas dari BPN yang berat dan kompleks, sehingga diperlukan penambahan tenaga kerja yang lebih profesional dan terampil terutama di daerah. Adanya kerja terpadu antara BPN dan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 5 tahun 1974. Masalah-masalah yang sering dihadapi adalah pengadaan tanah yang luas untuk pembangunan dan data pertanahan belum tercatat dengan lengkap, serta administrasi dan pendataan yang disalahgunakan oleh oknum. Adanya kasus ini maka diperlukan monitoring di daerah dan penertiban tanah sesuai dengan UU No. 51 tahun 1960. Sengketa tanah yang terjadi dimulai dari mutasi penyelesaian tanah yang tidak disertai dengan penyelesaian administrasi. Sebagai obyek pajak sering berpindah tetapi administrasi tidak pernah terselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Side B : Kasus-kasus pertanahan yang menonjol antara lain kasus tanah di Nias seluas 400 Ha, di daerah Muale dan Lagundri. Kemudian kasus tanah di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, masalah pemegang hak yang tidak diketahui alamatnya, pemegang hak meninggal dunia, dan sebagian besar tanah yang secara fisik sudah digarap oleh masyarakat setempat, bahkan banyak yang menjadi pemukiman	Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991	5 September 1990	Suara Jelas
107	Rapat Paripurna ke 5(L)/I/1990-1991 Volume 1 Side A : Rapat paripurna melanjutkan laporan kunjungan kerja Komisi-komisi selama masa reses persidangan ke IV tahun sidang 1989-1980. Pada acara ini dilanjutkan dengan Laporan Komisi VII dengan juru bicara Hari Suwondo S.H., Komisi VIII dengan juru bicara Nana Dumana Wiradi Putra, Komisi IX dengan juru bicara Dr. Ruberu, dan Komisi X dengan juru bicara Drs. Palar Batubara. Laporan kunjungan kerja Komisi VII oleh Hari Suwondo S.H. ke Propinsi Irian Jaya di Kabupaten Jayapura, Wamena dan Biak yang telah dilakukan tanggal 23-30 Juni 1990. Kunjungan kerja perseorangan juga dilakukan ke Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Timor-Timor. Laporan disusun dalam bidang keuangan, perbankan, perdagangan, Koperasi, dan Bulog. Dalam hal ini Irian Jaya dalam bidang keuangan terjadi perkembangan wajib pajak, sedang SDM-nya kurang. Untuk anggaran rutin masih terlalu kecil sehingga tidak seimbang dengan beban kerja. Inflasi juga terjadi di Irian Jaya, terutama harga semen yang cukup tinggi. Untuk koperasi mandiri berkembang di daerah Sorong, Mereuke, Wamena, dan Biak. Side B : Koperasi dan KUD belum dibuka. Kadin di Irian Jaya belum mampu mengantisipasi pembangunan daerah karena semua kegiatan tergantung dengan APBN dan APBD. Komoditi yang menjanjikan di Irian Jaya adalah kulit buaya. Namun adanya permainan dari para pengusaha sehingga rakyat belum bisa menikmati, karena menjualnya dengan harga rendah. Kendala pembangunan di sana karena kesulitan sarana dan prasarana, kualitas SDM yang rendah, kemampuan manajemen aparatur pemerintah yang masih rendah pula. Namun demikian secara sektoral dalam lingkup keuangan, perbankan, ada peningkatan walaupun relatif kecil. Untuk daerah Sumatera Selatan dalam bidang kesehatan dititik beratkan pada penurunan angka kematian bayi, balita, ibu melahirkan, dan penurunan vertilitas. Selain itu ditingkatkan juga program Keluarga Berencana (KB), termasuk sarana dan prasarananya. Rumah Sakit Manalayang di Sumatera Utara peralatan rumah sakit dari luar negeri harus segera dipasang, dokter spesialisnya juga masih kurang. Sedangkan Rumah Sakit Aceh Barat sangat memerlukan kendaraan roda 2 dan roda 4.	Rapat Paripurna ke 5(L)/I/1990-1991	5 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
108	Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 2 Side A : Untuk kunjungan perseorangan ke Kalimantan Tengah kegiatan PKK dan Program P2WKSS masih kurang karena hambatan Medan. Untuk Sumatera Selatan program KB terutama vasektomi dan tubektomi sudah berhasil baik. Hambatan dari dua daerah tersebut adalah karena kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, dan kesadaran terhadap nilai pernikahan dan tingkat pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Oleh karena itu banyak perkawinan muda, tingkat pendidikan rendah, kondisi geografis terisolir, serta alat mobilisasi yang tidak mendukung. Secara garis besar pelaksanaan pembangunan kesehatan di kedua wilayah tersebut pada umumnya telah mengalami kemajuan dan peningkatan hanya perlu diperbaiki teknis operasionalnya di Kalimantan Tengah. Partisipasi masyarakat Sumatera Selatan juga sudah cukup membantu. Sedangkan sarana prasarananya kedua daerah tersebut perlu ditingkatkan. Dilanjutkan dengan laporan kunjungan kerja Komisi IX oleh Dr. J. Riberu ke DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. Dalam kunjungan ini dilaporkan masalah pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olah raga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarananya sudah semakin diperhatikan dan dibenahi Side B: Sebagai contoh di Sumatera Selatan pembinaan pemuda dan olah raga dilakukan secara terpadu yang melibatkan instansi terkait, antara lain Kanwil Depdikbud, Dinas P dan K, Dewan Perwakilan Daerah, KNPI, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Program yang dilaksanakan antara lain: Paskibraka, pertukaran pemuda antar nagara, misi kapal muda Asia Tenggara, kepramukaan, dan lain-lain. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Suamtera Barat program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP 3). Dalam bidang keagamaan, sarana dan prasarana di daerah yang dikunjungi masih kurang, terutama asrama haji di Sumatera Barat, IAIN Palembang dan Ambon. Untuk daerah yang rawan gempa seperti Ciamis dan Sumedang, bangunan gedung baru sekolah diharapkan dibuat dengan kontruksi tahan gempa. Pemalsuan STTB dan NEM di Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti karena merusak citra pendidikan. Dilanjutkan dengan Laporan Komisi X yang disampaikan oleh Palar Batubara yang mengadakan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Kunjungan ini dengan tujuan memantau pelaksanaan APBN 1989-1990 untuk mendapat masukan tentang rencana APBN 1990-1991 dan Repelita yang mencakup bidang Komisi X. Tugas-tugas yang dibidangi Komisi X meliputi: perencanaan pembangunan nasional, kependudukan dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan riset dan teknologi, survey, tenaga atom, penerbangan dan antariksa, dan statistik.	Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991	6 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
109	Rapat Paripurna ke 5(L)/I/1990-1991 Volume 3 Side A: Dalam memproduksi wilayah Kalimantan Selatan diperlukan reboisasi dan reklamasi. Banyak kendala untuk memproduksi wilayah tersebut di atas sehingga perlu perhatian, antara lain : pembinaan peladang khususnya bagi masyarakat yang terisolasi melalui usaha pertanian menetap, usaha pelestarian sumber daya alam, tumpangsari, bina desa oleh HPH PIR, dan pemukiman kembali masyarakat terasing. Selain itu perlu pula ditingkatkan peran serta pesantren, pramuka, KNPI, LSM, dan lain-lain dalam rangka kegiatan penghijauan. Masalah yang sedang dihadapi adalah kurang tersedianya dana. Masalah limbah harus sesuai dengan Kepres No. 29 tahun 1990. Dalam hal ini PT. Indah Kiat di Riau belum mengamankan limbah sesuai dengan peraturan. Untuk wilayah Jawa Timur masalah lingkungan yang perlu diperhatikan, Operasi Kemukus oleh Polri dilakukan untuk mengurangi pencemaran di Jawa Timur. Dilanjutkan dengan laporan Komisi APBN yang mengadakan kunjungan ke Lampung pada masa reses ke IV persidangan. Kunjungan dilakukan di instansi-instansi terkait diantaranya Kanwil Perindustrian dan Kanwil Perdagangan, Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, dan Dinas Pertambangan dan Energi Side B: Kunjungan dilakukan juga ke Kanwil Keuangan beserta jajaran dan perwakilan BPKB di Lampung, aparat perbankan pemerintah maupun swasta, Kadinda dan Asosiasi-asosiasi, Bupati Dati II Lampung Utara, serta Pembantu Bupati Lampung Barat dalam kaitannya dengan pemekaran wilayah tersebut. Dilanjutkan juga ke kunjungan ke Pabrik marmer. Dari kunjungan tersebut diketahui info pelaksanaan APBN dan APBD, moneter, perkreditan, dunia usaha dan industri, laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, disertai masalah harapan dan himbauan yang dikemukakan oleh instansi dan pengusaha di daerah. Dari hasil kunjungan dilaporkan perlunya penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kawasan industri, adanya masalah tentang transmigrasi lokal, masalah minimnya beras, dan perlu segera diselesaikannya pembangunan Dam Batulegi untuk keperluan irigasi	Rapat Paripurna ke 5(L)/I/1990-1991	6 September 1990	Suara Jelas
110	Rapat Paripurna ke 5(L)/I/1990-1991 Volume 4 Side A: Lanjutan laporan Komisi APBN. Temuan yang diperoleh antara lain adalah proyek fasilitas Bandar Branti tentang pengeboran sumur bor tidak dapat dilaksanakan. PLN penyaluran listriknya baru mencapai 14.000 KK dengan peralatan yang sangat tua, sehingga perlu diganti. Dilaporkan juga adanya kebocoran keuangan. Diperlukan pembiayaan pembangunan gedung Departemen Penerangan dan pembangunan stasiun produksi keliling. Perlu juga dilakukan penambahan pesawat Jakarta-Branti agar tidak terus menerus terjadi perubahan jadwal. Jaringan telepon belum dialokasikan di Kadinda ibukota Lampung Selatan. PBB (harga tanah) belum ada ketetapan dari Kanwil II Dirjen Pajak. PT. Semen Tonasa perlu dikembangkan. Dalam kunjungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan Provinsi Lampung Selatan sudah berjalan walaupun masih banyak hambatannya. Pertumbuhan ekonomi selama Repelita IV cukup tinggi sekitar 9,7%. Pengaruh birokrasi dan deregulasi secara umum memberi dampak positif dalam ekonomi daerah. Bidang usaha tumbuh tinggi dalam ekspor swasta maupun pemerintah. Pemekaran Lampung Barat menjadi Lampung Utara dan Lampung Barat sudah memenuhi persyaratan tinggal mendapat persetujuan. Akan dilakukan pembangunan cagar alam Krakatau. Acara rapat paripurna ditutup oleh pimpinan dewan. Side B: Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 5(L)/I/1990-1991	6 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
111	Rapat Paripurna ke 6/1990-1991 Volume 1 Side A: Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua Dewan. Dilanjutkan dengan dua laporan BKSAP, yaitu mengenai pengiriman delegasi Indonesia dalam rangka pelucutan senjata di Born Republik Federasi Jerman dan muhibah delegasi DPR RI ke Uni Soviet dan Republik Federasi Jerman. Laporan pertama oleh Joni Herlaut Sumaryono yang melaporkan hasil konferensi pelucutan senjata di Born. Dalam Konferensi tersebut Joni Herlaut didampingi oleh Marzuki Darusman S.H. Tujuan konferensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan antar parlemen di dunia, apalagi Indonesia sangat berkepentingan dengan pelucutan senjata. Disana delegasi Indonesia mengikuti sidang pleno, merumuskan hasil pleno, mendengarkan pernyataan Kanselir Jerman Helmut Koln dalam pleno hasil-hasil konferensi. Dalam pernyataannya Indonesia menekankan perkembangan persenjataan baik dalam perencanaan, pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaannya akan menghancurkan segi-segi kehidupan manusia, merusak perdamaian dan budaya bangsa. Delegasi yang hadir dalam Konferensi di Jerman berjumlah 61 negara. Dengan konferensi ini melahirkan komitmen agar pelucutan senjata segera dipatuhi untuk mendamaikan dunia. Dilanjutkan dengan laporan kedua oleh Megawati Taufik Kemas yang melaporkan muhibah DPR RI ke Uni Soviet dan Republik Federasi Jerman. Side B: Dalam muhibah tersebut di atas diketuai oleh M. Kharis Suhud, sedangkan anggotanya terdiri dari R. Kartidjo, A.A. Oka Mahendra, Yan Hendrik Salu, Taheransah Karim, Megawati, dan Soeharto. Di Berlin Barat mengadakan pertemuan dengan wakil ketua Berlin Barat. Dilanjutkan dengan kunjungan ke gedung DPR Berlin, Museum Berlin, peternakan sapi, obyek-obyek wisata. Dalam kunjungan ke Moskow, adanya grashot dan perestroika oleh Gorbacev telah melahirkan prinsip pluralisme dalam bidang politik. PKUS tidak lagi mempunyai posisi sentral sebagai pemegang monopoli kekuasaanb, tetapi berkedudukan sama dengan partai-partai lainnya. Akhirnya tumbuh kembali negara-negara bagian yang sebelumnya kurang mendapatkan hakanya, bahkan ada kemungkinan negara-negara bagian tersebut melepaskan diri untuk membentuk negara sendiri yang merdeka	Rapat Paripurna ke 6/1990-1991	6 September 1990	Suara Jelas
112	Rapat Paripurna ke 7/1990-1991 Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam pembicaraan ini akan dikemukakan pendapat akhir dari masing-masing fraksi atas Rancangan Undang-Undang tersebut. Sebelum masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, terlebih dahulu ketua Komisi X Markus Bouran untuk melaporkan hasil pembicaraan tingkat III. Pada intinya Rancangan Undang-Undang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia telah berhasil diselesaikan walaupun pada awalnya banyak perdebatan, namun adanya kebersamaan dan toleransi akhirnya diperoleh kesepakatan. Side B: Pembicaraan tingkat IV yang diawali dengan hasil keputusan dari Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicara Sudiartini Sumarno. Dalam rangka tahap tinggal landas, maka pembangunan disegala bidang diperlukan peran aktif dari warga negara termasuk ilmuwan guna memberi sumbangan pemikiran yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sumber daya alam perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia yang mampu menyerap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sangat diperlukan, apalagi merupakan satu-satunya wadah bagi Ilmuan Indonesia. Diharapkan para ilmuwan mampu memberi saran dan pertimbangan yang berguna bagi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.	Rapat Paripurna ke 7/1990-1991	17 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
113	Rapat Paripurna ke 7/1990-1991 Volume 2 Side A: Lanjutan laporan dari Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicara Sudiartini Sumarno. Kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dapat dicapai demi kepentingan bangsa. Dalam hal ini Fraksi Karya Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dilanjutkan hasil keputusan Fraksi ABRI dengan juru bicara M. Taufik Sarbaini. Pada era tinggal landas pada Pelita VI pembangunan industri lebih meningkat lagi, sehingga perkembangan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi lebih berperan. Peluang untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin terbuka. Perbedaan pendapat dari masing-masing fraksi banyak menyita waktu, sehingga dalam pembahasan perlu dicari konsensus antar fraksi dengan pemerintah sebelum pembahasan RUU tersebut. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan satu-satunya wadah bagi ilmuan Indonesia sehingga Fraksi ABRI menyetujui Rancanagn Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang. Setelah pengesahan diharapkan pemerintah segera menyiapkan keperluan dalam rangka merealisasi keperluan para ilmuan terkemuka baik perangkat lunak dan kerasnya. Selain itu pemerintah juga segera mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Side B: Hasil Keputusan Fraksi Persatuan Pembangunan dengan juru bicara Drs. H. Suwardi Hambali. Dalam laporannya Suwardi mengatakan bahwa saling mengisi dan membantu dalam mengembangkan gagasan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mengejar negara-negara maju yang sudah terlebih dahulu mempunyai wadah ilmuan terkemuka sejak berabad-abad yang lalu. Bertitik tolak dengan hal tersebut maka Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat tentang pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk disahkan menjadi sebuah Undang-Undang di Indonesia. Setelah Undang-Undang tersebut di atas disetujui maka Fraksi Persatuan Pembangunan berharap pemerintah segera merealisasikan 3 pimpinan lembaga pemerintah menjadi anggota dalam angkatan I. Hal ini sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Menteri Negara Riset dan Teknologi Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pro. Dr. Fuad Hasan, dan Pimpinan LIPI. Dilanjutkan dengan Hasil Keputusan Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia dengan juru bicara Drs. Subagio	Rapat Paripurna ke 7/1990-1991	26 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
114	Rapat Paripurna ke 7/1990-1991 Volume 3 Side A: Dalam laporannya Subagio mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sangat penting supaya bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam bidang teknologi dengan negara lain. Bangsa Indonesia seakan mendapat tantangan untuk melakukan akulturasi dengan budaya dan peradapan modern yang telah tumbuh menghasilkan peradapan global dimana ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonpomi menjadi kekuatan utama. Oleh karena itu Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia menyetujui Rancangan tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah semua fraksi menyampaikan keputusan yang sama akhirnya forum menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah pengesahan itu B.J. Habibie memberi sambutan. Dalam sambutannya Habibie mengatakan bahwa Pemerintah bersama dengan DPR telah menyelesaikan produk undang-undang tersebut bagi nusa dan bangsa Indonesia dengan landasan pasal 5 ayai 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi pembangunan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, sehingga terbitnya undang-undang tersebut sangat ditunggu sebagai satu-satunya wadah ilmuan Indonesia Side B: Lanjutan laporan dari Subagio, bahwa untuk menjaga kesinambungan teknologi informasi dalam melaksanakan peran dan fungsinya diperlukan tersedianya dana yang teratur dari sumber APBN atau sumbangan lain, misalnya dari masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat. Namun tanpa bantuan tidak akan mengurangi kemandirian Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang akan tetap memberikan pendapat, saran dan pertimbangan berdasar kebebasan akademikyang bertanggung jawab. Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang ini diperlukan pengaturan lebih lanjut yang berupa Keputusan Presiden. Undang-Undang ini memuat 8 Bab dan 17 Pasal, sehingga ringkas dan hanya memuat substansi pokok.	Rapat Paripurna ke 7/1990-1991	26 September 1990	Suara Jelas
115	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 1 Side A : Rapat dihadiri oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan staf, serta anggota dewan. Rapat paripurna ini merupakan pembicaraan Tingkat IV tentang pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan. Juru bicara dari masing-masing fraksi adalah Fraksi ABRI diwakili oleh Sundoro Samsuri, Fraksi Karya Pembangunan diwakili oleh Ibnu Saleh, Fraksi Persatuan Pembangunan diwakili oleh M. Buang, dan dari Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia. Sebelum juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan laporannya terlebih dahulu Bapak Warno Harjo sebagai ketua Pansus (Panitia Khusus) memberikan laporan proses pembahasan pembicaraan Tingkat III tentang kepariwisataaan. Dalam laporannya ada 3 tipologi daerah kepariwisataaan yaitu daerah baru, daerah telah berkembang dan daerah yang telah maju. Hasil dari pembicaraan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataaan tersebut. Dilanjutkan dengan juru bicara pertama pembicaraan Tingkat IV dari Fraksi ABRI oleh Sundoro Samsuri. Kepariwisataaan merupakan hal baru baik pengertian, lingkup, tujuan, aspek, maupun unsur-unsurnya, sehingga perlu kehati-hatian kesepakatan muatan konsideran dari masing-masing fraksi. Dari segi ekonomi kepariwisataaan merupakan andalan penghasil devisa negara, sedangkan dalam pembangunan mempunyai peran dalam mewujudkan cita-cita bangsa Side B : Sarana dan prasarana perlu dibenahi untuk meningkatkan mutu dan kelancaran kepariwisataaan, selain itu perlu juga SDM yang terdidik di bidang ini. Harapan Fraksi ABRI mengharapakan Undang Undang Kepariwisataaan segera disosialisasikan khususnya kepada aparaturn pemerintah yang terkait. Adanya Undang-undang ini Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi akan semakin terpacu untuk lebih mendorong sektor kepariwisataaan	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991	26 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
116	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 2 Side A : Juru bicara dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Ibnu Saleh. Undang-undang Kepariwisata ini akan membawa dampak positif terhadap pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Undang-undang ini harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta GBHN yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Selain itu diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara. Kebijakan pembangunan kepariwisataan hendaknya dilaksanakan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, sehingga mampu menumbuhkan kesempatan berusaha dan kerja dan mendorong pembangunan baik sektoral maupun regional. BUMN, koperasi, serta swasta hendaknya diberi kesempatan yang sama serta diupayakan saling menunjang dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pengusaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang kepariwisataan perlu diberi perlindungan sehingga dapat terhindar dari persaingan yang merugikan. Era industrialisasi menempatkan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan yang mutlak perlu dipacu. Masukan-masukan dari Fraksi Karya Pembangunan sudah tertampung terutama perlunya SDM yang berkualitas di bidang kepariwisataan. Side B : Fraksi Karya Pembangunan menyetujui naskah akhir Undang-Undang tentang Kepariwisata untuk disahkan menjadi undang-undang. Harapan yang diinginkan dari fraksi ini adalah setelah disahkan undang-undang ini Pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah juga segera mensosialisasikan kepada masyarakat, agar dapat memahami daerah tujuan wisata di Indonesia. Juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh M. Buang. Pembangunan kepariwisataan ditujukan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dengan nilai-nilai agama secara tetap mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai agama harus dimasukkan. Pertunjukan artis baik dari dalam maupun luar negeri harus sesuai dengan peraturan di pasal 12, pelanggaran dikenakan sanksi 5 tahun atau uang 50 juta	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991	27 September 1990	Suara Jelas
117	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 3 Side A: Menurut Fraksi Persatuan Pembangunan penyediaan akomodasi, makan, minum juga perlu memperhatikan nilai-nilai agama. Hotel berbintang maupun melati diharuskan memberi tanda arah kiblat. Pembangunan kawasan wisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Dalam Undang-undang harus tercermin penggunaan produksi dalam negeri. Kepariwisata merupakan sumber devisa negara. Pandangan akhir dari Jupri juru bicara dari Fraksi PDI. Undang-undang kepariwisataan merupakan milik bersama sehingga tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga segenap aparat dan rakyat yang terjangkau oleh undang-undang ini. Kepariwisata harus berdasar norma dan dasar sesuai Pancasila dan UUD 1945. Produk hukum kepariwisataan biasanya hanya berupa Kepres, Keputusan Menteri dan keputusan lain. Dengan adanya Undang-undang kepariwisataan merupakan langkah baru dalam memantapkan tata hukum nasional yang kokoh Side B: Masukan-masukan dari Fraksi PDI disambut dengan baik yang menyangkut aspek ideil politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Usaha kepariwisataan harus mempunyai ijin kecuali usaha rumah tangga. Dalam hal ini Fraksi PDI menyetujui Rancangan Undang-Undang Kepariwisata untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang. Dilanjutkan pernyataan bersama dalam sidang paripurna untuk menyetujui Rancangan Undang-undang Kepariwisata menjadi undang-undang. Setelah pernyataan itu dilanjutkan sambutan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991	27 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
118	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 4 Side A: Sambutan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Soesilo Soedarman. Dalam kesempatan itu Menteri Soesilo Soedarman mengucapkan terima kasih dari semua yang telah menyetujui Undang-undang Kepariwisata. Tahun 1970-an Indonesia sudah mulai mengembangkan kepariwisataan nasional. Dengan semakin mantapnya pembangunan ekonomi, diharapkan dalam bidang kepariwisataan juga semakin berkembang dengan baik. Stabilitas yang dinamis, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik maupun pertahanan keamanan. Kebutuhan Undang-undang tentang Kepariwisata sangat mendesak apalagi kepariwisataan tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi internasional yang secara nyata bergerak ke arah iklim yang menguntungkan kepariwisataan nasional dan memberi prospek yang cerah. Untuk mensinkronkan naskah undang-undang ini telah dilakukan rapat-rapat antara departemen terkait, antara lain Deparpostel, Depdagri, Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Polri, dan lain-lain Side B : Dalam kaitannya dengan kemajuan dan peningkatan bidang kepariwisataan, ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian yakni kemajuan teknologi bidang transportasi dan komunikasi. Lahirnya Undang-undang tentang Kepariwisata diharapkan kepariwisataan nasional bertambah baik dan memacu pembangunan serta pembinaan kebudayaan nasional, memperkuat jatidiri bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu daya tarik dunia yang handal. Selain itu diharapkan juga dapat memberi sumbangan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Rapat Paripurna ke 8/1990-1991	27 September 1990	Suara Jelas
119	Rapat Paripurna ke 9/I/1990-1991 Volume 1 Side A : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Pembicara dari masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat akhirnya adalah dari Fraksi Karya Pembangunan oleh M. Roem, Fraksi ABRI oleh Ung Rumaji, S.H., Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Sukardi Efendi, dan dari Fraksi PDI oleh Tengku Dahman Muzir, S.H. Dalam rapat ini didahului oleh laporan dari ketua Komisi III Susanto Bangun Negoro, S.H. yang menyampaikan hasil pembicaraan RUU tersebut di tingkat III yang intinya telah membentuk jadwal kerja dan mekanisme pembahasan RUU tersebut melalui pembahasan langsung oleh Panitia Kerja yang komposisinya diwakili dari semua Fraksi. Akhirnya diperoleh kesepakatan secara bulat dari masalah-masalah yang ada dan mengesahkan hasil Panja suatu Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang Side B : Dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV ini diawali pembicara dari Fraksi Karya Pembangunan oleh M. Roem, S.H. Dengan keluarnya Rancangan Undang -undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang ini berarti bangsa Indonesia sudah maju selangkah dalam usaha memberi perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara yang tertib, aman, dan sejahtera. Pembentukan Rancangan undang-undang ini bertahap, diharapkan nantinya disetiap propinsi akan dibentuk juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986. Dengan disetujuinya Undang-Undang ini diharapkan dapat memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam hal ini Fraksi Karya Pembangunan menyatakan menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dilanjutkan dengan pembicara dari Fraksi ABRI oleh Ung Rumaji, S.H. Adanya undang-undang tersebut diharapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menjadi pengadilan banding yang mampu mewujudkan pemerataan keadilan perlindungan hukum dalam proses peradilan. Dengan keluarnya undang-undang tersebut di atas, akan keluar juga Peraturan Pemerintah tentang undang-undang tersebut	Rapat Paripurna ke 9/I/1990-1991	27 September 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
120	Rapat Paripurna ke 9/I/1990-1991 Volume 2 Side A : Pembicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Sukardi Efendi S.H. Keluarnya Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ada dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Adanya undang-undang tersebut di atas berarti bangsa Indonesia telah berusaha mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, tenteram dan tertib. Side B : Setelah pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perlu adanya pendidikan ilmu hukum PTUN yang lebih diintensifkan guna mempersiapkan pengadaan hakim, pengacara, atau pejabat yang menangani permasalahan sengketa Tata Usaha Negara. Kemudian pemerintah segera mensosialisasikan PTUN secara luas. Anggaran Departemen Kehakiman juga perlu ditambah untuk menunjang PTUN tersebut. Menjelang pemilu hendaknya PTUN bekerja secara efektif mengadili semua pelanggaran pemilu sepanjang menyangkut PTUN. Dalam hal ini Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang untuk disahkan menjadi undang-undang. Dilanjutkan dengan pembicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia oleh Tengku Dahman Muzir, S.H. Dalam uraiannya dikatakan bahwa pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai adalah pemerintah yang bersih dan berwibawa. Adanya jaminan dan perlindungan hukum yang pasti bagi masyarakat atas tindakan pejabat Tata Usaha Negara yang merugikannya, hal itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Setelah pembentukan PTUN tahap pertama ini diharapkan akan disusul dengan pembentukan PTUN di setiap ibu kota provinsi. Dalam hal ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang untuk disahkan menjadi undang-undang.	Rapat Paripurna ke 9/I/1990-1991	4 Oktober 1990	Suara Jelas
121	Rapat Paripurna ke 9/I/1990-1991 Volume 3 Side A : Menurut Tengku Dahman Muzir S.H. pengesahan PTUN dinilai sebagai tindakan maju selangkah dan semoga akan diikuti terus dengan berbagai langkah nyata lainnya. Dengan hadirnya pengadilan administrasi negara diharapkan akan lebih mendorong kehati-hatian badan atau pejabat administrasi negara dalam membuat keputusan maupun tindakan-tindakan lain yang dapat menjadi sengketa tata usaha negara. Kehadiran undang-undang ini bukan semata-mata untuk melindungi hak-hak perseorangan saja tetapi memberi perlindungan kepada badan atau pejabat administrasi negara itu sendiri sehingga mendorong kehati-hatian pejabat administrasi negara yang menjadi objek sengketa. Selain itu keberadaan undang-undang ini harus kita sambut dengan tekad untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada rakyat, meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi dan kesadaran administrasi yang mantap sehingga tercipta administrasi negara yang dilaksanakan oleh aparatur yang jujur, adil, bersih, efisien, dan berwibawa atas landasan negara hukum dan landasan administrasi yang tertib. Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 9/I/1990-1991	4 Oktober 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
122	Rapat Paripurna ke 10/I/1990 – 1991 Volume I Side A: Pada rapat ini membahas pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan AA Oka Mahendra sebagai Ketua Pansus. Rapat kali ini memasuki pembicaraan tingkat IV yaitu pengambilan keputusan. Permasalahan perumusan RUU antara lain mengenai redaksional, teknis yuridis, substansial (perumusan DKI Jakarta sebagai kekhususan langsung sebagai ibukota negara dan segala konsekuensinya), keterpaduan pelaksanaan DKI Jakarta dengan daerah sekitarnya dan perlunya keluwesan dalam penyusunan perangkat. Drs. FNT Radjaguguk (FKP) menyampaikan pendapat akhir atas RUU, landasan idiil RUU adalah Pancasila dan landasan yuridisnya mengacu pada pasal 18 UUD 1945 (tentang pembagian daerah di Indonesia). Side B: Lanjutan Penyampaian pendapat akhir RUU dari Drs. FNT Radjaguguk (FKP) mengenai keberadaan DPRD Tingkat I yang disebutkan dalam RUU, karena perencanaan pembangunan dikelola secara terpusat pada Tingkat I. FKP menyetujui RUU ini untuk disahkan. Sdri. Rukmini (FABRI) dalam pembicaraan tingkat III menyampaikan pendapat mengenai perlunya Pansus untuk mengadakan rapat dengar pendapat dengan para pakar, Pemda DKI Jakarta, Pemda Jawa Barat, Kunjungan Kerja ke wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek).	Rapat Paripurna ke 10/I/1990 – 1991	4 Oktober 1990	Suara Jelas
123	Rapat Paripurna ke 10/I/1990 -1991 Volume2 Side A :Lanjutan Uraian Sdri. Rukmini (FABRI) tentang susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Menurut FABRI, DKI Jakarta memiliki fungsi ganda yaitu sebagai ibukota negara dan Daerah Tingkat II yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu DKI Jakarta merupakan tempat perwakilan negara-negara asing dan berlangsungnya acara-acara kenegaraan sehingga perlu pengaturan secara khusus. Alternatif perluasan wilayah, ditinggalkan karena tidak mampu menjawab persoalan. Yang harus dikembangkan adalah kota-kota di sekitar DKI Jakarta seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi sebagai daerah penyangga dengan prinsip yang saling menguntungkan. Ny. Aisyah Amini (FPP) menyampaikan uraian terhadap RUU tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan DKI Jakarta seharusnya berdasarkan rencana induk DKI Jakarta yang telah mendapat persetujuan Presiden. Selain itu dijelaskan pula tentang jumlah keanggotaan DPRD DKI Jakarta. Side B: Lanjutan uraian Ny. Aisyah Amini (FPP) terhadap RUU tersebut. Menurut FPP, karena penduduk DKI Jakarta sangat beragam termasuk Kepulauan Seribu maka nama kecamatan sebaiknya diganti dengan Kotapraja. Selain itu, perlu adanya Lembaga Musyawarah Kota di setiap kotamadya, kemudian dijelaskan tentang beberapa pasal dalam RUU tersebut.	Rapat Paripurna ke 10/I/1990 -1991	Jumat, 12 Oktober 1990	Suara Jelas
124	Rapat Paripurna ke 10/I/1990 -1991 Volume 3 Side A: Lanjutan uraian Ny. Aisyah Amini (FPP) terhadap RUU tersebut. FPP menjelaskan tentang keterkaitan pasal 20 (1) UUD 1945 dengan RUU, usulan perubahan urutan pasal RUU, batas-batas wilayah DKI Jakarta, usulan perubahan pasal 6 pada RUU menjadi pasal 7 tentang wilayah kotamadya, kecamatan dan kelurahan. Dikemukakan pula rencana pembangunan rumah susun (rusun) di lokasi bekas lapangan udara Kemayoran. Uraian Sdri. Ipik Asmasubrata (FPDI) terhadap RUU tersebut. FPDI berpendapat bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota negara, dapat memiliki susunan pemerintahan sendiri sesuai UU yang berlaku, keterkaitan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1974 yaitu mengenai titik berat otonomi daerah pada daerah tingkat II dan usulan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kota yang terdiri dari ABRI dan pemerintah. Side B: Sambutan Menteri Dalam Negeri Rudini (sebagai wakil pemerintah), atas disahkannya RUU menjadi UU.	Rapat Paripurna ke 10/I/1990 -1991	Jumat, 12 Oktober 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
125	Rapat Paripurna ke 11/I/1990 – 1991 Volume I Side A: Laporan BKSAP tentang kunjungan DPR RI ke luar negeri yaitu hasil pertemuan AIPO dengan Parlemen Eropa tanggal 21-24 Mei di Brussel, Belgia. Dalam pertemuan tersebut, dibahas situasi politik di Eropa dan Asia Tenggara, ekonomi dan perdagangan, Putaran Uruguay, perhubungan laut dan udara Internasional, kerjasama Eropa – ASEAN, lingkungan hidup dan pengungsi. Dilaporkan pula, para anggota DPR RI juga berkunjung ke Rotterdam dan Amsterdam, Belanda serta menghadiri Sidang Umum AIPO ke II tanggal 10-15 September di Singapura. Side B: Lanjutan Laporan BKSAP ketika menghadiri Sidang Umum AIPO ke II di Singapura. Pada Sidang AIPO ke II ini, diusulkan beberapa hal yang akan dibahas yaitu politik regional, pengungsi Indocina, daerah bebas damai, netral dan bebas senjata nuklir, situasi di Eropa, Timur Tengah dan Afrika Selatan, KTT Kelompok 15 di Kuala Lumpur, KTT Bush – Gorbachev, usulan diadakannya KTT ke 4 di Singapura, sosial ekonomi dan alih teknologi. Diharapkan AIPO lebih berperan aktif dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.	Rapat Paripurna ke 11/I/1990 – 1991	Jumat, 12 Oktober 1990	Suara Jelas
126	Rapat Paripurna ke 11/I/1990 – 1991 Volume 2 Side A: Lanjutan Laporan BKSAP ketika menghadiri Sidang Umum AIPO ke II di Singapura. Diuraikan mengenai hasil Sidang Umum AIPO hari ke 6 dan penyerahan jabatan Sekretaris Jenderal (bergilir) antara Mr. A. Lopez (parlemen Singapura) kepada Mr. Johan Boudewijn Paul Maramis. Sekretariat Jenderal AIPO dijabat oleh Buri Ratnamwat (Thailand). Sidang AIPO ke 13 akan diselenggarakan pada tahun 1992 di Jakarta. Diuraikan tentang pengesahan empat RUU, sedangkan RUU tentang Celah Timor belum disahkan. Konferensi internasional yang dihadiri delegasi Indonesia yaitu Sidang Umum AIPO ke II tanggal 10-15 September 1990 di Singapura; Cominac Conference of Ministers of Information of Non Align Countries ke 4 tanggal 24-29 September 1990 di Havana, Cuba; Global Parliamentarian Conference of Human Settlements and Development tanggal 25–28 September 1990 di Tokyo, Jepang; Sidang Umum PBB ke 45 di New York, AS dan Konferensi IPU ke 84 tanggal 15-20 Oktober 1990 di Punta Del Este, Uruguay. Side B: Penjelasan mengenai tugas komisi-komisi DPR RI pada priode ini yaitu: Komisi II, Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, Komisi VIII, Komisi IX. Dikemukakan tentang Raker Komisi X dengan Bappenas, Komisi VI dengan Menteri Pertambangan dan Energi serta Komisi APBN dan Menteri Keuangan. Selain itu, dikemukakan tentang pengendalian inflasi, keterkaitan koperasi dengan ekonomi dan politik dan tidak adanya lembaga okusisi di DPR RI (tidak dibenarkan diktator mayoritas dan tirani minoritas) karena anggota DPR RI mengabdikan kepada rakyat. Dikemukakan juga mengenai rencana kunjungan Presiden Suharto ke Beijing bulan November 1990 setelah menghadiri penobatan Kaisar Akihito di Jepang.	Rapat Paripurna ke 11/I/1990–1991	Sabtu, 13 Oktober 1990	Suara Jelas
127	Rapat Paripurna ke 12/II/1990–1991 Volume I Side A: Laporan mengenai penyelesaian empat RUU yaitu RUU Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, RUU tentang Kepariwisata, RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang dan RUU tentang Susunan Pemerintahan DKI Jakarta. Laporan Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPR RI ke duabelas provinsi dalam rangka tugas dibidang pengawasan. Untuk daerah lain, dikunjungi secara perorangan sesuai daerah pemilihan masing-masing. Dijelaskan pula mengenai Laporan Semester APBN Tahun 1990 – 1991 dan perkiraan tambahan APBN 1990 – 1991. Selain itu, diinformasikan bahwa Nelson Mandela (Pemimpin Nasional Afrika Selatan dan Wakil Ketua Kongres Afrika, diberikan penghargaan Bintang Republik Indonesia pada HUT Golkar ke 26 tanggal 20 Oktober 1990. Side B: Tidak ada suara.	Rapat Paripurna ke 12/II/1990–1991	Sabtu, 13 Oktober 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
128	Rapat Paripurna ke 13/II/1990-1991 Volume I Side A: Rapat ini dihadiri oleh Menteri Kehakiman beserta staf, Jaksa Agung beserta staf, rombongan khusus Perancang Undang-undang Babinkum dan para anggota Dewan. Dalam rapat ini dibahas RUU Kejaksaan Agung RI yang merupakan tindak lanjut dari Amanat Presiden RI No. R/PU/9/1990 tanggal 17 September 1990. Rapat ini diawali dengan uraian Menteri Kehakiman tentang RUU Kejaksaan Agung RI. Pada UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), digambarkan keserasian hubungan kerja dan koordinasi antar aparat dalam proses penyelesaian masalah pidana (integrated criminal justice system) yang merupakan penyidikan, penuntutan, penyidangan, pemutusan perkara dan pelaksanaannya secara terpadu. Side B: Lanjutan uraian Menteri Kehakiman mengenai: eksistensi Kejaksaan Agung RI pada UUD 1945, Amanat Presiden pada pelantikan Ketua Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI tanggal 19 Agustus 1945, keputusan PPKI tahun 1945 yang membentuk duabelas Departemen (termasuk Kejaksaan Agung RI) dan UU No.19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan bukan sekedar penuntut umum tetapi alat pelaksana kekuasaan pemerintah dibidang peradilan, dalam penegakan hukum dan keadilan. Sejak tahun 1966, ada dua permasalahan mengenai kedudukan Kejaksaan dan kontradiksi Kejaksaan dengan UU No.15 Tahun 1961. Sejak diberlakukannya KUHP, bobot Kejaksaan berkurang dalam penegakan hukum dan keadilan. Dasar pembuatan RUU tentang Kejaksaan Agung RI yaitu pasal 284 KUHP (ketentuan peralihan) yaitu mengenai Kejaksaan tidak dapat dipisahkan dari wewenang penyidikan perkara-perkara tindak pidana khusus, menyempurnakan hasil penyidikan, wewenang khusus Jaksa Agung dan Kuasa Hukum.	Rapat Paripurna ke 13/II/1990 -1991	Senin, 5 November 1990	Suara Jelas
129	Rapat Paripurna ke 14/II/1990 – 1991 Volume I Side A: Muhammad Isnain Mahmud melaporkan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke 27 provinsi memantau perihal pemerintahan, aparatur, pembangunan, pertanahan, politik dan sebagainya. Dinilainya aparatur pemerintah jumlahnya belum proporsional. Selain itu dikemukakan mengenai pembangunan pulau Bintan (untuk memasok air ke Singapura, pariwisata, industri dasar dan agrobisnis) dan pembangunan pelabuhan Jambi. Side B: Lanjutan laporan Muhammad Isnain Mahmud mengenai Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke 27 provinsi. Hasil pantauan Komisi II yaitu tentang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pertanahan, politik, bantuan dana kepada parpol, penyediaan air bersih, perdagangan rakyat dan pembauran etnis Cina di pulau Bangka. Komisi II juga memantau sengketa tanah di beberapa daerah. Untuk tertibnya pengalihan hak tanah, Komisi II mengusulkan agar Peraturan No. 2 Tahun 1976, diusulkan untuk ditinjau kembali karena mengandung peluang untuk disalahgunakan. Dikemukakan pula Surat Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1990 tentang Susunan Tata Tertib DPRD, Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Susunan Pimpinan DPRD Tk II, penggantian antar waktu anggota DPRD Tk I Jawa Barat dan RUU pembentukan Lampung Barat sebagai Daerah Tingkat II. Laporan Komisi III DPR RI oleh Tengku Dahman Munzir mengenai rencana kunjungan kerja ke provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memantau bidang Kehakiman, Tunjangan Fungsional Lapas dan penyuluhan hukum.	Rapat Paripurna Ke 14/II/1990 – 1991	Jumat 16 November 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
130	Rapat Paripurna ke 14/II/1990 – 1991 Volume II Side A: Lanjutan laporan Komisi III DPR RI oleh Tengku Dahman Munzir mengenai penebangan kayu di Kalimantan Tengah, industrial Pancasila, materi UU Pariwisata, bidang imigrasi, penyidik Polri, peradilan agama dan kesepakatan empat orang Gubernur di Kalimantan tentang pengaturan terpadu bidang transportasi dan perbatasan. Laporan Komisi IV DPR RI oleh Abdullah Kholil mengenai kunjungan kerja Komisi IV ke Sulawesi Selatan (memantau pertanian, pabrik gula dan wisata bahari) dan Irian Jaya (memantau pembangunan transmigrasi, pertanian dan kehutanan). Side B: Lanjutan laporan Komisi IV DPR RI oleh Abdullah Kholil mengenai kunjungan kerja Komisi IV ke Sumatera Selatan (memantau pengamanan hutan). Laporan Kunjungan Komisi V DPR RI oleh I Gusti Ngurah Yudha ke Maluku. Di sana Komisi V DPR RI memantau kesenjangan pembangunan, sektor perhubungan laut, darat dan udara serta daerah kumuh di Maluku.	Rapat Paripurna ke 14/II/1990–1991	Senin 19 November 1990	Suara Jelas
131	Rapat Paripurna ke 14/II/1990–1991 Volume 3 Side A: Laporan Kunjungan Komisi V DPR RI oleh I Gusti Ngurah Yudha ke Maluku. Komisi V DPR RI memantau perumahan rakyat dan sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi (parpostel) di Maluku. Selain itu Komisi V DPR RI juga berkunjung ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan; proyek irigasi Teluk Lada di Pandeglang dan Lebak, Jawa Barat; Tanjung Perak, Surabaya dan Kalimantan Barat. Laporan Kunjungan Komisi VI DPR RI oleh H. Muhammad Yusuf Anwar Gaffar ke Jawa Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Side B: Lanjutan laporan Kunjungan Komisi VI DPR RI oleh H. Muhammad Yusuf Anwar Gaffar. Komisi V DPR RI berkunjung ke Sorong dan Wamena juga menyoroti kasus Freeport, tenaga kerja, penanaman modal, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tenaga kerja di Irian Jaya. <u>Laporan Kuniungan Komisi I DPR RI oleh H. Kusnaedi ke DKI Jakarta. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.</u>	Rapat Paripurna ke 14/II/1990–1991	Senin, 19 November 1990	Suara Jelas
132	Rapat Paripurna ke 14/II/1990 – 1991 Volume 5 Side A: Lanjutan laporan Kunjungan Komisi I DPR RI oleh H. Kusnaedi ke Kalimantan Tengah yang memantau kesiapan Pemilu di sana, sensus penduduk, forum muspida, komoditi utama, RRI Palangkaraya, pertanian, potensi hutan, perhubungan darat dan sungai, perfilman dan media massa setempat. Rapat paripurna ditunda besok. Side B: <i>Tidak ada suara.</i>	Rapat Paripurna ke 14/II/1990–1991	Senin, 19 November 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
133	Rapat Paripurna ke 14 Lj/II/1990–1991 Volume I Side A: Laporan Kunjungan Kerja Komisi APBN DPR RI oleh Dra. Sarikinkin Ahmad Dimyati ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Di Sulawesi Tenggara, Komisi APBN DPR RI meninjau tentang peran serta daerah dalam membangun potensi daerah; pelaksanaan APBN, APBD, perkreditan, dunia usaha, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara sektoral dan regional. Di Sulawesi Utara, Komisi APBN DPR RI meninjau tentang Gerakan Makmur Desa Merata (Gersa), pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan APBD, penerimaan asli daerah, penerimaan negara, perkreditan, perbankan, peningkatan SDM, komoditi non migas, pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) di Kendari, pembentukan BPKP Daerah, pembangunan jembatan, jalan dan bendungan serta proyek Bina Marga. Side B: Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi APBN DPR RI oleh Dra. Sarikinkin Ahmad Dimyati ke Sulawesi Tenggara memantau perhubungan laut dan udara, sertifikasi tanah milik Pos dan Giro, transmigrasi serta otonomi Daerah Tingkat I dan II. Laporan kunjungan kerja perorangan Komisi APBN DPR RI ke Nias, Sumatera dan Maluku Barat, Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang dibacakan oleh Sdr. Sukirman ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jambi. Komisi VII DPR RI juga memantau tentang piutang negara (kredit macet) yang ditangani PUPN, Perum Pegadaian, Taspen, Asuransi dan Perbankan.	Rapat Paripurna ke 14 Lj/II/1990–1991	Senin, 19 November 1990	Kosong, Tidak ada Suara
134	Rapat Paripurna ke 14 Lj/II/1990–1991 Side A: Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dibacakan oleh Sdr. Sukirman. Komisi VII memantau penyaluran KUK, kredit macet, kredit modal kerja, laju inflasi, Tata Niaga Karet dan investasi. Pada kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Komisi VII DPR RI memantau ekspor non migas, laju inflasi, karet rakyat, koperasi, panen padi. Sedangkan pada kunjungan ke Jambi, Komisi VII DPR RI memantau ekspor migas, karet rakyat, koperasi, kebutuhan beras dan meningkatkan pendayagunaan tanah. Laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dibacakan oleh Ny. Tony Sumarjo ke DI Aceh. Komisi VII memantau bidang kesehatan, sosial, KB, Universitas Syah Kuala, pemindahan RS Lhoksemauwe, RS Zainal Abidin, RS Sigli dan Abri Masuk Desa (AMD) serta kendala-kendala pembangunan di Aceh. Side B: Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dibacakan oleh Ny. Tony Sumarjo ke DI Aceh. Komisi VII juga memantau bidang kesehatan di Aceh dan pelayanannya bagi masyarakat dan bidang sosial seperti pembinaan masalah sosial di panti, urusan peranan wanita, peranan ABRI, pemukiman serta kelompok masyarakat Raja Ubiet dan Bantakiyah. Kemudian dilanjutkan dengan laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI (yang dibacakan oleh Drs. Kafandi) ke Kalimantan Tengah. Pada Kunjungan kerja tersebut, Komisi IX memantau pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA serta pembangunan mess guru di perbatasan.	Rapat ParipurnakKe 14 Lj/II/1990–1991	Selasa, 20 November 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
135	Rapat Paripurna ke 14 Lj/II/1990–1991 Volume 3 Side A: Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang dibacakan oleh Drs. Kafandi ke Kalimantan Tengah. Komisi IX DPR RI melaporkan perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Kalimantan Tengah; perkembangan pendidikan di Kebumen, Jawa Tengah; kondisi budaya, agama dan permasalahan tanah di Jambi serta pelayanan urusan haji di Kalimantan Tengah, DI Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan dengan laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dibacakan oleh Budi Waluyo ke Sulawesi Tenggara. Side B:Kemudian dilanjutkan dengan laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dibacakan oleh Budi Waluyo ke Sulawesi Tenggara tentang : pembangunan, pendidikan, kondisi daerah, sensus penduduk, pelabuhan laut dan tata kota Kendari, Lampung tentang : pembangunan dan penelitian Balai Budidaya Laut, Nusa Tenggara Timur tentang : dana PBB untuk kelautan, Irian Jaya tentang : pemeliharaan hutan, longsor, bendungan Wowotobi, Jawa Barat tentang : limbah yang mencemari waduk Saguling, DI Yogyakarta tentang pembentukan Komisi Amdal dan Sumatera Selatan.	Rapat Paripurna ke 14 Lj/II/1990–1991	Volume II, Selasa, 20 November 1990	Suara Jelas
136	Rapat Paripurna ke 14 Lj/II/1990–1991 Volume 4 Side A: Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dibacakan oleh Sdr. Budi Waluyo. Sidang ditutup. Side B: <i>Tidak ada suara.</i>	Rapat Paripurna ke 14 Lj/II/1990–1991	Selasa, 20 November 1990	Suara Jelas
137	Rapat Paripurna ke 15/II/1990-1991 Volume I Side A: Rapat Paripurna Dewan membahas mengenai pembicaraan tingkat II yaitu tentang : Pemandangan Umum para anggota Dewan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kejaksaan RI yang dibacakan FKP, FABRI, FPP dan FPD. Pemandangan Umum FKP yang dibacakan oleh MH Monangan Hutabarat, SH. FKP menyampaikan bahwa RUU tentang Kejaksaan RI merupakan proses penggantian UU No.15 Tahun 1951 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan RI dan UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Dikemukakan pula tentang pokok-pokok yang tercantum dalam RUU yaitu tentang kedudukan Kejaksaan RI berdasarkan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, susunan Kejaksaan RI, tugas dan wewenang Kejaksaan RI dan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI. Side B: Kemudian dilanjutkan dengan Pemandangan Umum FABRI yang dibacakan oleh Drs. H. Bagoes Sujadi GR. FABRI menyampaikan bahwa UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan rujukan hukum pembuatan RUU tentang Kejaksaan RI. Kemudian FABRI mengemukakan tentang pokok-pokok yang tercantum dalam RUU, isi berbagai peraturan perundangan tentang hukum dan aturan-aturan yang belum tercantum dalam RUU.	Rapat Paripurna ke 15/II/1990-1991	Selasa 20 November 1990	Suara Jelas
138	Rapat Paripurna ke 15/II/1990–1991 Volume 2 Side A: Lanjutan Pemandangan Umum FABRI yang dibacakan oleh Drs. H. Bagoes Sujadi GR mengenai kedudukan dan peranan Jaksa secara umum, persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung Muda dan pengertian yang tidak tercantum dalam RUU, UU No.15 Tahun 1951 dan UU No.16 Tahun 1961, untuk menghindari salah pengertian dalam RUU. Pemandangan Umum FPP yang dibacakan oleh Drs. Muhammad Yunus Husein mengenai kajian-kajian pasal-pasal dalam RUU. Side B: Lanjutan Pemandangan Umum FPP yang dibacakan oleh Drs. Muhammad Yunus Husein mengenai kajian-kajian pasal-pasal dalam RUU. Kemudian disampaikan Pemandangan Umum FPD oleh Jupri, SH.	Rapat Paripurna ke 15/II/1990–1991	Senin, 26 November 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
139	Rapat Paripurna ke 15/II/1990–1991 Volume 3 Side A: Lanjutan pemandangan Umum FPDl oleh Jupri, SH. FPDl meminta penjelasan tentang koordinasi dan sinkronisasi antara instansi terkait dalam penyusunan RUU tentang Kejaksaan RI. Selain itu FPDl mengemukakan bahwa RUU harus mengacu pada TAP MPR RI No. 4 Tahun 1978, kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, pembahasan pasal-pasal dalam RUU dan penyidikan tindak pidana khusus.	Rapat Paripurna ke 15/II/1990–1991	Senin, 26 November 1990	Suara Jelas
140	Rapat Paripurna ke 16/II/1990-1991 Volume I Side A: Laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Global Parliamentarian Human Settlement and Development ke IV tanggal 25 -18 September 1990 di Tokyo, Jepang yang dibacakan oleh Sdr. HSK Susilastuti Sutopo Isnomo. Dalam laporan ini dikemukakan tentang tujuan konferensi tersebut mengenai pandangan dan dukungan masalah-masalah pemukiman dan lingkungan secara umum (khususnya negara-negara berkembang) dan upaya solidaritas antar anggota parlemen. Topik yang dibahas dalam konferensi tersebut yaitu isu pemukiman dan pembangunan di tingkat global, pemukiman dan lingkungan, wanita dan pemukiman, proyek inovatif yang berhasil tentang pemukiman serta kerjasama dibidang pemukiman. Side B: Lanjutan laporan kunjungan delegasi DPR RI yang dibacakan oleh Sdr. HSK Susilastuti Sutopo Isnomo mengenai kesimpulan dan saran yang disepakati pada Global Parliamentarian Human Settlement and Development ke IV tanggal 25 -18 September 1990 di Tokyo, Jepang Laporan kunjungan delegasi DPR RI sebagai penasihat khusus para Menteri Penerangan negara-negara Non Blok ke Conference of Ministers of Information of Non Align Countries III (Cominec) di Havana, Kuba yang dibacakan oleh Sdr. Joni Herlaud Sumaryono (FABRI). FABRI melaporkan penyelenggaraan Cominec III, usulan delegasi RI mengenai realisasi program kerja Cominec I tahun 1984 di Jakarta dan Cominec II tahun 1987 di Harare, Zimbabwe. Diharapkan Gerakan Non Blok lebih pragmatis dalam mengisi kegiatannya, khususnya dalam meningkatkan bidang Informasi.	Rapat Paripurna ke 16/II/1990 -1991	Senin 26 November 1990	Suara Jelas
141	Rapat Paripurna Ke 17/II/1990-1991 Volume I Side A: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para anggota Fraksi yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman. Dikemukakan penjelasan yang bersifat umum untuk menyeragamkan persepsi secara prinsipil, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fraksi-fraksi, masalah-masalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), penambahan ketentuan tanpa mengubah sistem dan asas yang dianut KUHAP yaitu persidangan perkara secara cepat dan murah serta uraian proses perkara di pengadilan. Side B: Lanjutan jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para anggota fraksi yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman. Kemudian diuraikan mengenai pasal-pasal dalam RUU, keterkaitannya dengan KUHAP, kondisi hukum di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1959, proses perkara di pengadilan dan pembahasan pasal-pasal pada RUU yaitu pasal 32 (1) b, 28, 7 (2), 27 butir c dan d. Disampaikan pula surat-surat dari Mahkamah Agung yang telah diterima Pimpinan Dewan tentang usul pengangkatan enam nama Hakim Agung untuk mengganti dua orang Hakim Agung yang telah memasuki masa pensiun.	Rapat Paripurna ke 17/II/1990-1991	Jumat, 30 November 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
142	Rapat Paripurna ke 18/II/1990–1991 Volume I Side A: Rapat Paripurna Ke 18/II/1990 – 1991 merupakan pembicaraan Tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang pengesahan perjanjian antara RI – Australia, zona kerjasama antar dua wilayah di Timor Timur, Indonesia dengan Australia. Pada rapat paripurna tersebut, disampaikan pendapat akhir oleh Clementino Dos Reis Amaral (FKP) tentang penambahan terjemahan treaty dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedalam Batang Tubuh RUU, batas landas kontinen suatu negara dan tuntutan Indonesia atas garis tengah yang sama pada laut Timor dan laut Arafura. Side B: Lanjutan penyampaian pendapat akhir Clementino Dos Reis Amaral (FKP) tentang batas landas kontinen, yaitu di sebelah Selatan Timor Timur (dinamakan Celah Timor) dan di sebelah utara Australia. Dikemukakan tentang persetujuan zona kerjasama yang memanfaatkan migas di Celah Timor antara RI – Australia pada tahun 1989 yang dibagi menjadi 3 daerah eksplorasi dan eksploitasi yaitu daerah A, B, dan C. Tetapi persetujuan tersebut bersifat sementara, bukan ketetapan yuridiksi (hak berdaulat setiap negara). Selain itu RI dan Australia harus berupaya mencapai batas landas kontinen yang tetap. Penyampaian pendapat akhir oleh Drs. E. Syarifuddin (FABRI) tentang kerjasama RI – Australia di daerah eksplorasi dan eksploitasi yaitu daerah A, B, dan C; cara bagi hasil dan pengelolaannya dan prospek dan potensi migas di zona kerjasama dan sekitarnya. Dikemukakan pula UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.	Rapat Paripurna ke 18/II/1990–1991	Jumat, 7 Desember 1990	Suara Jelas
143	Rapat Paripurna ke 18/II/1990–1991 Volume 2 Side A: Lanjutan penyampaian pendapat akhir oleh Drs. E. Syarifuddin (FABRI). FABRI mengemukakan tentang perbandingan Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, pembagian hasil zona kerjasama di daerah A, B dan C serta pendapat dan saran terkait dengan RUU Celah Timor. Penyampaian pendapat akhir oleh H. Ali Tamin, SH (FPP). Menurut FPP, kekayaan alam yang terkandung di Celah Timor, dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam membahas konsiderans minyak, FPP memandang perlu untuk disebutkan UU yang terkait dengan perjanjian tersebut, baik secara nasional maupun internasional. Side B: Lanjutan penyampaian pendapat akhir oleh H. Ali Tamin, SH (FPP). FPP menitikberatkan ratifikasi perjanjian Celah Timor, meningkatkan hubungan bilateral RI – Australia, perjanjian Celah Timor diharapkan tidak merugikan batas landas kontinen di Celah Timor dan dapat mengembangkan saling pengertian dan menjembatani perbedaan antara kedua negara. FPP juga mengemukakan saran terkait perjanjian ini. Penyampaian pendapat akhir oleh BN Marbun, SH (FPDI) bahwa perjanjian Celah Timor diharapkan tidak menghambat persetujuan batas landas kontinen dan agree minute '88 bahwa kerjasama di Celah Timor dapat dihentikan setiap saat apabila RI – Australia telah sepakat terhadap penetapan batas landas kontinen.	Rapat Paripurna ke 18/II/1990–1991	Rabu, 12 Desember 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
144	Rapat Paripurna ke 18/II/1990–1991 Volume 3 Side A: Menteri Luar Negeri Ali Alatas, SH memberikan sambutan pemerintah mengenai perjanjian RI – Australia di zona kerjasama Timor Timur dan bagian utara Australia. Dikemukakan bahwa tujuan perjanjian ini untuk menjernihkan permasalahan dan menghilangkan keraguan mengenai manfaat perjanjian ini bagi Indonesia. Perjanjian ini merupakan pengaturan sementara garis batas landas kontinen kedua negara karena pihak RI dan Australia memiliki pendapat yang berbeda tentang garis batas landas kontinen masing-masing negara. Dikemukakan pula tentang pasal 2 (3) RUU perjanjian Celah Timor dan zona pengembangan bersama (daerah yang tumpang tindih yang menjadi klaim negara-negara yang bersangkutan) berdasarkan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 pasal 83 (3). Side B: Menteri Luar Negeri Ali Alatas, SH memberikan sambutan pemerintah mengenai perjanjian RI – Australia. Perjanjian ini berlaku selama 40 tahun, kontrak bagi hasil berlaku selama 30 tahun, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dikemukakan tentang pasal-pasal dalam RUU yaitu pasal 31 (1), pasal 2 (4) dan pasal 3. Diharapkan, setelah disahkannya perjanjian ini, dewan menteri dan otoritas bersama, dapat mulai bekerja dan berfungsi.	Rapat Paripurna ke 18/II/1990–1991	Rabu, 12 Desember 1990	Suara Jelas
145	Rapat Paripurna ke 19/II/1990–1991 Volume I Side A: Pada rapat ini disampaikan laporan kunjungan BKSAP DPR RI ke luar negeri yaitu: Laporan hasil kunjungan delegasi DPR RI ke Sidang Umum PBB ke 45 tanggal 18 September – pertengahan Desember 1990 di New York, AS, oleh Sdr. Sabar Kumbino. Dalam laporan ini disampaikan secara umum tentang penyelenggaraan Sidang Umum PBB tersebut dan misi yang dibawa delegasi RI ke Sidang Umum tersebut yaitu masalah umum, masalah khusus dan pelaksanaan tugas misi tersebut. Side B: Lanjutan laporan kunjungan BKSAP DPR RI ke luar negeri yaitu: Laporan hasil kunjungan delegasi DPR RI ke Konferensi IPU ke 84 tanggal 15 – 20 Oktober 1990 di Punta Del Este, Uruguay, oleh Sdr. Clementino Dos Reis Amaral. Dalam laporan ini disampaikan secara umum tentang penyelenggararaan jalannya, Ny. Tati Sumiati Harsoyo sebagai anggota Parlemen wanita selama 2 tahun, terpilihnya Delegasi RI sebagai Ketua Panitia Perumus Pendidikan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup serta terpilihnya Delegasi RI sebagai anggota panitia perumus dekolonisasi untuk mencegah Timor Timur dimasukkan dalam resolusi. Kemudian disampaikan kesimpulan (berupa keberhasilan-keberhasilan yang dicapai delegasi RI) dan saran-saran	Rapat Paripurna ke 19/II/1990–1991	Rabu, 20 Desember 1990	Suara Jelas
146	Rapat Paripurna ke 19/II/1990–1991 Volume 2 Side A: Lanjutan laporan Sdr. Clementino Dos Reis Amaral yang menyampaikan tentang resolusi-resolusi yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia, persiapan menghadapi Konferensi IPU ke 85 di Pyong Yang, Korea Utara dan meminta kerjasama Deparlemen Luar Negeri RI untuk Konferensi IPU ke 85 tersebut. Laporan hasil kunjungan delegasi DPR RI ke Sidang Umum III, Asian Forum of Parleментарian of Population and Development tanggal 15 - 18 Oktober 1990 di Bangkok, Thailand , oleh Sdri. Dr. Ida Yusi Dahlan. Disampaikan hal-hal yang dibahas dalam Sidang Umum III tersebut yaitu kependudukan dan lingkungan hidup, kesehatan ibu – anak, keluarga berencana dan perhatian terhadap orang lanjut usia. Laporan hasil kunjungan delegasi DPR RI tanggal 12 -13 November 1990 ke Papua Nugini, oleh MZ Wazaraka. Disampaikan tujuan kunjungan tersebut untuk meningkatkan kerjasama RI – Papua Nugini di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan melalui legislatif. Dalam kunjungan tersebut dibahas berbagai hal dan solusinya seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kecurigaan rakyat Papua Nugini terhadap Indonesia. Side B: Laporan hasil kunjungan anggota DPR RI tanggal 12 -13 November 1990 ke Papua Nugini, oleh MZ Wazaraka. Disampaikan tentang rincian kegiatan anggota DPR RI di Papua Nugini, kesimpulan dan saran.	Rapat Paripurna Ke 19/II/1990–1991	Sabtu, 15 Desember 1990	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
147	Rapat Paripurna Ke 19/II/1990 – 1991, Volume III Side A: Lanjutan Masa Sidang II mengenai dengar pendapat dengan Asosiasi Semen Indonesia, diusulkan agar ekspor semen dihentikan untuk sementara waktu, sistem kesehatan nasional, penyelenggaraan ibadah haji, larangan pementasan yang bertentangan dengan Pancasila, lingkungan hidup, Amdal, Komisi APBN – Menteri Keuangan yang membahas realisasi APBN dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) tanggal 20 Desember. Side B: <i>Tidak ada suara.</i>	Rapat Paripurna Ke 19/II/1990 – 1991, Volume III	Sabtu, 15 Desember 1990	Suara Jelas
148	Rapat Paripurna ke 20/III/1990-1991 Volume I Side A: Hal-hal yang dibahas pada rapat paripurna ini yaitu pembahasan RAPBN, demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan GBHN, kebijakan moneter, kenaikan harga minyak karena krisis Teluk, masalah-masalah pertanian, Hukum Acara Pidana, RUU yang telah disahkan sejak tahun 1989, RUU tentang Dati II Halmahera dan Bitung dan masalah-masalah yang muncul 1 tahun belakangan ini. Side B: Pidato Presiden Suharto tentang perhitungan RABN, penetapan harga minyak, sumber penerimaan non migas, perpajakan, bantuan luar negeri, investasi dari dalam negeri dan luar negeri, penerimaan negara, pengeluaran rutin dan pembangunan, subsidi daerah otonom, Trilogi Pembangunan dan prioritas pada Repelita V.	Rapat Paripurna ke 20/III/1990-991	Sabtu, 15 Desember 1990	Suara Jelas
149	Rapat Paripurna ke 20/III/1990–1991 Volume 2– 4 Side A: Pidato Pimpinan Dewan tentang penduduk Indonesia (per 31 Oktober 1990) berjumlah 179.321.641 jiwa dengan 31 % tinggal dipertanian dan 69 % di desa, Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, lawatan Presiden Suharto ke RRC dan Vietnam, Putaran Uruguay Desember 1990 di Brussel dan amanat yang disampaikan Presiden Soeharto tentang RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 1991/1992. Side B: Lanjutan pidato Pimpinan Dewan tentang pembangunan sarana dan prasarana, sektor perhubungan dan pariwisata, pembangunan energi, pendidikan bangsa, Program Pengembangan Kawasan Terpadu, pengembangan nilai moral, etika dan keagamaan, kelembagaan, III Dewan, Tata Usaha Negara, pembangunan di bidang kesehatan dan kebudayaan, anggaran KB	Rapat Paripurna ke 20/III/1990–1991	Senin, 7 Januari 1991	Suara Jelas
150	Rapat Paripurna ke 20/III/1990–1991 Volume 5 – 7 Side A: Lanjutan Amanat Presiden Soeharto yang mengemukakan tentang kependudukan di perkotaan serta kependudukan dan pembangunan. Sidang Paripurna ditutup. Side B: <i>Tidak ada suara.</i>	Rapat Paripurna ke 20/III/1990–1991	Senin 7 Januari 1991	Suara Jelas
151	Rapat Paripurna ke 21/III/1990–1991 Volume I Side A: Penyampaian pokok-pokok pikiran Komisi APBN oleh Ketua Komisi APBN Sdri. Bakri Sri Harsono mengenai penyusunan RAPBN yang dipengaruhi perekonomian nasional dan dunia, perkiraan peningkatan penerimaan negara Tahun Anggaran 1991/1992, perkiraan pengeluaran negara dan pembangunan Tahun Anggaran (TA) 1991/1992, peningkatan kesejahteraan PNS TA 1991/1992, peningkatan daya guna dan hasil guna anggaran negara. Side B: Lanjutan penyampaian pokok-pokok pikiran Komisi APBN oleh Ketua Komisi APBN Sdri. Bakri Sri Harsono mengenai penjelasan anggaran dari berbagai sektor, pokok-pokok pikiran Komisi APBN yang perlu mendapatkan perhatian, kebijakan fiskal dan moneter serta prioritas pembangunan nasional. Pada kesempatan ini juga disampaikan daftar nama calon anggota panitia khusus RUU tentang <u>Keiaksan RI</u>	Rapat Paripurna ke 21/III/1990–1991	Senin, 7 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
152	Rapat Paripurna ke 21/III/1990-1991 Volume 2 Side A: Nama-nama anggota Pansus RUU Kejaksaan yaitu Salvador Januarto Ximenes Soares, Herman Motte, Ahmad Dawaki, Sukoco Said. Anggota Pengganti yaitu Oka Mahendra, Suhardi, Ny. Hartini Mukhtar Kasran, Ibnu Saleh, Ny. Caya Supangat, Abu Hasan Jazili, Y. Mulyono, Jauhari Kahar Datuk Bagindo, Harun Rasyidi. Dari Fraksi ABRI, anggota tetap yaitu DP Sunardi, Made Sudiarto, Subagyo, Ung Rumaji, SH Simatupang, Akhmad Rustandi; anggota pengganti yaitu Samsudin, Sutaryo, E. Syarifudin. Dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), anggota tetap yaitu Abu Bakar, Sukardi Efendi, Muhamad Yusuf Husin, Ny. H. Aisyah Amini, anggota pengganti yaitu H. Didik Iskandar, Zarkasih Nur, H. Ali Tamin. Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), anggota tetap yaitu BN Marbun, Zufri, Tengku Dahman Musir; anggota pengganti yaitu Jeni Suharso, Budi Harjono. Rapat dihadiri oleh 317 anggota, telah mencapai quorum dan menyetujui nama-nama anggota Pansus yang telah disebutkan sebelumnya. Pengarahan singkat bahwa diharapkan Pansus RUU Kejaksaan dapat diselesaikan pada masa persidangan ke III ini dan penentuan pemilihan pimpinan Pansus dilaksanakan setelah selesainya rapat paripurna ini. Rapat paripurna ditutup. Side B: <i>Tidak ada suara</i>	Rapat Paripurna ke 21/III/1990-1991	Jumat, 11 Januari 1991	Suara Tidak Jelas
153	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume I Side A: Rapat membahas tentang pembicaraan tingkat II tentang Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 1991 - 1992 dan Nota Keuangannya. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Muda Keuangan beserta wakil pemerintah. Pandangan Umum Fraksi yang akan dibacakan oleh H. Abung Kusman (FKP), Drs. Sutikno (FABRI), H. Muhammad Hartono, BA (FPP), Klara Sitompul Tambunan (FPDI) dan besok pagi dilanjutkan lagi dengan tiga pembicara. Pembacaan Pandangan Umum oleh H. Abung Kusman (FKP) yaitu RAPBN harus ditetapkan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 (khususnya pasal 23), GBHN dan perkembangan Koperasi di Indonesia, RAPBN merupakan tanggungjawab konstitusional DPR RI bersama pemerintah dan penjelasan GBHN tahun 1988 tentang Pelita V. RAPBN 1991 – 1992 diharapkan dapat melaksanakan fungsi sesuai kedudukannya sebagai tahun ke III Repelita ke V dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menjamin terjadinya keseimbangan pembangunan antar bidang, sektoral dan wilayah. Pada Repelita ke V ini, harus dapat mewujudkan kemandirian ekonomi yang dapat menjadi tolak ukur bisa tidaknya mencapai era tinggal landas pada Repelita VI. Side B: (Sambungan) Pembacaan pandangan umum oleh H. Abung Kusman (FKP) yaitu mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan penentuan RAPBN 1991 – 1992 antara lain, harga minyak yang fluktuasi harganya dipengaruhi oleh Perang Teluk, penerimaan non migas, pajak penghasilan, hutang luar negeri (pada Repelita I – V masih memerlukan pinjaman luar negeri), pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan subsidi BBM. FKP menanyakan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah terkait Perang Teluk, hutang luar negeri dan rencana pembelian saham Bank Danamon oleh PT Taspen Pembacaan pandangan umum oleh Sdr. Sutikno (FABRI) mengenai kesenjangan hubungan Utara - Selatan, perkembangan ekonomi di Eropa Timur dapat berdampak positif bagi Indonesia, ekonomi ASEAN dan globalisasi dunia.	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-991	Jumat, 11 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
154	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume 2 Side A: (Sambungan) Pembacaan pandangan umum oleh Sdr. Sutikno (FABRI) mengenai Putaran Uruguay (perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka GATT yang dapat menciptakan perdagangan dunia yang lebih terbuka dan bebas), berbagai hal yang mempengaruhi laju inflasi, pertumbuhan ekspor non migas, tabungan pemerintah (selisih pemasukan dan pengeluaran negara), kebijakan uang ketat, hutang laur negeri, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Side B: (Sambungan) Pembacaan pandangan umum oleh Sdr. Sutikno (FABRI) mengenai PMDN yang banyak menumpuk di pulau Jawa, kendala-kendala ekonomi di Indonesia, peningkatan anggaran pembangunan untuk meningkatkan daya guna aparatur pemerintah, pengawasan perbankan setelah kasus Bank Duta, Bank Majapahit dan bank-bank lainnya. Pembacaan pandangan umum oleh Sdr. Muhammad Hartono, BA (FPP) mengenai penyusunan RAPBN dan nota keuangannya dipengaruhi Perang Teluk, berbagai keadaan perekonomian dunia pada tahun 1991, kebijakan yang mengarahkan kekuatan konglomerat agar tidak mempersempit golongan ekonomi lemah dan mengarahkan kekuatan konglomerat untuk mampu menghadapi globalisasi yang dapat memperbesar akses komoditi Indonesia di pasaran dunia, naiknya RAPBN tahun 1991 - 1992 dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak bumi, subsidi BBM, penentuan patokan harga, pada tahun anggaran 1991 -1992 pemerintah belum dapat menaikkan gaji PNS, pensiunan dan ABRI, diharapkan DPR RI dapat mengelola sendiri anggarannya, penerimaan dari pajak penghasilan dan pertambahan nilai dan penerimaan dari bea cukai.	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991	Kamis, 17 Januari 1991	Suara Jelas
155	Rapat Paripurna ke 22/III/1990–1991 Volume 3 Side A: Lanjutan pembacaan pandangan umum oleh Sdr. Muhammad Hartono, BA (FPP) mengenai usulan kepada pemerintah untuk memulihkan peranan dan fungsi bea cukai, mengganti UU Kepabeanan sebagai pengganti ordonantie, membina pabrik-pabrik rokok kecil, meninjau kembali Peraturan Tata Niaga Cengkeh Nomor SKEP. 306/KP/XII/1990 tanggal 28 Desember 1990, pelayanan publik yang menguasai hajat hidup orang banyak harus berkerjasama dengan BUMN (menolak swastanisasi BUMN), usulan pembayaran gaji ke 13 pada bulan April 1991 dan menaikkan gaji PNS, pensiunan dan ABRI serta menghilangkan potongan-potongan dan menambah 12 jenis jabatan fungsional baru dan subsidi BBM. Pandangan-pandangan lainnya yang disampaikan FPP mengenai penerimaan khusus laba negara, bank dan BUMN, penerimaan negara dari bantuan luar negeri, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), Dana Operasional Manajemen (DOM) serta arah dan dasar RAPBN dengan GBHN 1988. Pertanyaan FPP kepada pemerintah yaitu mengenai rincian jumlah hutang komersial, lunak dan setengah lunak, pembayaran bunga dan cicilan hutang, sektor pertanian dan pengairan, sektor pendidikan, generasi muda dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME, sektor pertambangan dan energi serta sektor pembangunan kota dan desa. Side B: Lanjutan pembacaan pandangan umum oleh Sdr. Muhammad Hartono, BA (FPP) mengenai berbagai hal yang terkait dengan sektor pembangunan kota dan desa, pembangunan sektor industri, sektor perdagangan dan koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi, pengadilan agama, bantuan proyek dalam dan luar negeri, peningkatan kualitas Bappeda Tingkat II, pengawasan pembangunan uang negara, subsidi bagi sektor pertanian, berbagai kebijakan moneter, penyebaran KUK di daerah oleh perbankan, kegagalan Bank Duta dan Bank Majapahit, usulan menerbitkan RUU yang terkait dengan keuangan, pertanyaan mengenai PT Indo Rayon Utama dan PT Indah Kiat yang telah go public padahal belum memenuhi syarat dan perolehan devisa negara dari ekspor komoditi non migas.	Rapat Paripurna ke 22/III/1990–1991	Kamis, 17 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
156	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume 5 Side A: (sambungan) pembacaan pandangan umum oleh Sdr. Muhammad Hartono, BA (FPP) mengenai usulan-usulan yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan dalam negeri, cadangan devisa Tahun Anggaran 1991 – 1992 dan partisipasi Indonesia pada perdamaian wilayah Teluk. Pembacaan pandangan umum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan (FPDI) mengenai RAPBN yang diajukan pemerintah selama ini masih belum sesuai dengan pasal 23 UUD 1945, komposisi dana bantuan luar negeri dalam RAPBN, prioritas pola umum pembangunan Repelita V, kenaikan penerimaan migas, penerimaan non migas, penerimaan dari berbagai jenis pajak dan bea cukai. Selain itu FPDI juga meminta penjelasan pemerintah tentang tata niaga cengkeh. Side B: (sambungan) Pembacaan pandangan umum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan (FPDI) mengenai penerimaan pembangunan, bantuan luar negeri beserta cicilan dan bunganya, pengeluaran rutin, usulan kenaikan anggaran belanja pegawai, usulan kenaikan gaji PNS, ABRI dan pensiunan, anggaran belanja barang, Kredit Usaha Kecil (KUK), penyaluran kredit perbankan, sektor ekonomi (perindustrian dan perdagangan), sektor pertanian dan pertambangan. Selain itu FPDI menanyakan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan efesiensi dan efektifitas dunia usaha di Indonesia.	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-991	Kamis 17 Januari 1991	Suara Jelas
157	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume 5 Side A: Lanjutan pembacaan pandangan umum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan (FPDI). Pandangan umum FPDI bagian II akan dibacakan oleh Sdr. Edwin Himawan Sukowati. Rapat ditutup. Side B: <i>Tidak ada suara.</i>	Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991	Kamis 17 Januari 1991	Suara Jelas
158	Rapat Paripurna ke 22 Lj/III/1990–1991 Volume I Side A: Pembacaan pandangan umum oleh Nur Siswadi Puspo Senjoyo (FABRI) mengenai tinjauan secara sektoral atas RAPBN tahun 1991–1992, diharapkan kenaikan anggaran diiringi pengelolaan dan pengawasan yang efektif dan produktif. Dalam RAPBN tahun 1991–1992, yang mendapat prioritas adalah sektor perhubungan dan pariwisata. Hal-hal lain yang dikemukakan yaitu, sektor pertanian dan pengairan (diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pangan), pengelolaan kawasan hutan, pembangunan sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan kepada Tuhan YME, sektor pembangunan dan energi, sektor perdagangan dan koperasi, sektor tenaga kerja dan transmigrasi, sektor agama dan sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan KB. Side B: (sambungan) Pembacaan pandangan umum oleh Nur Siswadi Puspo Senjoyo (FABRI) mengenai sektor hukum, sektor pengembangan dunia usaha, himbauan kepada pemerintah untuk meninjau kembali indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan Repelita V dan Repelita yang akan datang, efisiensi pelaksanaan pembangunan tercermin pada peningkatan anggaran sektor aparatur pemerintah, tingkat efisiensi tersebut harus diiringi pengajuan perundang-undangan terkait, serta peningkatan RAPBN tahun 1991–1992 agar diiringi dengan pengelolaan dan pengawasan yang efektif, produktif dan konsisten. Pembacaan pandangan umum bagian II oleh Maskan Sajarwo (FKP) diawali mengenai ralat (salah ketik) pada pandangan umum bagian I oleh FKP yaitu pada halaman 11, seharusnya berbunyi Tahun Anggaran 1990–1991 dan pada halaman 12, seharusnya berbunyi lebih dari 15, 8 Trilyun. Selain itu, FKP mengemukakan mengenai perkiraan pengeluaran pembangunan pada RAPBN 1991–1992, sektor perhubungan dan pariwisata, sektor pembangunan pengairan dan pertanian, pembangunan eksploitasi sumber daya hutan serta sektor pendidikan, generasi muda dan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.	Rapat Paripurna ke 22 Lj/III/1990–1991	Kamis, 17 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
159	Rapat Paripurna ke 22 Lj/III/1990–1991 Volume 2 Side A: (sambungan) Pembacaan pandangan umum oleh Maskan Sajarwo (FKP) mengenai kebutuhan energi dalam negeri dan sumber energi tenaga nuklir, sektor pembangunan desa dan kota, aturan-aturan hukum yang harus diubah, kegiatan transmigrasi dan pemerataan pembangunan di luar pulau Jawa, kebijakan-kebijakan keuangan dan investasi, kesiapan pemerintah dalam keseimbangan pembangunan di pulau Batam dengan Singapura dan Johor, prioritas pelayanan dasar bagi rakyat, peningkatan masyarakat berpenghasilan rendah (khususnya para nelayan dan suku-suku terasing), pelaksanaan KB Mandiri, kegiatan-kegiatan pengembangan dan kelestarian lingkungan hidup harus dikoordinasikan dengan Bapedal, peningkatan SDM yang berkualitas dan urbanisasi. Pembacaan pandangan umum bagian II oleh Edwin Himawan Sukowati (FPDI) mengenai lima sektor yang mendapat anggaran terbesar. Lima sektor tersebut yaitu sektor perhubungan dan pariwisata, sektor pertanian dan pengairan, sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, sektor pertambangan dan energi serta sektor pembangunan daerah/desa dan kota. Side B: (Sambungan) Pembacaan pandangan umum bagian II oleh Edwin Himawan Sukowati (FPDI) mengenai himbauan kepada pemerintah agar anggaran pembangunan jalan dan jembatan baru lebih ditingkatkan. Selain itu dikemukakan juga mengenai sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, sektor pariwisata, sektor pertanian dan pengairan, peningkatan pendapatan dan taraf hidup para petani, nelayan dan peternak, sub sektor energi, sub sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan KB, sektor tenaga kerja dan transmigrasi, sektor iptek dan penelitian, sektor pengembangan dunia usaha, sektor industri, sektor sumber alam dan lingkungan hidup serta sektor perdagangan dan koperasi.	Rapat Paripurna ke 22 Lj/III/1990–1991	Jumat, 18 Januari 1991	Suara Jelas
160	Rapat Paripurna ke 22 Lj/III/1990-1991 Volume 3 Side A: Lanjutan Penutup pandangan umum FPDI bagian II oleh Edwin Himawan Sukowati. Dengan selesainya pandangan umum bagian umum bagian II, telah selesai pandangan umum seluruh Fraksi. Pembicaraan tingkat II jawaban Pemerintah, akan diadakan pada tanggal 25 Januari 1991. Ada usulan bahwa penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan, seharusnya disertai dengan rincian anggaran (buku biru), baik anggaran rutin maupun pembangunan. Rapat ditutup. Side B: <i>Tidak ada suara.</i>	Rapat Paripurna ke 22 Lj/III/1990-1991	Jumat, 18 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
161	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991 Side A : Pembukaan rapat paripurna dewan dan laporan kunjungan kerja komisi selama reses persidangan kedua tahun 90-91. Laporan masing-masing komisi : 1. Komisi I disampaikan Endang Kusuma Inten Suweno 2. Komisi II disampaikan Drs. Awang Arung Isak 3. Komisi III disampaikan Drs. Habi Sujadi 4. Komisi IV disampaikan H. Lukman 5. Komisi V disampaikan R. Ahmad Natar 6. Komisi VI disampaikan R. Adi Sayoto 7. Komisi X disampaikan H.M Musafak 8. Komisi APBN disampaikan Drs. Muhammad Mansyur 9. Komisi VII disampaikan Umbu Haramburu Kapita 10. Komisi VIII disampaikan Drs. H. Sadikun Sugih Waras 11. Komisi IX disampaikan Drs. Tengku Jamaludin Wali Laporan kerja komisi I dengan tema : Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Pemilu 1992 dalam pemantauan ke Dati II Sumatra Barat. Side B : Kesimpulan hasil kerja di Daerah TK I Sumatra Barat : 1. Pemerintah Daerah tetap optimis untuk memacu pembangunan diberbagai sektor dan mensukseskan Pemilu 1992 2. Jajaran ABRI di Daerah TK II dan TK I Sumatra Barat mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Laporan komisi II oleh Awang Arung Isak 1. Bidang Pemerintah 2. Bidang Aparatur 3. Bidang Pembangunan 4. Bidang Pertanian 5. Bidang Sosial Politik 6. Penutup	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991	Jumat, 18 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
162	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991 Side A : Lanjutan oleh Awang Arung Isak Pelayanan Pemerintah untuk penanaman modal bagi masyarakat Laporan Komisi III oleh Drs. Habi Sujadi GR. Daerah kunjungan di Bengkulu dan Sumatra Selatan, Tema Kunjungan Kerja Komisi III : Dengan semangat keterpaduan Aparat Penegak Hukum mengembangkan tugas untuk menegakkan Hukum dan Keadilan. Laporan terdiri 2 bagian : bagian yang menonjol / penting - penting yang perlu mendapatkan prioritas perhatian pemerintah dan bagian yang memuat data dan hal-hal lain yang tak terpisahkan dengan hal pertama. Side B : Laporan penemuan hasil kunjungan kerja Komisi III sebagai berikut 1. Pendahuluan 2. Bidang Hukum membahas KUHP dan Penyuluhan Hukum 3. Bidang Kejaksaan membahas Jaksa Masuk Desa, Laut dan Pos Hukum Terpadu 4. Bidang Kehakiman membahas Hakim Masuk Desa, Laut dan Kadarkum 5. Bidang Kepolisian 6. Bidang Pengadilan Agama 7. Penutup Laporan Komisi IV oleh H. Lukman Kunjungan kerja di Daerah Sumatera Utara dan Kalimantan Timur di lingkup Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Transmigrasi.	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991	Rabu, 23 Januari 1991	Suara Jelas
163	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991 Side A : Lanjutan oleh H Lukman Sektor Pertanian di Kalimantan Timur dengan program Ekstensifikasi penanaman padi melalui kegiatan pengolahan sawah baru, Sektor kehutanan bekerja sama dengan PT. Inti Indorayon Utama di Tapanuli Utara yang merupakan hutan pinus, Sektor Transmigrasi dengan adanya 17 UPT di Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Selatan. Side B : Laporan Kerja Komisi V oleh H. Ahmad Natar di daerah propinsi Jambi dan Kodya Madya Sumatera Selatan pada tanggal 16 - 20 Desember 1990. 1. Sektor Perhubungan membahas Perhubungan Laut, proyek pembangunan Pelabuhan Laut Banyu Asin 2. Sektor Departemen Pekerjaan Umum membahas Sarana dan Prasarana Jalan meliputi Pembangunan Jembatan Musi dan Jalan Arteri dan Rehabilitasi Jembatan Ampera 3. Sektor Pariwisata, Pos dan Giro membahas pembangunan Situs Purbakala.	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991	Rabu, 23 Januari 1991	Suara Jelas
164	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991 Side A : Lanjutan oleh H. Ahmad Natar, membahas masalah sektor perumahan rakyat, sektor pariwisata Laporan Komisi VI oleh R. Adi Sayoto kunjungan kerja di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Membahas bidang perindustrian lebih prioritas peningkatan modal, bidang pertambangan dan energi lebih mengembangkan kebijakan tentang listrik, bidang tenaga kerja lebih meningkatkan pembinaan akan peraturan dan bidang penanaman modal lebih meningkatkan sarana dan prasarana. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991	Rabu, 23 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
165	Rapat Paripurna ke 23 (Ijt)/III/1990-1991 Volume 1 Side A : Laporan Komisi oleh H.M. Musafik 1. Koordinasi Perencanaan dengan memperhatikan personil Bapeda Kalimantan Timur yang semakin luas 2. Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengangkat program kali bersih sebagai air baku pemasok air bersih kelas B 3. Reboisasi dengan menambah jumlah dan jenis tanaman 4. Penyelamatan Satwa Langka dengan peningkatan pengawasan HPH agar tidak sempitnya lahan Hutan 5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Statistik 7. Bidang Pemetaan Side B : Kesimpulan kunjungan kerja komisi X dalam kunjungan kerja selama reses masa persidangan ke 2 tahun 1990-1991.sebagai tindak lanjut pemerintah harus memperhatikan masalah perencanaan, kependudukan & lingkungan hidup, masalah IPTEK & Statistik, bidang pemetaan, pengkajian dan penerapan teknologi BPPT. Laporan Komisi APBN oleh Drs. M. Mansyur. Hasil kunjungan kerja tingkat I Jabar, Kanwil Pertanian, Kanwil Perhubungan, Kanwil Pekarjaan Umum, Kanwil Perdagangan, Kanwil Pertanian, Kanwil Perindustrian, Kanwil Keuangan, Aparat Perbankan dan Swasta.	Rapat Paripurna ke 23 (Ijt)/III/1990-1991	Rabu, 23 Januari 1991	Suara Jelas
166	Rapat Paripurna ke 23 (Lj) / III / 1990 -1991 Side A : Lanjutan, Pengembangan Pulau Batam yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Laporan Komisi VII oleh H. Slamet Riyanto, pembahasan masalah keuangan, perbankan, perdagangan, koperasi di propinsi TK I Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh ketua komisi VII Saiful Anwar Husein. Laporan Komisi VIII oleh Drs. H Sadikun Sugih Waras Kunjungan kerja ke daerah TK I Propinsi Jawa Tengah membahas masalah bidang kesehatan, sosial, peningkatan peranan wanita dan keluarga berencana Side B. Lanjutan Laporan Komisi VIII, membahas masalah bidang sosial dan bidang peranan wanita. Laporan Komisi I oleh Drs. Tengku Jamaludin Wali, kunjungan kerja ke daerah TK I Sulawesi Tengah, membahas pembangunan Indonesia Timur, masalah terbatasnya SDM / kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia, peningkatan prioritas pembangunan Sulawesi Tenggara antara lain bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan agama.	Rapat Paripurna ke 23 (Ijt)/III/1990-1991	Kamis, 24 Januari 1991	Suara Jelas
167	Rapat Paripurna ke 23 (Lj)/III/1990-1991 Side A : Lanjutan Laporan Komisi IX. - bidang pendidikan --> hambatan ketenagaan tentang penyebaran guru yang belum merata - bidang kebudayaan --> pembentukan kelompok kebudayaan kesenian tradisional dan kurangnya pembinaan - bidang agama --> kurangnya madrasah/tempat belajar agama dan kurangnya guru agama Side B : Penutupan rapat Paripurna ke 23/III/90-91 oleh pimpinan sidang	Rapat Paripurna ke 23 (Ijt)/III/1990-1991	Kamis, 24 Januari 1991	Suara Jelas
168	Rapat paripurna ke 24/III/1990-1991 Side A : Pembukaan rapat oleh Pimpinan Sidang. Rapat membahas jawaban Presiden atas pandangan umum para anggota mengenai rancangan undang-undang tentang APBN 91-92 beserta nota keuangannya. Menteri Keuangan --> jawaban pemerintah, tantangan globalisasi semakin ketat dan membahas masalah Anggaran dan Belanja Negara; membahas mengenai penerimaan pajak tidak langsung yang lebih besar dari pajak langsung. Side B : Membahas peningkatan penerimaan bukan pajak melalui penyempurnaan administrasi, tata penyetoran dan pengawasan dalam pelaksanaan.	Rapat paripurna ke 24/ III/1990-1991	Kamis, 24 Januari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
169	Rapat paripurna ke 24 (Lj)/III/1990-1991 Side A : Lanjutan, perkembangan koperasi harus sejajar dengan para pelaku ekonomi lainnya dan diperlukan peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian sesuai kebutuhan dan perkembangan. Penutupan rapat paripurna ke-24/III/90-91 oleh pimpinan sidang Side B : Tidak ada suara	Rapat paripurna ke 24 (Lj)/ III/1990-1991	Jumat, 25 Januari 1991	Suara Jelas
170	Rapat Paripurna ke 25/III/1990-1991 Side A : Pembukaan Rapat oleh pimpinan dan terbuka oleh umum. Laporan Komisi APBN tentang rancangan UU APBN tahun 91-92 oleh Ketua APBN sdr. H. Abdul Bakri Srihardo. Komisi APBN mencatat berbagai masalah sbb : Sistem anggaran masih ada kerancuan tentang penempatan kegiatan. Side B : Pembangunan di bidang hukum, masalah kejaksaan dan departemen kehakiman masih membutuhkan Sarana dan Prasarana	Rapat Paripurna ke 25/III/1990-1991	Jumat, 25 Januari 1991	Suara Jelas
171	Rapat Paripurna ke 26/III/1990-1991 Side A : Ketua membuka rapat paripurna dan terbuka untuk umum. Rapat membahas laporan tentang : 1. Laporan Delegasi DPR-RI ke sidang Internasional Tropical Timer Organization Consul di Yokohama Jepang oleh Usman Hasan tentang hutan sebagai komponen lingkungan hidup menjadi faktor dominan menjamin kelangsungan kehidupan biologi yang perlu dipelihara, kedudukan, peranan ekonomi dari hutan sebagai sumber pendapatan serta komoditi perdagangan, dan Keorganisasian ITTO. 2. Laporan Delegasi DPR-RI ke sidang Road and Agriculture Organization di Roma Italia oleh Sutahan Mangun Sentono tentang misi yang dibawa sebagai tugas dan kewajiban program nasional bidang pangan dan pertanian. Side B : Kemajuan usaha pembangunan plasma nutfah ternak sangat berkembang pesat, pengembangan pangan dunia supaya anggota donor dapat memberikan sumbangan berupa komoditas atau tunai.	Rapat Paripurna ke 26/III/1990-1991	Kamis, 14 Februari 1991	Suara Jelas
172	Rapat Paripurna ke 27/III/1990-1991 Side A : Wakil Ketua membuka rapat dan terbuka untuk umum. Pembahasan usul pendapat sdr. Theo L Sambuaga dkk tentang perang teluk sbb : 1. Pembicaraan TK.I penjelasan pengusul atas pendapat Theo L Sambuaga dkk tentang perang teluk 2. Pembentukan panitia khusus yang akan menangani materi pada pembicaraan TK.II 3. Pengambilan keputusan dengan urutan-urutan sbb. Laporan Ketua Pansus, Pendapat fraksi-fraksi tentang pernyataan dewan tentang perang teluk. Side B : Pembukaan rapat melanjutkan pembicaraan Tk. IV tentang laporan pansus oleh Theo L Sambuaga dan pembahasan konsep pendapat usul pernyataan Theo L Sambuaga.	Rapat Paripurna ke 27/III/1990-1991	Jumat, 25 Februari 1991	Suara Jelas
173	Parap Paripurna ke 27/LJ/III/1990-1991 Side A : Drs. Mardiansyah dari fraksi PP mengemukakan pendapat tentang perang teluk tidak hanya menghancurkan berbagai aspek kehidupan tapi propaganda perang teluk dapat membentuk persepsi yang keliru ditengah masyarakat sehingga menciptakan disintegrasi bangsa. Naro dari fraksi PDI berpendapat menyatukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berperang untuk segera genjatan senjata dan menghentikan perang secara total, mendorong dewan keamanan PBB untuk segera mengadakan evaluasi perkembangan perang teluk, menghimbau kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pembinaan perdamaian penyelesaian masalah internasional untuk segenap etiket baik menempuh upaya - upaya supaya jiwa, semangat dan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD '45 dapat diterapkan di tingkat internasional	Rapat Paripurna ke 27/III/1990-1991	Sabtu, 16 Februari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
174	Rapat Paripurna ke 28/III/1990-1991 Side A : Pembicaraan Tingkat IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN 1991 -1992 beserta nota Keuangannya. Sambutan kepala Biro Persidangan untuk membacakan surat dari Presiden tentang RUU Lalulintas dan Angkutan Jalan, RUU Penerbangan, RUU Pelayaran, RUU Pembangunan. Side B : Lanjutan, Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 1991- 1992, Pendapat dan Saran fraksi-fraksi dan Komisi I - X dan Komisi APBN.	Rapat Paripurna ke 28/III/ 1990-1991	Sabtu, 16 Februari 1991	Suara Jelas
175	Rapat Paripurna ke 28/III/1990-1991 Side A : Lanjutan, Penyampaian Pendapat Fraksi Karya Pembangunan dalam pelaksanaan APBN 1991 -1992 yang akan datang. Side B : Penyampaian pendapat akhir dari Fraksi ABRI oleh sdr. Drs. Afif Ma'ruf tentang langkah deregulasi dan debirokratisasi telah membawa hasil bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.	Rapat Paripurna ke 28/III/ 1990-1991	Kamis, 28 Februari 1991	Suara Jelas
176	Rapat paripurna ke 28/III/1990-1991 Side A : Lanjutan pendapat Akhir dari Fraksi ABRI dan menyatakan menyetujui RUU APBN 1991 - 1992 untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian pendapat akhir Drs. Moh Mansur dari Fraksi Persatuan Pembangunan tentang penerimaan dari ekspor migas tetap menjadi penerimaan utama negara, selain itu mendukung sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Side B : Lanjutan pendapat dari Fraksi Persatuan Pembangunan, penyampaian harapan dan saran dari Fraksi Persatuan Pembangunan.	Rapat Paripurna ke 28/III/ 1990-1991	Kamis, 28 Februari 1991	Suara Jelas
177	Rapat Paripurna ke 28/III/1990-1991 Side A : Lanjutan, Penyampaian pendapat akhir oleh Budi Harjono dari Fraksi PDI tentang bidang politik dan kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, Hankamnas. Side B : Harapan fraksi PDI dalam sektor pertanian, pengairan, kehutanan, pendidikan umum dan generasi muda, energi dan listrik desa, pembangunan daerah, desa dan kota, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat dan pemukiman, kesehatan, tenaga kerja, dunia usaha, perdagangan dan koperasi, perbankan, pengawasan pembangunan, yayasan dan pertanahan.	Rapat Paripurna ke 28/III/ 1990-1991	Kamis, 28 Februari 1991	Suara Jelas
178	Rapat paripurna ke 28/III/1990-1991 Side A : Lanjutan Penyampaian pendapat (harapan) dari fraksi PDI. Pimpinan sidang membacakan naskah akhir RUU APBN tahun 1991 - 1992. Sambutan Menteri Keuangan RI bahwa kelahiran UU APBN merupakan tonggak penting demokrasi. Kurun waktu Repelita V merupakan kurun waktu yang penting dan menentukan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Side B : Lanjutan sambutan Menteri Keuangan RI. Pimpinan menutup sidang.	Rapat Paripurna ke 28/III/ 1990-1991	Kamis, 28 Februari 1991	Suara Jelas
179	Rapat Paripurna ke 29/III/1990-1991 Side A : Pimpinan membuka rapat paripurna dan terbuka untuk umum. Laporan BKSAP delegasi DPR-RI ke Australia oleh H. Mien Sugandhi tentang membina dan mempererat kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa termasuk hubungan kerjasama antar perlemen, menunjang kebijaksanaan Pemerintah RI untuk meningkatkan upaya pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Australia. Side B : Laporan dari Susantini Sukantono, SE tentang BKSAP delegasi DPR-RI ke Konferensi AIPO tentang kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang berlangsung di Thailand dari tanggal 28 Januari sampai dengan 1 Februari 1991 yang bertempat di Convent Comhuri	Rapat Paripurna ke 29/III/ 1990-1991	Kamis, 28 Februari 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
180	Rapat Paripurna ke 29 /III/1990-1991 Side A : Lanjutan Laporan dari Susantini Sukontono, SE tentang BKSAP delegasi DPR-RI ke Konferensi AIPO tentang kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, yang isinya bahwa Konferensi Aipo hendaknya mempertimbangkan kemungkinan diadakan pertemuan AIPO lebih lanjut untuk membicarakan aspek-aspek khusus dari pada kerjasama ekonomi regional, mempelajari cara dan metode untuk merangsang pendekatan dan memperluas kerjasama di bidang - bidang lain. Side B : Pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan melalui kegiatan lingkungan yang diatur dalam undang-undang antara lain pemanfaatan sumber daya alami hayati dan ekosistem yang berada dalam kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang berada didalam atau diluar kawasan pelestarian alam.	Rapat Paripurna ke 29/III/ 1990-1991	Jumat, 08 Maret 1991	Suara Jelas
181	Rapat paripurna ke 31/IV/1990-1991 Side A : Ketua sidang membuka rapat paripurna ke 31 dan terbuka untuk umum. Pidato pembukaan masa persidangan V tahun sidang 1990 - 1991. Tim - tim anggota DPR telah mengadakan kerja yaitu Tim Komisi I ke Provinsi Kalimantan Timur, Komisi II ke Provinsi Irian Jaya, Komisi III ke Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV ke Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi V ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali, Komisi VI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat, Komisi VII ke Provinsi Timor-Timor dan Nusa Tenggara Timur , Komisi VIII ke Provinsi Riau dan Bali, Komisi IX ke Provinsi DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Komisi X ke Provinsi Riau, Komisi APBN ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Side B : Pembicaraan Tk. I keterangan pemerintah tentang rencana undang-undang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Barat. Laporan Menteri Dalam Negeri atas penjelasan pemerintah atas diajukannya RUU pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Barat.	Rapat Paripurna ke 31/IV/1990-1991	Jumat, 08 Maret 1991	Suara Jelas
182	Rapat paripurna ke 31/IV/1990-1991 Side A : Lanjutan, pembahasan tentang potensi wilayah Lampung Barat, keadaan pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan. Penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Side B : Tidak ada suara.	Rapat paripurna ke 31/IV/1990-1991	Senin, 13 Mei 1991	Suara Jelas
183	Rapat Paripurna ke 32/IV/1990-1991 Side A : Pimpinan membuka rapat persidangan, pembicaraan Tk. I keterangan pemerintah atas RUU tentang tambahan dan perubahan APBN tahun 1990-1991, RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 1988-1989. Side B : Penjelasan RUU tentang perhitungan Anggaran Negara tahun 1988-1989, gambaran perhitungan anggaran negara tahun 1988-1989 sebagai berikut : Pendapatan rutin, Belanja rutin, tabungan pemerataan, pendapatan pembangunan dan belanja pembangunan.	Rapat Paripurna ke 32/IV/1990-1991	Senin, 13 Mei 1991	Suara Jelas
184	Rapat Paripurna ke 33/IV/1990-1991 Volume 1 Side A : Pimpinan membuka rapat persidangan, Pembicaraan Tk. II pandangan umum anggota terhadap RUU tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Barat. Penyampaian pandangan umum atas RUU sebagai berikut : Drs. Mulalola Pardede dari Fraksi Karya Pembangunan, Rubiyanto dari fraksi ABRI, H. Aisyah Amini dari fraksi Persatuan Pembangunan, Adi Pranoto dari Fraksi Demokrasi Indonesia. Side B : Pandangan umum dari fraksi ABRI, daerah otonom dibentuk dengan tujuan pembinaan politik, pembinaan rumah tangga sendiri, pembinaan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan negara RI terhadap daerah diberi hak-haknya.	Rapat Paripurna ke 33/IV/1990-1991	Jumat, 17 Mei 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
185	Rapat Paripurna ke 33/IV/1990-1991 Volume 2 Side A : Lanjutan, Pandangan Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Adi Pranoto tentang menggali pendapatan asli daerah dan peningkatan kwalitas pegawai. Side B : Lanjutan, Program pembangunan air bersih, sekolah dasar, transmigrasi, pariwisata dan pemberian modal pangkal selama 3 tahun.	Rapat Paripurna ke 33/IV/1990-1991	Senin, 20 Mei 1991	Suara Jelas
186	Rapat Paripurna ke 34/IV/1990-1991 Volume1 Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 34 masa persidangan IV oleh pimpidan sidang. Pembahasan Tk. I keterangan pemerintah atas RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Perkeretaapian, RUU pelayaran, RUU Penerbangan. Side B : lanjutan pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Sistem Jaringan Transportasi Jalan.	Rapat Paripurna ke 34/IV/1990-1991	Senin, 20 Mei 1991	Suara Jelas
187	Rapat Paripurna ke 34/IV/1990-1991 Volume 2 Side A : Lanjutan, Ketentuan wajib angkut sebagai aturan wajib publik mengandung arti penyedia jasa/operator. Pembicaraan Tk. II jawaban pemerintah pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat oleh Menteri Dalam Negari. Side B : Jawaban pemerintah dari fraksi ABRI oleh Ruhdiyanto membahas tentang kewenangan pangkal, jawaban pemerintah dari fraksi Persatuan Pembangunan membahas status perwakilan 8 kecamatan menjadi definitif kecamatan.	Rapat Paripurna ke 34/IV/1990-1991	Jumat, 24 Mei 1991	Suara Jelas
188	Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991 Volume 1 Side A : Pembicaraan Tk.IV mengenai pengambilan keputusan RUU tentang Kejaksaan RI, Pandangan umum dari Pansus Marzuki Darusman, SH, pendapat akhir dari fraksi Karya Pembangunan oleh H.Z Ansori Ahmad, SH. Side B : Lanjutan pendapat akhir dari fraksi Karya Pembangunan dan dilanjutkan pendapat akhir dari fraksi ABRI tentang RUU kejaksaan RI oleh S.H. Simatupang.	Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991	Jumat, 24 Mei 1991	Suara Jelas
189	Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991 Volume 2 Side A : Lanjutan pendapat akhir dari fraksi ABRI, menerima dan menyetujui RUU tentang Kejaksaaan RI untuk menjadi UU yang disahkan oleh pemerintah. Side B : Pendapat akhir dari fraksi Persatuan Pembangunan oleh Soekardi, SH tentang penghapusan pasal 17 faktor umur, pasal 27.E menjadi pasal 27.D	Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991	Senin, 27 Mei 1991	Suara Jelas
190	Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991 Volume 3 Side A : Lanjutan pendapat dari fraksi Persatuan Pembangunan kemudian dapat menerima dan menyetujui RUU kejaksaan RI oleh Soekardi Effendi, SH; Fraksi PDI oleh BN Marbun, SH menyatakan tentang diterima dan dicantumkan UU no 14 th 1970 dalam konsideran mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dimaksudkan dalam pengertian RUU. Side B : Sambutan Menteri Kehakiman RI membahas tentang semangat anggota DPR dan pengkajian anggota yang berkualitas. penutupan Rapat Paripurna oleh pimpinan sidang.	Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991	Senin, 27 Mei 1991	Suara Jelas
191	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 1 Side A : Laporan kerja komisi-komisi pada reses yang lalu. Laporan komisi VI oleh Drs. Nugraha Besoes daerah kunjungan kerja ke Jawa Barat, NTT, Timor-timur masalah peraturan. Side B : Lanjutan laporan komisi VI tentang pertambangan dan energi, industri, tenaga kerja dan penanaman modal Laporan komisi I oleh H Andi Selanurdin masalah bidang pertahanan dan keamanan.	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991	Senin, 27 Mei 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
192	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 2 Side A : Laporan Komisi I oleh H. Andi Selanurdin tentang bidang Hankam ABRI di Balikpapan, kesiapan menghadapi pemilu 1992, bidang penerangan tentang koran masuk desa, sarana dan prasarana operasional yang masih kurang dan kesiapan menghadapi pemilu 1992, bidang luar negeri tentang perkembangan Pulau Sipadan. side B : Laporan Komisi II oleh Adi Pranoto di wilayah Irian Jaya tentang keadaan geografi, jumlah tenaga kerja dan sumber alam.	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991	Rabu, 29 Mei 1991	Suara Jelas
193	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 3 Side A : Lanjutan Laporan komisi II, tetang program INPRESBANGDES (Inpres Pembangunan Desa) dan didang Aparatur, Laporan Komisi III oleh sdr. Samsul Muarif, BA. Dalam reses III tentang masalah hukum dan perundang-undangan, sanksi hukum, pemikiran hukum dan kelembagaan negara. Side B : Lanjutan, masalah kasus hukum daerah perbatasan, masalah lembaga permasyarakatan, larangan hakim. laporan Komisi IV oleh Sdr. Muntaran, kunjungan kerja di Sumatra Barat oleh H. H. Imam Khurmen dan Kalimantan Selatan oleh sdr. Sutahan lingkup kerja di Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan Depertemen Transmigrasi.	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991	Rabu, 29 Mei 1991	Suara Jelas
194	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 4 Side A : Lanjutan laporan Komisi IV, Pengembangan perkebunan teh, perkebunan karet, sektor kehutanan membahas hutan konservasi, sektor tansmigrasi. Laporan komisi V oleh Dra. Sumiatmi BS dalam reses III kunjungan kerja di wilayah Bali dan NTB. Wilayah Bali membahas tentang Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, serta perumahan rakyat. Side B : Wilayah NTB membahas tentang pelabuhan, sektor pos dan giro, sektor telekomunikasi, sektor pekerjaan umum tentang pembangunan Bendungan Menuk, Bina Marga, perumahan rakyat dan kunjungan kerja perorangan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya.	Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991	Rabu, 29 Mei 1991	Suara Jelas
195	Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 1 Side A : Lanjutan, Pembacaan Laporan : Komisi IX oleh Suwardi Wiry Admadja SH, Komisi X oleh sdr. Dr Ir Irma Ade putra M.Sc, Komisi APBN oleh sdr Drs. Joni Alwibanyo, Komisi VII oleh sdr Dr WM Sudjoko. Laporan Komisi VIII oleh Suwardi Wiry Admadja SH. Kunjungan kerja ke Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur mengenai masalah pembinaan generasi muda melalui olahraga, pendidikan formal dan permasalahan kurang guru sekolah dasar, Asrama Haji. Side B : Laporan komisi X oleh sdr. Dr Irma Ade Putra M.Sc tentang pembangunan pelaksanaan desa di kepulauan Riau, kurangnya tenaga SDM dan pengembangan Pulau Batam.	Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/ IV/1990-1991	Rabu, 29 Mei 1991	Suara Jelas
196	Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 2 Side A : Lanjutan laporan Komisi X di Provinsi Irian Jaya tentang perencanaan pembangunan, Provinsi Jawa Tengah tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, bidang kependudukan dan lingkungan hidup, Provinsi DIY tentang pengkajian AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan tata ruang kependudukan, Provinsi Sumatra Barat tentang pelestarian Aliran Sungai; Riset dan Teknologi; Bidang Statistika. Laporan Komisi APBN oleh Drs. Joni Alwibanyo di Propinsi Kalimantan Timur membahas tentang keuangan daerah, hubungan komunikasi antara desa dan kota, tata laksana Impor. Side B : Masalah perkreditan, perasuransian, pengawasan, pelaksanaan pembangunan daerah, bidang perhubungan darat, laut dan udara, bidang kehutanan, bidang transmigrasi dan bidang kelistrikan. Laporan Komisi VII oleh Ibu Sudjoko kunjungan kerja ke Dati I Timor-Timur dan Dati I Nusa Tenggara Timur.	Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/ IV/1990-1991	Kamis, 30 Mei 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
197	Rapat paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 3 Side A : Lanjutan laporan Komisi VII, tentang Gerakan Gempar (Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat) di Dati I Timor-Timur meliputi bidang keuangan, bidang perbankan, bidang perdagangan, bidang koperasi. Side B : Laporan Kerja Komisi VIII oleh Nana Dumana Wiradiputra, kunjungan kerja di Provinsi Riau dan Bali tentang masalah kesehatan.	Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/ IV/1990-1991	Kamis, 30 Mei 1991	Suara Jelas
198	Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 4 Side A : Lanjutan Laporan Komisi VIII tentang kesehatan di Provinsi Riau dan Bali, Penutupan rapat paripurna oleh ketua sidang. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/ IV/1990-1991	Kamis, 30 Mei 1991	Suara Jelas
199	Rapat Paripurna ke 38/IV/1990-1991 Volume 1 Side A : Pimpinan rapat Membuka Rapat dan Terbuka untuk umum, Rapat tentang Pembicaraan Tk. I keterangan pemerintah atas RUU perumahan dan Pemukiman. Laporan BKSHP tentang laporan BKSHP delegasi DPR-RI terhadap penasihat Khusus delegasi RI ke sidang Hak Asami Manusia di Jenewa Swiss dan Laporan BKSHP muhibah ke Rakyat Demokrasi Korea. Pembicaraan Tk.I Side B : lanjutan BKSHP, membahas Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggaran HAM, Kerjasama regional dikawasan asia Pasifik, dan penghapusan ras diskriminasi sosial.	Rapat Paripurna ke 38/ IV/1990-1991	Kamis, 30 Mei 1991	Suara Jelas
200	Rapat Paripurna ke 38/IV/1990-1991 Volume 2 Side A : Laporan BKSHP Muhibah ke Republik Rakyat Korea oleh H.M Yusuf Anwar Gofar, Melaporkan keadaan dan perkembangna di Korea. Side B : Lanjutan, Saran - saran, Perlu adanya Peningkatan kerjasama, Tukar menukar pengalaman bidang pembangunan, perlu adanya penjajakan dan penelitian mengenai perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan, perlu adanya kerjasama untuk saling membantu keamanan di Asia Pasifik.	Rapat Paripurna ke 38/ IV/1990-1991	Selasa, 11 Juni 1991	Suara Jelas
201	Rapat Paripurna ke 39/IV/1990-1991 Volume 1 Side A: Pembicaraan Tingkat IV tentang pengambilan keputusan atas dua Rancangan Undang-Undang (RUU), tentang: (1). RUU Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun 1991; (2). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara T.A. 1988/1989. Selanjutnya Bakri Sri Hardono (Ketua Komisi APBN) melaporkan Neraca Penerimaan Negara T.A. 1990/1991 sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Dalam Negeri, diperkirakan mencapai Rp. 39 trilyun 564 milyar 442 juta; Penerimaan Migas Rp. 17 trilyun 711 milyar 900 juta; Penerimaan Non Migas Rp. 21 trilyun 834 milyar 542 juta; Realisasi Belanja Negara mencapai Rp. 29 trilyun 997 milyar 739 juta; dan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor mencapai US\$ 27 milyar 770 juta. Side B: Pendapat akhir dari masing-masing fraksi atas dua RUU. Imam Santoso, BA (Fraksi Karya Pembangunan/FKP) melihat adanya kemajuan dan keseimbangan dalam penyerahan dana dan kredit yang dikeluarkan. Namun FKP melihat bahwa distribusi pengelolaan kredit masih kurang menjangkau golongan ekonomi lemah. FKP mengharapkan agar penyaluran kredit perbankan dapat menjangkau dan mendorong pengembangan usaha golongan ekonomi lemah	Rapat Paripurna ke 39/ IV/1990-1991	Selasa, 11 Juni 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
202	Rapat Paripurna ke 39/IV/1990-1991 Volume 2 Side A: Imam Santoso, BA (FKP) berkesimpulan bahwa Penerimaan APBN T.A. 1990/1991 mengalami kenaikan cukup besar, sehingga pengajuan RUU Tambahan dan Perubahan APBN T.A. 1990/1991 adalah tepat sesuai prinsip anggaran berimbang dan dinamis. FKP dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN T.A. 1990/1991 dan RUU Tentang Perhitungan Anggaran Negara T.A 1988/1989 untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang. Side B: Machmudi Hadi Saroso (Fraksi ABRI) berpendapat Pembahasan RUU Tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN dilaksanakan setelah Tahun Anggaran berakhir. Fraksi ABRI menyarankan agar Perkiraan Tambahan dan Perubahan atas APBN dapat diajukan dalam triwulan ke-3 T.A. 1989/1990. Selanjutnya, pelaksanaan realisasi PAN Tahun 1988/1989 masih berada dalam garis kebijaksanaan dan lingkup sasaran, sehingga dalam pelaksanaan program pembangunan mampu diwujudkan. Fraksi ABRI menyatakan menyetujui dua RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden.	Rapat Paripurna ke 39/ IV/1990-1991	Senin, 17 Juni 1991	Suara Jelas
203	Rapat Paripurna ke 39/IV/1990-1991 Volume 4 Side A: Dengan Persetujuan Sidang DPR RI, Ketua DPR RI memutuskan untuk Menetapkan Undang-Undang Tentang Perhitungan Anggaran Negara T.A. 1988/1989, dengan rincian: Pasal 1 (ayat 1) Pendapatan Anggaran Negara T.A. 1988/1989 sebesar Rp. 30 trilyun 538 milyar 94 juta 529 ribu; (ayat 2) Belanja Negara T.A. 1988/1989 sebesar Rp. 33 trilyun 252 milyar 43 juta 567 ribu; (ayat 3) Sisa anggaran lebih perhitungan Anggaran 1988/1989 sebesar Rp. 280 milyar 50 juta 962 ribu. Daftar akhir ditandatangani 317 anggota sidang maka kuorum telah terpenuhi untuk pengambilan keputusan dua RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sebagai penutup sidang, Menteri Keuangan mengharapkan kerja sama antara anggota dewan dan pemerintah dalam menjalankan pembangunan di masa-masa mendatang. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 39/ IV/1990-1991	Senin, 17 Juni 1991	Suara Jelas
204	Rapat Paripurna ke 40/IV/1990-1991 Volume 1 Side A: Acara Pembicaraan Tingkat II tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum para anggota mengenai RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum di Jalan; RUU tentang Perkereta-Apian; RUU tentang Pelayaran; dan RUU tentang Penerbangan; yang sebelumnya telah dibicarakan pada tanggal 10 Juni 1991. Jawaban Menteri Perhubungan Ad Interim: (1). Pemerintah berusaha menata kembali peraturan-peraturan lama yang masih sesuai dalam ke-4 RUU bersangkutan; (2). Pemerintah berupaya mengelompokkan berbagai pasal yang memerintahkan penyatuan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; (3). Sebagai hasil pengelompokan, Pemerintah menyiapkan 5 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di bidang lalu lintas dan angkutan di jalan. Side B: Menteri Perhubungan <i>Ad Interim</i> : Penyusunan 4 RUU bidang Transportasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh di bidang Transportasi berdasar Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Penyusunan RUU Transportasi ini juga didasarkan atas Asas Kepentingan Umum, Asas Keterpaduan, Asas Adil dan Merata, dan Asas Keseimbangan.	Rapat Paripurna ke-40/IV/1990-1991	Senin, 17 Juni 1991	Suara Jelas
205	Rapat Paripurna ke 40/IV/1990-1991 Volume 2 Side A: Jawaban Menteri Perhubungan <i>Ad Interim</i> terhadap pertanyaan masing-masing fraksi terkait 4 RUU Bidang Transportasi: (1). Pemerintah menginginkan adanya kewajiban terhadap operator untuk mengasuransikan terhadap angkutan dan barang yang diangkat maupun terhadap pihak ke III terkait pengoperasian alat angkutnya; (2). Transportasi Nasional harus disusun secara terpadu dalam satu kesatuan sistem yang utuh, saling berkaitan, saling tergantung, dan saling mengisi/melengkapi mode yang satu dengan mode lainnya; (3). Di bidang Pelayaran, Apabila RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang, maka UU tersebut akan ditindaklanjuti dengan sekurang-kurangnya 30 RPP. Sebagai Pelaksanaan telah disiapkan 10 RPP bidang Pelayaran, 5 RPP bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan, 4 RPP bidang Perkereta Apian, dan 4 RPP bidang Penerbangan. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke-40/IV/1990-1991	Selasa, 18 Juni 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
206	Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991 Volume 1 Side A: Raja Kami Sembiring M (Ketua Komisi II DPR RI) membuka rapat Pembahasan RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tk II Lampung Barat. Pembentukan Kabupaten Tk II Lampung Barat dilihat dari sisi kemajuan Lampung Utara dan dari sisi kebutuhan yang mendesak sebagai wilayah Lampung Barat untuk dikembangkan. Ke-4 fraksi dan pemerintah dalam kesimpulan musyawarahnya tanggal 18 Juni 1991 telah menyepakati agar RUU tersebut dapat diajukan pada pembicaraan Tingkat IV pada hari ini. Side B: Pendapat akhir fraksi-fraksi. HA. Yahya Murad, SH (FKP); FKP menyetujui RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tk II Lampung Barat untuk disahkan menjadi Undang-undang. FKP menghimbau kepada pemerintah untuk segera memenuhi harapan rakyat di Lampung Barat sebelum tanggal 17 Agustus 1991 (HUT RI ke-46). Husni Zein (Fraksi ABRI), menyimpulkan bahwa hakekat ekonomi lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban untuk menjamin terwujudnya pembangunan di daerah. Sebagai bagian dari negara kesatuan, pemerintah pusat wajib menjamin terciptanya hubungan yang serasi antara perangkat pemerintah pusat dengan perangkat pemerintah daerah.	Rapat Paripurna ke-41/IV/1990-1991	Selasa, 18 Juni 1991	Suara Jelas
207	Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991 Volume 2 Side A: Husni Zein (Fraksi ABRI); menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat untuk disahkan Presiden RI menjadi Undang-Undang. Fraksi ABRI mengharapkan setelah disahkan RUU ini menjadi UU, agar segera ditindaklanjuti penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Usnain Yahya (Fraksi Persatuan Pembangunan/FPP); menghendaki setelah diresmikan Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat, diikuti pula dengan peresmian pengangkatan anggota-anggota DPRD. FPP juga menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat untuk disahkan menjadi Undang-undang. Side B: Adi Pranoto (Fraksi Demokrasi Indonesia/FDI), mengusulkan agar penetapan calon pejabat Bupati dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD Fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah, yang untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).	Rapat Paripurna ke-41/IV/1990-1991	Kamis, 20 Juni 1991	Suara Jelas
208	Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991 Volume 3 Side A: Menteri Dalam Negeri; menyampaikan beberapa materi RUU yang menjadi ajang perbedaan pendapat seperti: (1). Penetapan ibukota Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat di Liwa; (2). Penetapan Liwa sebagai Ibukota karena letaknya strategis; (3). Pengembangan jumlah kecamatan di Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat; (4). Kewenangan yang menyangkut masalah perikanan. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991	Kamis, 20 Juni 1991	Suara Jelas
209	Rapat Paripurna ke 42/IV/1991 Volume I Side A: Pembicaraan tingkat pertama tentang 4 RUU, yakni: (1). RUU Perbankan; (2). RUU Dana Pensiun; (3). RUU Usaha Perasuransian; (4). RUU Perubaahn atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Side B: Menteri Keuangan; menyampaikan 4 ciri utama RUU yang harus menjadi perhatian Dewan, antara lain: (1). Pengamanan dan perlindungan kepentingan umum terkait kegiatan menghimpun dana masyarakat yang harus cermat dan didasari aturan-aturan ketat; (2). sikap kehati-hatian didalam mengelola dana masyarakat; (3). memperluas kesempatan berusaha dan bekerja; (3). Mendorong keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar berbagai pihak.	Rapat Paripurna ke 42/IV/1990-1991	Kamis, 20 Juni 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
210	Rapat Paripurna ke 42/IV/1991 Volume 2 Side A: Pidato Menteri Keuangan; pembahasan mengenai pokok-pokok materi dalam RUU Dana Pensiun, perlakuan perpajakan terkait pengenaan pajak penghasilan, ketentuan-ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan dalam penyelenggaraan dana pensiun. Side B: Penyampaian RUU perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Tujuan perubahan UU tersebut agar dapat menampung perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan dunia usaha yang menyangkut perlakuan pajak penghasilan. Berdasar RUU tersebut, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan perbankan terdiri atas; (1). Perbankan; (2). Perasuransian; (3). Dana Pensiun; (4). Lembaga Pembiayaan; (5). Lembaga di bidang Pasar Modal.	Rapat Paripurna ke 42/IV/1990-1991	Jum'at, 21 Juni 1991	Suara Jelas
211	Rapat Paripurna ke 42/IV/1991 Volume 3 Side A: <i>Tidak Ada Suara</i> Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 42/IV/1990-1991	Jum'at, 21 Juni 1991	Suara Jelas
212	Rapat Paripurna ke 43/IV/1991 Volume I Side A: Pembahasan dua materi rapat tentang Pelaporan BKSAP mengenai hasil-hasil muhibah DPR dan Pembentukan Panitia Khusus Paket RUU Bidang Perhubungan. Laporan Drs. Kafandhie yang melakukan kunjungan muhibah ke Selandia Baru dengan materi: Laporan kunjungan delegasi DPR, kunjungan kehormatan dengan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, pembahasan ekspor-impor Indonesia-Selandia Baru, Perbatasan PNG Indonesia, Hubungan bilateral kedua negara, dan masalah pendidikan. Side B: Laporan Ibu Sri Redjeki Indro Subagja yang melakukan kunjungan muhibah ke Italia pada tanggal 7-14 April 1991. Tujuan delegasi yakni: (1). Untuk menunjang kebijaksanaan ekonomi, (2). Meningkatkan hubungan perdagangan dan pariwisata kedua negara, laporan kunjungan delegasi muhibah ke Presiden Italia dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang menghasilkan persetujuan kedua negara dalam bidang ekonomi yakni kerja sama IGGL.	Rapat Paripurna ke 43/IV/1990-1991	Jum'at, 21 Juni 1991	Kosong, Tidak ada Suara
213	Rapat Paripurna ke 43/IV/1991 Volume 2 Side A: Sri Redjeki Indro Subagja (lanjutan); pembahasan dibidang ekonomi dan sosial-budaya terkait: (1). masalah industri dan keanggotaan IGGL, (2). Hubungan dagang dan ekspor-impor antara Indonesia dengan Italia, (3). pembahasan promosi kepariwisataan Indonesia di Italia serta, (4). pemberian beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk belajar di Italia. Side B: Drs Rihata; Pembacaan nama-nama calon anggota panitia khusus pembahas RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan, RUU Perkereta-Apian, RUU Pelayaran, RUU Penerbangan, dengan daftar hadir telah ditandatangani 300 anggota dari total 491 anggota dewan.	Rapat Paripurna ke 43/IV/1990-1991	Jum'at, 5 Juli 1991	Suara Jelas
214	Rapat Paripurna ke 44/IV/1991 Volume I Side A: Pembacaan Laporan BKSAP kunjungan 3 Delegasi DPR-RI ke Luar Negeri yakni: (1). Delegasi Dewan ke Prancis tanggal 5 -22 Maret 1991 oleh Muh. Diran; (2). Delegasi DPR-RI ke Konferensi IPU ke-85 di Pyongyang, RRD Korea Utara tanggal 29 Maret - 4 April 1991 oleh Sjafrie Said; (3). Delegasi DPR-RI ke Global Parlementarian Confrence on Habitat di Harere, Zimbabwe tanggal 29 Maret - 8 April 1991 oleh Ibu Sutopo Isno. Side B: Sjafrie Said dalam pokok acara kunjungan membicarakan masalah: (1). penyatuan kembali kedua Korea Utara dan Korea Selatan; (2). Penyelesaian re-unifikasi sedarah damai, persatuan nasional; (3). Upaya pencegahan perlombaan senjata nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya. (4). Peranan parlemen dalam usaha perdamaian di Timur Tengah.	Rapat Paripurna ke-44/IV/1991	Jum'at, 5 Juli 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
215	Rapat Paripurna ke 44/IV/1991 Volume 2 Side A: Sutopo Isnowo: laporan Delegasi DPR-RI di Global Parleментарian Confrence on Habitat di Harere, Zimbabwe menghasilkan 13 resolusi, 4 diantaranya yang diusulkan Delegasi RI, yakni: (1). Pembangunan Permukiman utuk golongan masyarakat miskin; (2). Pembangunan kota-kota kecil dan menengah serta peningkatan kemampuan lembaga pemerintah daerah; (3). program peningkatan pembinaan perkotaan; (4). Peningkatan peranan wanita dalam peningkatan Global Parleментарian on Habitat. Side B: Pidato ketua dewan tentang penutupan masa persidangan IV yang dimulai sejak tanggal 13 Mei 1991 terkait pembahasan perundang-undangan, anggaran, dan bidang pengawasan. RUU yang akan dibahas pada sidang mendatang membicarakan: (1). Paket RUU bidang Perhubungan; (2). Paket RUU bidang Keuangan; (3). RUU tentang Perumahan dan Permukiman.	Rapat Paripurna ke44/IV/1991	Sabtu, 6 Juli 1991	Suara Jelas
216	Rapat Paripurna k -44/IV/1991 Volume 3 Side A: lanjutan pidato Ketua Dewan pada penutupan masa sidang IV T.A. 1990-1991, membicarakan: (1). Keputusan kenaikan gaji PNS, ABRI, dan Pensiunan sebesar 15% terhitung mulai Tanggal 1 Juli 1991; (2). Harapan untuk selalu berusaha memelihara suasana kekeluargaan dalam menghadapi masalah nasional yang menyangkut kepentingan rakyat; (3). Pengadaan kegiatan pameran ilmiah hasil penelitian bidang Bio-Science tanggal 15-17 Agustus 1991 dan Peresmian Museum MPR/DPR Tahap I di Pustaka Loka pada tanggal 16 Agustus 1991 oleh ketua MPR/DPR. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 44/IV/1991	Sabtu, 6 Juli 1991	Suara Jelas
217	Rapat Paripurna ke 1/I/1991-1992 Volume I dan 3 Side A: Acara Rapat Paripurna meliputi: (1). Pidato pembukaan masa persidangan I / Tahun Sidang 1991-1992 oleh pimpinan dewan; (2). Pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Ketua Dewan mengharapkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan datang dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas serta pembahasan masalah krusial lain seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik dan angkutan umum, kemarau panjang, dan Pembangunan Indonesia Bagian Timur Side B: Pidato Presiden Soeharto, "mulai pertengahan tahun 1990 pemerintah melaksanakan kebijaksanaan mengendalikan jumlah mata uang beredar, tujuannya untuk mengendalikan perekonomian Indonesia agar tetap dijalar yang sehat dan aman. Secara keseluruhan arah pertumbuhan bangsa ini berhasil memenuhi petunjuk GBHN".	Rapat Paripurna ke 1/I/1991-1992	Sabtu, 6 Juli 1991	Suara Jelas
218	Rapat Paripurna k -1/I/1991-1992 Volume 2 dan 4 Side A: Pidato Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan menjelaskan perubahan mendasar di bidang ekonomi yang berpengaruh pada integrasi ekonomi dunia. Dilain pihak muncul tanda-tanda lahirnya blok-blok ekonomi baru, kemajuan IPTEK, revolusi di bidang komunikasi dan informasi, serta munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru telah merubah secara drastis pola investasi, produksi, konsumsi, distribusi, dan perdagangan. ASEAN sendiri terus berkembang meningkatkan mutu dan ruang lingkupnya dalam mencapai kemajuan ekonomi dan perubahan sosial. Side B: Pidato Presiden Soeharto, "Koperasi harus terus dikembangkan, sehingga memenuhi amanat pasal 33 UUD 1945. Terkait pemerataan pembangunan, meliputi penyediaan dana-dana melalui berbagai jenis proyek-proyek pembangunan di semua daerah, pengalihan saham dari perusahaan besar dan sehat kepada koperasi, kemitraan usaha antar bapak angkat dan anak angkat, dan kredit usaha kecil olah perbankan".	Rapat Paripurna ke 1/I/1991-1992	Jum'at, 16 Agustus 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
219	Rapat Paripurna ke 2/1/1991-1992 Volume 1 Side A: Pidato Menteri Tenaga Kerja dalam Pembicaraan Tingkat I RUU Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). RUU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan jangka panjang tahap II, yaitu menciptakan satu hubungan industrial yang kondusif terhadap pembangunan. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja ini diberikan kepada mereka pada waktu sakit, mengalami kecelakaan, menderita cacat, mencapai hari tua, dan meninggal dunia. Side B: Pembahasan penetapan keanggotaan komisi-komisi BURT dan BKSAP Tahun Sidang 1991/1992. Pembacaan daftar nama keanggotaan komisi I-VII oleh Kepala Biro Persidangan, sedangkan pembacaan daftar nama keanggotaan komisi 8-10 dan komisi APBN oleh Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan.	Rapat Paripurna ke 2/1/1991-1992	Jum'at, 16 Agustus 1991	Suara Jelas
220	Rapat Paripurna ke 2/1/1991-1992 Volume 2 Side A: Kepala Biro Persidangan membacakan Keanggotaan komisi VI dan VII BURT dan BKSAP oleh Kepala Biro Persidangan dan komisi VIII s/d komisi X oleh Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan. Side B: Ketua Sidang mengumumkan jumlah anggota sidang yang hadir tercatat 308 orang dari 409 orang anggota. Acara pemilihan pimpinan komisi-komisi BURT dan BKSAP akan diselenggarakan pada hari Jum'at, 23 Agustus 1991, jam 08.30.	Rapat Paripurna ke 2/1/1991-1992	Kamis, 22 Agustus 1991	Suara Jelas
221	Rapat Paripurna ke 3/1/1991-1992 Volume 1 Side A: (opening) Ibu Sulastri Imran Arsyad memimpin lagu Indonesia Raya. Pidato Ketua MPR/DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI ke-46, pada tanggal 29 Agustus. Ketua MPR/DPR menyampaikan sejarah berdirinya lembaga MPR/DPR RI serta membahas peran penting lembaga ini dalam meningkatkan mekanisme pembahasan RAPBN, agar secara kualitas peran DPR didalam hak budget nanti tampak. Side B: Ketua MPR/DPR, "dalam kurun 4 tahun, lembaga ini melaksanakan tugas&funksinya dengan baik, sehingga banyak kemajuan yang telah dicapai. Namun, masih ada satu pekerjaan rumah bagi DPR, yakni upaya penanganan pembangunan hukum yang lebih serius, karena pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan politik di dalam suatu masyarakat yang tatanan kehidupannya tertib dan teratur".	Rapat Paripurna ke 3/1/1991-1992	Kamis, 22 Agustus 1991	Suara Jelas
222	Rapat Paripurna ke 3/1/1991-1992 Volume 2 Side A: (1). Pembacaan doa penutup dalam rangka memperingati HUT MPR/DPR RI ke-46; (2). Acara ramah tamah para anggota dewan di Plaza Graha Karana, dengan diwakili oleh Bapak Ketua DR/MPR RI. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 3/1/1991-1992	Kamis, 29 Agustus 1991	Suara Jelas
223	Rapat Paripurna ke 4/1/1991-1992 Volume 1 Side A: Pembicaraan Tingkat II Pemandangan umum Para Anggota atas RUU Tentang Perumahan dan Permukiman. Ir. Budi Hariyanto dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP) berpendapat bahwa unsur pengawasan dan Permukiman perlu secara jelas diatur didalam RUU ini. RUU ini diharapkan tidak hanya memberikan dasar hukum bagi kegiatan perumahan dan Permukiman, tetapi justru dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang ini. Side B: Sdr. Komaruddin dari Fraksi ABRI berpendapat Pasal 9 RUU Tentang Perumahan dan Permukiman ini lebih lanjut dijabarkan pada Peraturan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat 5 agar diperhatikan hal-hal seperti: (1). Pada Dasarnya Badan Usaha Swasta cenderung lebih menekankan pada keuntungan; (2). Penggunaan tanah pada kawasan siap bangun agar dibatasi sesuai kebutuhannya; (3). Bahwa kepemilikan tanah tersedia juga bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (4). Bahwa penentuan kavling perumahan agar ditata secara proporsional.	Rapat Paripurna ke 4/1/1991-1992	Kamis, 29 Agustus 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
224	Rapat Paripurna ke 4/I/1991-1992 Volume 2 Side A: Ibu Zaelinar Utomo dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) sepakat bahwa perkampungan kumuh (terutama di kota-kota besar) harus diremajakan, agar tercipta lingkungan Permukiman yang sehat, nyaman, dan serasi. FPP juga melihat pentingnya RUU Tata Ruang dan Tata Guna Tanah yang harus diajukan terlebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan RUU Perumahan dan Permukiman. Side B: Sdr. Tengku Dahman Musir, SH., dari Fraksi Demokrasi Indonesia (FPDI) sependapat dengan pidato ketua DPR RI tanggal 16 Agustus 1991, yang mengatakan problematika yang sering dijumpai di bidang hukum yakni banyaknya undang-undang yang ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. FPDI juga menjelaskan pada pasal 14 yang dikatakan bahwa sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan tanah atau sengketa lainnya diselesaikan dengan peradilan umum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	Rapat Paripurna ke 4/I/1991-1992	Senin, 2 September 1991	Suara Jelas
225	Rapat Paripurna ke 4/I/1991-1992 Volume 3 Side A: Sdr. Tengku Dahman Musir, SH., dari FPDI mengusulkan agar pengaturan tentang ganti rugi tanah yang terkena kawasan siap bangun harus diatur dalam RUU ini. Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa kawasan siap bangun dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman, jadi bukan untuk kepentingan umum seperti jalan. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 4/I/1991-1992	Senin, 2 September 1991	Suara Jelas
226	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 1 Side A: Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan Umum Para Anggota atas 4 RUU di bidang keuangan, yakni RUU Perbankan, RUU Dana Pensiun, RUU Perasuransian, RUU Perubahan atas UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Drs. Maska Ridwan dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), memandang Pengajuan RUU di bidang Keuangan&Perbankan sangat tepat dalam upaya meletakkan kerangka landasan yang kuat untuk memasuki awal tahap tinggal landas. FKP meyarankan agar terdapat bank khusus yang mempunyai misi khusus yang menangani pembinaan terhadap golongan ekonomi lemah/Koperasi (baik secara pendanaan maupun pembinaan manajemen). Side B: Drs. Maska Ridwan (FKP) berpendapat bahwa, "RUU Perbankan perlu dilengkapi dengan fungsi Bank sebagai pemberi bantuan teknis, mencari peluang bisnis, penyebar peta bisnis (terutama golongan ekonomi lemah)". Dengan diserahkannya RUU ini menjadi UU, maka UU No. 14 Tahun 1967 tidak berlaku lagi.	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992	Senin, 2 September 1991	Suara Jelas
227	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 2 Side A: M. Pasaribu, S.H. (Fraksi ABRI) berpendapat bahwa, "RUU Bidang Keuangan dan Perbankan ini harus dapat menjadi satu pedoman dan penuntun yang mampu mendorong terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi yang berpedoman pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta mampu mengantisipasi arus globalisasi yang melanda dunia". Side B: M. Pasaribu (Fraksi ABRI) berpendapat, "untuk tarif pajak perlu diadakan perubahan dari 3 lapis menjadi 4 lapis, dengan tarif terendah 5% dan tertinggi 40%. Sedangkan lapisan penghasilan kena pajak ditingkatkan dan pengaturannya melalui Keputusan Menteri, dengan memperhatikan kesadaran dan keadilan.	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992	Selasa, 3 September 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
228	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 3 Side A: Drs. Ali Sofwan dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), mengharapkan agar Bank Pembangunan Rakyat (BPR) dapat terus didorong untuk menjadi lebih besar dan berkembang baik. FPP juga mengusulkan agar bank dibagi menjadi 3 jenis yakni Bank Umum, Bank Khusus, dan Bank Eks Pemerintah yang berfungsi sebagai Bank Pembangunan. Menanggapi Bank Asing, FPP berpendapat Undang-undang yang lama lebih tagas dan jelas. Side B: Aberson Marley Sialuhu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) berpendapat, "Dalam RUU Perbankan, penyaluran dana yang dilakukan oleh Perbankan harus diatur secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui resiko penyaluran dana tersebut". FPDI mengharapkan agar penyempurnaan UU Tentang Perbankan ini juga dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan sistem pembinaan dan pengawasan (baik fungsional atau dari masyarakat atas penyelenggaraan Perbankan Nasional kita).	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992	Selasa, 3 September 1991	Suara Jelas
229	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 4 Side A: Aberson Marley Sialuhu (FPDI) berpendapat dari ke-7 jenis usaha perasuransian itu, masih perlu ditambah satu lagi usaha perasuransian yaitu "ke-agen-an asuransi". Hal ini mengingat jika broker asuransi mewakili kepentingan masyarakat pembeli saja, maka sebaliknya agen asuransi mewakili kepentingan perusahaan asuransi (asuradur). Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992	Selasa, 3 September 1991	Suara Jelas
230	Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992 Volume 1 Side A: Laporan hasil kunjungan kerja komisi-komisi dalam reses masa persidangan ke-IV tahun 1990/1991. H.M. Nikmat Rahmatullah BCHK (juru bicara Komisi V) dalam laporan hasil kunjungan tim ke Irian Jaya mengungkapkan tentang masalah perhubungan dan transportasi (baik darat, laut, maupun udara) di Irian Jaya yang masih kurang memadai. Selain itu juga permasalahan di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi bidang pengairan, bidang Bina Marga, dan Pembangunan Cipta Karya. Side B: (1). Laporan hasil kunjungan kerja komisi VI ke Daerah DKI Jakarta, Lampung, D.I. Aceh, dan Sumatera Utara, tentang krisis PLTA di Asahan, Studi khusus pelayanan PLN di desa-desa terpencil, dan bidang ketenagakerjaan di Jakarta. (2). B.N. Marbun, SH melaporkan pelaksanaan kunjungan kerja Komisi I di daerah pemilihan masing-masing dan secara tim ke propinsi daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (14-20 Juli 1991).	Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992	Selasa, 3 September 1991	Suara Jelas
231	Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992 Volume 2 Side A: Drs. Asful Anwar (Komisi II): Laporan hasil kunjungan kerja Tim Komisi II ke Propinsi Daerah Tk I Kalimantan Selatan dan kunjungan kerja perseorangan ke daerah pemilihan dan pembinaan masing-masing. Materi yag dibahas meliputi laporan bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah (3 masalah), bidang pembangunan daerah (2 masalah), bidang pertanahan (2 masalah), bidang aparatur negara (3 masalah), bidang sosial-politik (2 masalah), dan bidang lain-lain (4 masalah). Side B: Moh. Yusuf Husein (Komisi III) membacakan laporan hasil kunjungan kerja Komisi III ke Propinsi Daerah Tk I Kalimantan Timur pada masa reses IV Tahun 1990/1991 yang dipimpin S. Suhardi, SH. (wakil ketua komisi) dengan anggota 10 orang. Laporan meliputi hal-hal prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus dr pemerintah seperti bidang kehakiman dan masalah korupsi, hasil kunjungan kerja perorangan maupun tim Komisi III ke Propinsi Kalimantan Timur.	Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992	Rabu, 4 September 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
232	Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992 Volume 3 Side A: H.M. Ali Sri Indrajaya (Komisi IV) membacakan laporan hasil kunjungan kerja Komisi III ke Propinsi Daerah Tk I Sulawesi Utara, yang dipimpin H. Asfuri Purwosasmito dengan anggota 12 orang. Kunjungan lainnya yakni satu tim komisi IV ke Propinsi Sumatera Selatan yang dipimpin H. Imam Kormen dengan anggota 12 orang. Kunjungan kerja yang dilakukan tanggal 9-13 Juli 1991 ini membahas masalah bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, tanaman industri, dan sektor transmigrasi. Objek kunjungan kerja meliputi daerah-daerah yang berada di lingkup Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Transmigrasi. Side B: H.M. Ali Sri Indrajaya (Komisi IV) menyarankan agar para transmigran di Sulawesi Utara perlu dilakukan pembinaan peningkatan keterampilan, mempersiapkan dan memprogramkan transmigran swakarsa. Sedangkan di Sumatera Selatan telah disediakan tanah lokasi pemukiman para transmigran seluas 1.287.000 Ha. Hingga saat ini jumlah transmigran sebesar 216.484 KK atau 902.957 jiwa yang tersebar di 8 kabupaten 549 UPT.	Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992	Rabu, 4 September 1991	Suara Jelas
233	Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992 Volume 1 Side A: Rapat paripurna dengan agenda membahas hasil kunjungan kerja komisi-komisi selama masa reses persidangan IV Tahun 1990/1991. Dr. M.P. Pasaribu (Komisi VIII), melaporkan hasil kunjungan kerja perorangan maupun tim ke Propinsi Kalimantan Timur dari tanggal 8-12 Juli 1991, dengan pembahasan bidang kesehatan, bidang sosial, serta bidang urusan peranan wanita (PKK). Side B: Sulasih Imran Arsyad (Komisi IX) melaporakan hasil kunjungan kerja Komisi IX Tim dan perorangan ke Propinsi Lampung. Laporan meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pembinaan generasi muda dan olahraga, serta bidang agama. Masalah lain yakni evaluasi CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang meliputi gerakan pendekatan CBSA ke segenap jajaran pendidikan di Lampung yang perlu disebarluaskan.	Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992	Rabu, 4 September 1991	Suara Jelas
234	Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992 Volume 2 Side A: Drs. Al Sulstya (Komisi X), melaporkan hasil kunjungan kerja tim dan perorangan ke Propinsi Timor-Timor. Bahasan laporan ini meliputi: (1). Bidang perencanaan pembangunan di Propinsi Timor-Timor, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur; (2). Kependudukan dan lingkungan hidup di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur (khususnya proses pelestarian hutan); (3). Bidang riset dan teknologi di Propinsi Timor-Timor, NTT, dan kalimantan Timur; (4). Masalah penunjang seperti pembangunan kantor dan sarana transportasi yang masih minim. Side B: Nur Siswadi PS (Komisi APBN), melaporkan hasil kunjungan kerja tim maupun perorangan yang terdiri dari semua unsur fraksi ke Propinsi Daerah Tk I Sulawesi Tengah pada tanggal 4-9 Agustus 1991 serta kunjungan kerja ke daerah transmigrasi di Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15-18 Juli 1991. Bidang yang dibahas meliputi keadaan daerah, keuangan daerah keuangan negara, moneter dan perkreditan, neraca pembayaran, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan.	Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992	Kamis, 5 September 1991	Suara Jelas
235	Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992, Volume 3 Side A: Murdono (Komisi VII), melaporkan kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ke Daerah Tk I Propinsi Sumatera Barat pada reses masa persidangan IV tahun 1990/1991, tanggal 8-13 Juli 1991, dengan bahasan mengenai kondisi wilayah, keuangan dan perbankan, perdagangan, Koperasi, Bulog, dll. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992	Kamis, 5 September 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
236	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992 Volume 1 Side A: Ketua Sidang memimpin sidang dengan mata acara: (1). Pembicaraan Tingkat II tentang jawaban pemerintah atas 4 RUU Bidang Keuangan yang meliputi RUU Tentang Perbankan, RUU Tentang Dana Pensiun, RUU Tentang Perasuransian, RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1982 Tentang Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Prof. Dr. JB. Sumarlin; (2). Pembicaraan Tingkat II tentang Pemandangan Umum Para Anggota atas RUU Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang dipimpin oleh wakil ketua Koor in Bank, Sdr. Sukardi. Side B: Menteri Keuangan Prof. Dr. JB. Sumarlin memberikan jawaban atas pertanyaan dari 4 Fraksi tentang RUU Perbankan. Dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), dan FPDI untuk hal yang berkaitan dengan tindak pidana pembocoran rahasia bank oleh pihak di luar bank dan mengenai cek kosong. Jawaban atas pertanyaan dari FPP tentang tugas pokok Bank Indonesia yang bertalian dengan rencana kredit dan pemantapan tingkat suku bunga.	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992	Kamis, 5 September 1991	Suara Jelas
237	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 2 Side A: Menteri Keuangan Prof. Dr. JB. Sumarlin memberikan jawaban atas pertanyaan dari 4 Fraksi tentang tentang RUU Perasuransian. Dari FPDI Tentang penyelenggaraan program asuransi sosial, dari Fraksi ABRI tentang pembinaan dan pengawasan asuransi, dari FPDI, FPP, dan Fraksi ABRI tentang masalah perlindungan kepada tertanggung bila perusahaan asuransi bangkrut. Side B: Menteri Keuangan Prof. Dr. JB. Sumarlin memberikan jawaban atas pertanyaan dari 4 Fraksi tentang RUU Dana Pensiun serta jawaban tentang RUU Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992	Senin, 9 September 1991	Suara Jelas
238	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 3 Side A: Menteri Keuangan Prof. Dr. JB. Sumarlin memberikan jawaban atas pertanyaan dari 4 Fraksi tentang RUU Dana Pensiun serta jawaban tentang RUU Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Ketua Sidang: membacakan urutan pembicara, dalam penyampaian pandangan umum para anggota atas RUU Jamsostek. Side B: Sukarno Darmono Sukarto (FKP): Dalam RUU Jamsostek, FKP menyarankan agar peran pengusaha dan tenaga kerja dijabarkan lebih khusus dalam program jamsostek.	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992	Senin, 9 September 1991	Suara Jelas
239	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 4 Side A: Harsono (Fraksi ABRI): Dalam RUU Jamsostek, Fraksi ABRI mengharapkan pemerintah memberikan penjelasan tentang sejauh mana kaitan antara program jamsostek dalam pembangunan ekonomi nasional. Fraksi ABRI juga belum melihat adanya butir yang menggambarkan tentang peranan dana jamsostek sebagai salah satu sumber pembangunan nasional. Side B: Yusuf Anwar Ghofar (FPP): FPP mengharapkan agar bunyi, isi, dan maksud RUU ini janganlah memberi peluang untuk dijadikan alat penghambat pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja. FPP juga berharap setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-undang, segera dilahirkan UU Jaminan Sosial bagi kaum tani dan nelayan.	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992	Senin, 9 September 1991	Suara Jelas
240	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 5 Side A: Budi Harjono (FPDI): FPDI memberikan tanggapan tentang ruang lingkup RUU Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992	Senin, 9 September 1991	Suara Jelas
241	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 8/I/1991-1992, yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk II Jawaban Pemerintah atas pandangan umum para anggota mengenai RUU Perumahan dan Pemukiman: Menteri Negara Perumahan Rakyat, untuk kemudian dilakukan jawaban terhadap pandangan umum dari FKP dan F-ABRI Side B : Lanjutan jawaban terhadap pandangan umum dari F-ABRI untuk kemudian dilakukan jawaban pemerintah atas tanggapan dari fraksi-fraksi yang dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat	Rapat Paripurna ke 8/I/1991-1992	Senin, 9 September 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
242	Side A : Jawaban pemerintah atas tanggapan dari fraksi-fraksi yang dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (lanjutan), yang kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna ke 8 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 8/I/1991-1992	13 September 1991	Suara Jelas
243	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 9 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Benda Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Side B : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Benda Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (lanjutan) yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perfilman oleh Menteri Penerangan	Rapat Paripurna ke 8/I/1991-1992	13 September 1991	Suara Jelas
244	Side A : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perfilman oleh Menteri Penerangan (lanjutan) yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman Side B : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman (lanjutan) dan dilanjutkan dengan laporan BKSAP tentang kunjungan delegasi DPR RI ke Konferensi Anggota Parlemen se ASEAN di Thailand	Rapat Paripurna ke 9/I/1991-1992		Suara Jelas
245	Side A : Laporan BKSAP tentang kunjungan delegasi DPR RI ke Konferensi Anggota Parlemen se ASEAN di Thailand (lanjutan) untuk kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna ke 9 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 9/I/1991-1992	16 September 1991	Suara Jelas
246	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 10 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Laporan Komisi I mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993, Side B : Laporan Komisi I mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan), dilanjutkan dengan Laporan Komisi II mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993, dan Laporan Komisi III mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993	Rapat Paripurna ke 9/I/1991-1992	16 September 1991	Suara Jelas
247	Side A : Laporan Komisi III mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan), dan Laporan Komisi IV mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 Side B : Laporan Komisi IV mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan) dan Laporan Komisi V mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993	Rapat Paripurna ke 10/I/1991-1992	Rapat Paripurna ke 10/I/91-92 I	Suara Jelas
248	Side A : Laporan Komisi V mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan) untuk kemudian dilakukan skorsing sidang Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 10/I/1991-1992	19 Juni 1991	Suara Jelas
249	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 10 lanjutan Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Laporan Komisi VII mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 Side B : Laporan Komisi VII mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan) dilanjutkan dengan Laporan Komisi VIII mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 dan Laporan Komisi IX mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993	Rapat Paripurna ke 10/Ljt//I/1991-1992	19 Juni 1991	Suara Jelas
250	Side A : Laporan Komisi IX mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan), dan dilanjutkan dengan Laporan Komisi X mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 Side B : Laporan Komisi X mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan)	Rapat Paripurna ke 10/Ljt//I/1991-1992	24 September 1991	Suara Jelas
251	Side A : Laporan Komisi X mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan) yang kemudian dilanjutkan dengan Laporan Komisi VI mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 untuk kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna ke 10 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 10/Ljt//I/1991-1992	24 September 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
252	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke- 11 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan acara Pembacaan Amanat Presiden tentang RUU pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar, RUU Penataan Ruang, RUU Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan, RUU Kesehatan dan Merk, kemudian Pembentukan Panitia Khusus RUU bidang Keuangan; RUU Perbankan, RUU Dana Pensiun, RUU Perasuransian, dan RUU Pajak Penghasilan, Pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Perumahan dan Pemukiman, Pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, untuk kemudian dilanjutkan dengan Laporan BKSAP tentang hasil kunjungan delegasi DPR RI ke Liga Parlemen negara-negara Pasifik di Singapura Side B : Laporan BKSAP tentang hasil kunjungan delegasi DPR RI ke Liga Parlemen negara-negara Pasifik di Singapura (lanjutan) yang kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna Ke- 11 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992	Rapat Paripurna ke 11/I/1991-1992		Suara Jelas
253	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Laporan BKSAP tentang kunjungan delegasi DPR RI sebagai penasehat delegasi RI ke Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non Blok ke 10 di Ghana Side B : Laporan BKSAP tentang kunjungan delegasi DPR RI sebagai penasehat delegasi RI ke Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non Blok ke 10 di Ghana (lanjutan), yang dilanjutkan dengan agenda Penetapan dan pembacaan nama-nama calon Hakim Agung, Penetapan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pidato penutupan masa persidangan I Tahun 1991-1992 oleh Wakil Ketua Korinbang	Rapat Paripurna ke 12/I/1991-1992	11 Oktober 1991	Suara Jelas
254	Side A : Pidato penutupan masa persidangan I Tahun 1991-1992 oleh Wakil Ketua Korinbang (lanjutan) untuk kemudian dilakukan penutupan sidang oleh Ketua Sidang Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 12/I/1991-1992	12 Oktober 1991	Suara Jelas
255	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan pidato pembukaan oleh Ketua Sidang Side B : Pidato pembukaan oleh Ketua Sidang (lanjutan)	Rapat Paripurna ke 13/I/1991-1992	12 Oktober 1991	Suara Jelas
256	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman Side B : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman (lanjutan) yang dilanjutkan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar oleh Menteri Dalam Negeri	Rapat Paripurna ke 14/I/1991-1992	04 November 1991	Suara Jelas
257	Side A : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar oleh Menteri Dalam Negeri (lanjutan) dan dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Penataan Ruang oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Side B : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Penataan Ruang oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (lanjutan) dan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan	Rapat Paripurna ke 14/I/1991-1992	07 November 1991	Suara Jelas
258	Side A : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan (lanjutan) Side B : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan RUU Budidaya Tanaman oleh Menteri Pertanian	Rapat Paripurna ke 14/II/1991-1992	07 November 1991	Suara Jelas
259	Side A : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan RUU Budidaya Tanaman oleh Menteri Pertanian (lanjutan) untuk kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 14/II/1991-1992	07 November 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
260	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan agenda Laporan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, dan Laporan kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Propinsi Dati I Bengkulu dan Propinsi Dati I Lampung Side B : Laporan kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Propinsi Dati I Bengkulu dan Propinsi Dati I Lampung (lanjutan) yang dilanjutkan dengan Laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Propinsi Dati I Irian Jaya dan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan	Rapat Paripurna ke 15/II/1991-1992	07 November 1991	Suara Jelas
261	Side A : Laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Propinsi Dati I Irian Jaya dan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan (lanjutan) dan Laporan kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Dati I Kalimantan Barat Side B : Laporan kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Dati I Kalimantan Barat (lanjutan) dan Laporan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dan Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara	Rapat Paripurna ke 15/II/1991-1992	18 November 1991	Suara Jelas
262	Side A : Laporan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dan Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara (lanjutan) dan Laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Side B : Laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (lanjutan) yang dilanjutkan dengan skorsing sidang oleh Ketua Sidang	Rapat Paripurna ke 15/II/1991-1992	18 November 1991	Suara Jelas
263	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke-13 lanjutan Masa Sidang ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Propinsi Dati Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Dati I Bali Side B : Laporan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur dan Laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Propinsi Dati I Jawa Timur	Rapat Paripurna ke 15/II/1991-1992	18 November 1991	Suara Jelas
264	Side A : Laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Propinsi Dati I Jawa Timur (lanjutan) dan Laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Propinsi Dati I ke Sulawesi Selatan dan Laporan peninjauan ke BUMN industri strategis seperti PT PAL, IPTN, Krakatau Steel, Puslitbang PU dan pelabuhan Tanjung Priuk Side B : Laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Propinsi Dati I ke Sulawesi Selatan dan Laporan peninjauan ke BUMN industri strategis (lanjutan) yang dilanjutkan dengan Laporan kunjungan kerja Komisi APBN DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rapat Paripurna ke 15/II/1991-1992	19 November 1991	Suara Jelas
265	Side A : Laporan kunjungan kerja Komisi APBN DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (lanjutan) yang kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 15/II/1991-1992	19 November 1991	Suara Jelas
266	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Pembacaan Amanat Presiden mengenai RUU tentang perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, dan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi Karya Pembangunan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya Side B : Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Benda Cagar Budaya, dan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya	Rapat Paripurna ke 16/II/1991-1992	19 November 1991	Suara Jelas
267	Side A : Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya (lanjutan) dan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi PDI atas RUU tentang Benda Cagar Budaya Side B : Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi PDI atas RUU tentang Benda Cagar Budaya (lanjutan) yang dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992	Rapat Paripurna ke 16/II/1991-1992	25 November 1991	Suara Jelas
268	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi Karya Pembangunan atas RUU tentang Perfilman dan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Perfilman Side B : Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Perfilman (lanjutan)	Rapat Paripurna ke 17/II/1991-1992	25 November 1991	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
269	Side A : Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Perfilman (lanjutan) yang dilanjutkan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Perfilman Side B : Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Perfilman (lanjutan), yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi PDI atas RUU tentang Perfilman, dan penutupan Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992	Rapat Paripurna ke 17/II/1991-1992	26 November 1991	Suara Jelas
269.a	Rapat Paripurna ke 18/II/1991-1992, Kamis, 28 Nopember 1991, Volume 1 Side A : Pandangan umum anggota tentang RUU Keimigrasian, dengan Amanat Presiden No. R.21/TU/VIII/1991 Tentang RUU Keimigrasian. Pendapat dari FKP oleh Mochamad Roem. Side B : Pendapat dari Subagio, SH. (F. ABRI), Pada dasarnya UU tersebut hanya mengatur bagaimana orang asing dapat masuk dan dan menetap di wilayah Indonesia.	Rapat Paripurna ke 18/II/1991-1992, Volume 1	28 November 1991	Suara Jelas
269.b	Rapat Paripurna ke 18/II/1991-1992, Kamis, 28 Nopember 1991, Volume 2 Side A : Lanjutan, Sukardi Effendi, SH : orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di wilayah Indonesia disamping harus memiliki izin keimigrasian juga harus mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Side B : Tengku Dachman Munzir, SH (FPDI) : - Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil,- Polri sebagai tim penyelidikan yudicial,- Sanksi-sanksi perlu diatur oleh UU bukan PP, - Pelaksanaan dan pengawasan PPPNS.	Rapat Paripurna ke 18/II/1991-1992, Volume 2	28 November 1991	Suara Jelas
270	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan agenda Laporan BKSAP mengenai laporan studi perbandingan komisi APBN ke Jepang, Korea, Thailand, dan Malaysia, untuk kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 19/II/1991-1992	29 November 1991	Suara Jelas
271	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke-20 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992, yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk II Jawaban Pemerintah RUU tentang Benda Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Side B : Pembicaraan Tk II Jawaban Pemerintah RUU tentang Perfilman oleh Menteri Penerangan	Rapat Paripurna ke 20/II/1991-1992	29 November 1991	Suara Jelas
272	Side A : Penutupan Rapat Paripurna ke 20 Masa Sidang ke II Tahun 1991-1992 oleh Ketua Sidang Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 20/II/1991-1992	02 Desember 1991	Suara Jelas
273	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna Ke-21 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk II Jawaban Pemerintah RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman Side B : Pembicaraan Tk II Jawaban Pemerintah RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman (lanjutan) dan dilanjutkan dengan Laporan BKSAP mengenai laporan delegasi DPR RI ke Konferensi IPU di Santiago Chile	Rapat Paripurna ke 21/II/1991-1992		Suara Jelas
274	Side A : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke ke RRC Side B : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke ke RRC (lanjutan) yang kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna Ke-21 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992	Rapat Paripurna ke 21/II/1991-1992	03 Desember 1991	Suara Jelas
275	<i>Side A : Tidak Ada Suara</i> <i>Side B : Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 21/II/1991-1992		Suara Jelas
276	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 22 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 yang dilanjutkan dengan acara Pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Perfilman, Pembacaan calon anggota dan calon anggota pengganti Panitia Khusus RUU tentang perfilman oleh Kepala Biro Persidangan, Penyetujuan dan pengesahan calon-calon tsb, dan terakhir dilakukan Penutupan Rapat Paripurna Ke-22 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 Side B : Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 22/II/1991-1992	03 Desember 1991	<i>Tidak Ada Suara</i>

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
277	Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 23 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 yang dilakukan dengan Laporan Pembahasan RUU oleh Ketua Pansus RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pembicaraan Tk IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Karya Pembangunan Side B : Pembicaraan Tk IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Karya Pembangunan (lanjutan), dan Pembicaraan Tk IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi ABRI	Rapat Paripurna ke 23/II/1991-1992	09 Desember 1991	Suara Jelas
278	Side A : Pembicaraan Tk IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi ABRI (lanjutan) dan Pembicaraan Tk IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, Side B : Pembicaraan Tk IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan (lanjutan) dan Pembicaraan Tk IV Pengambilan Keputusan atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	Rapat Paripurna ke 23/II/1991-1992	18 Desember 1991	Suara Jelas
279	Side A : Penyetujuan dan pengesahan RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang dilanjutkan dengan Sambutan Menteri Keuangan atas nama pemerintah atas disyahnannya RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Laporan BKSAP mengenai laporan delegasi DPR RI ke Konferensi IPO di Bangkok Side B : Laporan BKSAP mengenai laporan delegasi DPR RI ke Konferensi IPO di Bangkok (lanjutan), yang dilanjutkan Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Maroko dan Tunisia	Rapat Paripurna ke 23/II/1991-1992	18 Desember 1991	Suara Jelas
280	Side A : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Maroko dan Tunisia (lanjutan) Side B : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Maroko dan Tunisia (lanjutan) dan Penutupan Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992	Rapat Paripurna ke 23/II/1991-1992	18 Desember 1991	Suara Jelas
281	Rapat Paripurna ke 24/II/1991-1992 Volume 1 Side A: Pembicaraan Tingkat IV untuk mengambil keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar dan Pidato Penutupan Masa Persidangan ke-2. Raja Kami Sembiring Melilala (Ketua Komisi II) melaporkan jalannya pembahasan RUU yang telah berlangsung pada tanggal 20 November 1991 dengan musyawarah mufakat bersama Fraksi-fraksi dengan klasifikasi 34 materi. Selanjutnya Drs. H. Awang Faruk Isak (Fraksi Karya Pembangunan) berpendapat pemberian Otonomi Daerah Tingkat II Denpasar adalah tepat dan benar karena lebih mengerti aspirasi rakyatnya. Side B: Rubiyanto (Fraksi ABRI) berpendapat bahwa di Daerah Otonom akan dibentuk dewan-dewan daerah yang dapat menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.	Rapat Paripurna ke 24/II/1991 - 1992	18 Desember 1991	Suara Jelas
282	Rapat Paripurna ke 24/II/1991-1992 Volume 2 Side A: Rubiyanto (Fraksi ABRI) mengatakan semakin yakin pembentukan Kota Madya II Denpasar yang berdampak positif dalam mewujudkan stabilitas politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta berpendapat secara umum muatan RUU tersebut sudah memuat asas, kesatuan & persatuan, keserasian pusat & daerah. H. Aisyah Amini (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan menurut observasi lingkungan di Kota Madya II Denpasar sudah terpenuhi untuk menjadi Kota Madya. Side B: H. Aisyah Amini, SH (Fraksi Persatuan Pembangunan) berpendapat dalam pembahasan RUU apakah tidak sebaiknya disebutkan kapan berlakunya RUU ini, karena tahapan-tahapan pemilihan umum telah mulai dilaksanakan pada tahapan 6. Selanjutnya Adi Pranoto (Fraksi Demokrasi Indonesia) mengatakan Kota Administratif Denpasar diperkirakan resmi menjadi daerah Kota Madya II pada bulan Februari 1992 dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.	Rapat Paripurna ke 24/II/1991 - 1992	Rapat Paripurna ke 24/II/1991 - 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
283	Rapat Paripurna ke 24/II/1991-1992 Volume 3 Side A: Adi Pranoto (Fraksi Demokrasi Indonesia) berpendapat Bab II Judul dan batas wilayah seyogyanya ditambah dan Ibukota Daerah Tingkat II Denpasar berkedudukan di Denpasar. Untuk menampung aspirasi masyarakat Denpasar serta meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat pelaksanaan pembangunan diharapkan UU tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Denpasar maka dapat disahkan pada bulan Februari 1992. Side B: Pimpinan Dewan menyampaikan pidato penutupan tentang masalah perekenomian sesuai dengan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yang diharapkan dapat menampung perkembangan perekenomian nasional.	Rapat Paripurna ke 24/II/1991 - 1992	Kamis, 19 Desember 1991	Suara Jelas
284	Rapat Paripurna ke 25/III/1991 - 1992 Volume 1 - 3 Side A: Penjelasan Rancangan APBN dalam tahun ke-4 Repelita dan Pengantar Nota Keuangan. Ketua Dewan berpendapat bahwa prospek ekonomi Indonesia masih baik dan memberikan harapan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kita harus mencari peluang dengan mengatasi kendala yang menghambat produksi dalam negeri seperti kendala dalam birokrasi, infrastruktur, dan SDM. Side B: Pada bulan September 1991 dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (Tim PKLN) yang bertugas mengelola sebaik-baiknya pinjaman komersial Luar Negeri agar tidak membebani terlalu berat dan dapat memperoleh persyaratan pinjaman sebanyak-banyaknya.	Rapat Paripurna ke 25/III/1991 - 1992		
285	Rapat Paripurna ke 25/III/1991-1992 Volume 2 - 4 Side A: Ketua Dewan membahas peristiwa Dili tanggal 12 Nopember 1991, Ketua Dewan berpendapat peristiwa tersebut mengandung unsur profokasi yang direncanakan oleh kelompok anti integrasi sehingga Dewan menyesalkan jika ada pihak dari Luar Negeri yang memanfaatkan untuk mendiskreditkan Indonesia. Presiden Soeharto mengatakan, telah membentuk Komisi Penyelidik Nasional untuk mengatasi insiden tersebut. Side B: Soeharto mengatakan dalam pembangunan nasional membutuhkan bantuan dari luar negeri akan tetapi kuncinya yaitu menggali sumber-sumber dalam negeri yang mencakup antara lain upaya sungguh-sungguh meningkatkan pajak, menghapus atau mengurangi subsidi yang tidak mencapai sasaran, dan meningkatkan efisiensi Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	Rapat Paripurna ke 25/III/1991 - 1992	Senin, 6 Januari 1992	Suara Jelas
286	Rapat Paripurna ke 25/III/1991-1992 Volume 5 Side A: Soeharto mengatakan untuk mengentaskan masalah kemiskinan hendaknya setiap Pemerintah Daerah Tk. II mengambil langkah-langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan meningkatkan Inpres bantuan dibidang pendidikan & kesehatan dengan dana 22,5 Miliar. Bantuan Inpres lainnya adalah penghijauan/ reboisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat pedesaan. Selain itu peningkatan jalan kabupaten mendapat bantuan yang paling besar, hal ini karena pentingnya jalan kabupaten bagi pembangunan dan mengembangkan otonomi daerah. Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 25/III/1991 - 1992	Senin, 6 Januari 1992	Suara Jelas
287	Rapat Paripurna ke 26/III/1991-1992 Volume 1 Side A: Penyampaian Pokok-pokok pikiran Komisi APBN atas RUU APBN 1992/1993 serta Nota Keuangannya dan Pemibacaraan Tingkat 4 Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Usaha Perasuransian. A. Bakri Tri Hadono (Ketua Komisi APBN) menyampaikan pokok-pokok pikiran RUU APBN tahun anggaran 1992/1993. Side B: A. Bakri Tri Hadono menyampaikan kesimpulan bahwa Rancangan APBN Tahun Anggaran 1992/1993 memenuhi persyaratan untuk dibahas lebih lanjut karena telah sesuai dengan Rapelita V. Masuk dalam Pembicaraan Tingkat 4 pengambilan keputusan atas RUU tentang Perasuransian. Dr. AA Baramuli, SH (Panitia Khusus bidang keuangan) menyampaikan posisi asuransi di Indonesia masih lemah dibanding posisi asuransi dunia dengan total Premi U\$ 1 triliun lebih.	Rapat Paripurna ke 26/III/1991 - 1992	Senin, 6 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
288	Rapat Paripurna ke 26/III/1991-1992 Volume 2 Side A: H. Sanggor (Fraksi ABRI) menyampaikan bahwa usaha perasuransian bertujuan untuk memberikan perlindungan perorangan, perusahaan, bangsa dan negara, karena itu masalah perlindungan tertanggung harus diwujudkan secara maksimal. Dra. Hj. Umrah Mahrujoh (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan pada tahun 1988 dari 1,2 triliun dolar AS dana yang dihimpun dari dana Perasuransian adalah 40 % dari Amerika, 30 % dari Eropa, 27% dari Asia, 25% dari Jepang, 2% negara lainnya, dan Indonesia 0.06%. Side B: Drs. Bambang Wahyudi mengatakan sebagai wahana ekonomi yang menampung dana masyarakat maka usaha perasuransian perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan dana yang berjangka panjang. Asas kebebasan memilih penanggung (free coise) harus diterapkan dalam usaha perasuransian, karena inilah kunci pengembangan dalam perasuransian.	Rapat Paripurna ke 26/III/1991 - 1992	Senin, 13 Januari 1992	Suara Jelas
289	Rapat Paripurna ke 26/III/1991-1992, Volume 3 Side A: Dra. H. Umrah Mahrujah (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengemukakan jenis usaha perasuransian yaitu Usaha asuransi kerugian, Usaha asuransi jiwa, dan Usaha reasuransi, pengelompokan tersebut ada manfaatnya dan dapat diartikan sebagai suatu political will berkembangnya asuransi. Selanjutnya Adi Pranoto (Fraksi PDI) menekankan perhatian pada tiga aspek dalam RUU tentang Perasuransian yaitu: Aspek perlindungan masyarakat, Aspek pembinaan dan pengawasan, dan Aspek perlindungan kepada dunia perasuransian. Side B: Prof. Dr. J.B. Sumarlin (Menteri Keuangan) mengatakan landasan konstitusional yang kokoh mutlak diperlukan mengingat peran perasuransian dalam perkembangan perekonomian bangsa secara keseluruhan sangat menentukan. Selain itu dalam hubungan dengan fungsi menanggulangi resiko, usaha perasuransian merupakan kebutuhan dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga yang diperlukan dalam menghadapi resiko finansial.	Rapat Paripurna ke 26/III/1991 - 1992	Senin, 13 Januari 1992	Suara Jelas
290	Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992 Volume 1 Side A: Membahas Pembicaraan TK II Pemandangan Umum para anggota atas RUU tentang Kesehatan. Nanang Surjana, SH (Fraksi Karya Pembangunan) mengatakan sarana pelayanan kesehatan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, budaya, kedudukan, jabatan, sehingga pelayanan kesehatan diberikan pada prinsip melayani orang yang memerlukan. Selain itu upaya kesehatan yang merupakan kegiatan pokok adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Side B: Nanang Surjana, SH (Fraksi Karya Pembangunan) mengatakan dalam RUU ini belum mencerminkan perlindungan keamanan terhadap masyarakat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya atau unsur makanan yang belum dikehendaki.	Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992	Senin, 13 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
291	Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Dr. Teheri Nur, ME melanjutkan penjelasannya bahwa Manajemen kesehatan dirasakan belum memadai karena kemampuan pengelolaan kesehatan di berbagai tingkat masih terbatas dan sistem informasi kesehatan yang mantab belum ada. Selain itu masih ada produk hukum yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan. Selanjutnya Tengku Hj. Gazali (Fraksi PPP) mengatakan RUU ini masih memerlukan pembahasan dan penyempurnaan yang lebih menyeluruh dibalik Judul, Isi, dll. Side B: Tengku Hj. Gazali (Fraksi PPP) mengatakan bahwa Pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pelayanan kesehatan swasta dengan melalui 3 aspek pendekatan, yaitu: Pendekatan melalui aspek manajemen, ketenagaan, teknologi dan financial. Dengan aspek-aspek tersebut unit-unit swasta dibina dan dikembangkan kualitas mutu pelayanan, sehingga dapat terhindar dari beban pemerintah. Selanjutnya Dr. Safei Aligumai (Fraksi Demokrasi Indonesia) mengharapkan pada semua pihak layanan kesehatan ini janganlah digunakan sebagai lahan bisnis yang bersifat komersial yang berorientasi pada mencari keuntungan karena obyeknya adalah manusia yang menderita sakit.	Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992	Selasa, 14 Januari 1992	Suara Jelas
292	Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992 Volume 3 Side A: Lanjutan Dr. Safei Aligumai (Fraksi Demokrasi Indonesia) berkesimpulan bahwa suksesnya pembangunan ekonomi antara lain sudah dibangunnya industri besar yang telah menggunakan para tenaga kerja kecil Indonesia. RUU ini dikhususkan bagi industri-industri makanan, restoran besar, dan catering, misalnya dengan membuat laboratorium kecil yang dapat mengukur standar kesehatan makanan dan minuman. Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992	Selasa, 14 Januari 1992	Suara Jelas
293	Rapat Paripurnak ke 28/III/1991-1992 Volume 1 Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan Umum Para Anggota RUU tentang APBN 1992/1993. Side A: Ir. Indra Bambang Utoyo, SE (Fraksi Karya Pembangunan) berpendapat RAPBN 1992/1993 merupakan bagian dari Rapelita V yang harus memprogram operasional tahunan yang dapat sasaran-sasaran Rapelita V untuk memasuki Rapelita VI sebagaimana tercantum dalam GBHN 1988. Side B: Lanjutan Ir. Indra Bambang, SE mengatakan pengeluaran rutin yang paling besar adalah pembayaran bunga dan cicilan luar negeri yang naik 10 % dari anggaran tahun ini. Selain itu di bidang Sektor Industri masih banyak industri lokal yang masih tergantung dari bahan baku yang diimpor dari luar negeri, sehingga mengakibatkan beban devisa yang cukup besar.	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992	Selasa, 14 Januari 1992	Suara Jelas
294	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Suwarno (Fraksi ABRI) menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi 1991/92 mengalami penurunan 2 %, hal ini disebabkan karena melonjaknya kegiatan impor dan makin melemahnya kegiatan ekspor, khususnya ekspor migas, sehingga Pemerintah harus mengendalikan Impor terutama untuk industri yang tidak berorientasi ekspor dan konsisten dengan kebijaksanaan deregulasi dan kebijaksanaan moneter lainnya. Suwarno juga mengatakan Pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis yang telah dianut selama ini. Side B: Lanjutan, Suwarno (Fraksi ABRI) mengatakan dalam penyusunan program pembangunan perlu memperhatikan: Pemanfaatan BLK yang ada di daerah agar dilaksanakan secara optimal dengan kerjasama pihak pemerintah dan swasta; Partisipasi swasta terutama penyediaan pelatih dan dukungan anggaran latihan; Peningkatan program magang, sebagai salah satu wujud praktek pendidikan dan pelatihan; Masalah penagihan dan pengembangan transmigrasi, khususnya menyangkut lokasi transmigrasi;	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992	Rabu, 15 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
295	Rapat Paripurna ke 28/III/ 1991-1992 Volume 3 Side A: Drs. H. Benyamin Mattaliti (Fraksi Persatuan Pembangunan, Pembicara I) menjelaskan untuk ekspor migas, asumsi harga standar Amerika adalah 17 dolar/ barel dari tahun 1992/1993 merupakan peringatan sifat kehati-hatian mengikuti harga minyak bumi dipasaran dunia bagi Indonesia. Untuk itu Indonesia diharapkan tetap berperan aktif dalam stabilitas bahkan menaikkan harga minyak bumi di pasaran dunia, baik melalui OPEC maupun kontak dengan negara-negara produsen lainnya yang non OPEC. Selain itu menurut logika dan rasional yang adil penerimaan negara perlu berorientasi pada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penerimaan pajak langsung dan tidak langsung. Side B: Lanjutan Drs. H. Benyamin Mattaliti (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengemukakan anggaran belanja pembangunan mempunyai prioritas pengeluaran pembangunan yaitu: pembangunan prasarana dasar, penyediaan pelayanan dasar yang makin luas kepada rakyat, pembangunan SDM, penyediaan biaya operasi pemeliharaan yang memadai bagi sarana dan prasarana yang telah dibangun. Berdasarkan prioritas tersebut terdapat 5 sektor pembangunan yang mendapat anggaran yang cukup besar, yaitu: Sektor perhubungan dan pariwisata, sektor pertambangan dan energi, sektor pendidikan generasi muda, sektor kebudayaan nasional, sektor pertanian dan pengairan, sektor pembangunan daerah desa dan kota.	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992	Rabu, 15 Januari 1992	Suara Jelas
296	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992 Volume 4 Side A: Drs. Muhamad Mansyur (Fraksi Persatuan Pembangunan, Pembicara II) menjelaskan selain 5 sektor pembangunan yang mendapat anggaran, terdapat 8 sektor lain yaitu: Sektor perumahan rakyat dan pemukiman, sektor kesehatan, sektor tenaga kerja dan transmigrasi, sektor teknologi dan penelitian, sektor koperasi, sektor agama, sektor perdagangan, dan sektor aparatur pemerintah. Jaja Winata Kusuma (Fraksi Demokrasi) mengusulkan agar daftar usulan proyek dan kegiatan bagi lembaga tinggi negara dapat disusun sendiri oleh lembaga yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan rumusan GBHN. Side B: Lanjutan Jaja Winata Kusuma (Fraksi Demokrasi) mengemukakan penerimaan sektor non migas direncanakan penerimaan PPh 10,8 triliun, untuk itu Fraksi Demokrasi mengharapkan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan pemerataan dan pendapatan.	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992	Rabu, 15 Januari 1992	Suara Jelas
297	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992 Volume 5 Side A: Lanjutan Jaja Winata Kusuma (Fraksi Demokrasi) mengatakan untuk sektor tenaga kerja dan transmigrasi mendapat anggaran 886 miliar yang akan digunakan untuk pemograman pemindahan penduduk terutama dari pulau jawa dan bali. Untuk Itu FDI menyarankan agar pembangunan sarana dan prasarana bangunan-bangunan kebutuhan dasar di daerah transmigrasi yang sudah ada agar lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penyebaran dari daerah pemukiman transmigrasi menjadi lancar. Selain itu Jaja Winata juga mengatakan Sektor Perumahan rakyat dan pemukiman mendapat anggaran 958,8 miliar yang akan digunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengadaan perumahan dan pemukiman yang layak, aman, sehat, serasi dan teratur, serta harga yang terjangkau. Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992	Rabu, 15 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
298	Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992 Volume 1 Side A: Pembicaraan Tingkat 4 Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sunaryo (Ketua Panitia Khusus RUU Jaminan Sosial Tenaga Kerja) menjelaskan proses jalannya RUU yang dimulai sejak tanggal 9 September 1991 dan telah disepakati antara lain: menambahkan pasal 27 (2) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan, ketentuan umum pasal 1 butir 2 tentang pengertian tenaga kerja Pansus menyetujui rumusan disempurnakan, dengan diresmikan UU ini maka UU No. 2 tahun 1951 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam pasal 34 baru. Situmorang (Fraksi Karya Pembangunan) mengatakan dalam pembahasan pengambilan keputusan RUU ini FKP lebih menitik beratkan pada aspek pemerataan, perlindungan, kesejahteraan, kegotongroyongan, peningkatan harkat dan martabat tenaga kerja sebagai perwujudan amalan Pancasila sila ke 4 dan 5. Side B: Lanjutan Situmorang (Fraksi Karya Pembangunan) menjelaskan pandangan strategis dari Fraksi Karya Pembangunan, antara lain yaitu: Eksistensi jaminan tenaga kerja hendaknya memberikan cakupan yang luas baik dalam hubungan kerja/ non kerja, penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja hendaknya dapat menumbuhkan kembangkan sarana dan prasarana kerja, jaminan sosial menjadi hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan tenaga kerja. Situmorang juga mengatakan substansi yang perlu ditambahkan adalah yang berhubungan dengan faktor keamanan, kekayaan, dan jaminan sosial tenaga kerja.	Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992	Rabu, 15 Januari 1992	Suara Jelas
299	Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Udiyanto (Fraksi ABRI) berpendapat bahwa pasal 31 RUU tentang pengembangan pensiun dasar tenaga kerja tidak perlu dirumuskan, hal ini dapat dikembangkan dengan menggunakan pasal 14 RUU yang menyebutkan bahwa Jaminan hari tua dibayarkan berkala atau dapat dikatakan sebagai pensiun, sehingga pasal 31 sebaiknya dihapus. Fraksi ABRI berharap Pemerintah segera membuat peraturan perundangan sebagai penjabaran dari UU ini antara lain tentang jaminan tenaga kerja bagi tenaga kerja yang mengalami PHK. Malik (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan RUU ini disusun dengan musyawarah mufakat, hasrat sungguh-sungguh yang disertai dengan keterbukaan dan dimana tidak ada pihak memaksakan kehendaknya. Side B: Lanjutan, Malik (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengemukakan harapan antara lain: Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan RUU, Jaminan sosial tenaga kerja sangat erat hubungannya dengan aspek pengupahan tenaga kerja, keberhasilan dari tujuan tentang jaminan tenaga kerja sangat tergantung pada peningkatan sarana dan dana, dan anggaran untuk Depnakertrans supaya ditingkatkan. Budi Harjono (Fraksi Demokrasi Indonesia) mengatakan masalah tenaga kerja adalah masalah yang mendasar sehingga perlu mendapat prioritas karena pada hakekatnya membahas masalah tenaga kerja tidak lepas dari manusia sebagai subjek, obyek dan tujuan pembangunan nasional.	Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992	Jumat, 17 Januari 1992	Suara Jelas
300	Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992 Volume 3 Side A: Budi Harjono (Fraksi Demokrasi) mengatakan RUU ini hakekatnya bertujuan meletakkan dasar-dasar yang kuat dan kepastian hukum yang kokoh, serta merupakan upaya perlindungan masyarakat tenaga kerja secara luas melalui program jaminan sosial, serta memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan usaha bersama antara pengusaha dengan tenaga kerja dimana pengusaha dan tenaga kerja merupakan mitra yang saling memerlukan. Perlindungan tenaga kerja hendaknya dilaksanakan dan tumbuhkan oleh organisasi-organisasi profesi ketenagakerjaan. Side B: Menteri Tenaga Kerja (Drs. Cosmas Batubara) mengatakan lahirnya Jamsostek ini merupakan satu langkah lebih maju untuk bangsa Indonesia dalam upaya memberi perlindungan pada tenaga kerja yang merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan. Selain itu adanya Jamsostek yang mencakup antara lain jaminan hari tua yang diatur dalam UU ini diharapkan menjadi daya tarik bagi kaum muda untuk bekerja di Sektor swasta dan tidak berorientasi dengan jabatan di Sektor pemerintah.	Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992	Jumat, 17 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
301	Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992 Volume 1 Side A: Pembicaraan Tk.II Pandangan Umum para anggota tentang: RUU tentang Penataan Ruang. Dr. Ir. Irma Alamsyah Jaya Putra, M.Si (Fraksi Karya Pembangunan) mengatakan RUU ini harus memuat landasan moral, etik yang kokoh bagi pembangunan nasional, meningkatkan martabat serta kewajiban HAM, meningkatkan kesetiakawanan sosial, menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara stabilitas nasional. Selain itu RUU yang akan mencakup ruang daratan, laut, udara, angkasa perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga membawa terwujudnya kemakmuran rakyat, karena RUU ini mengikat seluruh aparat pemerintah dan masyarakat sehingga RUU ini perlu mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Asas yang perlu diperhatikan dalam RUU ini adalah kesesuaian dan sinergi wilayah. Side B: Lanjutan Dr. Ir. Irma Alamsyah (FKP) menjelaskan maksud dan tujuan RUU ini adalah untuk memberi kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum dalam mengatur penataan ruang, terkait dengan hal tersebut Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud untuk memberi kepastian hukum dan penyederhanaan hukum. NM. Budi Waluyo (Fraksi ABRI) mengatakan RUU tentang Penataan ruang diharapkan berwawasan nusantara, ketahanan nasional dan berwawaskan lingkungan hidup. Masalah yang berkaitan dengan penataan ruang yaitu masih adanya tumpang tindih, gesekan atau benturan berbagai kepentingan, baik antara pemerintah dengan pengusaha, antara pengusaha dengan masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat.	Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992	Jumat, 17 Januari 1992	Suara Jelas
302	Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Lanjutan NM. Budi Waluyo (Fraksi ABRI) menjelaskan mengenai ruang apa yang akan ditata dalam RUU ini adalah (1) Ruang Wilayah Negara, belum secara definitif disebutkan seperti batas wilayah negara yang disebutkan termasuk Peraturan Pemerintah sebagai dasar sehingga akan dapat menimbulkan permasalahan, (2) Ruang Udara dan Laut, dalam RUU ini masih ada kerancuan dalam mengartikan tata ruang udara dengan tata ruang guna udara dan air. Side B: Drs. H. Suwandi (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan dalam RUU ini perlu diatur suatu penegakan tentang perlunya pengaturan atas hak-hak yang mencakup hak guna ruang bawah tanah, hak milik atas satuan ruang bawah tanah. Di daerah pemanfaatan ruang masih menimbulkan keluhan karena sulit ditertibkan peruntukannya sesuai dengan RUTR yang telah ada. Selain itu ada tumpang tindih pengertian antara rencana tata ruang dan penataan ruang, sedangkan rencana tata ruang adalah hasil perencanaan penataan ruang. Suwardi Wirya Atmaja (Fraksi Demokrasi Indonesia) mengatakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri telah tumbuh berbagai industri besar maupun kecil yang tersebar di berbagai daerah khususnya Jawa dan Sumatera, akibat adanya penataan ruang industri tersebut telah membawa masalah-masalah yang merisaukan dan merugikan masyarakat baik menyangkut lokasi, penggunaan dan perluasan tanah, fasilitas pendukung, air, listrik dan limbah.	Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992	Rabu, 22 Januari 1992	Suara Jelas
303	Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992 Volume 3 Side A: Suwardi Wirya Atmaja (Fraksi Demokrasi Indonesia) berpendapat dalam penataan ruang terdapat beberapa hambatan/ konflik, yaitu beredarnya peta yang dibuat oleh berbagai instansi pemerintah/pusat/daerah, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi pihak swasta yang ikut membuat peta. Dari produk peta yang dibuat instansi tersebut ternyata berbeda dari segi ukuran, batas, luas, isi dan ketepatan, sehingga masyarakat/ dunia menjadi ragu, bingung dan kurang percaya terhadap peta buatan Indonesia. Selain itu di beberapa daerah terjadi perubahan fungsi ruang yang membawa dampak yang luas bagi penataan ruang secara keseluruhan dan pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat. Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992	Rabu, 22 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
304	Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992 Volume 1 Side A: Pembicaraan Tk.II Pemandangan Umum para anggota atas RUU tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dan RUU tentang Budidaya Tanaman. Jamaris Yunus (Fraksi Karya Pembangunan) menjelaskan sektor pertanian adalah penghasil beras yang menjadi bahan makanan utama bagi sebagian besar rakyat Indonesia, oleh karena itu usaha perberasan merupakan produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selama orde baru pengaturan yang menyangkut usaha di sektor pertanian sangat minimal yang hanya melahirkan satu UU yakni UU No. 2 tahun 1961 tentang Pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman. Side B: Lanjutan, Jamaris Yunus (Fraksi Karya Pembangunan) mengatakan pembangunan pertanian waktu mendatang diharapkan menggunakan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada perkembangan pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Siahaan (Fraksi ABRI) menyebutkan bahwa UU No.6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan belum mengatur secara konkrit karantina hewan. Terdapat kasus pemalsuan benih yang mengganggu pencapaian produksi dan merugikan petani secara yuridis belum kuat dijadikan dasar. Selain itu masalah pestisida masih diatur dengan PP sebagai pelaksanaan UU No. 11 tahun 1962 yang mengatur tentang VGNA, jadi belum ada UU/ PP tentang masalah karantina untuk mencegah dan masuknya tersebar hama penyakit hewan dan ikan.	Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992	Rabu, 22 Januari 1992	Suara Jelas
305	Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Tidak ada suara Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992	Kamis, 23 Januari 1992	Suara Jelas
306	Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992 Volume 3 Side A: Lanjutan, Megawati Taufik Kiemas (FDI) mengatakan benih tanaman sebagai sarana produksi utama dalam budidaya tanaman perlu dijaga kemurnian kualitasnya, untuk itu harus dilakukan kegiatan pengumpulan <i>plasma nutfah</i> dan pemeliharaan tanaman. Selain itu Megawati Taufik Kiemas juga berpendapat pengendalian , pengelolaan sarana produksi budidaya tanaman seperti benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian menurut FDI perlu dilakukan pemerintah. Side B: Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992	Kamis, 23 Januari 1992	Kosong
307	Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992 Volume I Side A: Pembicaraan Tk. II Jawaban Pemerintah atas RUU tentang RAPBN, Pembicaraan Tk. I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perkembangan Produk dan Sejahtera, Pembicaraan Tk. II Jawaban Pemerintah atas RUU tentang Kesehatan. Menteri Keuangan (Prof. Dr. JB. Sumarlin) menjelaskan bahwa APBN merupakan kristalisasi dari cara hidup rakyat sebagai bangsa, yaitu cara memperoleh dan mempergunakan sumber-sumber keuangan negara bagi belanja negara, oleh karena itu penyusunan APBN harus berdasarkan perhitungan yang sangat cermat khususnya mengenai potensi dan peluang. Side B: Lanjutan Menteri Keuangan (Prof. Dr. JB. Sumarlin) mengatakan masalah macetnya pemberian kredit oleh bank dapat disebabkan 2 (dua) faktor yaitu faktor efisien dan intern bank. Faktor intern biasanya disebabkan oleh kekeliruan dalam memberikan kredit, kurang cermatnya dalam antisipasi masalah dan penetapan tingkat bunga yang terlalu tinggi. Masalah lain yang menyebabkan kredit macet adalah penetapan suku bunga kredit yang terlalu tinggi.	Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992	Kamis, 23 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
308	Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Lanjutan Menteri Keuangan Prof. Dr. JB. Sumarlin berpendapat penerimaan devisa-devisa dari sektor pariwisata juga akan terus digalakan antara lain melalui promosi ke beberapa negara yang menjadi pasar pariwisata Indonesia, misalnya dengan mengikuti brosur <i>travel fair</i> di Belgia yakni Pergelaran Indonesia Extravagansa di Taipeh. Selanjutnya Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim mengemukakan perkembangan matra kependudukan dinamis perlu dirumuskan perundang-undangan kependudukan yang bertumpu pada pertimbangan pokok, antara lain: Undang-undang yang dihasilkan hendaknya mempunyai wawasan masa depan, serta cukup komprehensif mengatur berbagai segi kependudukan dalam pembangunan. Side B: Lanjutan, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim menjelaskan bahwa pada intinya pembangunan nasional mencakup seluruh matra kependudukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. RUU ini menekankan tanggung jawab moral setiap penduduk, memelihara dan meningkatkan keselarasan, keserasian lingkungan. Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan seluasnya untuk berperan serta dalam kependudukan dan KB. Selain itu juga menjelaskan sasaran utama dari RUU ini adalah untuk menunjang terciptanya kualitas manusia dan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang 25 tahun ke dua.	Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992	Jumat, 24 Januari 1992	Suara Jelas
309	Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992 Volume 3 Side A: Menteri Kesehatan Dr. Adhytma, MPH menanggapi Partai Persatuan Pembangunan tentang Judul RUU tentang Kesehatan, dan pada kesimpulannya judul akan tetap RUU tentang Kesehatan. Mengenai transparansi organ (bedah mayat) dalam RUU ini merupakan bagian dari penelitian masyarakat dan sekaligus termasuk dalam pendidikan dan produk hukum, akan tetapi diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma agama dan bukan untuk kepentingan komersil. Side B: Penutupan rapat oleh Ketua Dewan	Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992	Jumat, 24 Januari 1992	Suara Jelas
310	Rapat Paripurna ke 33/III/1991-1992 Volume I Side A: Pembicaraan TK. II Jawaban atas pandangan umum para anggota RUU tentang Penataan Ruang. Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Drs. Emil Salim mengatakan Pemerintah sependapat dengan para fraksi mengenai maksud dan tujuan RUU tentang Penataan Ruang yaitu Penataan ruang sangat penting maknanya dalam penyederhanaan hukum bagi kegiatan penataan ruang. Dalam penataan ruang perlu mengambil prinsip-prinsip kelestarian kemampuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup demi terwujudnya pemanfaatan ruang. Selain itu Prof. Drs. Emil Salim juga menjelaskan RUU tentang Tata Ruang ini bermuara dan beroperasi pada Daerah Tk. II, tapi harus disusun karena izin pembangunan/ lokasi harus sesuai dengan ketentuan RUU yang mengatur alokasi pemanfaatan luar. Side B: Lanjutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatakn Rencana Penataan Ruang Daerah Tk. II sebagai penjabaran lebih lanjut penataan ruang Daerah Tk. I merupakan pedoman pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tk. II yang bersifat operasional dan dapat menampung pembangunan fisik serta perubahan sosial ekonomi yang global, sehingga penataan ruang Daerah Tk. II ditetapkan berjangka waktu 10 tahun.	Rapat Paripurna ke 33/III/1991-1992	Jumat, 24 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
311	Rapat Paripurna ke 33/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Menteri Pertanian Ir. Wardoyo menjelaskan salah satu prinsip yang dikembangkan dalam budi daya tanaman adalah prinsip demokrasi, badan usaha/hukum dalam bentuk koperasi sangat diharapkan dan didorong untuk dapat berkembang mewujudkan bentuk usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Pada prinsipnya tujuan pengembangan budi daya tanaman yaitu untuk meningkatkan pendapatan taraf hidup petani, perkebunan, nelayan dan memperluas lapangan kerja, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Untuk itu pemerintah menyusun rencana perkembangan dan menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman. Side B: Lanjutan, Menteri Pertanian Ir. Wardoyo mengatakan Pemerintah juga akan mengadakan pengawasan terhadap penggunaan pestisida terlarang atau membatasi penggunaan pestisida, yang sudah tercantum dalam Pasal 31 dan 32 RUU. Selain itu juga menjelaskan bahwa pengembangan budi daya tanaman dapat dicapai secara optimal apabila dalam pelaksanaannya menggunakan teknologi secara tepat, oleh karena itu pemerintah mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan penelitian guna menentukan teknologi tepat.	Rapat Paripurna ke 33/III/1991-1992	Senin, 27 Januari 1992	Suara Jelas
312	Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992 Volume I Side A: Pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Penataan Ruang dan Pembicaraan Tk. IV Pengambilan Keputusan atas RUU Perumahan dan Pemukiman. Rifai (Ketua Pansus) menyampaikan laporan proses penambahan RUU Perumahan, ada beberapa substansi yang bukan saja memerlukan waktu yang sangat panjang karena ekstensinya sangat dominan atas sukses/ tidaknya dibidang perumahan dan pemukiman, yaitu: pemerintah harus siap menanti RUU tentang Penataan ruang yang sedang dibahas dan harus dapat mengendalikan penyelenggara pengelola pelaksanaannya. Selain itu Abdul Latief (Fraksi Karya Pembangunan) juga menyampaikan pandangan umum fraksi mereka yaitu Pancasila sebagai dasar negara, falsafat dan pandangan hidup bangsa oleh karena itu UU tentang Perumahan dan Permukiman harus mewujudkan rumah yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sosial. Side B: Lanjutan, Abdul Latief (FKP) mengatakan pembangunan dan pemukiman harus berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, dan hendaknya berlandaskan pada UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah. FKP mengharapkan segera terwujudnya kebijaksanaan nasional yang mantap dalam bidang perumahan dan pemukiman termasuk terjaminnya ketertiban hukum di bidang perumahan. Selain itu Paula Rejaan (Fraksi ABRI) mengatakan dalam muatan RUU ini terdapat masalah-masalah baru yang merupakan terobosan terhadap ketentuan yang telah ada yaitu tentang pembangunan perumahan dan pemukiman siap bangun, pelepasan atas tanah milik masyarakat dan rumah sebagai jaminan hutang, untuk itu masing-masing pihak harus berhati-hati agar materi UU tersebut tidak berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ada.	Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992	Senin, 27 Januari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
313	Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Lanjutan Paula Rejaan (Fraksi ABRI) menyampaikan harapan antara lain: (1) Setelah RUU tentang Perumahan dan Pemukiman Pemerintah hendaknya mempersiapkan pengoperasiannya berupa perangkat yang diperlukan sehingga tertib secara administrasi; (2) Dalam mempersiapkan perangkat tersebut diharapkan pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh masalah antara lain: sidang pertanahan, peraturan yang berhubungan dengan sewa rumah; (3) Pemerintah sungguh-sungguh membina peran serta masyarakat dalam penyertaan modal; (4) Pengendalian harga tanah segera diwujudkan. H.M. Mustafa (Fraksi Persatuan Pembangunan) menyampaikan saran dan pendapat fraksinya, antara lain: (1) Masalah pelepasan hak tanah supaya dengan sistem kesepakatan; (2) Pemerintah perlu memberikan bantuan bimbingan dan kemegahan; (3) Perlu fasilitas untuk perumahan, khususnya golongan penghasilan rendah melalui bank tanah dan (4) Perlu penertiban penghuni yang bukan hak miliknya. Side B: Lanjutan, H.M. Mustafa (FKP) mengatakan sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman adalah akan menangani pemugaran perumahan yang tidak layak huni. I Gusti Ngurah Yudha (Fraksi Demokrasi Indonesia) berpendapat penyelenggaraan perumahan dan pemukiman harus diarahkan untuk mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara BUMN, Koperasi dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan.	Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992	Rabu, 5 Februari 1992	Suara Jelas
314	Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992 Volume 3 Side A: Lanjutan, I Gusti Ngurah Yudha (FDI) mengemukakan pendapat FDI, yaitu: (1) Segera ditertibkan PP untuk menjalankan UU ini sesuai amanat pasal 5 ayat 2 UUD' 45; (2) Pelanggaran terhadap pembangunan perumahan menurut RUU ini diancam pidana; (3) Dalam kaitan konsolidasi tanah yang dilakukan pemilih tanah dilaksanakan secara bertahap tanpa paksaan. Selanjutnya Menteri Perumahan Rakyat Ir. Siswono Yudohusodo menjelaskan pendekatan baru dalam pembangunan perumahan dan pemukiman dilakukan melalui strategi pembangunan kawasan siap bangun dalam kawasan yang besar yang dikelola oleh pemerintah untuk memperhatikan tata ruang dan pertumbuhan wilayah untuk jangka panjang. Pola ini merupakan strategi pembangunan perumahan yang berjangka melihat jauh ke depan, penyelenggaraan dilakukan oleh BUMN, pola tersebut akan dapat menciptakan pemukiman penduduk secara terencana dan serasi yang terkonsentrasi dalam kawasan siap bangun. Side B: Lanjutan, Menteri Perumahan Rakyat Ir. Siswoyo Yudohersodo menyampaikan materi yang diatur dalam Peraturan peraturan dalam RUU ini adalah (1) Ketentuan mengenai persyaratan teknis, logis, administratif pengelolaan lingkungan; (2) Ketentuan mengenai penghunian, pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai negara; (3) Ketentuan mengenai pendataan rumah; (4) Ketentuan tentang Penghunian rumah dengan cara sewa; (5) Ketentuan mengenai pengendalian harga sewa yang dibangun.	Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992	Rabu, 5 Februari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
315	Rapat Paripurna ke 35/III/1991-1992 Volume I Side A: Pembicaraan Tk. II Pemandangan Umum Anggota atas RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Bambang Supangat (Fraksi Karya Pembangunan) menjelaskan tujuan utama RUU ini adalah untuk mencapai perkembangan penduduk yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan hidup yang berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan akan berdampak pula terhadap kulaitas penduduk dan pembangunan pada kesehatan, mutu SDM, pemukiman, keamanan dan kesehatan keluarga. RUU ini mengatur 2 (dua) materi yaitu masalah kependudukan dan keluarga sejahtera yang terkait menjadi satu, tapi ditinjau dari berbagai segi 2 (dua) masalah tersebut menduduki posisi yang tidak sama. Side B: Mujono (Fraksi ABRI) mengatakan pembangunan nasional dalam bidang kependudukan dan keluarga sejahtera telah menunjukan keberhasilan perubahan yang cukup menggembirakan dari berbagai ciri kependudukan, perubahan tersebut antara lain: terjadinya penurunan dalam tingkat penurunan serta dalam laju pertumbuhan penduduk, kesadaran dan tanggung jawab serta motivasi penduduk semakin meningkat. Drs. H. Benyamin Mattaliti (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan dalam rangka kampanye Keluarga Berencana (KB) hendaknya dihindari cara-cara penyebaran dan penggunaan alat-alat kontrasepsi KB (kondom, KB, spiral), hal ini bertujuan supaya tidak disalahgunakan untuk <i>free sex</i>.	Rapat Paripurna ke 35/III/1991-1992	Rabu, 5 Februari 1992	Suara Jelas
316	Rapat Paripurna ke 35/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Lanjutan, Drs. H. Bunyamin Mattaliti (Fraksi Persatuan Pembangunan) menambahkan bahwa peningkatan kualitas penduduk adalah sangat tepat jika secara sungguh-sungguh dan simultan didukung oleh pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Drs. Popo Sunandar Harun (Fraksi Demokrasi Pancasila) menjelaskan terjadi masalah komplek karena sektor kependudukan dan keluarga sejahtera mencakup berbagai aspek (politik, ekonomi, HANKAM, pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan hidup). Karena mencakup berbagai aspek tersebut maka permasalahannya menjadi rumit, untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan pendekatan yang multi dimensi agar mendapatkan penyelesaian yang tuntas. Sejak tahun 1989 pemerintah telah mencanangkan untuk memberikan prioritas bagi pembangunan Indonesia bagian Timur, karena wilayah bagian Timur ketinggalan dalam bebagai hal dibandingkan dengan wilayah lain Indonesia baik segi prasarana, komunikasi, maupun transportasi. Side B: Lanjutan, Drs. Popo Sunadar (Fraksi Demokrasi Pancasila) mengatakan dari segi kepadatan penduduk pada tahun 1990 pulau Jawa paling padat penduduk dengan luas 6,88% dari luas Indonesia, menampung 55,99% penduduk Indonesia, Propinsi DKI. Jakarta kepadatannya masih tertinggi penduduknya yaitu 13.990 orang/Km². Sedangkan Irian Jaya menempati urutan terendah hanya 4 orang/Km².	Rapat Paripurna ke 35/III/1991-1992	Senin, 10 Februari 1992	Suara Jelas
317	Rapat Paripurna ke 36/III/1991-1992 Volume I Side A: Pemandangan Umum para anggota atas RUU tentang Merk. Samsul Mu'arif, BA (Fraksi Karya Pembangunan) menyampaikan pokok-pokok pikiran antara lain: (1) UU No. 21 tahun 1961 menyebutkan sistem deklaratif lebih cocok digunakan untuk pendaftaran merk mengingat wilayah Indonesia yang luas dan perhubungan antara daerah satu ke daerah lain belum cukup mudah untuk digunakan pendaftaran merk. Apabila ada seorang pemakai merk benar-benar menggunakannya meskipun tidak terdaftar dalam sistem ini tetap dilindungi oleh hukum sepanjang dia dapat membuktikan sebagai pemakai pertama. Side B: Lanjutan, Samsul Mu'arif (FKP) menanyakan tentang alasan mengapa sanksi pidana antara RUU ini dengan RUU tentang Hak Paten dan Hak Cipta, ancumannya persis sama sedangkan pemberian jangka waktu haknya berbeda-beda. Drs. M. Ali Tahla (Fraksi ABRI) mengatakan kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi dan transportasi telah menyebabkan tercegahnya globalisasi pasar yang menyebabkan mengalirnya produk luar negeri ke Indonesia. Dengan judul "Merk" maka RUU tidak hanya menjangkau merk perusahaan dan merk perniagaan, tetapi juga akan menjangkau merk dagang, jasa, dan merk kolektif.	Rapat Paripurna ke 36/III/1991-1992	Senin, 10 Februari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
318	Rapat Paripurna ke 36/III/1991-1992 Volume 2 Side A: Abubakar, SH (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan dalam pasal 2 (1) UU No. 21 tahun 1991 telah ditentukan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merk diberikan kepada pemakai pertama dari merk tersebut di Indonesia, tetapi apabila dikemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan sebagai pemakai merk tersebut, maka dapat dibatalkan pendaftar pertama tersebut. Selain itu Abubakar, SH menjelaskan merk merupakan simbol sehingga pedagang dapat memperluas dagangannya dan mempertahankan pasarannya. Side B: Tengku Dahman Muhzir, SH (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia) mengatakan bahwa Pemerintah dalam menyiapkan RUU tentang Merk ini telah melakukan penelitian-penelitian cukup mendalam dalam bentuk seminar, konsultasi, supaya pada akhirnya RUU ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tengku Dahman Muhzir, SH juga menjelaskan prosedur pendaftaran merk tercantum dalam pasal sebagai berikut: (1) Pasal 9 Permintaan pendaftaran merk diajukan secara tertulis kepada kantor merk; (2) Pasal 12 ayat 2 Apabila ada kekurangan pemenuhan persyaratan diharapkan segera dipenuhi dalam waktu 3 bulan; (3) Pasal 19 Kantor merk secepatnya akan mengumumkan setelah ketentuan pada pasal 9 dan 12 terpenuhi; (4) Pasal 20 Pengumuman berlangsung selama 6 bulan; (5) Pasal 23 ayat 2 Sanggahan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 bulan setelah pengumuman; (5) Pasal 25 ayat 1 Selanjutnya kantor merk akan mengadakan pemeriksaan pendaftar merk; (6) Pasal 26 Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengumuman/ pemeriksaan; (7) Pasal 29 Sertifikat merk diberikan pada pihak yang mengajukan selambat-lambatnya 30 hari.	Rapat Paripurna ke 36/III/1991-1992	Selasa, 11 Februari 1992	Suara Jelas
319	Rapat Paripurna ke 37/III/1991-1992 Volume I Side A: Laporan Komisi APBN atas RAPBN 1992/1993, Laporan BKSAP tentang Hasil Kunjungan Delegasi ke Jerman, Laporan Hasil Delegasi DPR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi RI Sidang Majelis Umum PBB Ke-46 di New York, AS. Wiratno Puspo Atmojo, SH (Wakil Ketua Komisi APBN) menjelaskan hasil kompilasi RAPBN salah satunya adalah Komisi I, bahwa tidak tercermin di Departemen Luar Negeri dalam REPELITA V alokasi dan sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian dalam pelaksanaan pengawasan. Side B: Lanjutan, Wiratno Puspo Atmojo, SH (Wakil Ketua Komisi APBN) kembali menjelaskan hasil kompilasi RAPBN, Komisi V yang pada dasarnya menerima RAPBN 1992/1993, yang perlu diperhatikan adalah banyak konsultan yang gagal dalam perencanaan proyek, tapi tidak pernah mendengar sanksi apa yang dijatuhkan pada konsultan dan masih lemahnya koordinasi persiapan serta pengawasan. Komisi VI menyetujui, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan minyak solar yang menunjukkan kenaikan perlu diusahakan pemecahannya karena akan mempengaruhi berapa besarnya subsidi. Selanjutnya A. Bakri Sri Hardono melaporkan kegiatan delegasi ke Jerman pada tanggal 3 s.d 13 Oktober 1991, yaitu pembicaraan tentang kerjasama berupa bantuan pemerintah Jerman perbandingan sistem pembangunan wilayah dan masalah Desentralisasi yang diterapkan di Jerman. Ruang lingkup pembicaraan tersebut lebih menitik beratkan pada masalah politik dan ekonomi.	Rapat Paripurna ke 37/III/1991-1992	Selasa, 11 Februari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
320	Rapat Paripurna ke 37/III/1991-1992 Volume 2 Side A: A. Bakri Sri Hardono menjelaskan laporan kerja delegasi ke Jerman, kebijakan ekonomi negara Jerman menganut sistem ekonomi liberal/ ekonomi pasar. Dalam sistem ini campur tangan pemerintah dihindari semaksimal mungkin, yang diutamakan adalah kombinasi antar insan individu dan prinsip-prinsip kemajuan sosial. Prioritas bantuan Jerman kepada Indonesia adalah: transportasi, pengadaan air bersih, industri kecil dan menengah, pembangunan pedesaan dan pertanian (khususnya pulau Sumatera dan Kalimantan). Permasalahan yang menghambat bantuan yaitu keterlambatan pihak Indonesia dalam menyediakan dana rupiah dan negara kita sering terlambat mengajukan proyek. Selanjutnya Roesdi Roesli menyampaikan Laporan Delegasi DPR RI ke New York pada tanggal 12 September 1991. Delegasi RI untuk sidang Majelis Umum PBB Ke-46 bertugas untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam rangka kelangsungan program-program pembangunan perdamaian dunia. Side B: Lanjutan Roesdi Roesli mengatakan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah KTT Non Blok Ke-10 Tahun 1992, maka diharapkan dapat menciptakan konsolidasi dalam gerakan Non Blok sehingga dapat berperan dalam rangka memelihara kedamaian dunia. Kegiatan antara tanggal 23 September s.d 10 Oktober 1991 adalah acara penyampaian pidato persengketaan senjata, pelucutan senjata diharapkan menyeluruh karena merupakan tanggung jawab bersama negara di dunia.	Rapat Paripurna ke 37/III/1991-1992	Kamis, 13 Februari 1992	Suara Jelas
321	Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 1 Side A: Pembicaraan tingkat II pandangan atas para anggota mengenai RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang disampaikan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Merasakan keprihatinan yang sama, ditangan Presiden ditangani secara prioritas maka pemerintah mengambil langkah RUU dihadapkan DPR untuk Hak-hak penduduk dalam segala matranya, memperhitungkan keterkaitan penduduk dengan lingkungan fisik dan sosial tempat mereka berada dan mengabur ketentuan mengenai batas-batas wewenang pemerintah terhadap penduduk untuk penanggulangan penduduk miskin dan penduduk rentan lainnya diatur secara sistematis dalam RUU dengan peningkatan kualitas pada pembangunan jangka panjang ke-2. Side B: Lanjutan sambutan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, mengenai masalah single parents dan angka perceraian, masalah sanksi dan peran serta masyarakat. scors 3 menit. Pembentukan panitia khusus RUU tentang Kesehatan, pembacaan nama-nama anggota tetap dan anggota pengganti pansus yang akan disahkan. scors 3 menit. Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum anggota dewan atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman.	Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992	Senin, 17 Februari 1992	Suara Jelas
322	Rapat Paripurna ke 38/III/91-92 Senin, 17-2-1992, jam 09.00, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan Menteri Kehakiman, penjelasan tentang Sistem Kontributif dan Sistem Deklaratif dalam RUU tentang Merk, pendapat dari fraksi-fraksi, sanksi-sanksi dalam RUU tentang Merk, Keterangan asal barang, jangka waktu prosedur pendaftaran merk, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai satu-satunya tempat pengajuan dan pembatalan merk dan penjelasan ancaman pidana untuk tindak pidana di bidang merk. Side B: Lanjutan sambutan Menteri Kehakiman, bahwa RUU tentang Merk yang baru dan Peraturan Pemerintah tentang daftar kelas dan jenis barang telah ada revisi sebanyak 6 kali. Pembicaraan tingkat IV oleh Menteri Keuangan (perwakilan) RUU tentang Perbankan penanganan oleh Panitia Khusus (Pansus), Sambutan Ketua Pansus oleh Dr. A. A. Baramuli bahwa modal asing tidak akan mendominasi perekonomian nasional masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam perekonomian negara dan memperjuangkan Azas Pancasila.	Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992	Senin, 17 Februari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
323	Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 3 Side A: Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. H.M. Hoesni Thamrin Asaat, S.H. Bahwa konsisten selalu mengarahkan pandangan, pikiran dan analisa pada pola pikir yang didasarkan pada falsafah bangsa dan negara yaitu Pancasila, UUD 1945, GBHN dan program umum Golongan Karya yang harus dijabarkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, RUU harus berimplementasi dan tergambar dengan jelas semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Program umum Golkar. Side B: Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Murdono, hal-hal yang perlu dipedomani dalam pembahasan yaitu Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, fungsi bank sebagai agen pembangunan yaitu meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penjelasan tentang jenis-jenis bank dan harapan-harapan dari Fraksi Karya Pembangunan.	Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992	Senin, 17 Februari 1992	Suara Jelas
324	Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 4 Side A: Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa beberapa pokok UU perbankan untuk saat ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dan internasional, perbankan nasional dalam era globalisasi dengan cara menjemput bola (paket-paket deregulasi oleh pemerintah), dunia perbankan sangat aktif menghimpun dana masyarakat, RUU tentang perbankan ini terlalu liberal dan kurang adanya landasan filosofi yang kuat, azas-azas fungsi dan tujuan, perizinan bentuk hukum dan kepemilikan, prinsip bagi hasil, rahasia bank distribusi peredaran uang dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Side B: Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Heronimus Eipada Sihombing, penyampaian keluhan kesah masyarakat, DPR stempel pemerintah dianggap tidak mampu bikin UU Perbankan, membutuhkan UU tentang perbankan yang tetap mengandung nilai-nilai normatif dari Pancasila, UUD 1945 dan GBHN, Izin bank harus konsekuen dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam RUU dan Lembaga Perbankan harus berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan global, mampu melindungi dana yang dititipkan masyarakat dan mengeluarkan ke bidang produktif.....suara terputus.	Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992	Senin, 17 Februari 1992	Suara Jelas
325	Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 5 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Heronimus Eipada Sihombing bahwa Badan hukum koperasi dalam RUU tentang perbankan ini diberikan izin untuk mendirikan Bank Umum dan BPR maka diharapkan pemerintah memberikan sentuhan dan dorongan khusus untuk menciptakan iklim yang kondusif agar bank umum dan BPR yang berbadan hukum koperasi dapat didirikan dan berperan sederajat dengan perbankan yang berbadan hukum PT maupun PERSERO. Sambutan Menteri Keuangan oleh J.B. Sumarlin bahwa telah disetujui RUU Perbankan untuk disahkan menjadi UU, Perbankan Nasional diharapkan semakin mampu meningkatkan peran serta didalam mendorong dan meningkatkan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, profesionalisme para pelaku perbankan, pembinaan perbankan, landasan perbankan, ketentuan kegiatan perbankan, bank dengan prinsip bagi hasil, pemberian kredit bank, fungsi Menteri Keuangan selaku otoritas yang memberi izin atas usaha perbankan dan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank dan ketentuan hukum bagi pelanggaran perbankan (pemalsuan dan penggelapan). Penutupan oleh ketua sidang. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992	Senin, 17 Februari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
326	Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 1 Side A: Sambutan Ketua rapat pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN 1992-1993 serta nota keuangannya. Sambutan Kepala Biro Persidangan untuk membacakan surat tentang RUU tentang pembentukan pengadilan tinggi agama di DIY Bandar Lampung dan Jambi. Gambaran proses penanganan RUU tentang APBN tentang APBN 1992/1993 serta nota keuangannya sejak masuk Dewan 6 Januari sampai dengan hari ini tanhggal 27 Februari 1992, amanat presiden keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 1992/1993 serta nota keuangannya disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Januari. Laporan dari ketua komisi APBN Sdr. Abdul Bakri Srihardono, pembahasan draf tentang APBN. Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Mubakarmuang, SE., bahwa Pancasila azas kehidupan bermasyarakat, RAPBN 1992/1993 cukup strategis dalam repelita dan praktek monopoli penguasa kuat harus dicegah. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan olehh Mubakarmuang,SE., Pembahasan RAPBN : penjualan minyak dan non migas, yang menghambat pengembangan rakyat kurang mampu harus ditiadakan, PBB naik 1% dan anggaran yang sedang berjalan, pemungutan PBB, KTP, dll harus ditiadakan, Pengelolaan Yayasan di BUMN/Departemen perlu ditertibkan, mengurangi pinjaman bantuan luar negeri sebesar 7,4 % dari anggaran yang ada sekarang, pemerinhth perlu bisa menaikkan gaji Pegawai Negeri, ABRI dan Para Pensiunan, Peningkatan Sektor Pembangunan Daerahh desa dan kota 2,9 Triliyun, Pengawasan pengembangan kawasan terpadu untuk yang berpenghasilan kecil, menghindari pemotongan dana inpres desa dll, penyempurnaan kebijaksanaan kredit likuiwiditas terhadap koperasi, untuk mendorong ekspor dan devisa Indonesia perlu meningkatkan peran perdagangan dan lembaga promosi di luar negeri, harapan swadana yang diberikan kepada beberapa unit kegiatan, pembebasan tanah dan penanaman hutan industri.	Rapat Paripurna ke 39/III/1991-1992	Kamis, 27 Februari 1992	Suara Jelas
327	Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Muzakar Muang, SE., : Peningkatan SDM terutama di Indonesia bagian Timur setingkat dengan laju pertumbuhan yang dibutuhkan, peningkatan ekspor non migas, bidang ketenagakerjaan belum memperoleh perhatian sebagaimana mestinya (upah buruk), kekurangan guru, pelayanan kesehatan dan kebersihan rumah sakit yang memadahi, kesejahteraan sosial, pelaksanaan kegiatan dan proyek masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kemajuan dan pemanfaatan IPTEK melalui keberhasilan proses ahli teknologi dan transformasi industri perlu terus dilanjutkan. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Drs. Habib Makruf : kondisi ekonomi moneter tahun 1991 kendala yang kurang mendukung, memulai proses tinggal landas Pelita VI, meningkatkan stabilitas ekonomi, APBN harus mencerminkan keserasian antara penerimaan dan pengeluaran, serta mengenai pinjaman luar negeri perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menuju pembangunan ekonomi dan proyek yang produktif. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Drs. Habib Makruf : bantuan luar negeri haruslah tidak mengandung ikatan politik yang merugikan apalagi mengurangi harga diri dan martabat bangsa dan negara, melanjutkan pembangunan dengan kekuatan sendiri, OPEC belum berhasil mendorong harga minyak secara bertahap sesuai yang ditetapkan OPEC sebesar 21 dolar AS, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi juga pajak penghasilan, pemungutan pajak lainnya menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, pengeluaran-pengeluaran rutin yang terbesar, menurunkan pinjaman luar negeri dalam RAPBN 1992/1993, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pegawai, pemerintah agar mengantisipasi implikasi perubahan sistem pendidikan, bantuan sekolah pada daerah-daerah terpencil, kumuh dan miskin, serta penjelasan-penjelasan dalam berbagai sektor.	Rapat Paripurna ke 39/III/1991-1992	Kamis, 27 Februari 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
328	Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 3 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Drs. Habib Makruf, bahwa Fraksi ABRI menyetujui RUU tentang RAPBN 1992/1993 menjadi UU dan harapan-harapan dari Fraksi ABRI atas RUU tentang RAPBN 1992/1993. Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh H. Mohamad Yanis Sairudin, menjelaskan tentang pemberantasan kemiskinan, pematokan harga minyak per barel, pinjaman Indonesia sudah melebihi batas, penyaluran dana sosial harus jujur dan adil, penyediaan sarana dan prasarana umum, wajib pajak, pemberian kredit, ekspor non migas, pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap, proyek dari luar negeri perlu ditingkatkan, menggunakan produksi dalam negeri serta Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU tentang RAPBN 1992/1993. Side B: Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh H. Suwardi Wiryo Atmajo, menjelaskan bahwa RUU tentang RAPBN 1992/1993 masih memperlihatkan perbedaan sistem dan pelaksanaannya, belum mengatur substansi yang inspiratif, penerimaan migas, wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea cukai tembakau, penerimaan pembangunan dari pinjaman luar negeri untuk pembangunan proyek serta penjelasan tentang rincian kegiatan rutin.	Rapat Paripurna ke 39/III/1991-1992	Kamis, 27 Februari 1992	Suara Jelas
329	Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 4 Side A: Lanjutan Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh H. Suwardi Wiryo Atmojo yang menjelaskan tentang biaya perjalanan dinas, lokakarya, pengadaan barang-barang kantor, pembayaran jasa-jasa yang perlu dilakukan penilaian kembali, kenaikan gaji Pegawai Negeri dan ABRI serta pensiunan mutlak harus dilakukan untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa, pembayaran bunga dan cicilan luar negeri, menekankan proyek-proyek untuk menunjang roda perekonomian serta harapan-harapan dari Fraksi Demokrasi Indonesia dalam berbagai sektor. Pembacaan RUU tentang RAPBN 1992/1993 oleh Kepala Biro Persidangan. Side B: Lanjutan pembacaan RUU tentang RAPBN 1992/1993 oleh Kepala Biro Persidangan, bahwa RUU tentang RAPBN 1992/1993 telah disetujui dan sah menjadi UU. Sambutan Menteri Keuangan, antara lain tentang perekonomian yang semakin meningkat, sektor perhubungan, kesehatan, pendidikan, KB, air bersih semakin meluas dinikmati masyarakat, sektor industri semakin meningkat dan makin mampu bersaing dipasar internasional, sektor pertanian yang semakin kokoh, ketergantungan terhadap minyak bumi telah jauh berkurang, penurunan kemiskinan cepat berkurang, ketidakseimbangan makro dan mendorong ekonomi lemah dengan menciptakan usaha. Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua Rapat.	Rapat Paripurna ke 39/III/1991-1992	Kamis, 27 Februari 1992	Suara Jelas
330	Rapat Paripurna ke 40/III/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 1 Side A: Pembicaraan Tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya. Sambutan Dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Usman Simanjuntak bahwa UUD 1945 mengamanatkan upaya memajukan kebudayaan Indonesia, sejarah tidak boleh dilupakan oleh suatu bangsa, tujuan tidak membedakan kepentingan daerah, keyakinan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penjelasan tentang RUU tentang Cagar Budaya bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta kekuatan dan modal utama bagi bangsa untuk maju mencapai cita-cita. Side B: Lanjutan Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Usman Simanjuntak menjelaskan tentang syarat-syarat upaya pengembangan kebudayaan dan larangan-larangan cagar budaya. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Dra. Djumyatni Gautama Suhodo menjelaskan bahwa cagar budaya yang sebagian besar berasal dari hasil ciptaan bangsa pada zaman lalu yang merupakan kebanggaan nasional untuk memperkuat sebagai jati diri negara.	Rapat Paripurna ke 40/III/1991-1992	Selasa, 3 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
331	Rapat Paripurna ke 40/III/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Dra. Djumyatni Gautama Suhodo menjelaskan hasil pantauan dilapangan oleh Fraksi ABRI, harapan-harapan dari Fraksi ABRI . Side B: Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Drs. Tengku Jamaludin Wali menyampaikan harapan-harapan dari Fraksi ABRI antara lain : nilai budaya Indonesia hendaknya harus dibina dan dikembangkan, tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa kebanggaan nasional serta kemanfaatan nasional, pemerintah harus tanggap terhadap masalah-masalah yang masih dirasakan baik teknis atau penegakan hukum, pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik teknis historis archeologis, hasil pemugaran harus berguna untuk studi pengembangan nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan. Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh A. Tyas Satiyono Soenarto menjelaskan bahwa benda cagar budaya dikuasai oleh negara tetapi setiap orang dapat memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu dan penggandaan benda cagar budaya wajib mendapatkan izin dari pemerintah.	Rapat Paripurna ke 40/III/1991-1992	Selasa, 3 Maret 1992	Suara Jelas
332	Rapat Paripurna k -40/III/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 3 Side A: Lanjutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh A. Tyas Satiyono Soenarto, apabila RUU tentang Benda Cagar Budaya sudah disahkan menjadi UU maka segera dimasyarakatkan secara umum dan persetujuan RUU tentang Benda Cagar Budaya menjadi UU. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Prof. Dr. Fuad Hasan : bahwa kerugian hilangnya benda cagar budaya oleh tindakan pencurian maupun penyelundupan keluar wilayah RI, benda cagar budaya bukan hanya sekedar merupakan kristalisasi dari suatu proses kesejahteraan, benda cagar budaya Indonesia yang dilestarikan diakui sebagai warisan budaya kemanusiaan sedunia dan benda cagar budaya bersifat teknis dan alamiah. Penutupan rapat oleh Ketua Rapat. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 40/III/1991-1992	Selasa, 3 Maret 1992	Kosong, Tidak ada Suara
333	Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Keimigrasian. Sambutan dari Ketua Komisi III oleh S. Soehardi antara lain membicarakan tentang pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing dan penyidikan PNS wewenang tugas kepolisian. Side B: Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh M. Rusdy Thahir, S.H. antara lain membicarakan bahwa setiap WNI berhak masuk keluar di wilayah Indonesia, tindak pidana bagi pelanggaran keimigrasian, pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan harus dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.	Rapat Paripurna ke 41/III/1991-1992	Rabu,4 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
334	Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh M. Rusdy Thahir, S.H. yaitu menjelaskan bahwa HAM harus diletakkan secara proporsional, usulan Fraksi Karya Pembangunan untuk mempererat ancaman pidana, kesan, pesan dan harapan dari Fraksi Karya Pembangunan RUU tentang Keimigrasian. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Sumartini D, S.H. menjelaskan tentang pencegahan dan penangkalan hendaknya memberikan ketegasan tentang siapa yang dicegah dan yang ditangkap serta menjelaskan tentang penangkalan terhadap WNI merupakan suatu kemunduran karena melanggar HAM dan warga negara yang kembali kenegerinya sendiri. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Sumartini D, S.H. menjelaskan bahwa RUU tentang Keimigrasian adalah untuk menjamin terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta menyampaikan harapan-harapan dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Keimigrasian. Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Sukardi Effendi, S.H. menjelaskan tentang materi pokok dalam RUU tentang Keimigrasian antara lain : masuk dan keluar wilayah Indonesia, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, surat perjalanan RI dan ketentuan pidana.	Rapat Paripurna ke 41/III/1991-1992	Rabu,4 Maret 1992	Suara Jelas
335	Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 3 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Sukardi Effendi, S.H. yaitu menjelaskan tentang alasan pencegahan dan penangkalan, masalah paspor haji, pengawasan terhadap orang asing, ketentuan pidana bagi orang asing sesuai dengan ketentuan RUU tentang Keimigrasian, penyidikan dalam penangkapan bagi kasus yang melanggar RUU tentang Keimigrasian apabila ada yang kabur serta harapan-harapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Side B:Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Tengku Dahman Muji, S.H. menjelaskan tentang pencegahan-pencegahan ke luar negeri, tidak menerima penangkalan bagi warga Indonesia yang di luar negeri kembali ke Indonesia, wawasan kebangsaan serta harapan-harapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Sambutan Menteri Kehakiman yang menjelaskan tentang kebijaksanaan penyaringan orang asing yang akan menetap di Indonesia, pencegahan dan penangkalan, setiap warga negara berhak masuk keluar Indonesia serta Departemen Kehakiman sudah siap melaksanakan UU tentang Keimigrasian.	Rapat Paripurna ke 41/III/1991-1992	Rabu,4 Maret 1992	Suara Jelas
336	Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 4 Side A: Lanjutan sambutan Menteri Kehakiman menjelaskan bahwa WNI yang tinggal di luar negeri seharusnya bangga terhadap negara RI, sedang disiapkan RPP tentang pengawasan orang asing dan mempersiapkan Keputusan Menteri tentang Karantina Imigrasi. Penutupan rapat paripurna oleh Ketua Rapat. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 41/III/1991-1992	Rabu,4 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
337	Rapat Paripurna ke 42/III/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 1 Side A:Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perfilman. Sambutan Ketua Pansus oleh Krisantono yang menjelaskan tentang pokok-pokok RUU tentang perfilman yaitu : Dasar arah dan tujuan, film bukan hanya karya cipta tetapi seni dan budaya, film sebagai aspek ketahanan nasional, mencegah pemusatan satu tangan (kelompok) tetapi azas usaha bersama, pemerintah melakukan pembinaan terhadap usaha perfilman, film impor sebagai pelengkap harus bermutu baik yang dapat merangsang perfilman Indonesia, film nasional yang ditolak sensor tidak diumumkan serta penjelasan tentang penayangan film. Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Endang Kusuma Inten Suweno yang menjelaskan tentang kecaman terhadap perfilman Indonesia, sering mencampuradukkan pesan artistik dan nilai kandungannya, film Indonesia belum menyaingi film impor (barat), selera penonton sangat menentukan serta sendi-sendi perekonomian disusun usaha bersama. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Endang Kusuma Inten Suweno menjelaskan bahwa film merupakan karya seni budaya, film sebagai media komunikasi masa pandang dengar, penjelasan tentang sensor film sebagai pembinan untuk mendorong film yang lebih baik, penyerahan urusan serta harapan dan saran dari Fraksi Karya Pembangunan. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Drs. E. Syarifudin menjelaskan bahwa usaha kebudayaan harus menuju kemajuan adab budaya dan persatuan dan tidak menolak bahan-bahan baru kebudayaan asing, pembinaan perfilman, kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam berkreasi, berkarya dan berusaha dalam usaha perfilman serta penjelasan tentang sanksi yang tegas atas pelanggaran ketentuan pembinaan perfilman untuk melindungi masyarakat pada umumnya.	Rapat Paripurna ke 42/III/1991-1992	Senin, 9 Maret 1992	Suara Jelas
338	Rapat Paripurna k -42/III/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 2 Side A: Lanjuta sambutan dari Fraksi ABRI oleh Drs. E. Syarifudin yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi artis dan karyawan film serta produser film, film impor merupakan film pelengkap, impor film jumlahnya harus seimbang dengan peningkatan produksi film Indonesia, pertunjukan dan penayangan film di bioskop, pembinaan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya perfilman serta penyampaian harapan-harapan dari Fraksi ABRI. Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Aisyah Amini, S.H. menjelaskan bahwa Fraksi Persatuan Pembangunan tidak menghendaki munculnya film yang bermuatan kepekatan erotika pornografis, film mempunyai pengaruh yang tinggi pada masyarakat, pengembangan perfilman, perfilman Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai agama serta artis dan karyawan film berhak atas jaminan hukum. Side B:Lanjutan sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Aisyah Amini, S.H. menjelaskan tentang bimbingan kepada dunia perfilman nasional agar semakin bergerak maju, menghindari persaingan usaha perfilman yang tidak sehat, lembaga sensor Indonesia, penggolongan usia yang layak menonton film, ancaman pidana yang sudah ditolak oleh Lembaga Sensor Indonesia dan produser harus memahami arah, dasar tujuan perfilman. Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Marchel Beding menjelaskan bahwa film mengandung potensi ekonomi yang sangat tinggi, hak monopoli, film impor tidak bisa disamakan dengan film nasional, menghindari persaingan yg tidak sehat dalam usaha perfilman, penetapan usaha perfilman, pembinaan perfilman, kelemahan film nasional dan penjelasan bahwa Institut Kesenian Jakarta khususnya Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Film dan Televisi perlu diberikan pembinaan.	Rapat Paripurna ke 42/III/1991-1992	Senin, 9 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
339	Rapat Paripurna ke 42/III/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 3 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Marchel Beding menjelaskan perlu adanya pemberian bantuan dana rutin dalam rangka peningkatan sarana yang diperlukan untuk mewujudkan perfilman Indonesia sebagai tuan rumah sendiri, nasib warga masyarakat perfilman Indonesia diberi jaminan hukum dan sosial yang kuat serta harapan-harapan dari Fraksi Demokrasi Indonesia. Sambutan Menteri Keuangan menjelaskan bahwa dibutuhkan tenaga yang kreatif untuk menghasilkan film yang bernilai tinggi, film Indonesia hanya terbuka bagi WNI tetapi tidak menutup kesempatan bagi perusahaan asing untuk melakukan produksi bersama tetapi tidak dalam artian mendirikan perusahaan patungan serta film mempunyai potensi untuk pengembangan kebudayaan. Side B: Penutupan rapat oleh Ketua Rapat.	Rapat Paripurna ke 42/III/1991-1992	Senin, 9 Maret 1992	Suara Jelas
340	Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Dana Pensiun. Sambutan Ketua Pansus oleh Dr. Baramuli, S.H. yang menjelaskan tentang Laporan hasil akhir RUU tentang Dana Pensiun, kronologis dana pensiun dan ketentuan pidana. Side B: Lanjutan sambutan Ketua Pansus oleh Dr. Baramuli, S. H. tentang penyampaian terima kasih kepada wakil-wakil Ketua Pansus. Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Muhsin Lisan yang menjelaskan bahwa dana pensiun dapat menjamin kesejahteraan para karyawan di hari tuanya dan keluarganya, permasalahan tentang judul RUU, dana pensiun bersifat sukarela (hak masing-masing peserta), iuran peserta dana pensiun, manfaat pensiun dan ketentuan pidana.	Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992	Kamis, 12 Maret 1992	Suara Jelas
341	Rapat Paripurna ke-43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Muhsin Lisan bahwa menyetujui naskah akhir RUU tentang Dana Pensiun serta saran dan harapan dari Fraksi Karya pembangunan. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Maniur Pasaribu, S.H. menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang baik agar dipatuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan secara ketat, keberadaan dion pengawas sifatnya mutlak setiap dana pensiun, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bidang keuangan dan perbankan, perampangan materi serta penjelasan tentang dana pensiun adalah bersifat sukarela untuk mensejahterakan karyawannya. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Maniur Pasaribu, S.H. bahwa hak peserta yang meninggal dan berhenti, ancaman pidana atau denda atau sanksi pelanggaran peraturan serta sosialisai UU tentang Dana Pensiun. Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Drs. H. Ali Sofian yang menjelaskan bahwa dana pensiun bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dana pensiun akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional, azas-azas dana pensiun, peraturan pendirian dana pensiun dan penjelasan tentang hak-hak pensiun.	Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992	Kamis, 12 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
342	Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 3 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Drs. H. Ali Sofian yang menjelaskan tentang hak-hak pensiun, pembinaan dan pengawasan dana pensiun pemberi kerja oleh Menteri Keuangan serta penyampaian harapan-harapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Adi Pranoto yang menjelaskan tentang jenis dan status hukum dana pensiun, kepengurusan dana pensiun, pembubaran dan penyelesaian dana pensiun serta pemberi fasilitas perpajakan dana pensiun. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Adi Pranoto menjelaskan bahwa dana pensiun adalah untuk jaminan hari tua, pembinaan dan pengawasan dana pensiun oleh Menteri Keuangan, sanksi administratif, dana pensiun Lembaga Keuangan serta ketentuan peralihan dana pensiun Sambutan Menteri Keuangan menjelaskan dana pensiun diharapkan memberi peran terhadap pembangunan nasional, dana pensiun yang bersumber dari masyarakat agar dikelola dengan baik, dana pensiun untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya peserta dana pensiun, azas-azas dana pensiun, dana pensiun setara dengan PT dan koperasi, pengurusan dana pensiun, iuran yang dibayarkan adalah hak peserta, dana pensiun merupakan investor kelembagaan, Menteri berhak memeriksa dana pensiun, sanksi bagi yang melanggar serta penjelasan tentang ketentuan ancaman pidana.	Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992	Kamis, 12 Maret 1992	Suara Jelas
343	Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 4 Side A: Lanjutan Sambutan Menteri Keuangan yang menjelaskan bahwa Ketentuan ancaman pidana adalah untuk kesejahteraan masyarakat serta RUU agar disahkan menjadi UU dengan baik maka pemerintah akan segera menyiapkan peraturan-peraturan pemerintah. Sambutan Ketua Rapat bahwa Pansus dibubarkan karena pembahasan RUU bidang keuangan sudah selesai dan penutupan rapat oleh Ketua Rapat. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992	Kamis, 12 Maret 1992	Suara Jelas
344	Rapat Paripurna ke 44/III/1991-1992, Rabu, 18-3-1992, Jam 09.10 WIB, Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan Tingkat I yaitu keterangan pemerintah atas RUU tentang Perkoperasian. Sambutan Menteri Koperasi , Bustanil Arifin menjelaskan bahwa koperasi bertujuan mensejahterakan para anggotanya, diharapkan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional, koperasi yang tangguh dan mandiri masih jauh dari kenyataan, dalam aspek permodalan koperasi kurang mampu memobilisasi dan meningkatkan modal yang penting bagi usaha, koperasi adalah badan usaha yang mengandung nilai sosial dan nilai kekeluargaan, penjelasan jenis koperasi, warga negara asing boleh menjadi anggota koperasi, rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi, pengurus adalah sebagai pengelola koperasi serta pengawas harus dibentuk melalui pemilihan. Side B: Lanjutan Sambutan Menteri Koperasi , Bustanil Arifin menjelaskan tentang fungsi koperasi, permodalan penyertaan, koperasi simpan pinjam untuk para anggotanya, usaha simpan pinjam bukan usaha perbankan, pembinaan koperasi oleh pemerintah serta membahas pokok-pokok pikiran RUU tentang Perkoperasian. Skors 10.00 - 10.05 WIB Laporan BKSAP : delegasi RI ke KTT OKI yang ke-6 di Dakar, Sinegal, pada tanggal 9 Desember oleh Soetedjo yang dilatarbelakangi oleh berakhirnya perang dunia.	Rapat Paripurna ke 44/III/1991-1992	Rabu, 18 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
345	Rapat Paripurna ke 44/III/1991-1992,Rabu, 18-3-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan laporan BKSAP oleh Soetedjo bahwa Indonesia telah terpilih menjadi Wakil Ketua Sidang KTT OKI ke-6 bersama Palestina dan Suriah yang telah memimpin 3 kali sidang. Laporan BKSAP tentang muhibah ke Pakistan pada tanggal 16 - 23 Desember oleh Drs. H. Yan Mokoginta, antara lain : memperoleh gambaran pembangunan di Pakistan, Pakistan menganut demokrasi parlementer, perkembangan hubungan ekonomi antara Pakistan - Indonesia masih sangat terbatas pada sejumlah kerjasama tertentu, proyek kelapa sawit di Pakistan - Indonesia akan dilaksanakan untuk produksi minyak, Indonesia berhasil dalam melaksanakan program KB dan Pakistan mempunyai pusat riset yang canggih dalam Ilmu Kedokteran dan Ilmu Farmasi. Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 44/III/1991-1992	Rabu, 18 Maret 1992	Suara Jelas
346	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan Tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang Budidaya Tanaman dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan. Sambutan oleh Abdurahman Rangkuti mengenai Laporan Proses Pembahasan RUU tentang Budidaya Tanaman dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan. Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Syarif Al Khadi membahas mengenai pasal-pasal, bab dan judul RUU. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Syarif Al Khadi antara lain menjelaskan tentang penyempurnaan judul RUU, panen dalam budidaya hewan, pemerintah meringankan beban petani yang berlahan sempit, ciri-ciri usaha budidaya tanaman, FKP menyetujui RUU untuk disahkan menjadi UU, tujuan budidaya tanaman adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani, prinsip padat karya harus dipertahankan serta pencegahan peredaran pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi persyaratan atau palsu.	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992	Rabu, 18 Maret 1992	Suara Jelas
347	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 2 Side A:Lanjutan sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Syarif Al Khadi antara lain : pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan kedua UU tentang tentang Budidaya Tanaman dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan. serta permohonan maaf dan ucapan terimakasih. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Ibu Siti Sundari menjelaskan tentang ke dua RUU ini memiliki pola keterkaitan bahkan akan memberikan dukungan langsung bagi rencana pembangunan jangka panjang ke dua yang telah diambang pintu kehidupan bangsa Indonesia, RUU masih perlu disempurnakan, budidaya tanaman menyangkut rakyat banyak serta penjelasan tentang azas manfaat lestari dan keberlanjutan. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Ibu Siti Sundari menjelaskan tentang aspek kependudukan agar tidak terisolasi, transmigrasi, kepadatan penduduk dan lapangan pekerjaan, Fraksi ABRI menyetujui RUU menjadi UU, sosialisasi UU, menertibkan peraturan pelaksanaan, penyuluhan kepada petani tentang UU ini. Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Moh. Jafar Sidiq menjelaskan tentang perlindungan budidaya tanaman, cara menghasilkan pangan yang berkualitas serta mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya petani.	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992	Kamis, 19 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
348	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 3 Side A: Lanjutan, Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Moh. Jafar Sidiq yang menjelaskan tentang kemajuan agronomi Indonesia harus diperlukan penelitian, penjagaan stabilitas harga, mutu pestisida yang sangat rendah, sumber alam hewan nabati perlu dijaga dan dikembangkan, tindakan karantina hama penyakit hewan, penyuluhan kepada masyarakat tentang UUD dalam meningkatkan pembangunan serta peningkatan teknologi saat panen. Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Jaja Winata yang menjelaskan tentang pentingnya UU tentang Budidaya Tanaman dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan serta tingkat kesejahteraan masyarakat bidang pertanian masih dibawah garis kemiskinan. Side B:Lanjutan sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Jaja Winata menjelaskan bahwa petani memiliki kebebasan untuk memilih jenis tanaman, pemerintah mengusahakan agar petani memperoleh jaminan tertentu, hama (organisme pengganggu) akan menurunkan kualitas hewan dan ikan. Sambutan Menteri Pertanian RI yang menjelaskan tentang masyarakat memperoleh jaminan mutu, pengendalian usaha tanaman, organisasi profesi, pemberian penghargaan kepada kualitas unggul/badan hukum yang memiliki unggulan tertentu, pemberian penyuluhan yang mendukung perkembangan teknologi tanaman serta efisiensi yang menyangkut azas karantina ikan, hewan dan tumbuhan.	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992	Kamis, 19 Maret 1993	Suara Jelas
349	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 4 Side A: Lanjutan sambutan Menteri Pertanian RI yang menjelaskan bahwa UU ini harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan agar peraturan pelaksanaan dapat dilaksanakan secepat mungkin Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992	Kamis, 19 Maret 1994	Suara Jelas
350	Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan pengambilan keputusan atas RUU bidang perhubungan:RUU tentang Perkeretaapian, RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Dijalan, RUU tentang Penerbangan dan RUU tentang Pelayaran. Sambutan Ketua Pansus oleh Drs. H. Bomer Pasaribu, S.H., menjelaskan tentang rumusan yang disepakati merupakan hasil mufakat bulat, jujur dan obyektif, peranan DPR mengalami peningkatan optimasi serta penjelasan tentang sistem transportasi nasional. Side B:Lanjutan sambutan Ketua Pansus oleh Drs. H. Bomer Pasaribu, S.H., bahwa RUU harus mempertimbangkan sejumlah berbagai ketentuan-ketentuan Internasional, konvensi-konvensi Internasional karena kita menjadi anggota masyarakat sedunia. Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. H.M. Lalu Patriwijaya antara lain menginginkan adanya pokok-pokok pikiran sebagai fondasi untuk membahas merumuskan paket RUU bidang perhubungan dan menyetujui ke empat RUU tersebut.	Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992	Jumat, 20 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
351	Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. H.M. Lalu Patriwijaya antara lain operasionalisasi UU di bidang perhubungan sangat erat kaitannya dengan SDM, dampak lingkungan hidup dan sarana. Faktor ini akan menentukan baik buruknya penyelenggaraan pada gilirannya akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan perhubungan. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Ir. Soedjatmo menjelaskan masalah transportasi mempunyai peranan yang sangat luas, transportasi untuk mewujudkan wawasan nusantara, poleksosbudhankam, keselamatan dan keamanan harus diperhatikan serta menjadi transportasi nasional yang handal. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Ir. Soedjatmo bahwa Fraksi ABRI menyetujui RUU tentang perkeretaapian, RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Dijalan, RUU tentang Penerbangan dan RUU tentang Pelayaran untuk disahkan menjadi UU oleh Presiden RI serta harapan-harapan dari Fraksi ABRI. Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Zarkasih Noor bahwa transportasi akan menjadikan pembangunan yang semakin pesat, kereta api merupakan transportasi masa depan, kereta api mempunyai hubungan strategis untuk mempererat hubungan antar bangsa, kewajiban mutu pelayanan masyarakat dari Perumka, STNK berlaku sekurang-kurangnya 5 tahun, kendaraan pribadi tidak wajib diasuransikan karena memberatkan masyarakat, Indonesia harus mempunyai penerbangan yang tangguh, rute penerbangan serta tarif angkutan penumpang pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR.	Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992	Jumat, 20 Maret 1992	Suara Jelas
352	Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 3 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Zarkasih Noor bahwa industri transportasi nasional harus dipacu untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri serta Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU menjadi UU. Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Anwar Datuk menjelaskan tentang aspek-aspek dalam RUU yang harus diperhatikan, sistem transportasi nasional, Fraksi Demokrasi Indonesia prihatin atas angkutan Kereta Api pada saat lebaran, mendukung peran swasta ditingkatkan dalam mendukung pembangunan, hak dan kewajiban pengemudi, usul dan saran dari Fraksi Demokrasi Indonesia serta Fraksi Demokrasi menyetujui disahkannya RUU menjadi UU. Sambutan dari Menteri Perhubungan bahwa ketiga UU ini mempunyai makna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Side B: Lanjutan sambutan dari Menteri Perhubungan bahwa telah disetujui pokok-pokok pikiran transportasi nasional yaitu ketiga UU ini, ditambahkan RUU tentang Pelayaran serta transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat pada pukul 11.35 WIB.	Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992	Jumat, 20 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
353	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan Tingkat I yaitu keterangan pemerintah atas RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (suara teknisi ikut terekam sehingga suara rapat tidak jelas) Sambutan dari Pimpinan Komisi VIII dan X (Rapat Gabungan) oleh Drs. Markus Bawalan, membacakan jadwal pembahasan atas RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, alasan keraguan tidak terselesainya RUU ini, penyelesaian RUU harus tepat waktu, proses materi RUU, pasal-pasal yang disepakati dan yang belum disepakati. Side B: Lanjutan sambutan dari Pimpinan Komisi VIII dan X (Rapat Gabungan) oleh Drs. Markus Bawalan yang menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama dari fraksi-fraksi sehingga terselesainya RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Dr. Hida Yusli Dahlan yang menjelaskan hasil Munas ke-4 Golkar tahun 1998 juga merupakan pedoman dalam RUU, HAM harus dikaitkan dengan kepentingan yang lebih luas, Fraksi Karya Pembangunan menolak paham individualisme, hak yang dilindungi untuk menentukan jumlah besar kecilnya keluarganya dan menentukan kualitas keluarganya, hak dan kewajiban masalah kependudukan diatur dalam RUU, pembahasan RUU oleh FKP, FKP menyetujui RUU menjadi UU serta kesan dan harapan RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Dr. Fahri Nur menjelaskan bahwa rapat gabungan komisi bertujuan untuk mencapai mufakat.	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992	Sabtu, 21 Maret 1992	Suara Jelas
354	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh Dr. Fahri Nur menjelaskan bahwa aspek pembangunan yang harus diperhatikan adalah masalah keluarga sejahtera, penurunan tingkat kelahiran dengan Keluarga Berencana (KB), pola pikir yang mendasari Fraksi ABRI dalam membahas RUU, KB menentukan kualitas penduduk, pembahasan tentang judul RUU, Fraksi ABRI menyetujui RUU menjadi UU serta harapan-harapan dari Fraksi ABRI. Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Drs. Suwardi Hambali yang menjelaskan bahwa berbagai perombakan yang intensif dalam pembahasan RUU oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, faktor untuk kelancaran dalam pembahasan RUU, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh pada kualitas, sikap kurang menghargai kehamilan yaitu pengguguran anak, pelanggaran asusila yaitu menyebarkan alat KB secara tidak pantas dipakai untuk mencegah AIDS serta menyambut baik Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Drs. Suwardi Hambali yang menjelaskan bahwa pengaturan kelahiran dan mobilitas penduduk, populasi penduduk, perbaikan penduduk dengan sarana dan prasarana serta pembinaan tentang kependudukan, pelaksanaan KB sebagian besar adalah hanya orang yang berpendidikan serta penjelasan tentang pendidikan seks. Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Nana Dumana Wiradi Putra menjelaskan tentang jumlah penduduk yang besar kurang selaras dan serasi, jumlah penduduk yang besar tetapi berkualitas, kemandirian masyarakat, keluarga sejahtera dibentuk dari pernikahan yang membentuk keluarga yang sejahtera, kebahagiaan lahir batin dan berketuhanan YME, kasus-kasus yang menyebabkan keresahan masyarakat, sensus penduduk, kesehatan, transmigrasi, dll serta penjelasan tentang judul RUU oleh Fraksi Demokrasi Indonesia.	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992	Sabtu, 21 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
355	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 3 Side A: Sambutan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup antara lain menjelaskan tentang jumlah penduduk yang tidak selaras dan serasi akan menghambat pembangunan nasional, perkembangan kualitas keluarga dengan KB, hak-hak dan kewajiban-kewajiban penduduk, macam-macam perkembangan kualitas hidup, kemudahan-kemudahan untuk penduduk yang cacat fisik dan mental serta kemudahan dalam pendidikan, tiga cakupan kebijaksanaan kependudukan, penjelasan tentang keluarga dan kelahiran, hak asasi KB akan dilindungi hukum, peragaan alat KB hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang, pengendalian dampak lingkungan fisik dan non fisik serta sosial budaya dan sanksi-sanksi pelanggaran terhadap peraturan RUU. Side B: Lanjutan sambutan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup antara lain menjelaskan tentang tingkat kematian menurut suksesnya pembangunan nasional, jumlah penduduk yang besar menjadikan tantangan bagi suatu negara. Skors rapat 10 menit. Pidato Presiden penutupan masa persidangan III masa sidang 1991/1992 : pembahasan permasalahan-permasalahan dari komisi-komisi, 15 RUU yang telah disetujui menjadi UU pada masa sidang III, ada lima RUU yang masih akan dilanjutkan masa sidang selanjutnya, jadwal delegasi-delegasi.	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992	Sabtu, 21 Maret 1992	Suara Jelas
356	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 4 Side A: Lanjutan sambutan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup antara lain menjelaskan tentang masalah yang lain yaitu tentang tata niaga cengkeh karena petani masih susah dalam penjualan cengkeh, masalah tata niaga jeruk Kalimantan Barat karena kesukaran dalam masalah penjualan jeruk sehingga mengalami kerugian, penarikan iuran televisi oleh PT. Mekatama Raya, pemerataan dijadikan gerakan nasional, perlindungan kepada nasabah bank masih lemah, persengketaan-persengketaan tanah, pengenaan pajak yang tinggi untuk warisan dengan damai serta pimpinan telah menerima Tuan Huan Somavia utusan khusus Sekjen PBB mengenai peningkatan usaha pembangunan kesejahteraan manusia di dunia. (suara teknis ikut terekam sehingga suara rapat tidak jelas) Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992	Sabtu, 21 Maret 1992	Suara Jelas
357	Rapat Paripurna ke 48/IV/1991-1992, Senin, 15-6-1992, jam 09.10 WIB, Volume 1 Side A: Sambutan Ketua Sidang dalam masa persidangan IV oleh M. Kharis Suhud menjelaskan tentang kunjungan kerja DPR ke daerah-daerah, delegasi-delegasi muhibah DPR ke luar negeri, harapan semoga studi banding ada manfaatnya, penerimaan delegasi-delegasi dari luar negeri, pembahasan 8 RUU yang tersisa dalam masa persidangan IV serta yang mendapatkan perhatian adalah sidang konferensi tingkat menteri Gerakan Non blok di Bali. Side B: Lanjutan sambutan Ketua Sidang dalam masa persidangan IV oleh M. Kharis Suhud menjelaskan tentang ABRI yang mencegah militerisme, ABRI bersama masyarakat menciptakan stabilitas nasional, Pemilu sekarang lebih mantap dibandingkan kemarin-kemarin serta dibentuknya pola kampanye yang baik. (skors sidang beberapa waktu) Sambutan Ketua II oleh Drs. Soerjadi, Rapat pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan atas dua RUU tentang Penghitungan Anggaran Negara tahun 1989/1990 dan RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN tahun 1991/1992. Sambutan Menteri Keuangan oleh Prof. Dr. JB. Sumarlin menjelaskan tentang persoalan inflasi, suplai minyak dunia, perkembangan ekonomi mempengaruhi APBN, penggunaan APBN tahun 1991/1992, penerimaan dalam negeri di luar migas dalam memperkuat struktur penerimaan dalam negeri, realisasi penerimaan-penerimaan dalam negeri, penerimaan di luar migas mengalami peningkatan karena suksesnya penyuluhan dan pembinaan tentang pajak, peningkatan bea cukai serta penerimaan di luar migas lainnya misalnya : pajak ekspor media masa dll mengalami penurunan.	Rapat Paripurna ke 48/IV/1991-1992	Sabtu, 21 Maret 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
358	Rapat Paripurna ke 48/IV/1991-1992, Senin, 15-6-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan Menteri Keuangan oleh Prof. Dr. JB. Sumarlin menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran negara, anggaran subsidi BBM, realisasi pengeluaran pembangunan tahun 1991/1992 meningkat, penyebab penurunan pembiayaan daerah, realisasi pengeluaran daerah, garis-garis besar penghitungan anggaran negara tahun 1989/1990 serta penjelasan tentang rincian sisa anggaran tahun 1989/1990. Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 48/IV/1991-1992	Senin, 15 Juni 1992	Suara Jelas
359	Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 1 Side A: Rapat pembicaraan tingkat II yaitu tentang pemandangan umum para anggota atas RUU tentang Perkoperasian. Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Sumardjo Partodiwiryo menjelaskan bahwa ekonomi disusun berdasar atas azas kekeluargaan, koperasi adalah pelaku ekonomi dan Badan Usaha (gerakan ekonomi rakyat), koperasi belum memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, kendala-kendala yang menyebabkan koperasi ketinggalan dalam peranan bisnis, mengembangkan kerjasama koperasi dengan BUMN, koperasi harus diarahkan menuju demokrasi Indonesia, tanggapan, usul dan saran dari Fraksi Karya Pembangunan dalam RUU tentang Perkoperasian, koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional serta koperasi harus sesuai dengan makna, tujuan dan fungsi. Side B: Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Sumardjo Partodiwiryo menjelaskan bahwa dalam RUU tidak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi dan RUU tentang perkoperasian menjadi ujung tombak Demokrasi Indonesia. Sambutan dari Fraksi ABRI oleh H. Ahmad Gunardi menjelaskan bahwa koperasi belum bisa menjadi wadah ekonomi rakyat yang kuat dan tangguh sebagai tulang punggung perekonomian nasional, koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional, koperasi Badan Usaha yang dikelola secara profesional, koperasi juga harus berperan sebagai wadah demokrasi, koperasi harus melindungi anggota-anggotanya, belum ada kejelasan kerjasama antara koperasi dengan BUMN, pengaturan pemerintah tentang tidak adanya campur tangan tentang aparat terhadap perekonomian, tanggapan dan pertanyaan dari Fraksi Karya Pembangunan, koperasi sudah menjadi anggota koperasi internasional, modal koperasi dari modal sendiri dan modal pinjaman dan kekuarangan modal koperasi tidak bisa menyaingi swasta.	Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992	Senin, 15 Juni 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
360	Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRI oleh H. Ahmad Gunardi menjelaskan bahwa muatan dari anggaran dasar (besarnya modal dan jangka waktu), jenis-jenis koperasi berdasarkan pada persamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi, keanggotaan koperasi warga negara asing, kewajiban anggota, modal koperasi, pengawasan koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi, kerjasama saling menguntungkan serta penjelasan tentang ketentuan pidana dalam RUU tentang Perkoperasian. Sambutan dari Fraksi Pesatuan Pembangunan oleh Drs. H. Sofyan Ali yang menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran RUU tentang Perkoperasian, azas-azas koperasi, prinsip-prinsip dasar koperasi, peran koperasi dalam perekonomian Indonesia serta kebijakan perekonomian Indonesia. Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi Pesatuan Pembangunan oleh Drs. H. Sofyan Ali yang menjelaskan tentang dukungan perkembangan koperasi Indonesia, faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat perkembangan koperasi, aturan pembentukan koperasi oleh masyarakat, kesamaan persepsi untuk kemajuan ekonomi nasional, tanggapan-tanggapan persepsi untuk kemajuan ekonomi nasional, tanggapan-tanggapan RUU tentang Perkoperasian oleh FPP, peran Menteri sangat diharapkan untuk kemajuan koperasi serta koperasi juga melayani simpan pinjam. Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh M. Marbun, S.H yang menjelaskan bahwa koperasi berkembang dari bawah. (suara mendukung sehingga suara tidak jelas) Koperasi sebagai pelaku ekonomi masih kecil, permasalahan utama yang berkaitan dengan koperasi, koperasi harus tangguh dan mandiri, pemerintah harus menjelaskan lebih rinci tentang koperasi, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap koperasi, koperasi untuk memberikan kesempatan perolehan pekerjaan, memperoleh pendapatan serta untuk kesejahteraan masyarakat.	Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
361	Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 2 Side A: Lanjutan sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh M. Marbun, S.H yang menjelaskan tentang prinsip identitas keanggotaan koperasi, jenis usaha yang sama akan menjadi efektif untuk usaha koperasi, koperasi untuk menjadi kepastian hukum bagi berkembangnya koperasi sebagai tumpuan bagi para pengusaha, koperasi memerlukan manajemen yang obyektif dan fleksibel, koperasi harus siap menghadapi persaingan dengan usaha yang lebih maju, koperasi diperkenankan untuk penumpukan modal dari anggota atau simpan pinjam koperasi, prinsip kemandirian harus ada bantuan dari pemerintah serta penjabaran pokok-pokok pikiran RUU tentang Perkoperasian ini. Side B: <i>Tidak Ada Suara</i>	Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
362	Rapat Paripurna ke 50/IV/1991-1992. Side A : Tidak ada suara. Side B : Pembahasan tentang pembentukan RRU Pengadilan tinggi agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi. RUU ini di buat sebagai pelaksanaan dari UU No 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, dengan amanat presiden No R02/PU/II/1992 tanggal 18 Februari 1992. Hal yang melatarbelakangi pembentukan Pengadilan di 3 daerah ini karena beratnya beban tugas dan luasnya lingkup tugas yang harus dilaksanakan dan dilayani dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi pengadilan agama untuk itu perlu di bentuknya pengadilan agama di daerah yang telah memenuhi syarat.Beberapa penjelasan atas diajukan RUU tersebut: (1) Perkara semakin meningkat, (2) Penyelenggaraan pengadialan yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, (3) Memenuhi aspirasi daerah, (4) Pembinaan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pengadilan agama, (5) Kemampuan anggaran setiap daerah. Diharapkan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat akan lebih terwujud dalam bentuk pemerataan memperoleh keadilan.	Rapat Paripurna ke 50/IV/1991-1992.	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
363	Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992 Volume I Side A : (1) Pembicaraan tingkat II Jawaban pemerintah atas pemandangan umum para anggota atas RUU tentang perkoperasian, (2) Laporan BKSAP dari ke 4 delegasi, yaitu laporan delegasi DPR RI ke konferensi para anggota parlemen tentang pemukiman dan pembangunan tanggal 14-20 Maret 1992 di Francover Kanada, laporan delegasi muhibah DPR RI ke Spanyol dari tanggal 21-28 Maret 1992, Laporan Delegasi DPR RI ke konferensi IVU ke 87 di Yaunde Kamerun tanggal 6-11 April 1992. penyampaian pendapat telah disampaikan oleh masing-masing fraksi yaitu Sdr. Soemardjo Parto Soedirjo dari fraksi Karya Pembangunan, yang menyarankan tentang azas, landasan dan semangat koperasi. dari fraksi PDI (Demokrasi Indonesia) menanggapi tentang prinsip-prinsip kemandirian yang meminta penjelasan mengenai batas-batasan perkataan kemandirian yang dianut dalam RUU. Side B : Membahas tentang pencantuman anggaran koperasi besarnya modal dalam anggaran dasar koperasi untuk mempertegas koperasi sebagai badan usaha. Usaha koperasi boleh berada di dalam/ di luar negeri sepanjang usaha tersebut untuk kepentingan anggota dan harus ada kesinambungan antara usaha koperasi dengan usaha anggotanya, mengenai keanggotaan koperasi bagi warga asing penjelasannya umumnya mereka adalah sebagai konsumen sesuai dengan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, keanggotaan warga asing tidak sama dengan keanggotaan Warga Negara Indonesia. pemerintah harus memperlakukan sama antara koperasi dengan badan hukum lainnya. penjelasan tentang dasar simpan pinjam anggota. Hubungan antara pengurus dan pengelola anggota karena kekuatan perekonomian koperasi terletak pada potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, koperasi yang di dukung oleh anggotanya akan menjadi lembaga ekonomi yang kuat.	Rapat Paripurna ke51/IV/1991-1992	Rabu, 24 Juni 1992	Side A Tidak ada suara. Side B Suara jelas
364	Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992 Volume 2 Side A : Lanjutan tentang RUU Perkoperasian. Laporan BKSAP dari 1. Sdr. Clementio Dos Ares Ameral tentang komisi HAM ke 48 di Genet, 2. Dra. Ulfah AS Harmanto, 3. Dra. Ine Erna Adriana Soekaryo, 4. Sdr. Gewe Sudikse. 1. Clementio Dos Ares Ameral membahas 26 tata cara yang meliputi beberapa pembahasan tentang pelaksanaan dan pelanggaran HAM, beberapa yang menonjol sebagai kepentingan nasional antara lain : Question of the realitation of the right to the roofmen, The right of people to, Question of the human right of, Question of the human right and fundamental freedom with particular reference to colonial and other depener countries and teritorized. Indonesia telah ikut berpartisipasi aktif dalam membahas matakana sidang tersebut. Side B : 2. Dra. Ny. Ulfah AS Harmanto, Tiga hal utama yang menjadi sasaran yang hendak di capai yaitu 1. Urbanisasi global dan lingkungan hidup, 2. menumbuhkan institusi organisasi global parlemented on habitat dengan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pemilihan pengurus, 3. Menyusun Resolusi/Deklarasi untuk disampaikan kepada UNICEF di Brazil pada bulan Juni 1992, Delegasi DPR RI di pimpin oleh Bapak Dr. H.J. Naro SH, wakil ketua DPR RI dengan anggota Ny. Susilastuti Sutopo Isnomo, Kemas Fajarudin, Ulfah As Harmanto, dan 2 (dua) narasumber Dr. H Kholil MPH, Ir. Rahmadi Bambang Sumardjo. Dr. Acil Ramadhan mengatakan bahwa kunci keberhasilan dari transisi menuju pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah pemukiman dan hunian bagaimana menggunakannya, Sumber Daya Alam, perkembangannya dan memanajnya. 3. Dra. Ine Soekarya tentang Hubungan Spanyol dengan Indonesia terutama dalam bidang pariwisata. Delegasi di ketuai oleh wakil ketua DPR RI Bapak Saiful Sulun, dengan anggota Jamaludin Tambunan SH, Ine Soekaryo, Subiono, SH, Drs. Husni Thamrin, Nicolas MTH, Dra Sri Sumaryati Haryanto sebagai Sekretaris. Hasil dari delegasi adalah Spanyol dengan Indonesia pada Januari 1976 (Hub. Diplomatik), Spanyol menilai Indonesia sebagai Key Country dalam mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara ASEAN terutama dalam ekonomi dan perdagangan untuk turut membantu pembukaan jalur Spanyol-Jakarta dengan pesawat Siberia. Hubungan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahana, Ketahanan Perdagangan antara Indonesia dan Spanyol semakin meningkat baik.	Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992	Senin, 29 Juni 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
365	Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992 Volume 3 Side A : 4. Gewe Sudikse Tanggal 6 April 1992, sidang eksekutif komite dari Indonesia di wakili oleh Marzuki Darusman menyampaikan persetujuan laporan keuangan yang disampaikan auditor IVU Tati Sumiati Darsoyo. Sidang pleno General The Bitch yang diperdebatkan masalah internasional dan regional (Sosial, Budaya, Ekonomi). selain itu berlangsung juga konferensi wanita yang menghasilkan : 1. Proses perumusan resolusi mengenai masalah demokrasi dan keanekaragaman etnik serta deklarasi mengenai lingkungan hidup Indonesia terpilih menjadi anggota perumus, 2. Berhasil mencegah pihak Portugal dan Angola menyinggung masalah Timor-Timur dalam resolusi akhir IVU, 3. Sidang eksekutif komite, Indonesia berperan aktif mengusulkan agar komisi dekronisasi IVU di hapuskan, karena dekronisasi IVU sudah selesai, 4. Pada sidang anggota parlemen wanita IVU wilayah Asia Pasifik kembali menjadi sebagai koordinator wanita IVU wilayah Asia Pasifik, 5. Pertemuan Delegasi Indonesia dan Belanda yang menolak bantuan dari Belanda. Side B :Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992	Senin, 29 Juni 1992	Suara Jelas
366	Rapat Paripurna ke 52/IV/1991-1992, Jum'at 3 Juli 1992. Side A : Laporan Delegasi studi perbandingan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI ke Filipina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, New Zealand/Selandia Baru. Sebagai Ketua Dewan Suryadi, yang seharusnya memimpin rapat pleno parpol Saiful Sulun, Pelapor Delegasi Sdr. Dr. MP Pasaribu, adapun sasaran dititikberatkan pada bidang kelembagaan, anggaran, kesekretariatan dan perpustakaan. Masukan yang mendasar dari studi Banding : 1. Kelembagaan, di Indonesia masa jabatan yaitu sekitar 5 tahun, sedangkan di Jepang, Thailand, Korea Selatan selama 4 tahun dengan jumlah anggota di Indonesia sebanyak 500, Jepang 521, Korea Selatan 299, Filipina 250(3 tahun), Thailand 360 (4 tahun), Selandia Baru 97 (3 tahun), 2. Penyusunan RUU di Korea Selatan sudah ada komite khusus untuk penyusunan RUU, sehingga dalam 1 tahun dapat menghasilkan 100 RUU, 3. Bidang Anggaran di Korea Selatan pembangunan dilakukan swasta bukan dari RAPBN, di Jepang perpustakaan dan buku-buku sangat lengkap dan baik sehingga sangat mendukung fungsi dewan, di sekretariatan contoh Filipina setiap orang mendapat 12 orang staf dan staf ahli termasuk pembuat RUU. Saran : 1. Mengkaji, merumuskan, menambah perlengkapan DPR/RI, meningkatkan prosedur tata kerja, serta peningkatan SDM, 2. Dibutuhkan pola baru/khusus untuk pembuatan UU dan RUU atau adanya suatu badan perancangan UU, 3. Dalam penyusunan anggaran DPR RI dipihak pemerintah ikut dilibatkan. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 52/IV/1991-1992	Senin, 29 Juni 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
367	Rapat Paripurna ke 53/IV/1991-1992 Senin, 13 Juli 1992 Volume I Side A : Membahas tentang 1. laporan BKSAPI tentang delegasi Muhbah DPR RI ke Jerman (Suryati Atastinah), 2. Laporan BKSAP tentang delegasi Muhibah DPR RI ke Vietnam (Drs. Suseno), 3. Laporan studi perbandingan komisi ke luar negeri (Suwarno). selain itu ada tambahan tentang usul pencalonan Ketua Mahkamah Agung. 1. Laporan Suryani Atastinah Legowo : muhibah DPR RI ke Jerman pada tanggal 26 April - 2 Mei 1992, delegasi di pimpin oleh R. Soekardi wakil ketua DPR, Anggota Ir. Loekasnan Lokhi dari Fraksi Karya Pembangunan Indonesia (FKPI), Siswandi dari Fraksi ABRI, H. Tahiran Sakarim dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Nana Dumana Wiradiputra dari Fraksi PDI, Drs. Sf Prihata sekretaris delegasi, untuk memenuhi undangan ketua UNDESRAF Jerman dan mempererat persahabatan, kejasama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi, perdagangan, teknik, kebudayaan melalui jalur legislatif dan menjelaskan kebijaksanaan dan langkah yang diambil dalam hubungan pelaksanaan pembangunan RI serta mengenai peristiwa Dili tanggal 12 Nopember 1991. 2. Laporan Drs. Suseno : muhibah DPR RI ke Vietnam pada tanggal 3-9 Mei 1992, delegasi dipimpin oleh M. Kharis Suhud ketua delegasi, Anggota Suseno, Susilastuti Sutomo Isnomo, Drs, Mulyono Martosuwarno, Muh. Ja'far Sidik, Ny. Megawati Taufik Kiemas, Drs. S. Adibrata sebagai sekretaris delegasi. Studi banding tentang hal pemerintahan, ekonomi, bahan perbandingan peningkatan hasil kilang minyak/sumber minyak. Side B : Lanjutan, Hambatan dagang Indonesia dengan Vietnam kesulitan dalam sistem pembayaran akibat devisa keras Vietnam, dilakukan kredit tapi selalu tertunda-tunda pembayarannya, dalam hal ekspor impor antara Indonesia dan Vietnam yang kurang lancar, namun hubungan Indonesia dan Vietnam sangat memuaskan, kecuali masalah penyelesaian garis batas wilayah kontinen. 3. Soewarno (ke Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Belgia dalam bidang APBN) tahap II. Komisi APBN lanjutan studi banding ke Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia pada bulan Maret-April 1992, dalam bidang penyusunan dan penetapan APBN untuk menyajikan data masukan sebagai perbandingan tentang penyusunan APBN antara dewan dengan pemerintah.	Rapat Paripurna ke 53/IV/1991-1992	Jum'at, 3 Juli 1992	Suara Jelas
368	Rapat Paripurna ke 53/IV/1991-1992 Senin, 13 Juli 1992 Volume 2 Side A: Pembangunan fasilitas umum di luar negeri diserahkan/dikerjakan pada Badan Swasta contohnya di Perancis. Di Indonesia tidak ada penyampaian pendahuluan dalam RAPBN. Pada hakikatnya pembahasan UU perancangan RAPBN dilakukan dengan waktu yang relatif cukup cepat dan tepat, terutama diadakannya pembicaraan pendahuluan RAPBN, strukturisasi anggaran pada ke-4 negara di atas sampai pada program dan proyek, sedangkan di Indonesia hanya pada sektor dan subsektor, untuk tambahan perubahan anggaran pada negara-negara tersebut kecuali Perancis dilakukan setiap saat sesuai dengan parlemen dan adanya otonom pada parlemen (harus adanya ahli, harus adanya kegiatan program dan proyek dalam anggaran). 4. Usul pencalonan ketua Mahkamah Agung, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung di angkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden, kekosongan pada bagian jabatan ketua, wakil ketua diusulkan 2 calon dari masing-masing fraksi, pemberhentian terhormat pada surat salinan tanggal 8 Juli 1992 Sdr. Ali Said, SH terhitung dari tanggal 1 Juli 1992, pengusulan tentang nama-nama calon ketua Mahkamah Agung oleh dewan dalam rapat musyawarah dewan 16 Juli 1992. Side B: Tidak Ada Suara	Rapat Paripurna ke 53/IV/1991-1992	Senin, 13 Juli 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
369	Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume I Side A: Pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas 2 Rancangan Undang-Undang tentang tambahan dan perubahan atas APBN tahun 1991-1992, RUU APBN tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1989-1990. 1. Ibu Ir. Hj Niken Tari Musdiono pembicara pertama dari fraksi Karya Pembangunan 2. Drs. Sutikno dari Fraksi ABRI, H. Moh. Hartono dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan 3. Ibu Clara Sitompul Tambunan dari fraksi PDI. ketua komisi APBN Drs. Afif Ma'ruf menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat III RUU tentang tambahan dan perubahan APBN tahun 1991-1992, RUU tentang perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989-1990 pembentukan tim perumus dari anggota semua fraksi terdiri dari 10 orang dan dari pemerintah 5 orang. Side B : Pendapat akhir dari masing-masing fraksi Karya Pembangunan Ir. Hj. Niken Tari Musdiono. Masalah moneter semakin besarnya kredit macet, perbankan perlu mengembangkan strategi yang tepat dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kredit macet, tentang akuisisi perusahaan, neraca pembayaran yang semakin besarnya devisa berjalan karena impor yang meningkat dan menurunnya ekspor barang. Penerimaan negara dari sektor non migas telah semakin mantap selalu lebih besar daripada penerimaan migas, penerimaan dari sektor migas merupakan sumber dana yang potensial dan masih dapat digantikan. Selain itu permasalahan yang di bahas yaitu tentang masalah kepulungan jama'ah haji yang terlambat, kenaikan tarif jalan tol karena tidak dibicarakan dahulu dengan DPR, sektor perumahan rakyat dan pemukiman yang dibangun di daerah kumuh dengan swasta, sektor pertambangan dan energi.	Rapat Paripurna ke 54/IV/1991-1992	Senin, 13 Juli 1992	Suara Jelas
370	Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume 2 Side A: Sektor Industri, Sektor tenaga kerja dan transmigrasi (upah minimum tenaga kerja perlu di tinjau kembali), Sektor kesejahteraan sosial dan peranan wanita (lebih disiapkan secara baik dalam bantuan bencana alam, termasuk program pengiriman dan dalam penyediaan P3K), Sektor pendidikan, Sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian. Pendapat akhir dari Sutikno Fraksi ABRI, dalam pembahasan RUU tersebut tidaklah terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi dunia dan perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi Dunia yang mempengaruhi yaitu perdagangan internasional cenderung mengalami perkembangan pertumbuhan yang kurang menggembirakan, situasi dunia yang kurang menguntungkan dan meningkatnya harga minyak bumi pada akhir tahun 1990 dan awal 1991 menyebabkan tingkat inflasi seluruh negara khususnya pada negara berkembang, kerjasama ekonomi regional kurang menguntungkan terhadap terciptanya pola perdagangan internasional yang terbuka, situasi perekonomian di dalam negeri yang meningkatnya perluasan kegiatan industri dan investasi secara besar-besaran dan meningkatnya arus kredit. Side B: Fraksi ABRI menyetujui kedua RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU oleh Presiden. Pendapat dari H. Moh. Hartono dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kedua RUU telah disampaikan kepada Dewan Rakyat berdasarkan amanat Presiden pada tanggal 7 Maret 1992, perubahan tidak terlepas dari pihak intern dan ekstern, yaitu politik, kebijaksanaan 28 Februari 1991, kenaikan tarif listrik, kenaikan angkutan umum, impor kendaraan niaga, kewenangan bea dan cukai, kenaikan harga dasar gabah dan pupuk. Dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut diperlukan adanya tambahan dan perubahan-perubahan pada APBN 1991/1992, sebagai berikut: -Penerimaan Anggaran Negara.	Rapat Paripurna ke 54/IV/1991-1992	Rabu, 15 Juli 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
371	Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume 3 Side A: Lanjutan, pembicaraan dari H. Moh. Hartono : Agar RUU tentang tambahan dan perubahan APBN telah dapat disampaikan oleh pemerintah kepada dewan dan telah di setuju oleh dewan. Agar segera dapat dibentuk tim komisi APBN dan pemerintah untuk merumuskan mekanisme pembicaraan siklus APBN sesuai dengan UUD'45 dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila, jumlah saldo anggaran lebih agar jumlah maksimum supaya di batasi dan kelebihanannya dibukukan sebagai pendapatan pembangunan anggaran berikutnya, agar tarif money policy harus dilonggarkan, pendapatan dalam negeri supaya terus di tingkatkan. Pendapat dari Ibu Clara Sitompul Tambunan dari fraksi PDI : agar penerimaan devisa negara tidak terlalu tergantung pada migas perlu kebijaksanaan dan pengelolaan sumber devisa lainnya. Side B : Lanjutan, pendapat Clara Sitompul Tambunan : pinjaman luar negeri dapat di tekan sekecil mungkin. Agar pemerintah menyampaikan segera RUU tentang perlindungan usaha skala kecil, yang memberikan jaminan pangsa bidang usaha dan pangsa pasar bagi usaha kecil sehingga menjadi visible, perhitungan negara tahun anggaran 1989/1990, sisa anggaran lebih yang ada agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.	Rapat Paripurna ke 54/IV/1991-1992	Rabu, 15 Juli 1992	Suara Jelas
372	Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume Volume 4 Side A : Lanjutan, sambutan perwakilan dari pemerintah mengenai RUU tentang tambahan dan perubahan APBN, penyampaian terima kasih kepada dewan. Perwakilan dari pemerintah menyatakan bahwa perkembangan perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian dunia, demikian pula dengan pelaksanaan APBN 1991/1992 sebagai pelaksanaan operasional tahun III Repelita ke-V tidaklah terlepas dari pengaruh internal dan eksternal. Hal yang sangat menggembirakan di dalam melaksanakan anggaran APBN 1991/1992 tingginya realisasi penerimaan pajak dan makin intensifnya pelaksana penyuluhan dan pelayanan serta pemungutan pajak oleh aparat per pajakan. Dalam tahun anggaran tahun 1991/1992 pemerintah telah menyisihkan pula sebagian penerimaan negara dalam bentuk cadangan anggaran pembangunan (CAP) sebesar Rp. 1,5 Triliun. Pembentukan CAP tersebut untuk menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional dari kemungkinan tidak tercapainya sasaran penerimaan negara yang bersumber dari luar negeri dalam tahun anggaran 1992/1993, pemerintah senantiasa mengharapkan agar kerjasama yang baik yang telah berjalan keterbukaan dapat di pertahankan sampai depan. Side B : Tidak ada Suara	Rapat Paripurna ke 54/IV/1991-1992	Rabu, 15 Juli 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
373	Rapat Paripurna ke 55/IV/1991-1992 Volume I Side A : Pembicaraan tentang pengesahan nama-nama calon ketua Mahkamah Agung berdasarkan rapat dewan musyawarah tanggal 16 Juli 1992, Pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi. Pengesahan nama-nama calon ketua Mahkamah Agung, yang dibacakan oleh Biro Kepala Persidangan. Adapun nama-nama usulan DPR RI yang di setujui yaitu : 1. Hr. Poerwoto S. Ganda Subrata SH, 2. M. Jaelani, SH, 3. Prof. H.Mustamul, SH. 4. H. Adi Handoyo Sucipto, SH. Ketua komisi IX, H. Sugiono menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat III atas RUU tersebut. Pembicara yang akan menyampaikan pendapat tentang pembahasan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi dari fraksi-fraksi yaitu : 1. Drs. H. Parindo Rusli Mokoginta dari fraksi Karya Pembangunan. Fraksi Karya Pembangunan menilai Pancasila sudah menjiwai RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi. RUU ini sudah sesuai dengan isi dan makna UU'45. Side B: Lanjutan, Pembentukan ketiga Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi sudah tepat untuk memenuhi aspirasi dari ketiga daerah yang bersangkutan, nantinya akan lebih memudahkan dalam mencari keadilan di tingkat banding di daerah tersebut. Fraksi Kaya Pembangunan menyetujui RUU ini di jadikan Undang-Undang. 2. Drs. Mulyono Abdurahman dari fraksi ABRI. Fraksi ABRI berpendapat bahwa RUU ini sesungguhnya merupakan politik negara yang menetapkan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama di ketiga Ibukota Propinsi tersebut sebagai perwujudan dari ketentuan pasal 4 ayat 2 dan pasal 8 no 7 UUD tentang Pengadilan Tinggi Agama.	Rapat Paripurna ke 55/IV/1991-1992	Rabu, 15 Juli 1992	Suara Jelas
374	Rapat Paripurna ke 55/IV/1991-1992 Volume 2 Side A : Tujuan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di tiga daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pengadilan di tiga daerah itu yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pengadilan yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan. Fraksi ABRI menyetujui RUU untuk di sahkan menjadi Undang-Undang. Harapan fraksi ABRI untuk pemerintah agar membentuk Pengadilan Agama di daerah yang belum mempunyai Pengadilan Tinggi Agama. 3. Drs. Tengku Jamaludin Wali fraksi Persatuan Pembangunan. Agar pemerintah mempersiapkan RUU tentang Pengadilan Tinggi Agama terutama di tiga Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, selain itu mengharapkan agar perhatian sungguh-sungguh dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk ikut terlibat dalam penyediaan perangkat-perangkat keras, lunak dan personilnya tanpa adanya pembeda-bedaan antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya. Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU ini menjadi Undang-Undang. Side B : 4. Atias Satiyono Sunarto dari Fraksi PDI. Perlu pengukuhan UUD Pengadilan Tinggi Agama di Palembang, Aceh, Medan, Padang dan Pekanbaru. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan RUU menjadi Undang-Undang hendaknya segera di tempuh langkah-langkah konkrit dengan pola sebagai berikut : Proses pengadilan yang menjadi lebih sederhana, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, perlu lebih ditingkatkan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan konsultasi bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu, untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan misi peradiln agama yang bersangkutan di segala tingkat perlu di realisir dan terus di tingkatkan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan maupun pendayagunaannya sesuai denga dengan UUD'45. Frakasi Partai Demokrasi Indonesia menyetujui RUU ini di sahkan menjadi Undang-Undang.	Rapat Paripurna ke 55/IV/1991-1992	Rabu, 22 Juli 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
375	Rapat Paripurna Ke 56/IV/1991-1992 Volume I Side A : Pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang Merk. RUU tersebut telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 November 1991 dengan amanat Presiden. Ada 4 pembicara yang menyampaikan pendapat akhirnya yaitu : 1. Hartini Muchtar Kasran, SH dari Fraksi Karya Pembangunan. 2. Drs. M. Zahri Amin dari Fraksi ABRI 3. H. Sukardi Effendi dari Fraksi Persatuan Pembangunan 4. Teuku Dahman Musir, SH dari Fraksi PDI. Pembicara pertama dari Hartini Muchtar Kasran, SH dari Fraksi Karya Pembangunan : Pembentukan RUU tentang Merk tidak terlepas dari program-program umum Golongan Karya yang sangat mendukung pembentukan RUU ini. Side B : Lanjutan, Hartini Muchtar Kasran, SH : Penggunaan merk oleh seseorang atau badan hukum, jika ada yang tidak sesuai dengan permintaan pendaftaran merk yang bersangkutan bisa dihapus / digugat untuk dibatalkan, kemudahan prosedur tentang penggunaan merk, harus adanya perlindungan hukum, peningkatan pelayanan dari sistem konstitutif. Fraksi Karya Pembangunan menyetujui RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Merk. Drs. M. Zahri Amin dari fraksi ABRI : Agar Undang-Undang tentang merk mampu mengantisipasi perkembangan dunia usaha nasional maupun internasional serta dapat mencegah dan memberantas segala bentuk persaingan curang dan pemalsuan merk.	Rapat Paripurna ke 56/IV/1991-1992	Rabu, 22 Juli 1992	Suara Jelas
376	Rapat Paripurna ke 56/IV/1991-1992 Volume 2 (Lanjutan) Side A : Fraksi ABRI mengusulkan agar pemalsuan merk terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia harus khusus di atur dalam Undang-Undang merk ini. Diharapkan RUU tentang merk ini akan mampu mengantisipasi globalisasi dunia usaha serta memiliki daya sesuai yang cukup panjang, pada saat pemberlakuan Undang-Undang ini hanya satu azas yang dipakai yaitu azas konstitutif. Harapannya : diharapkan pemerintah mulai merintis pembentukan Undang-undang tentang konsumen, selain itu perlu disebarluaskannya UU merk ini, koordinasi antara instansi di daerah dengan pusat terutama dalam pemberian pelayanan. Side B : Lanjutan, H. Sukardi Effendi, SH dari fraksiPersatuan Pembangunan : Penggunaan sistem kontitutif lebih baik daripada penggunaan sistem deklaratif karena konstitutif lebih menjamin kepuasan hukum, lebih menguntungkan untuk negara-negara berkembang, dan akan lebih menumbuhkan kepastian hukum dan rasa adil pada saat pengumuman pendaftaran sedangkan deklaratif hanya menghasilkan anggapan kebenaran secara formal saja dan tidak memberikan jaminan secara material dan tidak pula memberikan kepastian hukum. Harapan : mampu menciptakan suasana yang merangsang tumbuh suburnya potensi, inovasi bangsa di bidang industri dan perdagangan, pelaksanaan undang-undang tentang merk harus diperhitungkan sedemikian rupa, praktek-praktek negatif peniruan dan penyerupaan merk-merk, sistem merk yang digunakan harus benar-benar merupakan jaminan kepastian hukum dan harus mendorong pertumbuhan industri dan dunia usaha yang sehat. Sdr. Tengku Dahman Musir dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Suatu merk baru dapat didaftarkan bila mempunyai daya pembeda dengan merk lain yang sudah terdaftar dan harus digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Merk terdaftar mempunyai perlindungan hukum selama 10 tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan merk bersangkutan.	Rapat Paripurna ke 56/IV/1991-1992	Kamis, 23 Juli 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
377	Rapat Paripurna ke 56/IV/1991-1992 Volume3 (Lanjutan) Side A: Lanjutan pembicaraan dari Tengku Dahman Musir, SH : Pemilik merk terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan merknya baik untuk sebagian maupun seluruh jasa yang termasuk 1 kelas. Harapan : agar pemerintah memanfaatkan peluang waktu sampai saat akan berlakunya Undang-Undang ini tanggal 1 April 1993, menyiapkan kantor merk yang akan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, agar Undang-undang ini dapat berlaku pada waktunya secara efektif maka peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan menteri semuanya harus diterbitkan tepat pada waktunya, mengenai berita resmi merk yang merupakan lembaran resmi yang mempunyai kekuatan/kebutuhan hukum yang sama dengan tambahan berita negara yang memuat hal-hal yang harus dimuat menurut Undang-Undang Dasar hukum pembentukkannya sebenarnya tidak ada. Fraksi PDI menyetujui dan menerima RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Side B : Sambutan dari pemerintah oleh Menteri Kehakiman, ucapan terimakasih dan ucapan rasa syukur.	Rapat Paripurna ke 56/IV/1991-1992)	Kamis, 23 Juli 1992	Suara Jelas
378	Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992 Volume I Side A : Pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang Pelayaran, dengan amanat Ppresiden No R 03/PU/II/1991 tanggal 19 Februari 1991 RUU tentang Pelayaran disampaikan pemerintah kepada pimpinan DPR. Sebelum penyampaian pembicaraan dari setiap fraksi, terlebih dahulu ada penyampaian laporan hasil pembahasan tingkat III oleh ketua Pansus RUU tentang Pelayaran Sdr. Drs. H. Bomer Pasaribu, SH. RUU pelayaran ini merupakan hasil karya ke-5 PANSUS. Pendapat akhir dari 4 fraksi yaitu : 1. Ir.Sm Tampubolon fraksi Karya Pembangunan : Diharapkan undang-undang pelayaran ini dapat menjawab seluruh permasalahan pelayaran nasional maupun internasional sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna baik untuk kepentingan bangsa, negara dan seluruh rakyat Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang. Side B : Lanjutan, pembicara Ir. SM Tampubolon : Fraksi Karya Pembangunan menyetujui RUU untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Harapan : salah satu tujuan yang diamanatkan Undang-Undang ini untuk memperlancar arus perpindahan orang dan barang melalui perairan serta sebagai penunjang, pendorong, perangsang pencapai pembangunan nasional diharapkan pemerintah berpedoman pada tujuan tersebut. 2.Aminudin Nawir dari Fraksi ABRI : RUU ini merupakan bagian dari paket rancangan undang-undang bidang perhubungan sebagai UU yang ke-4 yang di bahas oleh panitia khusus sejak tanggal 27 Januari 1992.	Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992	Kamis, 23 Juli 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
379	Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992 Volume 2 Side A : Lanjutan pembicaraan Aminudin Nawir : Harapan : setelah pengesahan RUU ini fraksi ABRI menghimbau kepada pemerintah kiranya dapat segera menyiapkan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional UUD tersebut, demi tercapainya keserasian, keselarasan, dan keterpaduan antar fungsi pelaksana setiap undang-undang termasuk pelaksana undang-undang pelayaran diperlukan kerjasama yang baik antar instansi dan pemerintah, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kiranya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masalah angkutan perairan di perbatasan dan daerah terpencil yang belum berkembang. Fraksi ABRI menyetujui disahkannya RUU pelayaran menjadi Undang-Undang oleh Presiden. 3. H. Muh Namubuan, SH dari fraksi Persatuan Pembangunan : melalui pembahasan dan pengkodifikasian RUU tentang pelayaran ini harus di capai tujuan dengan menjadikan perusahaan angkutan di perairan mampu menjadi tuan rumah di perairan Indonesia, salah satu usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah angkutan perairan harus di dukung oleh kemampuan industri perkapalan dalam negeri dan hal itu harus tercermin jelas dalam RUU tersebut. RUU ini mengamanatkan kepada pemerintah untuk benar-benar memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap angkutan laut nasional. Side B : Lanjutan, Harapan : fraksi Persatuan Pembangunan agar pelabuhan merupakan pula sebagai tempat kegiatan tempat pemerintahan telah diakomodasikan di dalam RUU ini, meminta perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja yang bekerja pada menara cuar akan kesejahteraan mereka, harus ada pembinaan SDM dalam pelayaran karena itu sangat penting, segera setelah RUU ini diundangkan menjadi undang-undang, pemerintah untuk segera memasyarakatkan undang-undang ini, serta pemerintah perlu mengambil langkah-langkah penyempurnaan terhadap aparat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 4. T. Muh. Yusuf Ali dari fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI). Pelayaran sebagai salah satu modal transportasi maka penyelenggaraannya harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi yang nasional secara terpadu serta mampu menyediakan jasa transportasi yang seimbang dan aman, nyaman, tertib, lancar, teratur dan biaya yang terjangkau masyarakat.	Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992	Jum'at, 24 Juli 1992	Suara Jelas
380	Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992 Volume 3 Side A : Lanjutan pembicaraan T. Muh Yusuf Ali : PDI mengungkapkan ada 3 aspek penting yaitu : Aspek perlindungan terhadap angkutan laut di dalam negeri, Aspek perlindungan terhadap pelayaran rakyat sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional, Aspek pembinaan pelayanan dengan tujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan dengan mengutamakan melindungi pelayanan nasional termasuk pelayaran rakyat. Harapan : mengharapkan perhatian dari semua fraksi dan pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya memasyarakatkan undang-undang ini secara luas, khususnya dikalangan masyarakat pelayaran, setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang segera dikeluarkan peraturan-peraturan yang berkenaan dengannya, menegakkan ke semua pihak yang terkait dalam operasionalisasi undang-undang ini agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Fraksi PDI menyetujui RUU pelayaran untuk disahkan menjadi undang-undang. Sambutan Menteri Perhubungan wakil dari pemerintah, ucapan terimakasih. Side B : Lanjutan sambutan Menteri Perhubungan : RUU tentang pelayaran ini telah diatur dalam Bab tersendiri yang merupakan substansi baru yang mengenai tentang SDM. Selesaiannya RUU pelayaran ini masih ada tugas berat bagi pemerintah yaitu menyusun peraturan pelaksanaannya baik berupa PP, Kepres, maupun keputusan menteri. Hal-hal yang telah disampaikan oleh semua fraksi-fraksi dalam pandangan akhir akan dijadikan perhatian pula dalam menyusun pelaksanaan peraturan undang-undang tentang pelayaran ini.	Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992I	Jum'at, 24 Juli 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
381	Rapat Paripurna ke 58/IV/1991-1992 Side A: Mengakhiri sidang Rapat Paripurna ke-IV, masa sidang ke-IV di mulai pada tanggal 15 Juni 1992, DPR disibukkan dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ke-3 tugas pelaksanaannya, yaitu bidang perundang-perundangan, bidang anggaran serta bidang pengawasan. Pada masa persidangan ke-IV ini telah di berangkatkan 3 delegasi teknis yaitu Delegasi komisi DPR ke konferensi pimpinan komite luar negeri parlemen se Asia Pasifik di Fokuwoka Jepang, Delegasi komisi I DPR ke sidang AMMPMC (Asean Ministrim Meeting Post Conference) di Manila Piliphina, Delegasi AIPO ke Cina di pimpin oleh ketua DPR selaku Presiden AIPO. Selain itu membahas tentang masalah-masalah yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan pendalaman seperti masalah antara peranan pers, masyarakat dan pemerintah perlu terus dibina, masalah pertanahan, masalah penyampaian konsep awal GBHN kepada Orsospol telah mendapat pula bahasan komisi II DPR dengan pemerintah. Side B : Lanjutan, Budaya dan etika Pancasila harus selalu mendasari ucapan dan sikap kita dan sesuai dengan azas kekeluargaan semua keputusan dan usahakan melalui musyawarah untuk mufakat sehingga tidak akan ada terjadinya diktator oleh mayoritas ataupun tirani oleh minoritas.	Rapat Paripurna ke 58/IV/1991-1992	Jum'at, 24 Juli 1992	Suara Jelas
382	Rapat Paripurna ke I/I/1992-1993 Volume I Side A : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dewan, tugas dewan dalam pengawasan diatur dalam Undang-Undang 1945, ketetapan MPR dan diatur secara rinci dalam tata tertib DPR. Pengawasan DPR dilakukan melalui penampungan umum aspirasi rakyat dan monitoring dinamika kehidupan masyarakat. Fungsi pengawasan dewan melalui rapat-rapat yang dilakukan dengan dialog langsung antara pemerintah dan DPR secara intensif. Amanat presiden tanggal 16 Agustus 1988 antara lain telah menegaskan disiplin nasional akan merupakan prasyarat yang sangat diperlukan bagi tahap tinggal landas, pada tanggal 1 April 1994 akan dimulai tahun Repelita VI yang merupakan langkah pertama pembangunan jangka panjang yang kedua. Side B : Volume 3 ada di dalam Volume no. 383.	Rapat Paripurna ke I/I/1992-1993	Sabtu, 25 Juli 1992	Suara Jelas
383	Rapat Paripurna ke I/I/1992-1993 Volume 2 Side A: Isi Volume tentang pemberian penghargaan terhadap guru teladan tingkat nasional dari TK sampai SMA, Guru, Kepala Sekolah SD daerah terpencil. Disambung dengan sambutan Presiden Soeharto dalam awal tentang hari kemerdekaan : Pancasila sebagai satu-satunya azas makin terasa menyatukan golongan dan semua lapisan. Kita semua perlu menarik pelajaran dari Pemilu tahun lalu, untuk merenungkan pelaksanaan pemilu pada tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, maka ABRI telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai kekuatan perjuangan mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan nasional ikut memikul tanggung jawab atas jalannya kehidupan bangsa dan negara. Side B : Lanjutan Side A No.382.Volume III Hasil pemilu tahun lalu mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan bangsa kita yang akan datang, yang akan menghasilkan GBHN untuk masa yang akan datang, yang akan memberi arah bagi perjalanan bangsa ini dan pembangunan nasional jangka panjang tahap II dalam era tinggal landas dalam kebangkitan nasional ke-2. Pada tahun 1991-1992 perekonomian Indonesia telah berhasil mengatasi ujian dengan selamat, laju inflasi yang semula meningkat telah menunjukkan menurun pada bulan-bulan terakhir ini. Harga pangan dan barang-barang pokok menjadi normal kembali dan penyediannya cukup lancar, keberhasilan dalam mengendalikan laju inflasi dan mengamankan neraca pembayaran internasional sungguh membesarkan hati tapi tidak boleh membuat kita lengah. Selain itu stabilitas yang mantap dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus disertai dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil bagi seluruh rakyat. Side B : Volume 4 Tidak ada Suara.	Rapat Paripurna ke I/I/1992-1993.	Sabtu, 15 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
384	Rapat Paripurna ke 1/I/1992-1993 Volume 5 Side A :Pembacaan do'a oleh Menteri Agama RI dan penutup sidang Paripurna di iringi lagu kebangsaan Indonesia Merdeka. Selesai. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 1/I/1992-1993	Sabtu, 15 Agustus 1992	Suara Tidak Jelas
385	Rapat Paripurna ke 2/I/1992-1993 Side A : Pembicaraan tingkat keterangan pemerintah atas RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi Undang-Undang. RUU pengganti ini berdasarkan amanat Presiden No R.06/PU/VIII/II tanggal 13 Agustus 1992. Beberapa pokok pikiran pemerintah dalam penyusunan undang-undang lalu lintas : Mengutamakan keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Mudah di fahami dan diketahui oleh masyarakat luas, terbuka dan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak masyarakat dan aparata pemerintah, menyederhanakan prosedur, kejelasan wewenang dari masing-masing instansi serta keterpaduan anatar instansi, menjamin kepastian hukum, menampung aspirasi dan pendapat masyarakat. Pokokpikiran pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan selaku wakil dari pemerintah. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 2/I/1992-1993	Sabtu, 15 Agustus 1992	Suara Jelas
386	Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993 Side A : Lahirnya ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila sebagai tindak lanjut dari wujud pengamalan Pancasila memberikan bukti mengenai kearifan. Melalui Keputusan Presiden tahun 1969 ditetapkan Repelita I yang akan di berlakukan tanggal 1 April 1969, maka sejak saat itu dimulailah pembangunan nasional Indonesia yang pertama yang berkesinambungan berdasarkan suatu rencana pembangunan lima tahunan. Keterbukaan politik dalam kehidupan kenegaraan berdasarkan tatanan kehidupan politik Demokratis Pancasila pada gilirannya akan menambah bobot dan kualitas Demokrasi Pancasila. Berdasarkan kepada pertimbangan bahwa suatu RUU yang dibicarakan oleh dewan dengan pemerintah haruslah mencerminkan suatu sosial politik yang berkembang dalam masyarakat serta mencerminkan aspirasi masyarakat maka pembahasan suatu RUU tidak dibatasi oleh adanya kendala waktu. Mengenai fungsi DPR dalam penetapan APBN. Side B : Lanjutan, Dalam penetapan APBN, kritik dan saran, sorotan tajam masyarakat terarah pada pelaksanaan hak the voting yaitu hak mengkruting dewan yang dinilai masih lemah dan belum sesuai dengan UUD 1945. Dalam Demokrasi Pancasila kita pentingkan jalan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Diharapkan hasil pemilihan 1992 nanti anggota dewan untuk tidak jemu-jemunya memikirkan mutu dan percakapan personil dan fasilitas pendukungnya dalam pelayanan fungsi APBN. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berencana di samping memberikan kegembiraan di salah satu pihak tapi di samping lain juga memberikan problematika-problematika yang banyak di bicarakan masyarakat.	Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993	Sabtu, 22 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
387	Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993 Volume I Side A : Lahirnya ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila sebagai tindak lanjut dari wujud pengamalan Pancasila memberikan bukti mengenai kearifan. Melalui Keputusan Presiden tahun 1969 ditetapkan Repelita I yang akan di berlakukan tanggal 1 April 1969, maka sejak saat itu dimulailah pembangunan nasional Indonesia yang pertama yang berkesinambungan berdasarkan suatu rencana pembangunan lima tahunan. Keterbukaan politik dalam kehidupan kenegaraan berdasarkan tatanan kehidupan politik Demokratis Pancasila pada gilirannya akan menambah bobot dan kualitas Demokrasi Pancasila. Berdasarkan kepada pertimbangan bahwa suatu RUU yang dibicarakan oleh dewan dengan pemerintah haruslah mencerminkan suatu sosial politik yang berkembang dalam masyarakat serta mencerminkan aspirasi masyarakat maka pembahasan suatu RUU tidak dibatasi oleh adanya kendala waktu. Mengenai fungsi DPR dalam penetapan APBN. Side B : Lanjutan, Dalam penetapan APBN, kritik dan saran, sorotan tajam masyarakat terarah pada pelaksanaan hak the voting yaitu hak mengkruting dewan yang dinilai masih lemah dan belum sesuai dengan UUD 1945. Dalam Demokrasi Pancasila kita pentingkan jalan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Diharapkan hasil pemilihan 1992 nanti anggota dewan untuk tidak jemu-jemunya memikirkan mutu dan percakapan personil dan fasilitas pendukungnya dalam pelayanan fungsi APBN. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berencana di samping memberikan kegembiraan di salah satu pihak tapi di samping lain juga memberikan problematika-problematika yang banyak di bicarakan masyarakat.	Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993	Sabtu, 29 Agustus 1992	Suara Jelas
388	Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993 Volume 2 Side A : Tidak ada suara Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993	Sabtu, 29 Agustus 1992	Suara Jelas
389	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993 Volume I Side A : Pembicaraan tingkat IV atas pengambilan keputusan RUU tentang kesehatan, atas amanat Presiden No. R16/PU/9/1991 tanggal 27 September 1991. Dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Dr. Adiyatma, MPH. Daftar pembicara dari berbagai fraksi tentang penyampaian pendapatnya : 1. Dra. Ine Erna Adriyana Soekaryo dari Karya Pembangunan, 2. Soewito S. dari fraksi ABRI, 3. H. Kun Solihudin dari fraksi Persatuan Pembangunan, 4. Sarjito Darsuki dari frkasi Demokrasi Indonesia. Sebelum menyampaikan pendapat dari setiap fraksi terlebih dahulu ada pembicaraan dari ketua Pansus RUU Kesehatan yaitu Dr. Bawadiman melaporkan hasil pembicaraan tingkat III. Rapat pansus di ketua oleh Dr. Bawadiman, rapat tim kecil di ketuai oleh wakil ketua pansus MA. Tambunan dan di bantu oleh PN Markum SH. Pansus bersama pemerintah yang dihadiri wakil ketua DPR RI Koordinator bidang Kesra Dr. H. Naru pada tanggal 5 September 1992 mengesahkan RUU Kesehatan. Side B : Menyampaikan pendapat akhir dari Fraksi Karya Pembangunan Dra. Ine Erna Adriyana : menyampaikan tentang beberapa masalah, usulan dan tambahan : Rahasia penyakit pasien dan kode etik harus dirumuskan lagi sehingga berbunyi menghormati hak pasien, dalam konsideran menimbang RUU ini belum terlihat dengan jelas filosofis maupun politis yang mendasari dibuatnya RUU ini, pengguguran kandungan (aborsi) tidak setuju dicantumkan dalam RUU ini karena sudah teratur dalam KUHP.	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993	Sabtu, 29 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
390	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993 Volume 2 Lanjutan. Side A : Harapan : Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan, untuk itu pemerintah mempunyai tugas bukan saja mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan tapi juga menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, adanya PP yang mengikuti undang-undang yang disusun. Fraksi Karya Pembangunan menyetujui RUU kesehatan ini disahkan menjadi undang-undang. 2. Fraksi ABRI Soewito, S.: Fraksi ABRI kurang sependapat dengan saran untuk merubah judul RUU menjadi sistem kesehatan. Dengan adanya kesepakatan RUU ini tetap menjadi RUU Kesehatan, upaya kesehatan dilaksanakan melalui pola pendekatan seperti yang sering di sebut 4 pilar upaya kesehatan yaitu : Peningkatan kesehatan, promosi kesehatan, rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Side B : Lanjutan, Fraksi ABRI menyetujui RUU kesehatan ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Harapan : Dalam rangka pengoperasian undang-undang baru ini pemerintah perlu menyiapkan piranti lunak dan piranti keras untuk menangani berbagai permasalahan yang timbul, perlu segera dibuat PP dan PP pelaksanaannya di lapangan dengan mengindahkan kondisi sosial masyarakat, perlu segera disebarluaskan undang-undang tentang kesehatan ini agar masyarakat turut berpartisipasi secara aktif melalui peraturan dan penyuluhan. 3. Fraksi Persatuan Pembangunan H. Kun Solihudin : Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993	Selasa, 8 September 1992	Suara Jelas
391	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993 Volume3 Lanjutan. Side A : Mengharapkan agar kinerja peraturan pelaksanaannya mengenai peraturan tersebut dapat diadakan tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu pengrajin makanan dan minuman serta pengusaha tingkat industri rumah tangga, industri kecil supaya selalu dibina dan dibimbing oleh pemerintah. Ukuran berhasil atau tidaknya aplikasi RUU ini diukur dari kebijaksanaan pemerintah atas hal-hal tersebut. Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan agar pengawasannya dipertegas, Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah. 4. Partai Demokrasi Indonesia, Sardjito Darsuki : Pokok-pokok Kesehatan; adanya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan amanat GBHN 1988, semua pokok kesehatan yang ada pada setiap batang tubuh undang-undang. Side B : Lanjutan pembicaraan pokok-pokok kesehatan : Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang tinggi dan distribusi yang optimal tidak merata, Percakupan pelayanan kesehatan yang belum memadai, ketenagakerjaan yang tersedia belum mencukupi, obat belum terjangkau oleh sebagian masyarakat besar karena biaya, Status gizi yang kurang. Fraksi Demokrasi Indonesia menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang, dan berharap hendaknya pemerintah segera menerbitkan PP sebagai peraturan pelaksanaannya agar didalamnya terisi ketentuan-ketentuan tentang kewajiban Rumah Sakit Pemerintah terutama swasta yang menyediakan 25% fasilitas pengobatan perawatan untuk golongan yang tidak mampu.	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993	Selasa, 8 September 1992	Suara Jelas
392	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993 Volume IV Side A : Sambutan dari Menteri Kesehatan dan Pidato penutupan rapat paripurna yang terakhir dari DPR masa bakti 1987/1992. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993	Selasa, 8 September 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
393	Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993 Volume I Side A : Pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang No.1 tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang Ilmu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Undang-Undang. Pembicara penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi, 1. Fraksi Karya Pembangunan Abdul Latif, SH, 2. Fraksi ABRI Ombun Simatupang, 3. Fraksi Persatuan Pembangunan H. Muh. Buan, SH. 4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Gusti Ngurah Yuda. Penyampaian pendapat terakhir dari 1.Fraksi Karya Pembangunan Abdul Latif, SH,Fraksi Karya Pembangunan sependapat terhadap tanggapan pemerintah menghadapi reaksi dan kerisauan dikalangan masyarakat, tindakan pemerintah mengeluarkan PP pengganti undang-undang untuk menunda berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 merupakan tindakan yang tepat dan bijaksana. Side B : Harapan : Perlu dipersiapkan sarana dan prasarana terutama untuk penerbitan PP sebagai pelaksanaan undang-undang dengan sebaik-baiknya. 2. Fraksi ABRI Ombun Simatupang,Harapan : kiranya pemerintah dapat segera menuntaskan kesiapan seluruh Peraturan Pelaksanaan yang berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang LLAJ.	Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993	Selasa, 8 September 1992	Suara Jelas
394	Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993 Volume 2 Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan H. Muh Buan, Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan agar penangguhan jangka waktu selama 1 tahun tidak diartikan sebagai menanggguhkan dan meredamkan untuk sementara kegelisahan masyarakat dengan akan diberlakukannya Undang-Undang no 14 tahun 1992 pada tanggal 17 September 1993 nanti, agar DPR dan pemerintah meneliti ulang terhadap ketentuan pidana khususnya ketentuan denda yang di cantumkan dalam Undang-Undang No.14 tahun 1992 dan harus mengacu pada ketenttuan undang-undang yang berlaku, apabila Undang-Undang no.14 tahun 1992 dilaksanakan pada tanggal 17 September 1993 kiranya budaya denda damai dan upaya mencari kesalahan-kesalahan supir tidak terdengar lagi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Gusti Ngurah Yuda, bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah dalam memasyarakatkan undang-undang tersebut, diantaranya menyampaikan penjelasan kepada masyarakat melalui media massa cetak maupun elektronik, mengadakan tatap muka dengan penyedia jasa angkutan jalan, memberikan penjelasan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 dalam berbagai lokakarya dan seminar. Side B : Saran : Agar pemerintah secara sungguh-sungguh mempersiapkan dan membangun sarana dan prasarana jalan sesuai dengan kewajiban pemerintah yang di amanatkan Undang-Undang No 14 tahun 1992, pemerintah secara terus menerus menyiapkan penyusunan perangkat Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1992, jangka waktu penangguhan selama 1 tahun agar pemerintah dengan penuh tanggung jawab memenuhi dan melaksanakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyatakan persetujuannya atas RUU No. 14 tahun 1992 untuk ditangguhkan. Wakil pemerintah memberikan sambutan yang di wakili oleh Menteri Perhubungan.	Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993	Selasa, 15 September 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
395	Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993 Volume 3 Side A : Lanjutan sambutan dan ucapan terimakasih dari Menteri Perhubungan perwakilan dari pemerintah. Bahwa dalam penyusunan peraturan pemerintah tersebut digunakan pokok pikiran dengan menampung pendapat dan aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lalu lintas, angkutan jalan, menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Masih perlunya di tingkatkan dalam pemahaman persiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang no 14 tahun 1992, sehingga diperlukan penangguhan tentang Undang-Undang No.14 tahun 1992. Secara konsepsional pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pemasyarakatan guna lebih meningkatkan persiapan dan kesiapan segenap aparat pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Melalui program terpadu dan berkesinambungan sebagai gerakan nasional, permasalahan yang sangat mendasar dalam upaya-upaya tertib lalu lintas adalah upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan lalu lintas di jalan. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993	Selasa, 15 September 1992	Suara Jelas
396	Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993 Volume I Side A : Pembicaraan tingkat IV Pengambilan keputusan tentang RUU Perkoperasian. Pembicara dari setiap Fraksi : 1. Sdr. Umbu Haramburu Kapita dari fraksi Karya Pembangunan, 2. Sdr. H.Y Sanggor Fraksi ABRI, 3. Drs. Yusuf Sakir Fraksi Persatuan Pembangunan, 4. Dempi Hariyanto Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat III atas RUU tersebut oleh Ketua Komisi 7 DPR RI H. Saiful Anwar Husain. 1. Umbu Haramburu Kapita dari fraksi Karya Pembangunan. Dalam landasan perkoperasian ini kemakmuran untuk rakyat bukan untuk perorangan atau kemakmuran seorang atau perorang. Side B : Lanjutan, Fraksi Karya Pembangunan Harapan : agar memasyarakatkan semua hal yang ditentukan seperti digariskan dalam bab pembinaan undang-undang ini agar direncanakan dan dilancarkan sebagai program kerja yang diutamakan, agar RUU ini dapat menjadi pendorong dan salah satu acuan utama untuk membentuk undang-undang tentang perekonomian nasional yang mewujudkan sistem perekonomian nasional sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945. 2. H.Y Sangger dari Fraksi ABRI, Koperasi harus menumbuhkan partisipasi rakyat secara menyeluruh sebagai wadah untuk berdemokrasi dalam kehidupan ekonomi memberikan manfaat ekonomi dan perlindungan bagi anggotanya serta dapat bekerja sama secara serasi dan dapat saling menguntungkan bagi anggota ekonomi lainnya dan telah ditampung dalam RUU koperasi ini.	Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993	Selasa, 15 September 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
397	Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993 Volume 2 Side A : Terdapat 3 perubahan yang sangat mendasar yang perlu ditonjolkan dalam forum ini : Adanya penambahan baru yang tertuang pada butir C konsideran menimbang, Rumusan baru definisi koperasi, Rumusan baru tentang tujuan. Selain adanya perubahan-perubahan ini, RUU ini telah membatasi peranan pemerintah. Harapan : segera dimasyarakatkan melalui sarana yang ada, baik pemerintah pusat dan daerah menentukan dan merencanakan bidang-bidang kegiatan ekonomi yang akan diusahakan koperasi sebagai wujud perlindungan koperasi dan sekaligus mempermudah permodalan yang diperlukan, untuk menjadikan koperasi benar-benar mampu berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional adanya sekolah kejuaraan koperasi. Side B : Drs. Yusuf Sakir Fraksi Persatuan Pembangunan, Koperasi masih memerlukan bimbingan, kemudahan dan perlindungan dari pemerintah. Harapan : Bahwa masalah pemerataan dan rasa keadilan terutama di bidang sosial ekonomi akan menjadi titik sentral dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia pada era pembangunan non jangka panjang, agar secara bertahap kehidupan dan perkembangan koperasi lebih mantap dan lebih baik, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan agar kondisi negatif yang mempengaruhi pertumbuhan koperasi dapat di eliminir, dalam melakukan pembinaan dalam kehidupan perkoperasian pemerintah hendaknya tetap berpegang teguh pada prinsip koperasi, dengan dibuka seluas-luasnya koperasi bagi permodalan swasta untuk ikut menanamkan modalnya dalam usaha koperasi hendaknya diupayakan secara bersungguh-sungguh oleh masyarakat dan gerakan koperasi terutama pemerintah agar tidak terjadi munculnya koperasi alih dagang.	Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993	Rabu, 16 September 1992	Suara Jelas
398	Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993 Volume 3 Side A : Dempi Hariyanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia : menilai RUU ini tidak saja pengganti UU No. 12 tahun 1967 akan tetapi untuk lebih menempatkan koperasi dan peranan koperasi sebagai badan usaha sesuai yang diamanatkan UUD 1945. Fraksi PDI mengharapkan dalam hal pendidikan koperasi, maka dalam hal pengertian SHU dan tujuan koperasi dapat dijadikan sebagai materi yang penting karena menurut pengamatan fraksi PDI selama ini sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan SHU antara lain sebagai contoh Bank Bukopin mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Fraksi PDI berpendapat bahwa peranan pemerintah dalam pembinaan koperasi masih diperlukan dalam hal menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi dan memberi bimbingan kemudahan dan perlindungan, dalam hal ini fraksi PDI berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlalu mencampur urusan internal organisasi koperasi. Side B : Saran dan Harapan : mengharapkan semua pihak yang terkait dengan operasionalisasi Undang-Undang tentang Perkoperasian agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sektor koperasi berperan sejajar dengan sektor swasta dan BUMN serta berperan utama dalam segala bidang perekonomian nasional, pemerintah agar segera menerbitkan PP dan peraturan pelaksanaannya untuk menghindari keadaan yang tidak menentu yang berlarut-larut untuk dapat efektif berlaku dan dapat dilaksanakan.	Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993	Rabu, 16 September 1992	Suara Jelas
399	Lanjutan Volume 4 Side A : Lanjutan sambutan dari Menteri Koperasi dan ucapan terimakasih. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993	Rabu, 16 September 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
400	Rapat Paripurna ke 8/I/1992-1993 Volume I Side A : Dalam masa sidang ke 1 dewan telah dapat menyelesaikan 4 buah RUU untuk disahkan menjadi Undang-Undang yaitu : RUU tentang Penataan Ruang disahkan pada tanggal 31 Agustus 1992, RUU tentang Kesehatan disahkan tanggal 8 September 1992, RUU tentang penetapan Perpu No.1 tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan tanggal 15 September 1992, dan RUU tentang koperasi disahkan tanggal 16 September 1992. Side B : DPR telah membentuk panitia khusus untuk membahas Repelita yaitu Pansus Repelita. Dalam kurun 5 tahun telah terbentuk 10 grup kerjasama dalam rangka menggalang, membina, mengolah dan mengembangkan hubungan persahabatan DPR dengan negara sahabat seperti DPR dengan parlemen Jerman, Perancis, Turki, Jepang, Korea Selatan, Australia, Banglades, Meksiko, Selandia Baru, dan Italia. Untuk masa bakti 1987/1992 telah dapat dikirim 23 delegasi muhibah DPR ke berbagai negara seperti Rumania, Thailand, Mesir, Hongaria, India, Belgia, Kolombia, Finlandia, Belanda, Kanada, Uni Soviet, Papua Nugini, Australia, Korea Utara, Perancis, Italia, Selandia Baru, RRC, Maroko, Tunisia, Pakistan, Spanyol, Vietnam, Tanzania, Republik Federasi Jerman. Sesuai dengan keputusan sidang umum IFO ke-12 di Thailand, bulan september 1991 maka pada tanggal 21-26 Desember 1992 Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang umum IFO ke-13 di Hotel Sahid Jakarta.	Rapat Paripurna ke 8/I/1992-1993	Sabtu, 19 September 1992	Suara Jelas
401	Rapat Paripurna ke.9 / II / 92-93, Volume 1 Side A : Pembacaan Pengumuman Lembaga Pemilihan Umum oleh Nugroho, Presiden Soeharto memasuki ruangan sidanag, Pembukaan rapat Paripurna oleh ketua DPR sementara oleh Kyai H. Usman Abdullah. Sekretaris Jendral DPR RI Soelaksono membacakan petikan Keputusan Presiden RI No. 240/M/1992. Pengambilan Sumpah dan Janji sebagai Anggota DPR. Side B : Penandatanganan secara simbolis berita acara dan sumpah janji. Pidato presiden RI Soeharto.	Rapat Paripurna Ke 9, Volume 1	Rabu, 30 September 1992	Suara Jelas
402	Rapat Paripurna ke.9 / II / 92-93, Volume 2 Side A : Lanjutan Pengambilan Sumpah Anggota DPR, Pembacaan pengumuman LPU oleh sekretaris Umum LPU, Pembukaan Rapat paripurna oleh ketua MPR sementara, Pengambilan Sumpah dan Janji sebagai anggota MPR dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung. Side B : Upacara penutupan Rapat paripurna, Presiden RI meninggalakan ruang rapat.	Rapat Paripurna Ke 9, Volume 2	rabu, 30 September 1992	Suara Jelas
403	Rapat Paripurna ke. 10 / II / 192-93, Volume 1 Side A : Pembukaan rapat, Agenda rapat terdiri dari Pengesaha jadwal kegiatan Rapat paripurna DPR RI sampai 3 oktober 1992, Penetapan penggunaan tata tertib dan persidangan, pengesahan pembentukan fraksi-fraksi pada DPR RI. Side B : Kosong	Rapat Paripurna Ke 10, Volume 1	Kamis, 1 Oktober 1992	Suara Jelas
404	Rapat Paripurna ke.11 / II / 92-93, Volume 1 Side A : Sambutan Rapat Paripurna oleh ketua DPR Sementara, Pembacaan pasal 45-48 peraturan tata tertib DPR I (tata cara pemilihan Pimpinan DPR RI) oleh kepala Biro Persidangan. Usulan Fraksi ABRI di ketuai oleh Sutejo, Usulan Fraksi Karya Pembangunan di ketuai oleh Wahono, Usulan faksi PDI di ketuai oleh H. wahono. Side B : Kosong.	Rapat Paripurna Ke 11, Volume 1	Jumat, 2 Oktober 1992	Suara Jelas
405	Rapat paripurna ke. 11 / II / 92-93, Volume 2 Side A : Lanjutan, Usulan Fraksi Persatuan Pembangunan di ketuai oleh H. Wahono. Ketua sidang membacakan susunan ketua dan wakil ketua tetap DPR. Ketua DPR sementara membacakan agenda rapat selanjutnya tanggal 3 oktober 1992 tentang pengambilan sumpah pimpinan DPR RI tahun 1992 - 1993. Ketua sidang menutup rapat Paripurna. Side B : Kosong.	Rapat Paripurna Ke 11, Volume 2	Jumat, 2 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
406	Rapat paripurna ke. 12 / II/ 92-93, Volume 1 Side A : Pembukaan Rapat oleh Ketua DPR Sementara, agenda Pengambilan Sumpah Pimpinan DPR tahun 1992-1993 oleh ketua Mahkamah Agung. Pembacaan petikan surat DPR RI mengenai penetapan pimpinan DPR RI oleh Sekjen DPR No. 8/DPR RI/II/1992-1993 tentang penetapan pimpinan DPR RI. Side B : Kosong	Rapat Paripurna Ke 12, Volume 1	Sabtu, 3 Oktober 1992	Suara Jelas
407	Rapat Paripurna Ke 12, Volume 2 Side A : Lanjutan, Pembacaan keputusan Rapat paripurna ke III MPR yang di tuangkan dalam Kep. Majelis No. 2/MPR/1992 oleh Sekjen MPR mengenai Susunan pimpinan MPR RI Upacara pengambilan Sumpah dan Janji pimpinan MPR terpilih yang di pimpin oleh Ketua MA. sambutan pimpinan terpilih MPR. pembacaan anggota tetap dan anggota pengganti oleh Fraksi ABRI, FKP, FPD, FPP. Side B : Lanjutan pembacaan anggota, penentuan tugas-tugas dan jadwal penentuan jadwal acara sidang badan pekerja, penentuan jadwal sidang umum Majelis tahap ke 2 bulan Maret 1993.	Rapat Paripurna Ke 12, Volume 2	Sabtu, 3 Oktober 1992	Suara Jelas
408	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1 Side A : Tugas - tugas para pimpinan DPR Periode 1992-1997 (dibacakan oleh Ketua DPR, Wahana), pembacaan daftar dan susunan calon keanggotaan badan musyawarah oleh kepala biro persidangan Sekjen DPR. Pembacaan daftar susunan dan nama calon Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga. Pembacaan daftar susunan dan nama calon Keanggotaan Badan Kerjasama antar Parlemen, Pembacaan daftar Susunan dan nama Calon Komisi I. Side B : Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi II, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi III, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi IV, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi V, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi VI.	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1	Kamis, 15 Oktober 1992	Suara Jelas
409	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1 Side A : Lanjutan, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi VII, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi VIII, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi IX, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi X, Pembacaan daftar susunan dan nama calon Komisi APBN, Side B : kosong	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 2	Kamis, 15 Oktober 1992	Suara Jelas
410	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1 Side A : Pembentukan dan penetapan susunan keanggotaan alat-alat kelengkapan dewan, badan Musyawarah, Komisi - komisi BURT dan Badan Kerjasama antar perlemen. Penentuan Badan Musyawarah di atur pasal 50, 51 ayat 1, 2, 3; BKSAP di atur pada pasal 65 dan 66 ayat 1 dan 2; BURT diatur pasal 61 dan 62 ayat 1,2 dan 3. Side B : pembacaan daftar susunan dan nama calon, di mulai dari BKSAP bagian dari FPP.	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1	Kamis, 15 Oktober 1992	Suara Jelas
411	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 2 Side A : Lanjutan, pembacaan daftar susunan dan nama calon di mulai dari komisi VI, Komisi VII. Side B : Lanjutan pembacaan daftar susunan dan nama calon, sampai penutupan rapat oleh Ketua DPR Wahono.	Rapat Paripurna Ke 13, Volume 2	Kamis, 15 Oktober 1992	Suara Jelas
412	Rapat Paripurna Ke 14, Volume 1 Side A : Pembukaan Rapat Paripurna ke 14 masasidang ke 2 oleh Pimpinan DPR. Agenda tentang laporan BKSAP tentang delegasi DPR RI ke luar negeri. Pembacaan laporan Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU ke 88 di Stockholm swedia oleh HM Jafar Rosidik. Side B : Kosong	Rapat Paripurna Ke 14, Volume 1	Rabu, 18 November 1992	Suara Jelas

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
413	Rapat Paripurna ke 14/II/1992-1993 Volume 2, Rabu, 18 November 1992 Side A : Lanjutan, Laporan BKSAP mengenai perjalanan ke luar negeri Delegasi DPRRI ke dialog AIPO dengan Parlemen Eropa ke 8 di Jakarta. Hubungan AIPO dengan Parlemen Eropa sudah berlangsung cukup lama, hal ini diawali dengan kunjungan muhibah parlemen Eropa dibawah pimpinan GM. George Bennel. Tujuan diadakan pertemuan AIPO dengan Parlemen Eropa ini adalah untuk menjalin kerja sama diantara organisasi parlemen Asia dan parlemen Eropa dengan saling tukar pikiran dalam berbagai masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat di kedua negara, yang menghasilkan 15 (lima belas) pernyataan bersama (joint statement). Side B : Kesimpulan dari hasil ketiga laporan delegasi DPR RI tersebut diatas akan menjadi masukan berharga dalam meningkatkan citra Bangsa Indonesia dalam forum Internasional. Rapat ditutup oleh pimpinan/ketua rapat.	Rapat Paripurna ke 14/II/1992-1993	Rabu, 18 November 1992	Suara Mendengung
414	Rapat Paripurna ke 15/II/1992-1993, Kamis, 19 November 1992 Volume 1 Side A : rapat kali ini adalah membahas mengenai laporan dari komisi-komisi tentang hasil-hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 1993-1994 yang telah dilakukan oleh oleh masing-masing komisi untuk didengarkan bersama baik oleh para Dewan maupun oleh rakyat sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dengan pasti gambaran secara terbuka dan luas bagaimana sesungguhnya proses penyusunan RAPBN setiap tahun dilaksanakan sebagai pelaksanaan terhadap Repelita dan GBHN. Adapun dasar pemikiran dari penyusunan RAPBN adalah: APBN pada hakekatnya disusun untuk mencerminkan program pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian dari program lima tahunan bagi setiap Departemen, non Departemen serta Lembaga-lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara yang merupakan hasil dari penjabaran GBHN itu sendiri. Side B : Lanjutan; Dilaporkan pula bahwa dalam laporan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 1993/1994 ada beberapa lembaga pasangan kerja Komisi 1 yang rincian anggarannya tidak dapat secara rinci dilaporkan antara lain : BAKIN, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Wanhankamnas. Anggaran untuk badan-badan non departemen ini masuk didalam rancangan anggaran Sekretariat Negara, untuk itu Komisi 1 telah mengkoordinasikan dengan Komisi 2 untuk membicarakannya dengan Sekretariat Negara yang menjadi pasangan kerja dari Komisi 2. Demikian telah dilaporkan kegiatan Komisi 1 DPR RI dalam penyusunan RAPBN tahun anggaran 1993/1994 sebagai sumbang pikir kepada Komisi APBN sebagai hasil rapat kerja dan dengar pendapat serta analisa terhadap realisasi dukungan anggaran selama 4 (empat) tahun Pelita ke V dan hasil penemuan di lapangan.	Rapat Paripurna ke 15/II/1992-1993	Kamis, 19 November 1992	Suara Mendengung
415	Rapat Paripurna ke 15/II/1992-1993, Kamis, 19 November 1992 Volume 2 Side A: Lanjutan; Selanjutnya disampaikan hal-hal yang memerlukan perhatian didalam penyusunan RAPBN tahun anggaran 1993/1994 sebagai berikut : 1. RAPBN tahun anggaran 1993/1994 adalah merupakan tahapan penting dari pencapaian program Repelita ke V dan sasaran GBHN. 2. Program-program pembangunan dan pengembangan SDM memerlukan prioritas tinggi karena tingkat kualitas SDM Indonesia sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. 3. Tingkat kesejahteraan PNS, ABRI, dan rakyat pada umumnya tetap memerlukan perhatian sungguh-sungguh dengan upaya terobosan-terobosan karena dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dana. 4. Keterbatasan anggaran negara dihadapkan dengan banyaknya aspek-aspek kehidupan nasional yang perlu dibangun. 5. Kemampuan pemeliharaan alat peralatan yang canggih perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh karena akan menjamin panjangnya usia pakai alat peralatan canggih tersebut. 6. Sistem perencanaan strategis kiranya perlu diseragamkan serta dibudayakan dan dikembangkan diseluruh departemen dan non departemen serta lembaga-lembaga lainnya agar diperoleh suatu kesamaan visi, interpretasi, dan persepsi terhadap suatu permasalahan. Side B : Lanjutan; pembahsan mengenai lembag BP-7 Pusat diharapkan agar menjadi pusat pusat penataran, pusat informasi, pusat laboratorium kepancasilaan yang hanya akan terwujud apabila kendala-kendala yang ada dapat diatasi melalui dukungan operasional yang memadai. Peranan BP-7 di daerah pada umumnya belum maksimal karena kurangnya dana operasional.	Rapat Paripurna ke 15/II/1992-1993	Kamis, 19 November 1992	Suara Mendengung

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
416	Rapat Paripurna ke 15/II/1992-1993, Kamis, 19 November 1992 Volume 3 Side A : Lanjutan; Dalam pembahasan masalah sarana prasarana transportasi baik transportasi darat, laut, dan udara ternyata perhubungan laut masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan perhubungan darat dan udara. Adapun dukungan dan saran kepada Pemerintah dalam penyusunan RAPBN selanjutnya adalah sebagai berikut : 1. Dalam menentukan proyeksi RAPBN tahun anggaran 1993/1994 pertimbangannya lebih difokuskan pada pembuatan sasaran pencapaian Pelita ke V secara keseluruhan. 2. Agar departemen dalam memproyeksikan penerimaannya bagi pendapatan negara tahun anggaran 1993/1994 memperhatikan juga realisasi penerimaan tahun anggaran 1993/1994. Devisa penerimaan antara rencana dan realisasi kiranya dapat diupayakan agar tidak meliputi 10%. 3. Dalam tahun anggaran 1993/1994 Komisi 5 menghimbau anggaran untuk sektor perhubungan , pariwisata tetap memperoleh prioritas tertinggi. 4. Dalam menetapkan prioritas sub sektor Komisi 5 menyarankan urutan-urutan sebagai berikut : prasarana jalan, perhubungan laut, perhubungan darat, sungai, dan danau, perhubungan udara, telekomunikasi, dan pariwisata. 5. Daerah-daerah tertinggal/terisolasi dan daerah-daerah perbatasan perlu dibangun jalan baru sedangkan yang kondisi baik perlu dipelihara dan ditingkatkan. 6. Perlu diprioritaskan peningkatan pembangunan berbagai prioritas pelabuhan. Side B : Tidak ada suara	Rapat Paripurna ke 15/II/1992-1993	Kamis, 19 November 1992	Suara Mendengung
417	Rapat Paripurna ke 15/LJ/II/1992-1993, Jumat, 20 Nopember 1992 Volume 1 Side A: Wijanarko Puspooyo dari Komisi VII, Widjarnoko Puspyo dari Komisi VII, menyampaikan laporan tentang penyusunan APBN dan memberikan saran serta masukkan kepada instansi Departemen Koperasi dan Perdagangan supaya mendapatkan anggaran yang cukup untuk mendorong menciptakan sektor non migas dan meningkatkan pembinaan koperasi seluruh Indonesia. Pemerintah agar secepatnya menciptakan Peraturan Pemerintah tentang SDM agar pembinaan perkoperasian dapat cepat dilaksanakan. Pada PJPT IV pembinaan koperasi anggarannya ditingkatkan 63 % dari tahun sebelumnya supaya dapat menciptakan 3350 KUD dan 300 koperasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja untuk itu perlu adanya petunjuk teknis guna mendukung kegiatan. Bantuan luar negeri untuk membiayai beberapa proyek pembangunan dan listrik dan peningkatan odal kerja. Untuk mendorong kegiatan ekspor non migas dengan cara promosi produksi dalam negeri untuk mendapatkan daya saing dan pasar . SDM perlu peningkatan wiraswasta sehingga perlu dibuat RUU perdagangan. Dalam struktur organisasi Departemen Keuangan Dirjen Moneter dihapus dan dibentuk Dirjen Pembinaan BUMN dan Dirjen Lembaga Keuangan serta Badan Akuntansi Negara/ AKUN. Side B: Untuk menekan laju inflasi diikuti turunnya suku bunga perbankan dan meningkatkan penerimaan pajak. Nasir Sudradjat, dari Komisi VIII, Gaji dan ULP PNS dapat ditingkatkan da peningkatan tenaga kesehatan supaya program kesehatan meningkat 53 % perlu dibangun Puskeasman dan Puskesmas Pembantu di seluruh Indonesia. Program air bersih, oobat-obatan, dan makanan mengalami peningkatan 50 % pada tahun anggaran 1992/ 1993 tetapi Puskesmas kurang memadai. Meningkatnya jumlah penduduk perlu didukung dengan alat transportasi daerah terpencil untuk memenuhi obat-obatan kontrasepsi karena permasalahan KB sangat penting. Prof. Dr. Wuryanto dari Komisi XI, bahwa tinjauan realisasi APBN dan RAPBN hasilnya dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan Pelita IV yang cukup menggembirakan.	Rapat Paripurna ke 15/LJ/II/1992-1993	Jumat, 20 Nopember 1992	Suara Kecil

NO. Volum e	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KET.
1	2	3	4	5
418	Rapur 15 LJ/II/1992-1993, Jumat, 20 Nopember 1992 Volume 2 Side A: Prof. Dr. Wuryanto dari Komisi XI, Anggaran rutin baik 31, 9 % untuk perawatan aset negara dan dana bantuan luar negeri naik 30 % dan persiapan wajib belajar pendidik dasar naik 9 %. Anggaran Menpora mengalami peningkatan untuk pembinaan olahraga dan pembuatan RUU Keolahragaan dan pengalihan tanggungjawab kantor museum olahraga di TMII. Realisasi RAPBN sektor agama, pendidikan dan olahraga meningkat dari tahun sebelumnya dan pada tahun anggaran 1994 meruakan tahun akhir Repelita V sehingga perlu peningkatan pengawasan agar RAPBN dapat maksimal digunakan. Drs. Areva, MBA dari Komisi X melaporkan bahwa pada PJPT I pembangunan ekonomi di sektor industri dapat menyerap sumber daya manusia yang siknifikan sehingga anggaran pada tahun aggaran 192/ 1993 merupakan penentuan pembangunan. Ketentuan dari pusat yang tidak sesuai dengan daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Side B: Adanya pembangunan rumah kaca dapat merusak ozon dan rusaknya resapan air. Rendahnya penegakan hukum mempengaruhi rasa kesejahteraan dan keadilan rakyat. Anggaran Ristek yang rendah empengaruhi lambatnya perkembangan teknologi. Pemanfaatan daerah yang kurang subur LAPAN diminta untuk menyusun RUU tentang Kedirgantaraan . Anggaran untuk LAPAN dapat ditetapkan dan dimanfaatkan supaya dapat berdaya guna. Sumber energi dan daerah gambut ditingkatkan penelitiannya untuk kepentingan bangsa. Pemerintah secara konsisten memberikan ijin pengelolaan hutan Proyek listrik masuk desa perlu ditingkatkan untuk mendorong kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.	Rapur 15 LJ/II/1992-1993	Jumat, 20 Nopember 1992	Suara Kecil
419	Rapur 15 LJ/II/1992-1993, Jumat, 20 Nopember 1992 Volume 3 Side A: Drs. Areva, MBA dari Komisi X, Iklim perdagangan di dalam negeri mengalami peningkatan. Belanja pegawai, perjalanan dinas kurang efektif dan tenaga peneliti di bidang lptek perlu ditingkatkan . LAPAN sedang membangun radar untuk mengetahui iklim guna mendukung petani dalam melaksanakan musim tanam dan panen. Prosedur birokrasi yang berbeit-belit dapat diatasi guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk membina penelitian perlu pengembangan dan tunjangan untuk ditingkatkan. Statistik pengolahan data untuk mengetahui tingkat perkembangan dari segala bidang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Side B : Suara kecil sekali dan tidak jelas	Rapur 15 LJ/II/1992-1993	Jumat, 20 Nopember 1992	Suara Kecil
420	Rapur 16/II/1992-1993, Sabtu, 5 Desember 1992 Volume 1 Side A: Ketua sidang membuka rapat yang dihadiri oleh 342 orang anggota DPR untuk menjalani sumpah jabatan sebagai anggota dewan pada tahun 1992-1997 anggota DPR untuk menjalani sumpah jabatan sebagai anggota dewan pada tahun 1992-1997dihadiri oleh 342 orang anggota DPR untuk menjalani sumpah jabatan sebagai anggota dewan pada tahun 1992-1997dihadiri oleh 342 orang anggota DPR untuk menjalani sumpah jabatan sebagai anggota dewan pada tahun 1992-1997, hal ini disebabkan adanya uang kartal untuk mendorong inflasi. Peminjaman uang ke luar negeri untuk menghambat inflasi . Pada tahun anggaran 1993/ 1994 Indonesia dipercaya sebagai Ketua negara Non Blok. Pada tahun 1992 ekonomi mengalami pertumbuhan 6,6 % sehingga menurun karena adanya uang kartal untuk mendorong inflasi. Peminjaman utang luar negeri untuk menghindari inflasi. Sidang ditutupp oleh Ketua pada masa reses. Side B: Suara tidak jelas	Rapur 16/II/1992-1993	Sabtu, 5 Desember 1992	Suara Kecil